



**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2022**





BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 110);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan, anggaran belanja serta pembiayaan tahunan daerah kabupaten atau provinsi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan, anggaran belanja serta pembiayaan tahunan nasional.

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan:

1. Pedoman operasional bagi organisasi perangkat daerah dalam menetapkan rencana kerja tahun 2023;
2. RKPD memuat arah kebijakan program dan rencana kegiatan prioritas sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2023

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 dimulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.

- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut dari RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023 dituangkan dalam APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 dan diusulkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 serta APBN Tahun Anggaran 2023.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 49

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I
1.1	Latar Belakang.....	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3	Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4	Maksud dan Tujuan	I-13
1.5	Sistematika Penulisan	I-13
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-10
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	II-49
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-63
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-66
2.2.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Daerah pada Tahun 2021	II-66
2.2.2	Capaian Indikator Kinerja Per Urusan Tahun 2021	II-66
2.3	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-138
2.3.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	II-138
2.3.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II-139
2.3.3	Urusan Pilihan	II-141
2.3.4	Urusan Penunjang	II-142
2.3.5	Urusan Pemerintahan Umum	II-143
2.3.6	Urusan Kewilayahan	II-143
2.4	ISU STRATEGIS	II-143
2.4.1	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.....	II-144
2.4.2	Kualitas Sumber Daya Manusia.....	II-145
2.4.3	Pertumbuhan Ekonomi.....	II-145
2.4.4	Kemiskinan dan Pengangguran.....	II-146
2.4.5	Kualitas Infrastruktur Wilayah	II-147
2.4.6	Kualitas Lingkungan Hidup	II-147
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.....	III-1
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-4
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-6
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-7
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-8
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-10

BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023.	IV-2
4.3	Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-20
4.3	Rencana Pengembangan Wilayah Tahun 2023	IV-26
4.3.1	Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Pembangunan	IV-26
4.3.2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen.....	IV-30
4.5	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sragen.....	IV-37
4.6	Inovasi Daerah.....	IV-38
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V
5.1	Kerangka Pendanaan Tahun 2023	V-1
5.2	Rencana Program Strategis Daerah Tahun 2023	V-3
5.3	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2023	V-8
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI
6.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023.....	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	VI-3
6.3	Indikator Kinerja Daerah	VI-8
6.4	Indikator Kinerja Program Daerah	VI-13
BAB VII	PENUTUP	VII

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administratif Menurut Kecamatan/Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021	II-1
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2021	II-2
Tabel 2.3	Luas Wilayah berdasarkan curah hujan Kabupaten Sragen	II-5
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021	II-7
Tabel 2.5	Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2021	II-9
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Penyelenggara Pemerintah Tahun 2017-2021 ..	II-10
Tabel 2.7	Target RKPD dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-11
Tabel 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021	II-12
Tabel 2.9	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021	II-14
Tabel 2.10	PDRB ADHB Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2021	II-15
Tabel 2.11	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021....	II-16
Tabel 2.12	PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021	II-17
Tabel 2.13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sragen (%)	II-22
Tabel 2.14	Target RKPD dan Capaian TPT Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-23
Tabel 2.15	Capaian TPT Kabupaten Sragen dan wilayah Sekitar Tahun 2017-2021	II-24
Tabel 2.16	Target dan Capaian IPM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-26
Tabel 2.17	IPM Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar.....	II-26
Tabel 2.18	Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Sragen Beserta Kompositnya Tahun 2017-2021.....	II-30
Tabel 2.19	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021	II-31
Tabel 2.20	Target dan Capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-33
Tabel 2.21	P1 Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021 ...	II-36
Tabel 2.22	P2 Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021 ...	II-38
Tabel 2.23	Target dan Capaian IPG Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-41
Tabel 2.24	Perkembangan Indikator Komposit IPG Kabupaten Sragen Tahun 2017-2020	II-42
Tabel 2.25	Target dan Capaian IDG Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	II-44

Tabel 2.26	IDG Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021 .	II-45
Tabel 2.27	Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021	II-46
Tabel 2.28	Kondisi Jalan kabupaten Tahun 2016-2021	II-49
Tabel 2.29	Kondisi Jalan kabupaten Tahun 2016-2021	II-49
Tabel 2.30	Kondisi Jembatan Tahun 2016-2021	II-50
Tabel 2.31	Kondisi saluran irigasi Tahun 2019 dan 2021	II-50
Tabel 2.32	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-51
Tabel 2.33	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2012/2013 s.d. 2017/2018	II-52
Tabel 2.34	Capaian Indikator SPM Pelayanan Pendidikan Tahun 2021	II-53
Tabel 2.35	Capaian Indikator SPM Pelayanan Kesehatan Tahun 2021 (%)...	II-58
Tabel 2.36	Penanganan RTLH Kabupaten Sragen dari Sumber Dana APBD Tahun 2021	II-59
Tabel 2.37	Penanganan RTLH Kabupaten Sragen dari Sumber Dana CSR Tahun 2021	II-60
Tabel 2.38	Capaian Indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2021 (%)	II-61
Tabel 2.39	Capaian Indikator SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2021 (%)	II-62
Tabel 2.40	Capaian Indikator SPM Bidang Sosial Tahun 2018-2021	II-62
Tabel 2.41	Capaian Produksi Pertanian Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021	II-63
Tabel 2.42	Perkembangan NTP Jawa Tengah 2016-2021	II-63
Tabel 2.43	Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2021....	II-64
Tabel 2.44	Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021	II-66
Tabel 2.45	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pendidikan.....	II-67
Tabel 2.46	persentase Kelulusan Peserta Didik Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Tahun Ajaran 2020/2021	II-68
Tabel 2.47	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Kesehatan.....	II-69
Tabel 2.48	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-73
Tabel 2.49	Kondisi Jalan Kabupaten Sragen per 31 Desember 2021	II-73
Tabel 2.50	Kondisi Drainase di Kabupaten Sragen Tahun 2021	II-74
Tabel 2.51	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-75
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-76
Tabel 2.53	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-77
Tabel 2.54	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Sosial.....	II-79
Tabel 2.55	PSKS Kabupaten Sragen per 31 Desember 2021	II-82
Tabel 2.56	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Tenaga Kerja	II-83
Tabel 2.57	Dampak COVID 19 terhadap Ketenagakerjaan Kabupaten Sragen Bulan Januari– Desember 2021	II-84

Tabel 2.58	Jumlah Karyawan yang ter PHK, habis kontrak dan dirumahkan (sampai dengan Desember 2021).....	II-84
Tabel 2.59	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-86
Tabel 2.60	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pangan	II-87
Tabel 2.61	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pertanahan	II-90
Tabel 2.62	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021	II-92
Tabel 2.63	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-94
Tabel 2.64	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	II-96
Tabel 2.65	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-98
Tabel 2.66	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Perhubungan ...	II-99
Tabel 2.67	Daftar Terminal Tipe C di Kabupaten Sragen Keadaan Tahun 2020	II-100
Tabel 2.68	Arus Penumpang dan Bus Cepat Kabupaten Sragen Tahun 2018-2020	II-100
Tabel 2.69	Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2016-2020.....	II-101
Tabel 2.70	Jumlah Uji Kendaraan Tahun 2021	II-102
Tabel 2.71	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Komunikasi dan Informasi	II-103
Tabel 2.72	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-105
Tabel 2.73	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021	II-107
Tabel 2.74	Realisasi Investasi Per Sektor di Kabupaten Sragen Tahun 2021	II-107
Tabel 2.75	Penilaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPSTSP Kabupaten Sragen Tahun 2021	II-109
Tabel 2.76	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-111
Tabel 2.77	Perolehan Medali Tahun 2021	II-112
Tabel 2.78	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Statistik	II-113
Tabel 2.79	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Persandian.....	II-113
Tabel 2.80	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Kebudayaan....	II-114
Tabel 2.81	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Perpustakaan...	II-116
Tabel 2.82	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Kearsipan	II-117
Tabel 2.83	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Kelautan dan Perikanan	II-118
Tabel 2.84	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pariwisata	II-119
Tabel 2.85	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sragen Tahun 2021 (orang).....	II-119
Tabel 2.86	Jumlah Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Tahun 2021 (Rp)...	II-120
Tabel 2.87	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pertanian	II-122
Tabel 2.88	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Perdagangan	II-125

Tabel 2.89	Sarana dan prasarana perdagangan yang tersedia di Kabupaten Sragen	II-127
Tabel 2.90	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Perindustrian...	II-127
Tabel 2.91	Perkembangan Industri Kecil, Sedang dan Besar di Kabupaten Sragen Tahun 2021.....	II-128
Tabel 2.92	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Transmigrasi....	II-128
Tabel 2.93	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021	II-129
Tabel 2.94	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Sekretariat DPRD	II-131
Tabel 3.1	Indikator Ekonomi Kabupaten Sragen Tahun 2021-2023	III-1
Tabel 3.2	Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021.....	III-4
Tabel 3.3	Prosentase Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021.....	III-5
Tabel 3.4	APBD Kabupaten Sragen Tahun 2022 dan Proyeksi Keuangan & Kerangka Pendanaan Kabupaten Sragen Tahun 2023	III-6
Tabel 4.1	Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2023	IV-1
Tabel 4.2	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023.....	IV-7
Tabel 4.3	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Nasional.....	IV-14
Tabel 4.4	Realisasi Capaian Penerapan SPM Pendidikan Tahun 2021	IV-20
Tabel 4.5	Realisasi Capaian Penerapan SPM Kesehatan Tahun 2021	IV-21
Tabel 4.6	Realisasi Capaian Penerapan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2021	IV-22
Tabel 4.7	Realisasi capaian SPM Urusan Trantibumlinmas.....	IV-23
Tabel 4.8	Realisasi Capaian Penerapan SPM Sosial Tahun 2021	IV-23
Tabel 4.9	Target SPM Pendidikan Tahun 2023	IV-24
Tabel 4.10	Target SPM Kesehatan Tahun 2023	IV-24
Tabel 4.11	Target SPM Pekerjaan Umum Tahun 2023.....	IV-25
Tabel 4.12	Target SPM Perumahan Rakyat dan Permukiman.....	IV-25
Tabel 4.13	Target SPM Sosial Tahun 2023	IV-31
Tabel 4.14	Kesiapan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah Berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 Dan Perpres Nomor 80 Tahun 2019	IV-35
Tabel 4.15	Tabel Anggaran Tuntas Kemiskinan.....	IV-40
Tabel 5.1	Proyeksi Kerangka Pendanaan dan Belanja Kabupaten Sragen Tahun 2023	V-1
Tabel 5.2	Prioritas Program RKPD Kabupaten Sragen 2023	V-8
Tabel 6.1	Indikasi Kinerja Utama Kabupaten Sragen tahun 2023	VI-2
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023	VI-3
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2023.....	VI-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-5
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Sragen	II-2
Gambar 2.2	Peta Sebaran Litologi di Kabupaten Sragen	II-4
Gambar 2.3	Penggunaan Lahan di Kabupaten Sragen	II-6
Gambar 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan	II-8
Gambar 2.5	Peta Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sragen.....	II-9
Gambar 2.6	Peta Kabupaten Sragen Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021.....	II-11
Gambar 2.7	Rerata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen, Wilayah Sekitar, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-12
Gambar 2.8	Pertumbuhan PDRB ADHB berdasarkan Lapangan Usaha (c-to-c) (%).....	II-13
Gambar 2.9	Pertumbuhan PDRB ADHB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (%) Tahun 2021	II-14
Gambar 2.10	Kontribusi Lima Usaha Terbesar Pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021.....	II-16
Gambar 2.11	Jumlah Penduduk yang Bekerja Tahun 2021	II-18
Gambar 2.12	Penambahan Jumlah Penduduk yang Bekerja Tahun 2021 ...	II-18
Gambar 2.13	Jumlah Pengangguran Tahun 2021	II-19
Gambar 2.14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2021	II-20
Gambar 2.15	Perubahan TPAK di Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar ..	II-20
Gambar 2.16	TPAK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021	II-21
Gambar 2.17	TPAK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional	II-21
Gambar 2.18	TPT Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional..	II-22
Gambar 2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sragen dan	II-23
Gambar 2.20	Perubahan TPT di Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar....	II-24
Gambar 2.21	Perbandingan IPM Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar....	II-25
Gambar 2.22	Perbandingan Perkembangan IPM Kabupaten Sragen dan	II-25
Gambar 2.23	Perbandingan Pertumbuhan IPM di Kabupaten Sragen dan ...	II-27
Gambar 2.24	Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-28
Gambar 2.25	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	II-28
Gambar 2.26	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.....	II-29
Gambar 2.27	Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-30
Gambar 2.28	Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Sragen dan	II-31
Gambar 2.29	Perbandingan Perkembangan persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 .	II-32
Gambar 2.30	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota yang Lebih Tinggi Dibanding Provinsi dan Nasional, Tahun 2021	II-33

Gambar 2.31	Pertumbuhan Penduduk Miskin Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-34
Gambar 2.32	Pertumbuhan Penduduk Miskin Kabupaten Sragen dan.....	II-35
Gambar 2.33	P1 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional.....	II-35
Gambar 2.34	Pertumbuhan P1 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2021.....	II-36
Gambar 2.35	Pertumbuhan P1 Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar.....	II-37
Gambar 2.36	P2 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional.....	II-37
Gambar 2.37	Pertumbuhan P2 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2021.....	II-38
Gambar 2.38	Pertumbuhan P2 Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar.....	II-39
Gambar 2.39	Perkembangan IPG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-40
Gambar 2.40	IPG di Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2021 ...	II-41
Gambar 2.41	Pertumbuhan IPG Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2021	II-42
Gambar 2.42	IDG Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	II-43
Gambar 2.43	Komponen IDG Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional	II-44
Gambar 2.44	IDG Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2021	II-45
Gambar 2.45	Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-64
Gambar 2.46	Data Kasus Covid-19 Tahun 2021	II-72
Gambar 2.47	Perkembangan kasus terinfeksi COVID-19 di Kabupaten Sragen Bulan Januari-Desember Tahun 2021	II-72
Gambar 2.48	Penambahan Kasus Meninggal COVID-19 di Kabupaten Sragen Bulan Januari-Desember Tahun 2021	II-72
Gambar 2.49	Isu Strategis RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023	II-144
Gambar 3.1	Perkembangan Laju Inflasi Kab.Sragen Tahun 2016-2021 dan Perbandingannya dengan Prov.Jawa Tengah dan Nasional.....	III-2
Gambar 4.1	Hubungan Rancangan Awal RKPD terhadap Rencana Pengembangan.....	IV-26
Gambar 4.2	Arah Pengembangan Wilayah Subosukowonosraten	IV-29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam struktur, sistem sosial, ekonomi dan sikap masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan Pemerintah Pusat, dinamika lingkungan strategis yang berkembang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

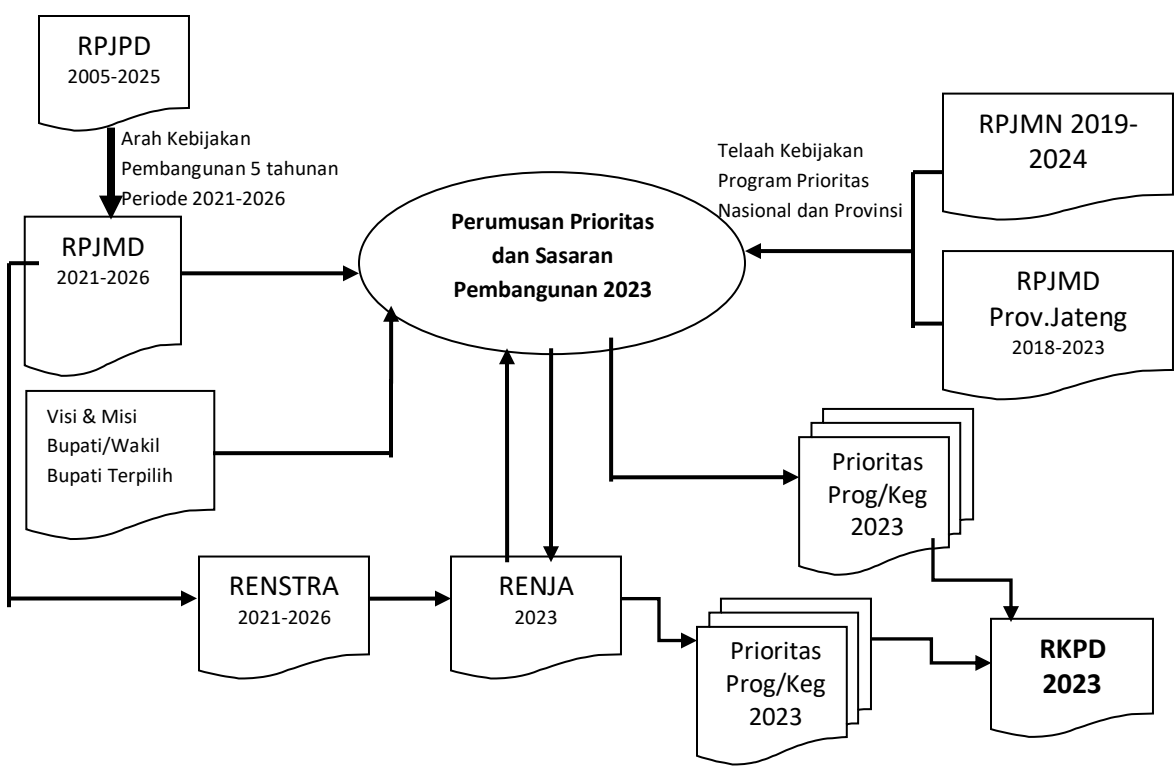
Proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023 meliputi: (1) Masa Musrenbang Desa dan Kelurahan serta Musrenbang Kecamatan; (2) Masa penjaringan aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD; (3) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; (4) Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD; (5) Forum OPD/Gabungan OPD; (6) Penyusunan Rancangan RKPD; (7) Masa Musrenbang Kabupaten; dan (8) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2023 merupakan tahun ke-2 dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2023 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan *good governance* dalam meningkatkan pelayanan publik yang prima”**.

Dalam rangka merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 perlu serangkaian tahapan serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang berlaku dan telah tersedia, di antaranya, review RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 dan Evaluasi RKPD Kabupaten Sragen

Tahun 2021, telaah dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, telaah RPJMN Tahun 2019-2024, serta memperhatikan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Secara ringkas alur perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Alur Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah **“Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong”**. Dalam visi tersebut memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni **“Mandiri”**, **“Sejahtera”**, **“Berbudaya”**, dan **“Gotong Royong”**. Pokok-pokok mengenai “Mandiri”, “Sejahtera”, dan “Berbudaya” menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi “Gotong Royong” memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya. Penjabaran visi-visi tersebut sebagai berikut.

1. “Mandiri” mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagai potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.

2. “Sejahtera” dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.
3. “Berbudaya” mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
4. “Gotong Royong” dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Misi yang ditempuh guna mewujudkan visi tahun 2021-2026 tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Investasi dan ketahanan pangan.
4. Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023 selanjutnya merupakan pedoman umum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

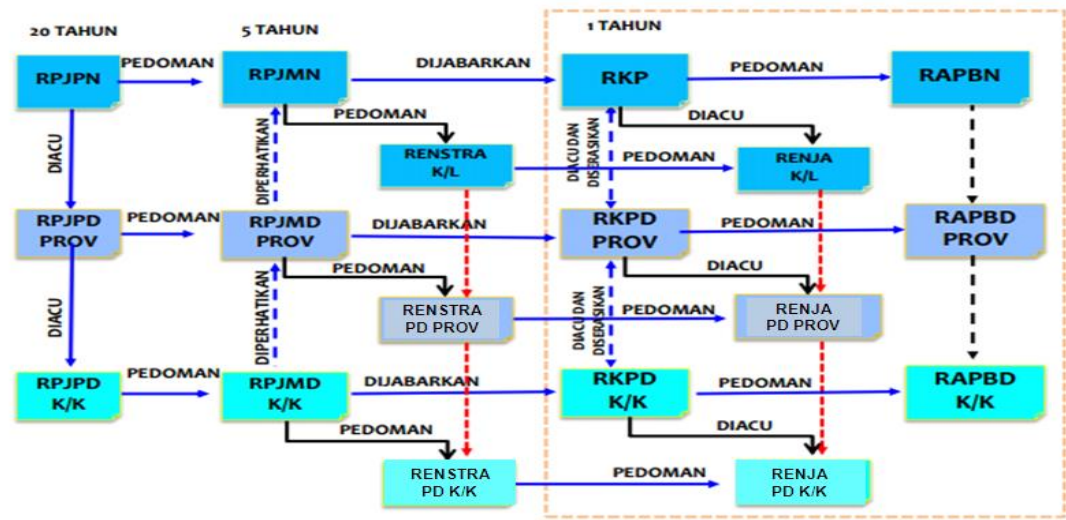
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023 menjelaskan hubungan antar dokumen perencanaan, Program Strategis Nasional, Program Strategis Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan kabupaten/kota lainnya, khususnya pembangunan wilayah perbatasan.



Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.2. Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun Renja OPD. RKPD diserasikan dengan RKPD Provinsi dan RKP melalui forum Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain: 1) RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah; 2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031; 3) Standar Pelayanan Minimal; 4) *Sustainable Development Goals* (SDGs); 5) *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan 6) Rencana Strategi Nasional Tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen tahun 2021-2026.

Telaah RKP Tahun 2023. Tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional yaitu:

1. **Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem** dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan pencapaian: a.

Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%; b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%; c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

2. **Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan** dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian: a. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%; b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk; c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%; d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%; e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%; f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.
3. **Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*** dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian: a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%; b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%; c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. **Mendorong pemulihan dunia usaha** dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian: a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%; b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%; c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar; d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
5. **Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan** dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian: a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%; b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%; c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan sebesar 10; d. Peringkat Global Innovation Index 75-80; e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55- 6,6,08%; dan f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.
6. **Pembangunan rendah karbon dan transisi energi** (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian: a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%; b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW; c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
7. **Percepatan pembangunan infrastruktur dasar** antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur

digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian: a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik; b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman); c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%; d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

8. **Pembangunan Ibu Kota Nusantara** dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian: a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Sasaran RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain: 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%; 2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%; 3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%; 4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378; 5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35; 6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%; 7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan 8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2021 Triwulan keempat sudah beranjak lebih baik mengalami peningkatan pada angka 3,32% (YoY), jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada triwulan pertama 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi minus 2,65% (YoY). Nilai ini berada di atas pencapaian nasional pada angka minus 2,07% (YoY). Kondisi terburuk pada tahun 2020 yaitu terjadi pada triwulan II karena perekonomian berkontraksi hingga 5,94%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini salah

satunya dikarenakan perlambatan konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Jawa Tengah. Lalu pada triwulan III dan triwulan IV pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah menunjukkan perbaikan walaupun pertumbuhannya masih negatif. Secara berturut-turut pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV tahun 2020 yaitu negatif 3,93% (YoY) dan negatif 3,34% (YoY). Perbaikan pertumbuhan ekonomi masih berlanjut hingga triwulan I 2021 dan tercatat perekonomian Jawa Tengah tumbuh negatif 0,87% (YoY). Selanjutnya, pada triwulan II 2021 perekonomian Jawa Tengah kembali tumbuh hingga 5,66% (YoY). Hal ini terjadi karena sudah mulai adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, dengan digencarkannya program vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan perekonomian akan terus tumbuh dan pulih kembali. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi guna "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari", yaitu:

- 1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi** secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 - b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan hidup;
 - g. Peningkatan nilai penanaman modal;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah, dan pansela;
 - i. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - j. Peningkatan ketahanan bencana.
- 2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran**, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE), dengan fokus pada:
 - a. Penyediaan *basic need access* (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan;
 - b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
 - d. Pengurangan pengangguran.

- 3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia** menuju SDM berdaya saing, dengan fokus pada:
- Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan;
 - Penguatan pembangunan kesehatan paripurna;
 - Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
 - Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan;
- 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan** yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, dengan fokus pada:
- Pemantapan kualitas pelayanan publik;
 - Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
 - Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik;
 - Penguatan kondusivitas wilayah;
 - Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif.

Kinerja utama daerah yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 merupakan suatu harmonisasi kondisi dimaksud, dengan proyeksi awal Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yaitu: 1) Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen; 2) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00; 3) Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 persen; 4) Indeks Gini sebesar 0,34; 5) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80 persen; 6) Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00 – 5,60 persen; 7) Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen; 8) PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah; 9) Indeks Williamson sebesar 0,56; 10) Nilai Tukar Petani 104,05; 11) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75; 12) Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21; dan 13) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57.

Telaah RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031. Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sragen tahun 2020-2031 sebagai berikut.

- Pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan, meliputi:
 - peningkatan kegiatan pertanian berbasis hortikultura;
 - pengembangan pusat pengolahan dan hasil pertanian pada pusat produksi yang berada di kawasan perdesaan.
- Pengembangan kawasan agropolitan, meliputi:
 - peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian unggulan Kabupaten;
 - pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan.
- Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif, meliputi:

- a. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. pengarahan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan lahan sawah irigasi dan/atau lahan kering kurang produktif.
4. Pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a. pengembangan kawasan industri dengan mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas, terutama yang berskala regional dan nasional;
 - b. perencanaan pembangunan *dry port* dengan mempertimbangkan proyek strategis nasional berupa jalan tol dan jalur ganda kereta api;
 - c. perencanaan kawasan industri dengan mempertimbangkan lokasi rencana pembangunan *dry port*;
 - d. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur pada kawasan peruntukan industri;
5. Pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian yaitu pengembangan kegiatan industri yang berbahan baku hasil pertanian pada kawasan pertanian hortikultura.
6. Pengembangan pariwisata alam dan buatan meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan wisata buatan pada kawasan permukiman;
 - b. pengembangan kegiatan wisata untuk mendukung Kawasan Cagar Budaya Sangiran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
 - c. pengembangan kegiatan wisata alam dan buatan pada kawasan pertanian hortikultura dan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kelestarian alam.
7. Pengembangan prasarana wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. peningkatan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. peningkatan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang berada di kawasan perdesaan;
 - c. pengembangan sistem prasarana sumberdaya air;
 - d. pengembangan sistem jaringan limbah yang berada di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
 - e. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana alam;
 - f. pengembangan sistem sanitasi lingkungan yang berada di kawasan perkotaan.
8. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah meliputi:
 - a. pembagian wilayah fungsional Kabupaten berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten;
 - b. pengembangan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL;
 - c. pengoptimalan peran ibukota kecamatan sebagai PPK dan PPL;
 - d. pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun dan permukiman perdesaan yang berbentuk Klaster;
 - e. pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
 - f. pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi dan desa pusat pertumbuhan;

- g. peningkatan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.
- 9. Pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan meliputi:
 - a. peningkatan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan pada PPL dan PPK;
 - b. peningkatan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi Kabupaten ke luar daerah pada PKL.
- 10. Peningkatan pelestarian kawasan lindung meliputi:
 - a. penentuan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 - b. pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan-lahan rawan longsor dan erosi;
 - c. pengembangan budidaya tanaman tahunan pada lahan-lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.
- 11. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. dukungan terhadap penetapan kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan.

Dari rumusan strategi RTRW tersebut, penekanan pengembangan wilayah Kabupaten Sragen adalah dalam rangka memberikan dukungan bagi pengembangan pertanian dan industri pengolahan yang berkelanjutan serta penumbuhan potensi pariwisata produktif.

Telaah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM tersebut harus menjadi bagian dari tujuan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya harus mengakomodasi SPM yaitu: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; serta 6) Sosial.

Telaah SDGs. Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang secara garis besar dikelompokkan ke dalam 4 pilar, yakni: pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. Pilar pembangunan sosial mencakup poin: (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesetaraan Gender. Pada intinya, bertujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pilar pembangunan ekonomi mencakup poin: (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pada intinya, bertujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan.

Pilar pembangunan lingkungan mencakup poin (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (11), Kota dan Pemukiman Layak, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Laut, dan (15) Ekosistem Darat. Pada intinya, bertujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

Pilar mencakup poin (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Pada intinya, bertujuan terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Telaah Grand Design Reformasi Birokrasi. *Grand design* Reformasi birokrasi tahun 2010-2025 ditujukan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Sasaran reformasi birokrasi adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Salah satu dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang nantinya dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam dokumen RKPD. Dokumen ini mengkaji mengenai capaian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tidak terlepas dari kondisi aktual aspek sosial, lingkungan, kesehatan, dan tata kelola.

Telaah Rencana Strategis Nasional Tahun 2020-2024. Rencana Strategi pembangunan nasional tahun 2020-2024 tertuang dalam 7 agenda pembangunan nasional, yaitu:

1. **Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas,** yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. **Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,** yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;
3. **Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,** yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta,

memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.

4. **Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan** dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;
5. **Memperkuat infrastruktur** untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. **Membangun lingkungan hidup**, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. **Memperkuat stabilitas** politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023 adalah dalam rangka penjabaran program pembangunan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan tujuan:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah;
2. Mewujudkan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2023 yang lebih terukur dan lebih optimal;
3. Menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
4. Menjadi dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD.

1.5. Sistematika

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah); evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan realisasi RPJMD; serta permasalahan pembangunan daerah (berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan hasil analisis

terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, IKU Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2023.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023.

-oOo-

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas wilayah secara administrasi sebagai berikut.

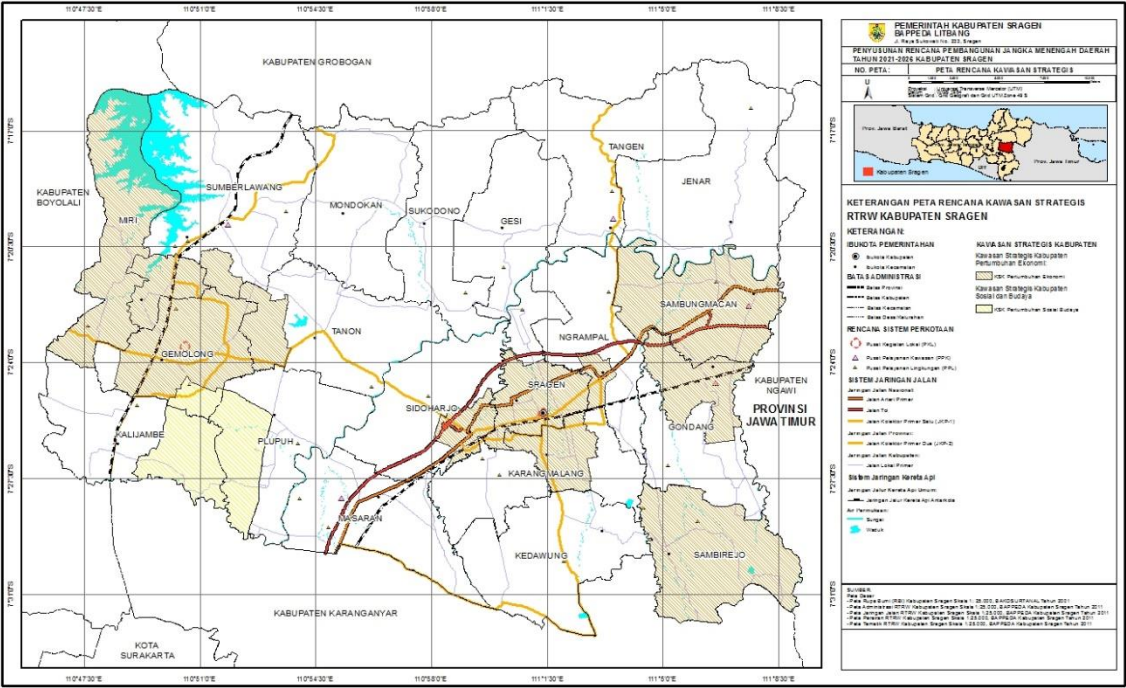
- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali;
- Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur).

Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah 941,55 Km², secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan (196 desa dan 12 kelurahan, dan 5.480 RT). Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Sumberlawang (75,16 km²) dan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Sragen (27,27 km²). Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan/Desa
Kabupaten Sragen Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan	Luas Wilayah	
			Km ²	% terhadap luas Kabupaten Sragen
1	Kalijambe	14	46,96	4,99
2	Plupuh	16	48,36	5,14
3	Masaran	13	44,04	4,68
4	Kedawung	10	49,78	5,29
5	Sambirejo	9	48,43	5,14
6	Gondang	9	41,17	4,37
7	Sambungmacan	9	38,48	4,09
8	Ngrampal	8	34,40	3,65
9	Karangmalang	10	42,98	4,56
10	Sragen	8	27,27	2,90
11	Sidoharjo	12	45,90	4,87
12	Tanon	16	51,00	5,42
13	Gemolong	14	40,23	4,27
14	Miri	10	53,81	5,72
15	Sumberlawang	11	75,16	7,98
16	Mondokan	9	49,36	5,24
17	Sukodono	9	45,55	4,84
18	Gesi	7	39,58	4,2
19	Tangen	7	55,13	5,86
20	Jenar	7	63,96	6,79
Jumlah		208	941,55	100,00

Sumber Data: Kabupaten Sragen Dalam Angka 2022



Gambar 2.1
Peta Kabupaten Sragen
Sumber Data: Bappeda Litbang Kab. Sragen 2021

b. Letak Astronomis dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Sragen terletak pada 110°45’ – 111°10’ Bujur Timur dan 7°15 – 7°30’ Lintang Selatan dengan luas wilayah 941,55 km². Sebagian besar Kabupaten Sragen merupakan kawasan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 109 m di atas permukaan laut (dpl).

c. Kondisi Topografi

Topografi Kabupaten Sragen dapat dipilah ke dalam tiga kelompok yaitu: 1) daerah dataran rendah, berada pada ketinggian maksimal 93 mdpl. dengan kemiringan lereng antara 0-8%, meliputi 7 kecamatan yaitu Kecamatan: Masaran, Karangmalang, Sidoharjo, Sragen, Ngrampal, Gondang dan Sambungmacan di bagian tengah; 2) daerah perbukitan, berada pada ketinggian 97-128 mdpl. dengan kemiringan lereng 8-15% meliputi 11 kecamatan yaitu Kecamatan: Kalijambe, Plupuh, Gemolong, Miri, Tanon, Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Gesi, Tangen dan Jenar; 3) daerah kaki Gunung Lawu pada ketinggian 116-190 mdpl dengan rata-rata kelereng >15%, meliputi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kedawung dan Sambirejo.

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten
Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak Ke Ibukota
1	Kalijambe	123	31,4
2	Plupuh	141	18,8
3	Masaran	93	11,1

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak Ke Ibukota
4	Kedawung	116	7,7
5	Sambirejo	190	12,4
6	Gondang	93	13,8
7	Sambungmacan	85	11,1
8	Ngrampal	84	4,4
9	Karangmalang	86	2,7
10	S r a g e n	86	1,7
11	Sidoarjo	86	4,3
12	Tanon	97	14,3
13	Gemolong	128	25,9
14	Miri	115	29,3
15	Sumberlawang	126	23,7
16	Mondokan	110	20,3
17	Sukodono	86	16,8
18	Gesi	126	13,7
19	Tangan	96	13,7
20	Jenar	118	17,5
Rata-rata		109	

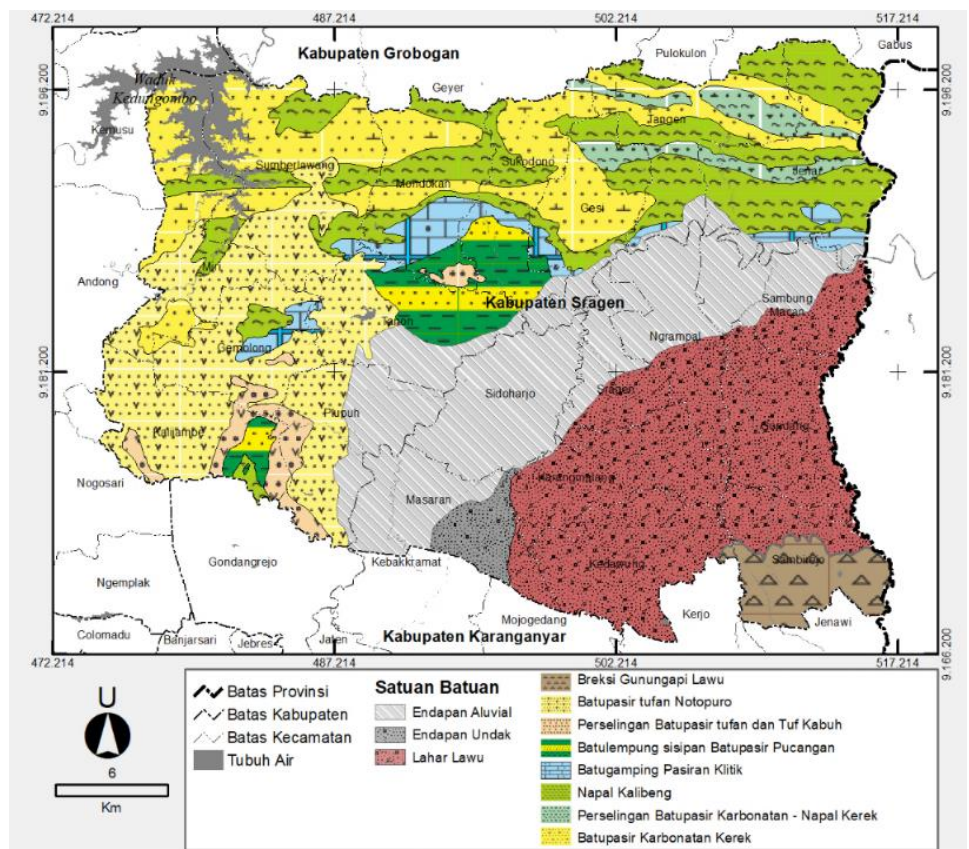
Sumber Data: Sragen Dalam Angka 2022

d. **Geologi**

Secara umum, struktur geologi di Kabupaten Sragen didominasi oleh deformasi Zona Kendeng, dan sebagian kecil struktur Gunung Lawu. Deformasi pertama pada Zona Kendeng terjadi pada akhir *Plios*en (*Plio–Plistosen*), deformasi merupakan manifestasi dari zona konvergen pada konsep tektonik lempeng yang diakibatkan oleh gaya kompresi berarah relatif utara–selatan dengan tipe formasi berupa *ductile* yang pada fase terakhirnya berubah menjadi deformasi *brittle* berupa pergeseran blok–blok dasar cekungan Zona Kendeng.

Kondisi alam di Kabupaten Sragen mempunyai relief yang beraneka ragam, ada daerah pegunungan kapur yang membentang dari timur ke barat terletak di sebelah utara Bengawan Solo dan dataran rendah yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen, dengan jenis tanah: Gromusol, Alluvial Regosol, Latosol dan Mediteran. Sragen berada di lembah daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang mengalir ke arah timur. Sebelah utara berupa perbukitan, bagian dari sistem Pegunungan Kendeng. Sedangkan di selatan berupa pegunungan, lereng dari Gunung Lawu.

Struktur geologi yang tidak dominan di Kabupaten Sragen terletak pada lereng Gunung Lawu, sebagian besar ditemukan di Kecamatan Sambirejo. Struktur yang berkembang di daerah ini adalah sesar turun, hal ini mutlak berada di kawasan lereng gunung, mulai dari *fasies sentral* gunung hingga *fasies proksimal*.



Gambar 2.2
Peta Sebaran Litologi di Kabupaten Sragen
Sumber Data: Analisis Pengembangan Wilayah 2018,
Bappedalitbang Kab. Sragen

e. Hidrologi

Keadaan hidrologi di Kabupaten Sragen ditandai dengan adanya sungai - sungai yang mengalir di dalam kesatuan wilayah DAS Bengawan Solo dan DAS Jratunseluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi and Juana). Sungai - sungai yang mengalir dalam kesatuan DAS bengawan solo adalah sungai Mungkung, Kenatan, Jenar, Kedungaren, Tanggan, Teseh dan Kedung dowo sedangkan sungai-sungai yang termasuk dalam kesatuan DAS Jratunseluna, yaitu sungai serang yang digunakan sebagai sumber air bagi waduk yang berada di Kabupaten Sragen.

f. Kondisi Iklim

Iklim di Kabupaten Sragen adalah iklim tropis, yang terdiri dari dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sragen memiliki curah hujan yang cenderung rendah hingga menengah. Pada beberapa wilayah dengan topografi bergunung seperti Kedawung bagian selatan, dengan hari hujan 99 curah hujan berkisar 1.750 mm/hari. Hal tersebut juga terjadi pada wilayah yang berada di lereng Gunung lawu, yaitu di stasiun pengamatan Jamus. Secara rinci curah hujan di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

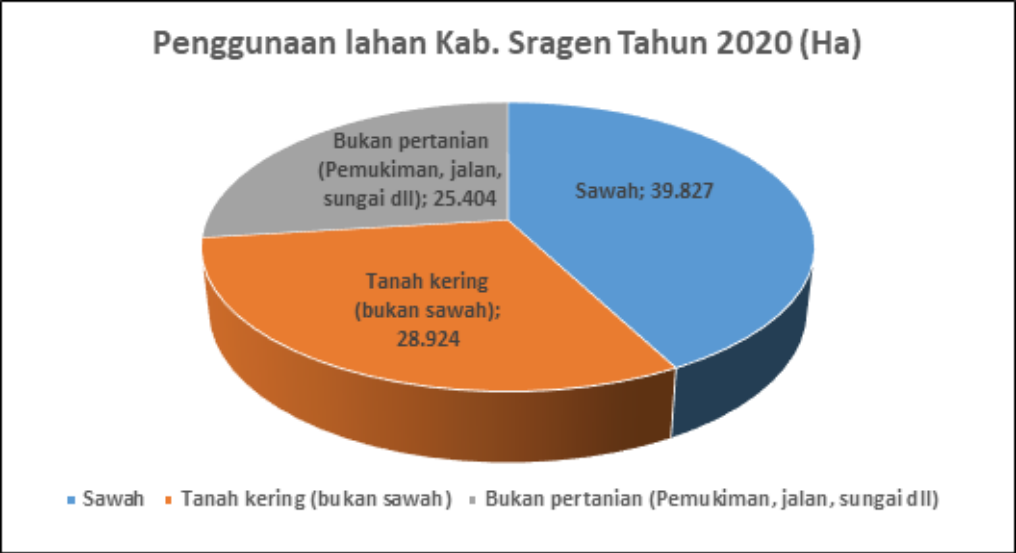
Tabel 2.3
Luas Wilayah berdasarkan curah hujan Kabupaten Sragen
Tahun 2021

Kecamatan	Stasiun pengamat	Curah Hujan (mm/hari)		Hari Hujan (mm/hari)	
		Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
Kalijambe	Kalimacan	3.351	119	279	10
Plupuh	Bapang	3.191	144	266	12
Masaran	Masaran	2.642	67	220	6
	Kedung Gatot	3.242	98	270	8
	Sidodadi	2.770	86	231	7
	Gebang	2.540	99	295	8
Kedawung	Kedawung	2.724	146	227	12
	Batu Jamus	2.196	127	183	11
	Purworejo	2.280	68	19	6
Sambirejo	Sambirejo	2.529	154	211	13
	Gebyar	1.097	108	91	9
Gondang	Kedung Banteng	2.235	82	186	7
SambungMacan	Bakalan	-	-	-	-
Ngrampal	Kenatan	2.283	123	190	10
	Ngarum	-	-	-	-
Karangmalang	Gembong	1.947	120	162	10
Sragen	Mojo	2.359	106	196	9
Sidoharjo	Singopadu	-	-	-	-
Tanon	Ketro	2.250	124	188	10
Gemolong	Dadapan	2.373	105	198	9
Miri	Kedung kancil	2.135	82	178	7
Sumberlawang	-	-	-	-	-
Mondokan	-	-	-	-	-
Sukodono	-	-	-	-	-
Gesi	-	-	-	-	-
Tangen	Tangen	1.693	97	141	8
Jenar	-	-	-	-	-
Rata-rata	-	2.412	108	196	9

Sumber Data: Sragen Dalam Angka Tahun 2022

g. Perincian Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Sragen terbagi menjadi tiga bagian yaitu lahan sawah, tanah pertanian bukan sawah (tanah kering) dan bukan pertanian. Tahun 2021 luas sawah sekitar 39.924 Ha (42.40%), Sedangkan luas lahan pertanian bukan sawah sekitar 28.068 Ha (29,81%), dan luas lahan bukan pertanian sekitar 26.156 Ha (27,78%).



Gambar 2.3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sragen
Sumber Data: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, olah data
Bappedalitbang Kab. Sragen

Penggunaan lahan pertanian dibagi menjadi 2, yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah seluas 39.924 Ha atau 42,40%, yang terdiri dari sawah irigasi seluas 25.362 Ha dan sawah tadah hujan seluas 14.562 Ha. Lahan pertanian bukan sawah atau tanah kering seluas 28.068 Ha atau 29,81% terdiri dari:

- a. Tegal/ladang/kebun seluas 16.755 Ha;
- b. Perkebunan seluas 2.413 Ha;
- c. Hutan rakyat seluas 2.014 Ha;
- d. Hutan negara seluas 4.933 Ha
- e. Tambak/kolam/empang seluas 1.138 Ha.

Penggunaan lahan pada lahan bukan pertanian ditahun 2021 sekitar 25.156 Ha atau 27,78%, mengalami penurunan 248 Ha atau 0,98% dari tahun 2020 seluas 25.404 Ha meliputi penggunaan lahan untuk permukiman, jalan, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, serta sungai.

Di Kabupaten Sragen terdapat kawasan lindung yaitu Kawasan Hutan Gunung Tunggang yang pertama kali disebut sebagai suaka margasatwa berdasarkan Surat Persetujuan KKPH Surakarta No. 4603/UM/V/6/SK tanggal 2 Agustus 1961 dan diperkuat dengan SK Penunjukan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004.

Secara administrasi wilayah, kawasan seluas 103,9 Ha tersebut berbatasan dengan wilayah 3 desa di Kabupaten Sragen, yaitu Desa Sambu, Desa Jambayan dan Desa Jetis yang berada di dalam wilayah Kecamatan Sambirejo serta 1 (satu) desa di wilayah Kabupaten Karanganyar, yaitu Desa Menjing yang masuk dalam wilayah Kecamatan Jenawi. Topografi kawasan ini bergelombang dan berbatu dengan ketinggian 400-600 m diatas permukaan laut, dengan kelembaban rata-rata 60% dan curah hujan rata-rata 2.756 mm/tahun.

h. Demografi

Jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Dari data BPS Kabupaten Sragen tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Sragen tahun 2021 sebanyak 983.641 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,68% dibanding tahun 2020. Angka tersebut mengalami peningkatan dari jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 976.951 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,26% dibanding tahun 2020. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri atas: penduduk laki-laki sebanyak 490.067 jiwa (49,82%) dan penduduk perempuan sebanyak 493.574 jiwa (50,18%). Rasio jenis kelamin Kabupaten Sragen sebesar 99 atau dengan kata lain berarti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan dengan rincian setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 99 penduduk laki-laki. Perincian jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Masaran dan terendah di Kecamatan Gesi.

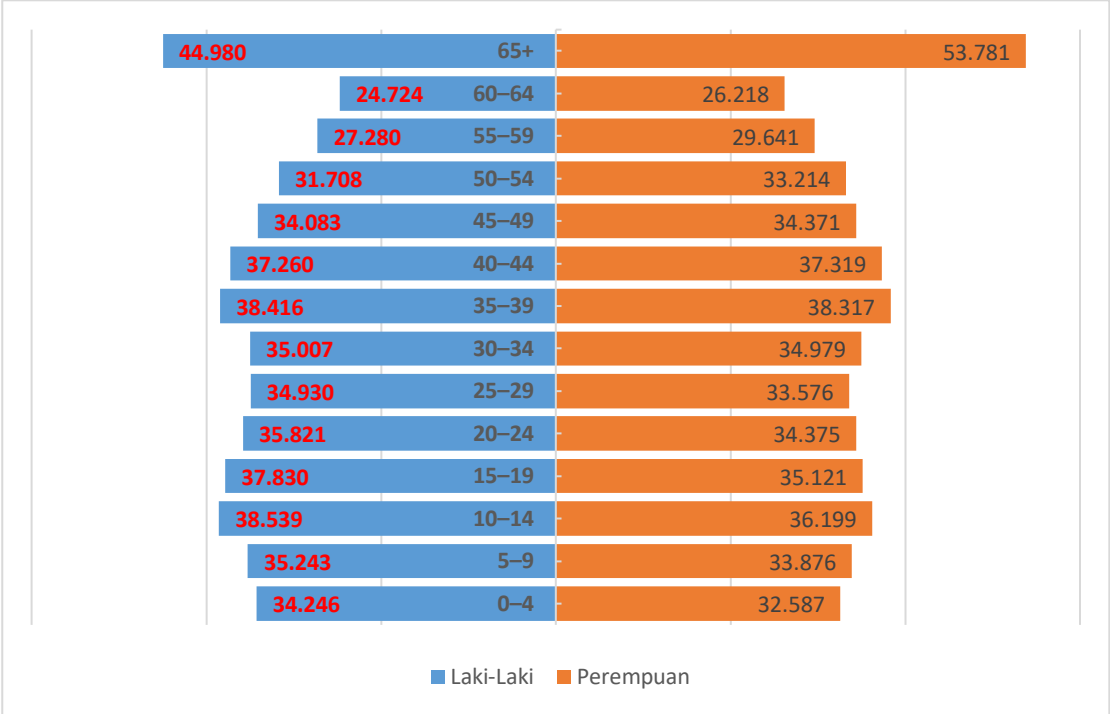
Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen
Tahun 2020-2021

No	Kecamatan	2020			2021			Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2021
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Kalijambe	26.654	25.965	52.619	26.749	26.128	52.877	0,49
2	Plupuh	25.540	25.357	50.897	25.878	25.630	51.508	1,2
3	Masaran	38.858	38.733	77.591	39.026	38.963	77.989	0,51
4	Kedawung	32.697	33.115	65.812	32.919	33.416	66.335	0,79
5	Sambirejo	20.407	20.309	40.716	20.591	20.469	41.060	0,84
6	Gondang	23.328	23.757	47.085	23.470	23.925	47.395	0,66
7	Sb. macan	24.067	24.399	48.466	24.161	24.490	48.651	0,38
8	Ngrampal	20.977	21.507	42.484	21.114	21.710	42.824	0,8
9	Karangmalang	36.260	36.860	73.120	36.565	37.263	73.828	0,97
10	Sragen	34.264	35.294	69.558	34.148	35.296	69.444	0,16
11	Sidoharjo	28.672	29.096	57.768	28.848	29.326	58.174	0,7
12	Tanon	29.230	29.360	58.590	29.504	29.578	59.082	0,84
13	Gemolong	25.977	26.004	51.981	26.174	26.194	52.368	0,74
14	M i r i	18.296	18.301	36.597	18.425	18.438	36.863	0,73
15	Sumberlawang	24.832	25.200	50.032	25.046	25.374	50.420	0,78
16	Mondokan	19.579	19.402	38.981	19.776	19.571	39.347	0,94
17	Sukodono	16.521	16.849	33.370	16.672	16.948	33.620	0,75
18	G e s i	11.234	11.526	22.760	11.350	11.614	22.964	0,9
19	Tangen	14.653	14.464	29.117	14.761	14.553	29.314	0,68
20	J e n a r	14.783	14.624	29.407	14.890	14.688	29.578	0,58
Jumlah		486.829	490.122	976.951	490.067	493.574	983.641	0,68

Sumber Data: BPS Kabupaten Sragen, 2022

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Masaran dan terendah di Kecamatan Gesi. Sedangkan rasio jenis kelamin penduduk pada tiap-tiap kecamatan secara umum lebih banyak jumlah penduduk perempuan, kecuali Kecamatan Kalijambe, Plupuh, Masaran, Sambirejo, Mondokan, Tangen dan Jenar.

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) yang merupakan tingkat ketergantungan ditinjau dari usia non produktif (0-14 tahun dan lebih besar dari 65 tahun), sebesar 210.690 jiwa (0-14 tahun) atau senilai 21,42% dan 98.761 jiwa (>65 tahun) atau senilai 10,04%. Banyaknya penduduk berdasarkan aspek usia dapat dilihat pada gambar berikut.

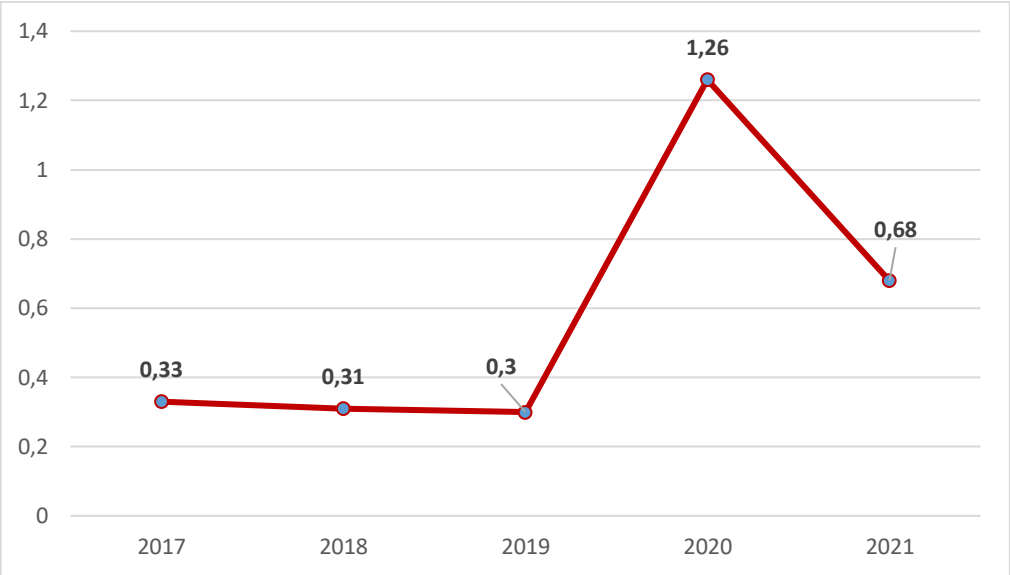


Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Gender di Kabupaten Sragen Tahun 2021
Sumber Data: Kabupaten Sragen Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya penduduk Kabupaten Sragen masih didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 674.190 jiwa atau senilai 68,54%. Kondisi ini mengarah pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta dengan meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut sangat menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Sragen.

Laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sragen dari tahun 2017 sampai

dengan tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2017 Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,33% turun 0,31% di tahun 2018, tahun 2019 turun menjadi 0,30%. Namun pertumbuhan penduduk di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,26% dan tahun 2021 turun lagi 0,68%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sragen tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.5
 Peta Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sragen
 Tahun 2017-2021(%)
 Sumber Data: Kabupaten Sragen Dalam Angka Tahun 2022

Kepadatan penduduk menjelaskan mengenai berapa jumlah penduduk yang tinggal dalam wilayah dengan ukuran tertentu, per kilometer persegi. Semakin banyak manusia yang tinggal di suatu tempat, maka kepadatan penduduk di wilayah tersebut semakin tinggi atau semakin padat. Kepadatan penduduk didapatkan dengan membagi jumlah populasi total dari suatu daerah dibagi dengan luas daerah tersebut. Oleh karena itu, notasi umum dari kepadatan penduduk adalah berapa orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sragen Tahun 2021 mencapai 1.045 jiwa per km² dengan jumlah penduduk 983.641 jiwa dan luas wilayah 941,55 km². Angka tersebut mengalami peningkatan 7 jiwa/km² atau 0,67% dari tahun 2020 sebesar 1.038 jiwa/km². Kenaikan dipengaruhi oleh jumlah penduduk tahun 2021 mencapai 983.641 jiwa.

Tabel 2.5
 Kepadatan Penduduk per Kecamatan
 di Kabupaten Sragen Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Jiwa Km ²
1	Kalijambe	46,96	52.877	1.126
2	Plupuh	48,36	51.508	1.065
3	Masaran	44,04	77.989	1.771
4	Kedawung	49,78	66.335	1.333
5	Sambirejo	48,43	41.060	848
6	Gondang	41,17	47.395	1.151

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Jiwa Km ²
7	Sb. Macan	38,48	48.651	1.264
8	Ngrampal	34,4	42.824	1.245
9	Karangmalang	42,98	73.828	1.718
10	Sragen	27,27	69.444	2.547
11	Sidoharjo	45,9	58.174	1.267
12	Tanon	51	59.082	1.158
13	Gemolong	40,23	52.368	1.302
14	M i r i	53,81	36.863	685
15	Sumberlawang	75,16	50.420	671
16	Mondokan	49,36	39.347	797
17	Sukodono	45,55	33.620	738
18	G e s i	39,58	22.964	580
19	Tangen	55,13	29.314	532
20	J e n a r	63,96	29.578	462
Jumlah / Total 2021		941,55	983.641	1.045
Jumlah / Total 2020		941,55	976.951	1.038
Jumlah / Total 2019		941,55	890.518	946
Jumlah / Total 2018		941,55	887.889	943
Jumlah / Total 2017		941,55	885.122	940

Sumber Data: Kabupaten Sragen Dalam Angka Tahun 2022

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen dapat dilihat dari beberapa tinjauan antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi daerah, Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita;
- Ketenagakerjaan;
- Tingkat kemiskinan;
- Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- Kesetaraan dan keadilan gender.

Secara rinci capaian indikator kinerja penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

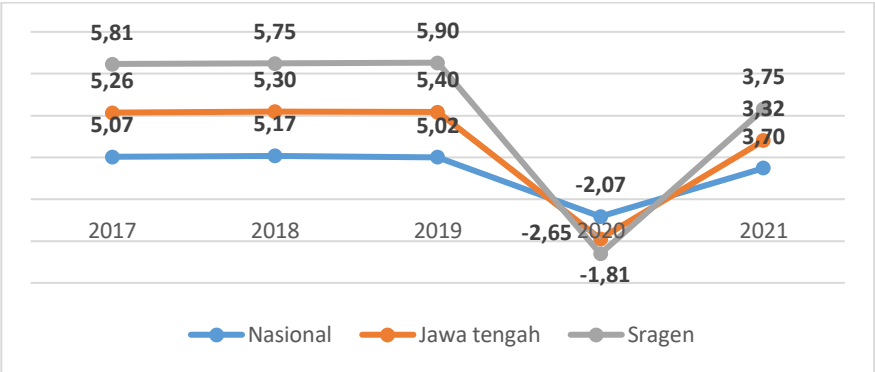
Tabel 2.6
Capaian Kinerja Penyelenggara Pemerintah Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,97	5,75	5,9	-1,81	3,75
2	PDRB ADHB (jt)	32.410.815	35.100.062	37.836.231	37.850.991	40.087.775
3	PDRB ADHK Perkapita (jt)	27,09	28,56	30,15	29,53	27,81
4	Pengangguran TPT (%)	4,55	4,82	3,32	4,75	4,76
5	Kemiskinan (%)	14,02	13,12	12,79	13,38	13,83
6	IPM	72,4	72,96	73,43	73,95	74,08
7	Inflasi	2,69	2,49	2,44	1,38	2,58

Sumber Data: BPS, Kabupaten Sragen dalam Angka Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi secara global masih dalam tren pemulihan meskipun mengalami perlambatan akibat penyebaran kasus Covid-19 yang kembali meningkat di berbagai negara pada triwulan III tahun 2021. Pemulihan ekonomi global memicu peningkatan harga komoditas utamanya harga komoditas energi, terutama gas alam dan batubara, yang menyebabkan lonjakan biaya input industri.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen tahun 2021 mencapai 3,75 di mana nilai ini mengalami pertumbuhan dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi dengan nilai -1,81%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen tersebut kondisinya lebih baik dibanding angka pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,70. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 3,32 setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi -2,65. Secara detail data terkait laju pertumbuhan ekonomi disampaikan pada gambar berikut.



Gambar 2.6
Peta Kabupaten Sragen Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Sragen Tahun 2017-2021
Sumber Data: BPS Kabupaten Sragen, 2022

Selanjutnya dibandingkan dengan target RKPD, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen menunjukkan kinerja yang belum baik. Selama periode lima tahun dari tahun 2017-2021, pertumbuhan ekonominya di bawah target RKPD. Kinerja paling baik terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,90 dan kinerja terendah terjadi pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar -1,81. Perkembangan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Target RKPD dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen,
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Target RKPD	Sragen	Jawa Tengah	Nasional
2017	6,00-6,25	5,81	5,27	5,07
2018	6,25-6,50	5,75	5,32	5,17
2019	6,25-6,50	5,90	5,41	5,02
2020	6,50-6,75	-1,81	-2,65	-2,07
2021	6,50-6,75	3,75	3,32	3,70

Sumber Data: BPS, 2022 dan Bappeda Litbang, 2021

Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen beserta kabupaten sekitar menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi

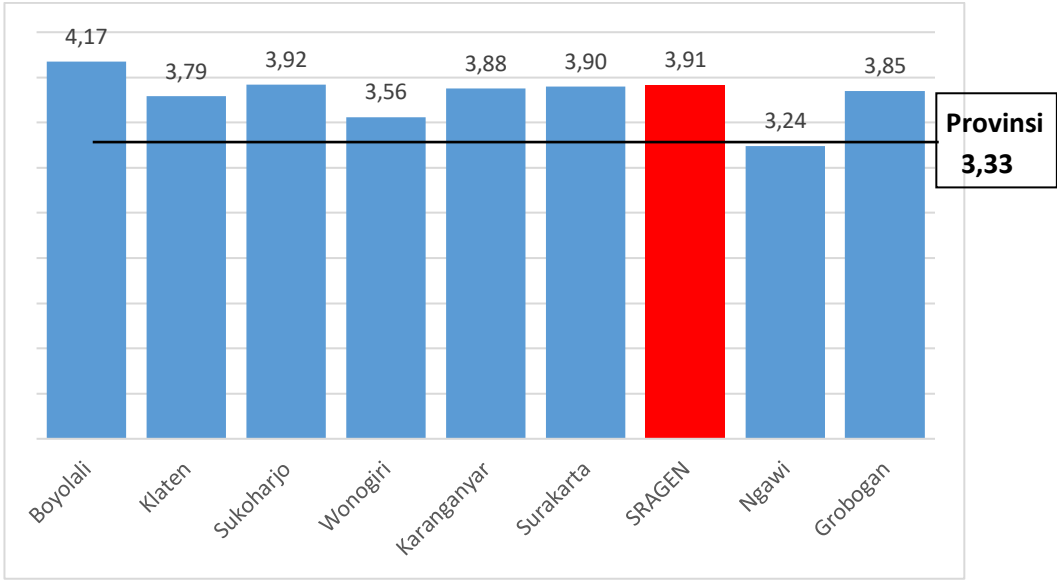
Kabupaten Sragen periode 2017-2021 relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi enam wilayah sekitar sebagaimana terlihat dalam tabel. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,35% dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen 5,97% sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah 5,62%. Sebaliknya, selisih paling kecil terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,06% dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen 5,75% dan rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah 5,69% seperti terlihat dalam tabel.

Tabel 2.8
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar
 Tahun 2017-2021

Tahun	Boyolali	Klaten	Sukoharjo	Wonogiri	Karanganyar	Surakarta	Rata-Rata	Sragen
2017	5,80	5,34	5,76	5,32	5,77	5,70	5,62	5,97
2018	5,72	5,47	5,79	5,41	5,98	5,75	5,69	5,75
2019	5,96	5,50	5,92	5,14	5,93	5,78	5,71	5,90
2020	-1,24	-1,18	-1,70	-1,41	-1,87	-1,74	-1,52	-1,81
2021	4,63	3,82	3,82	3,35	3,57	4,01	3,87	3,75

Sumber Data: BPS, 2022

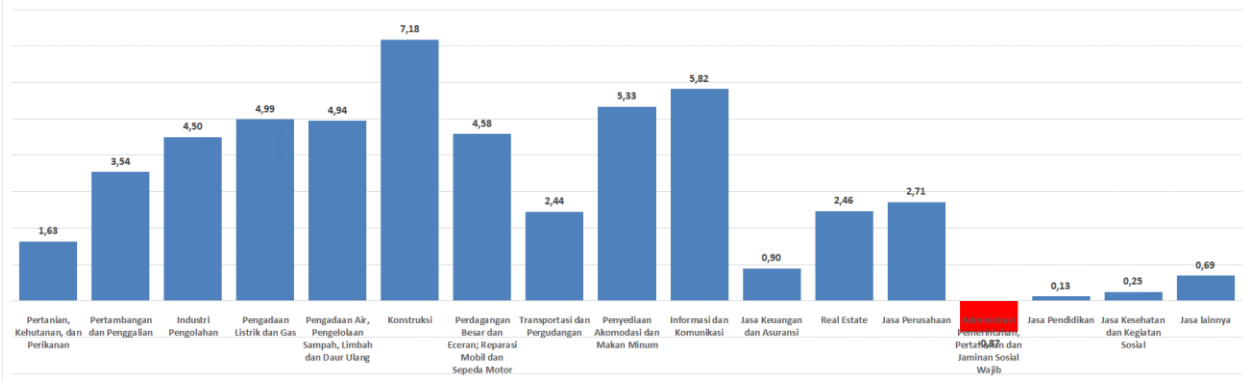
Dalam periode lima tersebut, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen juga relatif baik dibanding wilayah sekitar. Bahkan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Dibandingkan daerah sekitar, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen berada pada peringkat terbesar ketiga setelah Boyolali, dan Sukoharjo. Dengan demikian, di Solo Raya rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen lebih tinggi dari Surakarta, Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen lebih tinggi dari Ngawi dan Grobogan. Bahkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen juga lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Boyolali memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi sebaliknya Ngawi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah. Berikut adalah gambar rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar Tahun 2017-2021.



Gambar 2.7
 Rerata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen, Wilayah Sekitar,
 dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021
 Sumber Data: BPS, 2022

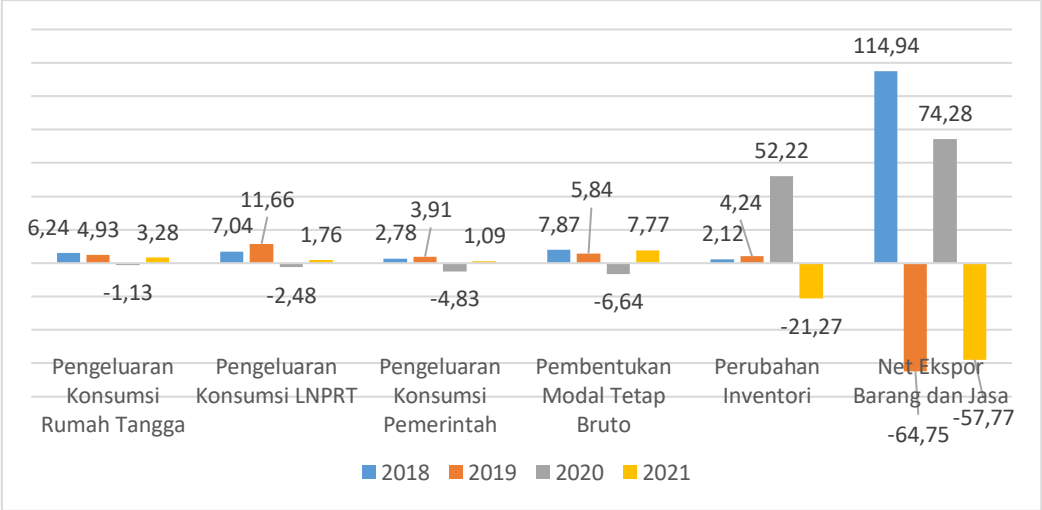
Berdasarkan lapangan usaha, selama tahun 2021 hanya satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar -0,87% sedangkan lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi yang tumbuh sebesar 7,18%, selanjutnya informasi dan komunikasi tumbuh 5,82% dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 5,33%. Sebaliknya jasa pendidikan tumbuh paling rendah hanya 0,13%. Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sedikit lebih baik dengan pertumbuhan 0,25%. Pertumbuhan lapangan usaha dapat dilihat pada grafik.



Gambar 2.8
Pertumbuhan PDRB ADHB berdasarkan Lapangan Usaha (c-to-c) (%)
Tahun 2021
Sumber Data: BPS, 2022

Selain menurut lapangan usaha, seringkali aktivitas ekonomi juga dilihat dari sisi pengeluarannya. Menurut pengeluaran, pada tahun 2021 pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran kecuali komponen perubahan inventori dan ekspor barang dan jasa. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 7,77%; diikuti pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 3,28%; pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,76% dan pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) sebesar 1,09%. Sedangkan komponen perubahan inventori dan ekspor barang dan jasa masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar -21,27% dan -57,77%.



Gambar 2.9
Pertumbuhan PDRB ADHB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (%) Tahun 2021
Sumber Data: BPS, 2022

PDRB. Atas dasar harga berlaku (ADHB), pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Sragen sebesar 40,087 trilyun rupiah sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK), PDRB-nya mencapai 27,355 trilyun rupiah. Sejak tahun 2017, nilai PDRB naik terus tiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, nilai PDRB ADHB naik 7.676.960,50 juta rupiah sedangkan PDRB ADHK naik 3.377.938,66 juta rupiah. Dibandingkan tahun 2020, nilai PDRB masing-masing naik 2.236.784,80 juta rupiah untuk PDRB ADHB dan naik 987.884,72 juta rupiah untuk PDRB ADHK. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.9
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021

PDRB (juta Rp)	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB adhb	32.410.814,98	35.100.061,65	37.836.230,82	37.850.990,68	40.087.775,48
PDRB adhk	23.977.207,30	25.356.459,51	26.853.059,12	26.367.261,24	27.355.145,96

Sumber: BPS, 2022

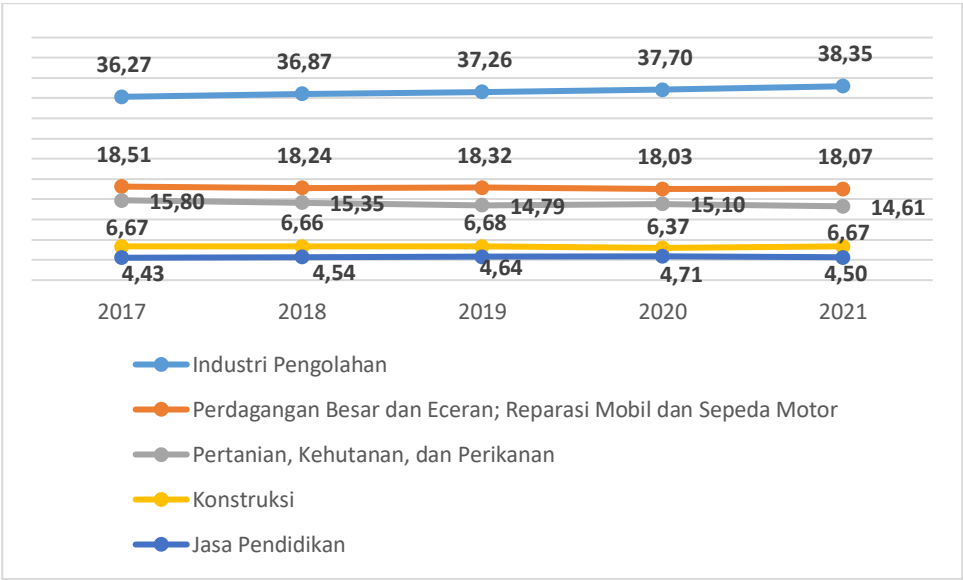
Dibandingkan wilayah sekitar, PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sragen merupakan tertinggi ketiga setelah Kota Surakarta dan Kabupaten Klaten. Dibandingkan Kota Surakarta, PDRB ADHB Kabupaten Sragen selisih 10,2843,79 juta rupiah sedangkan dibandingkan Kabupaten Klaten, PDRB ADHB Kabupaten Sragen selisih 2.207,48 juta rupiah. Baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Sragen lebih tinggi dibanding rata-rata wilayah. Ngawi merupakan daerah dengan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK terendah. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.10
PDRB ADHB Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2021

KABUPATEN	PDRB (Juta Rp)	
	ADHB	ADHK
Boyolali	34.906.160,78	23.447.366,01
Klaten	42.295.255,88	28.531.108,64
Sukoharjo	38.990.458,19	27.634.117,53
Wonogiri	30.580.892,45	21.251.003,92
Karanganyar	39.158.453,93	27.034.107,96
Surakarta	50.371.564,19	36.211.248,26
Grobogan	28,815.025,00	20,115.534,00
Ngawi	20.814.462,59	13.823.456,47
Rata-Rata Wilayah	32.139.656,00	22.241.551,10
SRAGEN	40.087.775,48	27.355.145,96

Sumber Data: BPS, 2022

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Sragen didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi dan jasa pendidikan. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, industri pengolahan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan pertanian, kehutanan, dan perikanan peranannya mengalami penurunan peranan. Sedangkan , konstruksi dan jasa pendidikan peranannya berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Salah satu penyebab menurunnya peranan pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.10
Kontribusi Lima Usaha Terbesar Pembentuk PDRB ADHB Kabupaten
Sragen Tahun 2017-2021
Sumber Data: BPS Kabupaten Sragen, 2022

Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB ADHB Kabupaten Sragen. Pada tahun 2021, kontribusinya sebesar 37,70% dan meningkat menjadi 38,35% pada tahun 2021. Distribusi terbesar kedua sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 18,03 pada tahun 2020 dan naik menjadi 18,07% pada tahun 2021. Distribusi terbesar ketiga sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 15,10% pada tahun 2020 dan turun menjadi 14,61% pada tahun 2020. Sedangkan distribusi terkecil sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan kontribusi 0,06% pada tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan kontribusi 0,13 pada tahun 2020 dan 2021 dan sektor Jasa Perusahaan dengan kontribusi 0,45 pada tahun 2020 dan 2021. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,80	15,35	14,79	15,10	14,61
B	Pertambangan dan Penggalian	2,97	2,84	2,72	2,80	2,77
C	Industri Pengolahan	36,27	36,87	37,26	37,70	38,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	6,67	6,66	6,68	6,37	6,67
G	Pedagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,51	18,24	18,32	18,03	18,07
H	Tranportasi dan Pergudangan	2,34	2,30	2,33	1,78	1,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,95	3,03	3,15	3,09	3,13

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
J	Informasi dan Komunikasi	1,21	1,26	1,31	1,52	1,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,84	2,89	2,83	2,87	2,85
L	Real Estate	0,88	0,89	0,88	0,88	0,87
M, N	Jasa Perusahaan	0,42	0,44	0,47	0,45	0,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jmainan Sosial Wajib	2,19	2,13	2,06	2,07	1,92
P	Jasa Pendidikan	4,43	4,54	4,64	4,71	4,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,75	0,76	0,86	0,82
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,58	1,59	1,62	1,57	1,51
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: BPS Kab.Sragen, 2022

PDRB Perkapita. PDRB perkapita merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita Kabupaten Sragen Tahun 2021 sebesar Rp 40,75 juta per tahun/jiwa atau sebesar Rp 3,396 juta per bulan/jiwa, turun sebesar 3,88% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp 42,39 juta per tahun/jiwa atau sebesar Rp 3,533 ,juta per bulan/jiwa.

Tabel 2.12
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Sragen
Tahun 2017-2021

PDRB	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Target PDRB adhb perkapita (juta Rp)	35,27	37,74	40.21	42,68	45.15
PDRB adhb perkapita (juta Rp)	36,62	39,53	42,49	42,39	40,75
PDRB adhk perkapita (juta Rp)	27,09	28,56	30,15	29,53	27,81

Sumber Data: BPS, 2022

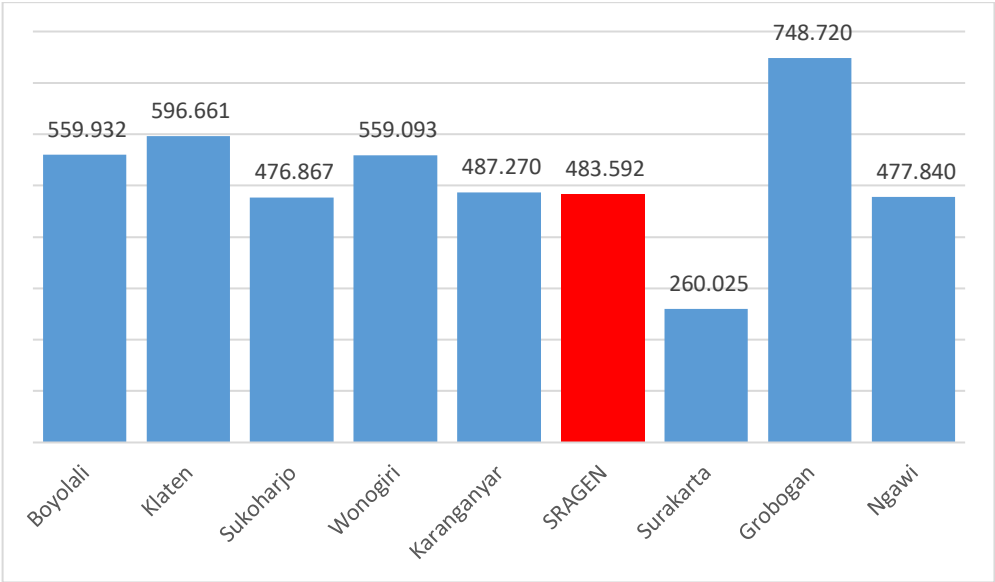
Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan tahun 2019 realisasi nilai PDRB perkapita ADHB lebih tinggi dibanding dengan target RKPD. Namun demikian, tahun 2020 dan 2021, nilai PDRB perkapita ADHB lebih kecil dibanding dengan target RKPD. Hal tersebut menggambarkan perekonomian Kabupaten Sragen masih dalam pemulihan dari pandemi.

Aspek kesejahteraan masyarakat ditinjau dari **ketenagakerjaan**. Angkatan kerja mencerminkan jumlah penduduk yang secara aktual siap memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan jasa di suatu wilayah/negara. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sragen pada tahun 2021 sebanyak 507.752 orang, bertambah sebanyak 25.990 orang dibanding tahun 2020. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada tahun 2021 sebanyak 483.592 orang, bertambah sebanyak 24.736 orang dibanding setahun yang lalu.

Dibanding daerah sekitar, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Sragen termasuk rendah. Jumlahnya lebih sedikit dibanding 6 daerah lainnya dan sedikit lebih banyak dari Sukoharjo

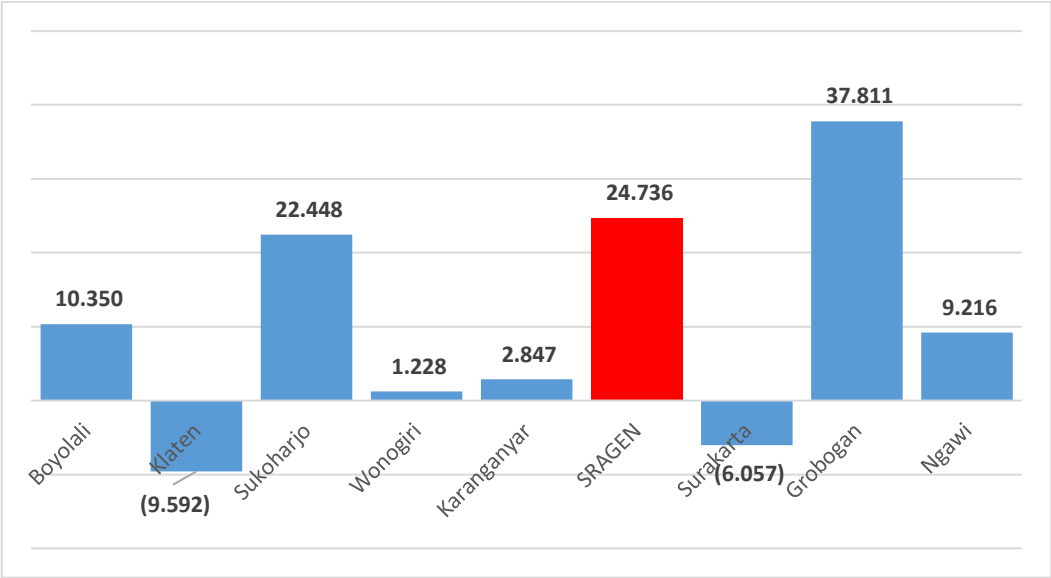
RKPD Kab.Sragen Tahun 2023

yang memiliki 476.867 orang bekerja. Grobogan memiliki jumlah penduduk bekerja terbanyak atau 748.720 orang sedangkan Surakarta memiliki jumlah penduduk bekerja paling sedikit atau 260.025 orang.



Gambar 2.11
Jumlah Penduduk yang Bekerja Tahun 2021
Sumber Data: BPS, 2022

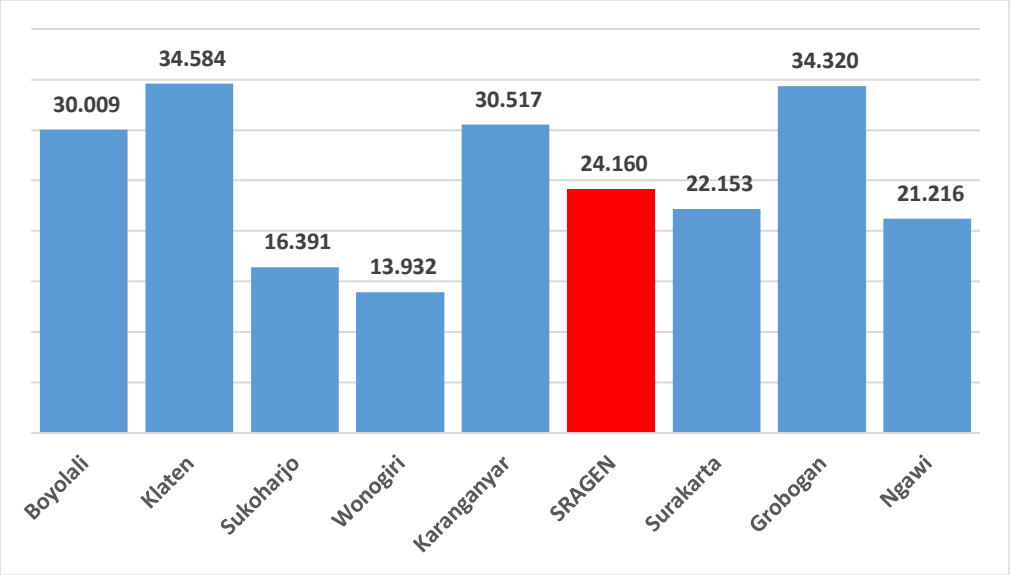
Penambahan penduduk bekerja di Kabupaten Sragen merupakan yang terbanyak setelah Grobogan dengan penambahan 37.811 orang. Dari tujuh Kabupaten/Kota Solo Raya dan dua daerah perbatasan, terdapat tujuh daerah mengalami penambahan jumlah penduduk bekerja sedangkan dua daerah mengalami penurunan jumlah penduduk bekerja yaitu Klaten dan Surakarta.



Gambar 2.12
Penambahan Jumlah Penduduk yang Bekerja Tahun 2021
Sumber Data: BPS, 2022

Sementara itu, jumlah pengangguran di Kabupaten Sragen sebanyak 24.160 orang, mengalami kenaikan sekitar 1.254 orang

dibanding setahun yang lalu. Jumlah tersebut termasuk kategori sedang dibanding daerah sekitar.

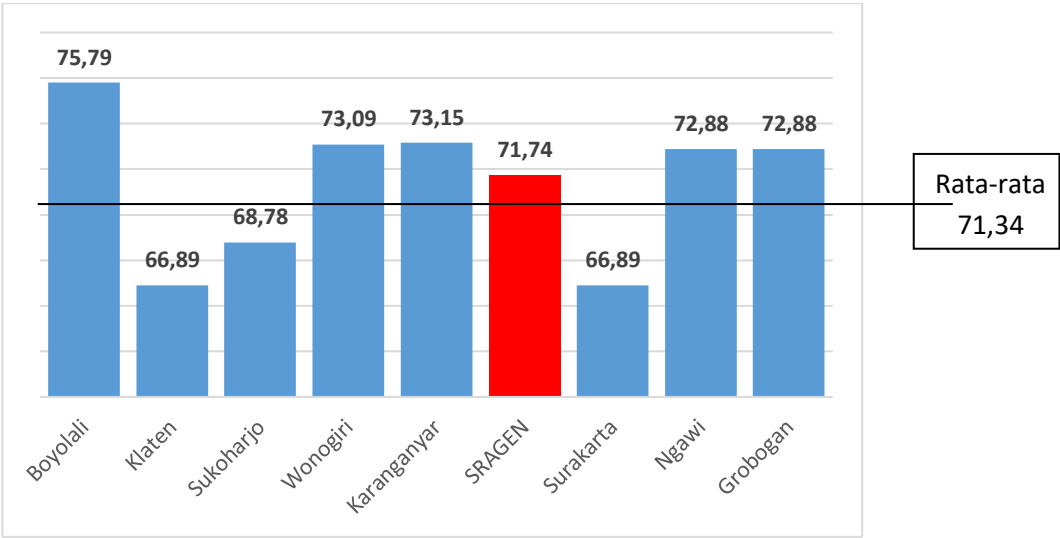


Gambar 2.13
Jumlah Pengangguran Tahun 2021
Sumber Data: BPS, 2022

Sejalan dengan naiknya jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

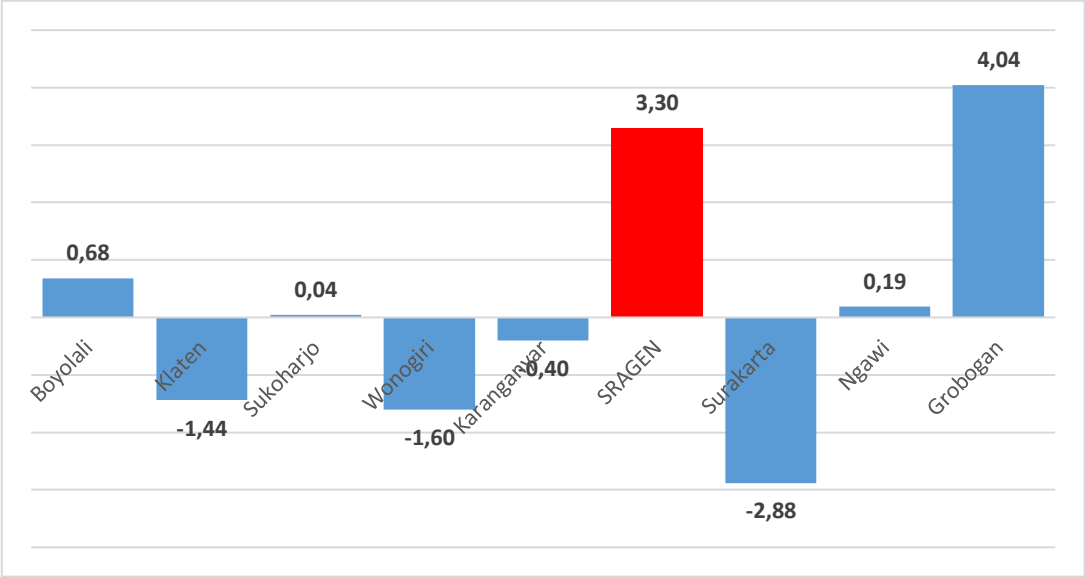
Pada tahun 2021, TPAK Kabupaten Sragen mencapai 71,74% artinya dari jumlah penduduk angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) sebanyak 71,74% diantaranya bekerja, mencari kerja dan tidak bekerja sedangkan sisanya sebanyak 28,26% mengurus rumah tangga, sekolah atau lainnya. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.

Dibandingkan wilayah sekitar, TPAK Kabupaten Sragen termasuk rendah. Nilainya berada dibawah median atau nilai tengah yaitu TPAK Grobogan dan Ngawi sebesar 72,88. Namun demikian, dibandingkan nilai TPAK rata-rata wilayah sekitar yang mencapai 71,34, TPAK Kabupaten Sragen lebih tinggi.



Gambar 2.14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Sragen dan Wilayah Sekitar
Tahun 2021
Sumber Data: BPS, 2022

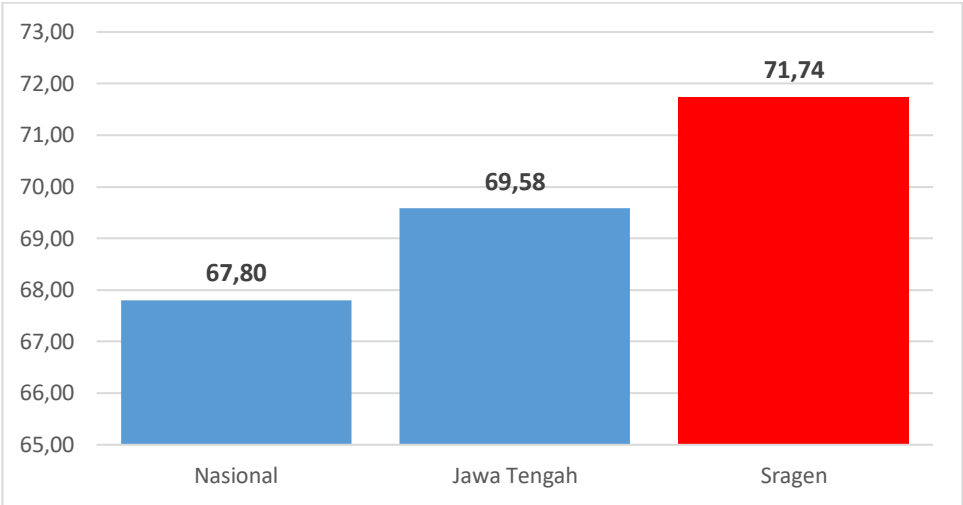
Perubahan TPAK dari tahun 2020 ke tahun 2021 menunjukkan Kabupaten Sragen merupakan satu dari lima wilayah yang mengalami pertumbuhan positif bersama dengan Grobogan, Boyolali, Ngawi dan Sukoharjo. Sedangkan wilayah lain menunjukkan penurunan. Penurunan TPAK terbesar terjadi di Surakarta sebesar -2,88 dan penurunan terendah terjadi di Karanganyar -0,40. Kondisi tersebut menunjukkan ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan besar dibanding wilayah lain. Perubahan TPAK di wilayah sekitar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.15
Perubahan TPAK di Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar
Tahun 2021
Sumber Data: BPS, 2022

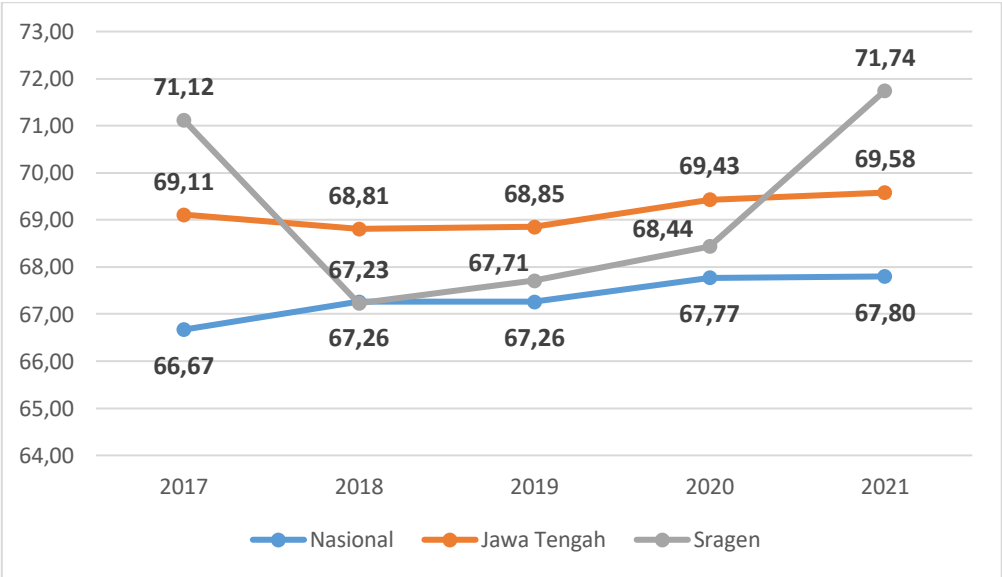
Dibandingkan TPAK Jawa Tengah, TPAK Kabupaten Sragen masih lebih tinggi. Bahkan dibandingkan TPAK nasional, TPAK Kabupaten Sragen lebih baik. Tingginya TPAK di Kabupaten Sragen dibarengi UMK yang kompetitif dapat mendorong investasi usaha padat karya yang memerlukan banyak tenaga kerja dengan upah sedang.

Perbandingan TPAK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.16
TPAK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021
Sumber Data: BPS, 2022

Selama periode 2017-2021, TPAK Kabupaten Sragen membentuk kurva U yang dapat diartikan tinggi pada awal periode selanjutnya turun dan di akhir periode naik lagi. Kenaikan tersebut dipicu tingginya usia produktif yang ada di Kabupaten Sragen. TPAK Jawa Tengah dan nasional cenderung tetap pada kisaran 69,00 untuk provinsi dan 67,00 untuk nasional. TPAK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan nasional pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.17
TPAK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017-2021
Sumber Data: BPS, 2022

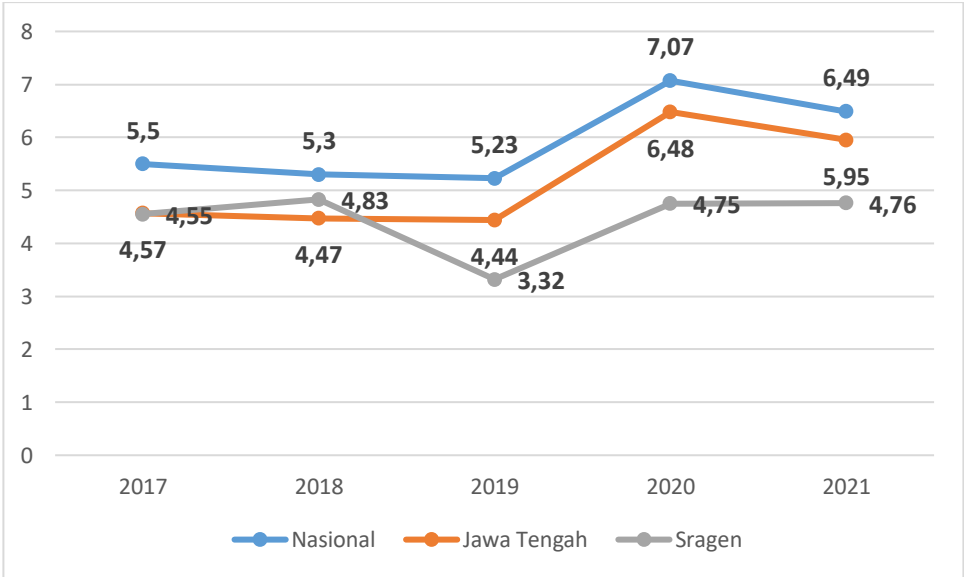
Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan yang signifikan antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki tercatat sebesar 78,74% sementara TPAK perempuan hanya mencapai 58,74%. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu TPAK laki-laki mengalami kenaikan 7,62% poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan 8,22% poin.

Tabel 2.13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sragen (%)

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	
	2019	2020
Laki-Laki	71,12	78,74
Perempuan	66,96	58,74
Total	67,43	68,44

Sumber Data: BPS Sragen, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan Pemkab. Sragen terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya cukup berhasil menekan tingkat pengangguran, ditunjukkan oleh TPT cenderung tidak mengalami kenaikan selama periode 2017-2021. Dengan kata lain, TPT Kabupaten Sragen dapat dikatakan stabil pada kisaran 4,50% sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2.18
TPT Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017-2021
Sumber Data: BPS, 2022

Selanjutnya dibandingkan dengan target RKPD, kinerja penurunan pengangguran Kabupaten Sragen menunjukkan kinerja yang belum baik. Selama periode lima tahun dari tahun 2017-2021, TPT cenderung lebih tinggi daripada target RKPD. Hal tersebut utamanya disebabkan Pemerintah Kabupaten Sragen baru bisa mengendalikan jumlah pengangguran tidak bertambah dan cenderung stabil pada kisaran 4,50% padahal dalam RKPD jumlah pengangguran ditarget selalu berkurang. Namun demikian, pada tahun 2017 Kabupaten Sragen berhasil mencapai target TPT yaitu 4,55% dengan target dalam RKPD sebesar 4,68%. Bahkan pada tahun 2019 jumlah pengangguran dapat ditekan sampai 3,32% lebih rendah dari target dalam RKPD sebesar 4,35%. Perkembangan target dan capaian TPT

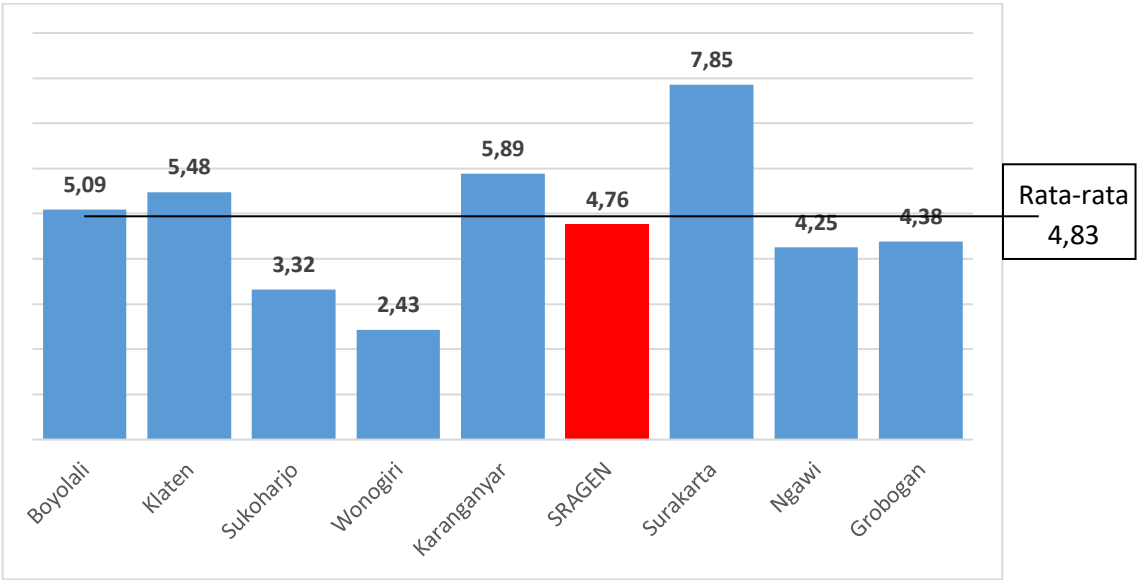
Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Target RKPD dan Capaian TPT Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Target RKPD	Sragen	Nasional	Jawa Tengah
2017	4,68	4,55	5,50	4,57
2018	4,52	4,83	5,30	4,47
2019	4,35	3,32	5,23	4,44
2020	4,19	4,75	7,07	6,48
2021	4,03	4,76	6,49	5,95

Sumber Data: BPS, 2022

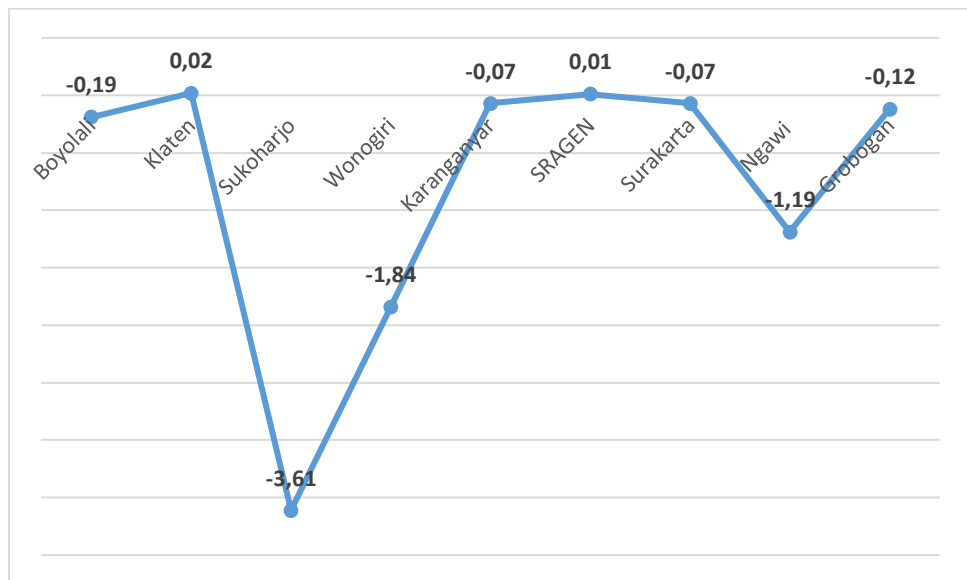
Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 TPT di Kabupaten Sragen mencapai 4,76%. Ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sragen dari 100 penduduk usia kerja terdapat 4 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Dibandingkan sembilan wilayah sekitar, TPT Kabupaten Sragen berada ditengah atau urutan kelima terendah. Sedangkan di Wilayah Solo Raya, TPT Kabupaten Sragen merupakan terendah ketiga setelah Kabupaten Sukoharjo dengan TPT mencapai 3,32% dan Kabupaten Wonogiri dengan TPT terendah sebesar 2,43%. Sedangkan TPT terbesar adalah Kota Surakarta mencapai 7,85%. Dibandingkan dengan nilai rata-rata wilayah sekitar, TPT Kabupaten Sragen termasuk baik dengan nilai dibawah rata-rata wilayah. TPT Kabupaten Sragen pada tahun 2021 mencapai 4,76% sedangkan rata-rata wilayah sebesar 4,83%.



Gambar 2.19
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2021
Sumber Data: BPS, 2022

Perubahan TPT dari tahun 2020 ke tahun 2021 menunjukkan Kabupaten Sragen merupakan satu dari dua wilayah yang mengalami pertumbuhan positif bersama dengan Kabupaten Klaten. Sedangkan wilayah lain menunjukkan penurunan. Penurunan TPT terbesar terjadi di Sukoharjo sebesar -3,61 dan Wonogiri -1,84. Kondisi tersebut menunjukkan kondisi lapangan kerja di Kabupaten Sragen dan Klaten

belum pulih dari dampak pandemi yang membuat sejumlah usaha tutup. Sedangkan wilayah lain menggambarkan pemulihan lapangan kerja meski pandemi belum berakhir yang ditandai dengan penurunan TPT pada tahun 2021 dibanding 2020. Perubahan TPT di Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.20
Perubahan TPT di Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar
Tahun 2021
Sumber Data: BPS, 2022

Tidak hanya tahun 2021, dibanding wilayah sekitar, jumlah pengangguran di Kabupaten Sragen cenderung terkendali sejak tahun 2019. Nilai TPT Kabupaten Sragen pada tahun 2017 dan tahun 2018 lebih tinggi daripada rata-rata wilayah sekitar sedangkan dalam tiga tahun terakhir nilai TPT-nya lebih rendah daripada rata-rata wilayah sekitar.

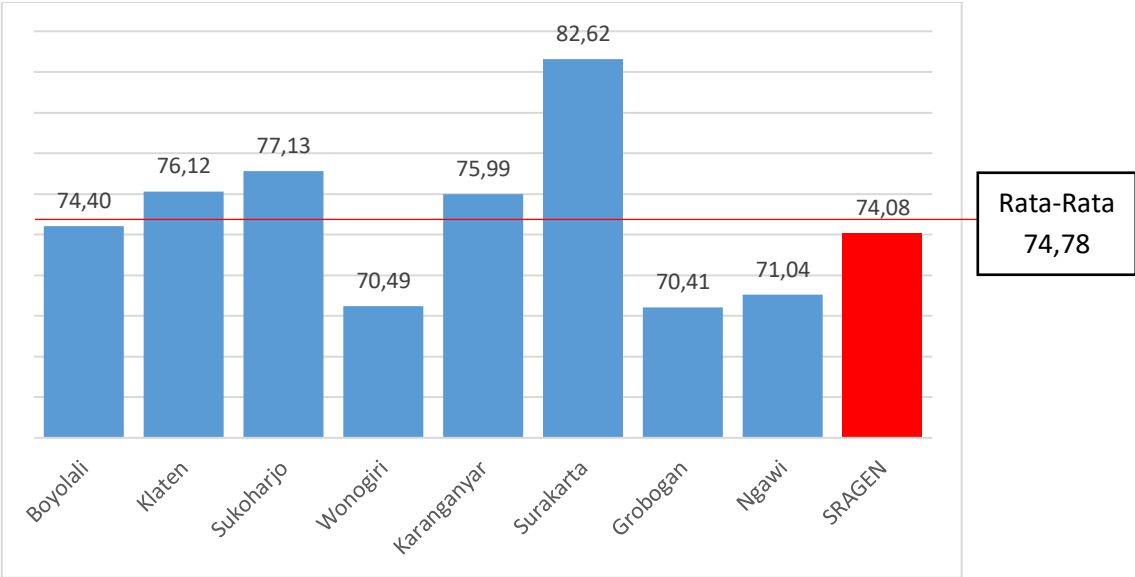
Tabel 2.15
Capaian TPT Kabupaten Sragen dan wilayah Sekitar
Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Boyolali	3,67	2,18	3,09	5,28	5,09
Klaten	4,35	3,14	3,54	5,46	5,48
Sukoharjo	2,27	2,72	3,39	6,93	3,32
Wonogiri	2,38	2,28	2,55	4,27	2,43
Karanganyar	3,17	2,28	3,12	5,96	5,89
Surakarta	4,47	4,35	4,16	7,92	7,85
Ngawi	5,76	3,83	3,70	5,44	4,25
Grobogan	3,02	2,22	3,54	4,50	4,38
Rata-Rata	3,64	2,88	3,39	5,72	4,84
Sragen	4,55	4,83	3,32	4,75	4,76

Sumber Data : BPS 2022

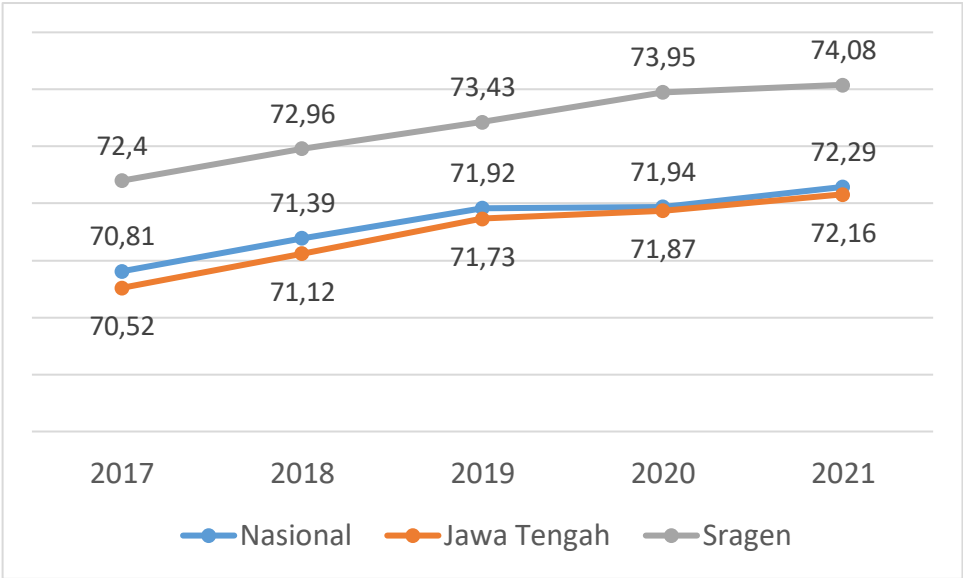
Aspek kesejahteraan masyarakat ditinjau dari cerminan kualitas hidup penduduk berdasarkan capaian IPM di Kabupaten Sragen. Pada tahun 2021 nilainya sebesar 74,08 naik 1,3 poin dari tahun 2020 sebesar 73,95. Dibandingkan tahun 2016 nilai IPM Kabupaten Sragen naik 2,65 poin dan selalu naik tiap tahunnya. Capaian tersebut cukup baik dan berada pada peringkat 13 di Jawa Tengah. Akan tetapi

dibandingkan dengan wilayah sekitar, capaian IPM Kabupaten Sragen perlu ditingkatkan. IPM terendah dimiliki Kabupaten Wonogiri sebesar 70,49 sedangkan IPM tertinggi terdapat di Kota Surakarta sebesar 82,62. Perbandingan IPM Kabupaten Sragen dengan kabupaten/kota di Solo Raya bisa dilihat pada gambar.



Gambar 2.21
 Perbandingan IPM Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2021
 Sumber Data : BPS Jawa Tengah 2022

Dibandingkan IPM Jawa Tengah, IPM Kabupaten Sragen masih di atas rata-rata IPM Jawa Tengah yang mencapai 71,87. Perkembangan dan perbandingan angka IPM Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.22
 Perbandingan Perkembangan IPM Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021
 Sumber Data: BPS Jawa Tengah, 2022

Dibandingkan target RKPD, dari tahun 2017-2021, IPM Kabupaten Sragen selalu lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan kinerja IPM Kabupaten Sragen sangat baik. Selisih capaian terbesar

(1,88) terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi IPM sebesar 74,08 sedangkan target RKPD 72,20. Sedangkan selisih capaian terendah (0,81) terjadi pada tahun 2017 dengan realisasi IPM sebesar 71,39 dan target RKPD 72,20.

Tabel 2.16
Target dan Capaian IPM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Target RKPD	Sragen	Jawa Tengah	Nasional
2017	71,39	72,20	70,52	70,81
2018	71,69	72,96	71,12	71,39
2019	71,99	73,43	71,73	71,92
2020	72,10	73,95	71,87	71,94
2021	72,20	74,08	72,16	72,29

Sumber Data: BPS, 2022

Selanjutnya IPM Kabupaten Sragen tahun 2017-2021 dibandingkan dengan wilayah sekitar untuk melihat posisi pembangunan manusia Kabupaten Sragen diantara kabupaten/Kota lainnya sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Secara garis besar, capaian IPM Kabupaten Sragen lebih rendah dibanding rata-rata wilayah sekitar. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2017 dimana IPM Kabupaten Sragen 72,40 dan rata-rata wilayah sekitar 72,82 atau terdapat perbedaan 0,42. Pada tahun 2018 terjadi selisih terkecil dengan IPM kabupaten Sragen 73,17 dan rata-rata wilayah sekitar 72,96 atau tedapat selisih 0,21.

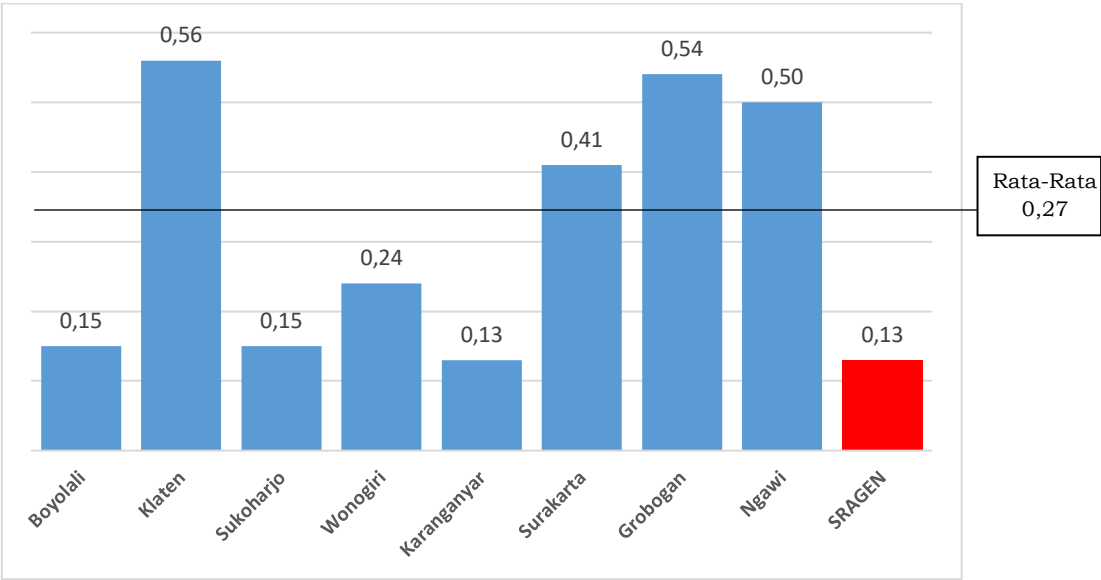
Tabel 2.17
IPM Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Boyolali	72,64	73,22	73,80	74,25	74,40
Klaten	74,25	74,79	75,29	75,56	76,12
Sukoharjo	75,56	76,07	76,84	76,98	77,13
Wonogiri	68,66	69,37	69,98	70,25	70,49
Karanganyar	75,22	75,54	75,89	75,86	75,99
Surakarta	80,85	81,46	81,86	82,21	82,62
Grobogan	68,52	68,87	69,32	69,86	69,87
Ngawi	68,96	69,27	69,91	70,41	70,54
Rata-Rata Wilayah	72,82	73,17	73,71	74,24	74,44
Sragen	72,40	72,96	73,43	73,95	74,08

Sumber Data: BPS, 2022

Berdasarkan gambar analisis pertumbuhan IPM Kabupaten Sragen dengan wilayah sekitar pada tahun 2020 dan tahun 2021 diketahui bahwa Kabupaten Sragen memiliki pertumbuhan paling kecil dibanding wilayah lain. Dengan pertumbuhan 0,13, Kabupaten Sragen bersama Karanganyar

menjadi daerah dengan peningkatan IPM paling rendah. Peningkatan tertinggi terdapat di Klaten sebesar 0,56. Selanjutnya Grobogan dan Ngawi masing-masing sebesar 0,54 dan 0,50. Gambaran tersebut menunjukkan perlunya upaya peningkatan IPM yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen agar dapat mempertahankan peringkatnya secara nasional dan provinsi karena daerah lain melakukan memiliki kinerja lebih baik berdasarkan pertumbuhan IPM. Lambat laun, jika kondisi tersebut terjadi, IPM Kabupaten Sragen akan semakin tertinggal.

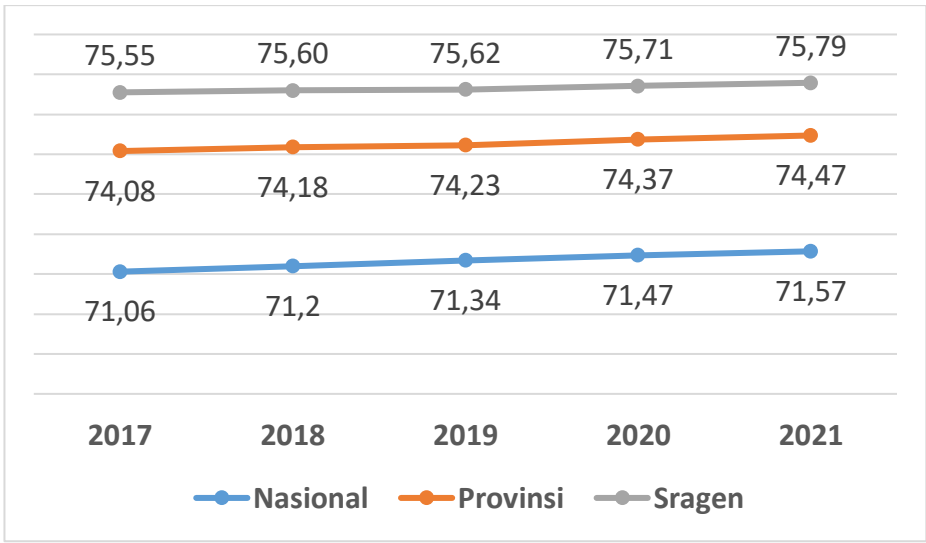


Gambar 2.23
Perbandingan Pertumbuhan IPM di Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2021
Sumber Data : BPS Jawa Tengah, 2022

Indikator komposit IPM terdiri dari: Usia Harapan Hidup (tahun) menggambarkan kualitas kesehatan penduduk; besarnya nilai Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (tahun) menggambarkan tingkat pendidikan; dan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi perkapita/bulan menggambarkan kesejahteraan.

1) Usia Harapan Hidup (UHH)

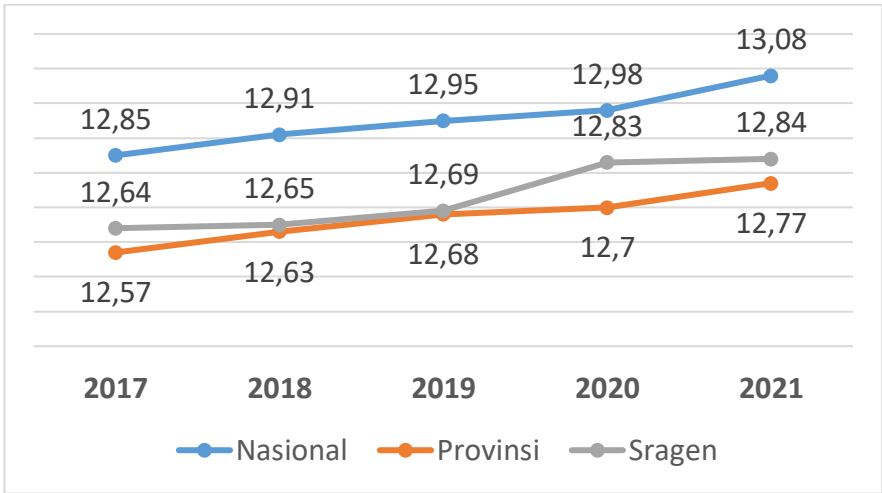
UHH adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data UHH di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021 UHH di Kabupaten Sragen sebesar 75,79 dan lebih tinggi dibanding nilai provinsi sebesar 74,47 dan nasional sebesar 71,57. Dibandingkan tahun 2020, nilai UHH Kabupaten Sragen meningkat 0,10% dan lebih rendah dibanding pertumbuhan UHH provinsi yang mencapai 0,10% dan pertumbuhan UHH nasional yang mencapai 0,10%.



Gambar 2.24
 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021
 Sumber Data : BPS, 2022

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

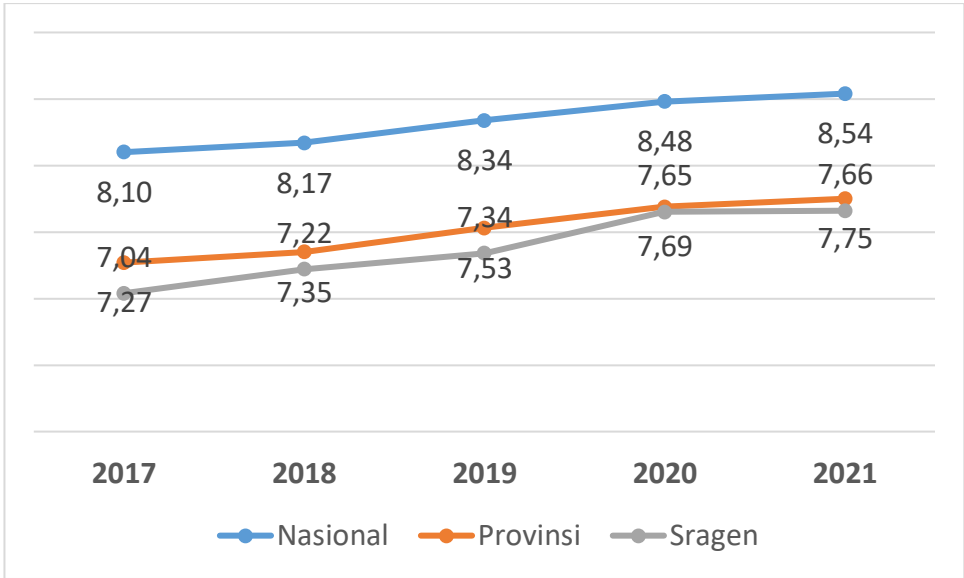
HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Pada tahun 2021 HLS di Kabupaten Sragen sebesar 12,84 dan lebih tinggi dibanding nilai provinsi sebesar 12,77 tapi lebih rendah dibanding nilai nasional sebesar 13,08. Dibandingkan tahun 2020, nilai HLS Kabupaten Sragen meningkat 0,01% dan lebih rendah dibanding pertumbuhan UHH provinsi yang mencapai 0,07% dan pertumbuhan UHH nasional yang mencapai 0,10%.



Gambar 2.25
 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021
 Sumber Data : BPS, 2022

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

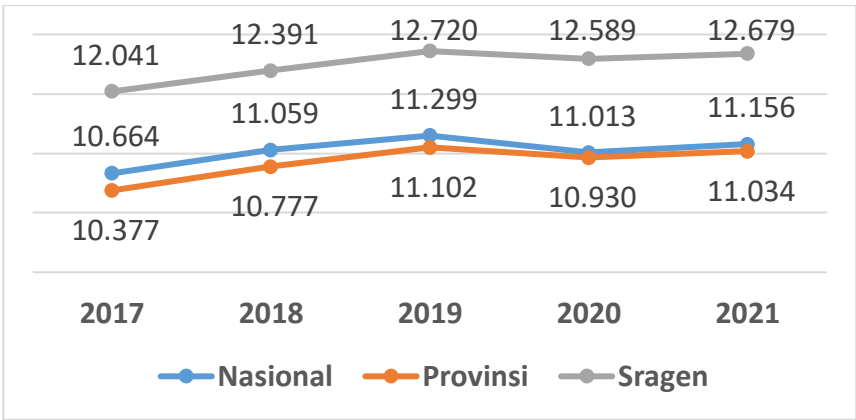
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional dari *United Nations Development Program* (UNDP). RLS Kabupaten Sragen pada tahun 2021 sebesar 7,75 tahun dan lebih rendah dibanding nilai provinsi sebesar 7,66 dan nilai nasional sebesar 8,54. Dibandingkan tahun 2020, rata-rata RLS Kabupaten Sragen meningkat 0,01 dan lebih rendah dibanding peningkatan RLS provinsi yang mencapai 0,06 dan peningkatan RLS nasional yang mencapai 0,06.



Gambar 2.26
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021
Sumber Data : BPS Jawa Tengah, 2022

4) Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Perkapita/tahun

Besarnya pengeluaran konsumsi perkapita dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan, dan menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Rata-rata pengeluaran perkapita Kabupaten Sragen pada tahun 2021 sebesar Rp 12.679.000 perkapita per tahun dan lebih tinggi dibanding nilai provinsi sebesar 11.034.000. Dibandingkan tahun 2020, rata-rata pengeluaran perkapita Kabupaten Sragen meningkat Rp 90.000% dan lebih rendah dibanding peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita provinsi yang mencapai Rp 104.



Gambar 2.27
Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021
Sumber Data : BPS, 2022

Selama periode 2017-2021, ketiga aspek pembentuk IPM Kabupaten Sragen meningkat menuju kondisi ideal. Namun demikian, pembangunan bidang pendidikan yang direpresentasikan oleh komponen RLS masih cukup jauh dari keadaan ideal dan nilainya dibawah nilai provinsi dan nasional. Oleh karena itu, program-program pembangunan pendidikan dasar perlu ditingkatkan untuk meningkatkan RLS agar lebih baik setidaknya lebih tinggi dari RLS provinsi. Capaian komponen-komponen pembentuk IPM Kabupaten Sragen selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Sragen Beserta Kompositnya Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	72.40	72.89	73.43	73.95	74.08
Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75.55	75.60	75.62	75.71	75,79
Harapan Lama Sekolah (HLS) (%)	12.64	12.65	12.69	12.83	12,84
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7.04	7.22	7.34	7.65	7,66
Pengeluaran (Rp. Juta/kapita)	12.04	12.39	12.72	12.58	12.68

Sumber Data : BPS Kabupaten Sragen, Tahun 2022

Aspek kesejahteraan masyarakat dilihat dari **Tingkat kemiskinan**. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen selama kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Jamkesmas, Jamkesda, Rastra dan beasiswa pendidikan untuk siswa ataupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

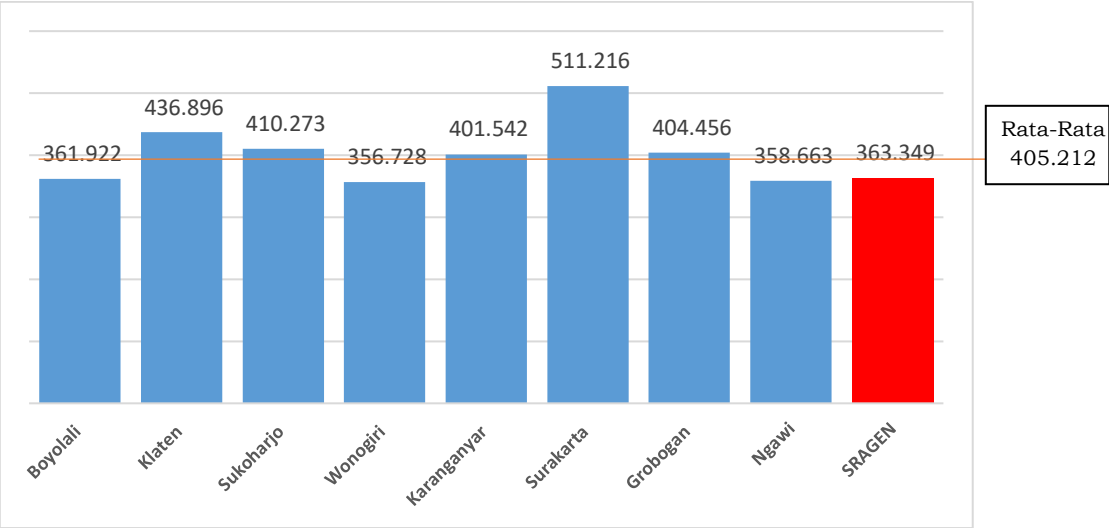
Garis kemiskinan merupakan ambang batas yang menentukan seseorang menjadi miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Sragen pada tahun 2021 sebesar Rp 363.349 meningkat Rp 14.459 dibanding tahun 2020 sebesar Rp 348.890. Selama kurun waktu lima tahun terakhir atau sejak tahun 2017, garis kemiskinan Kabupaten Sragen selalu naik tiap tahunnya. Perkembangan persentase tingkat kemiskinan selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.19
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sragen
Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Presentase penduduk miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp)
2017	124.010	14,02	292.544
2018	116.370	13,12	312.106
2019	113.833	12,79	335.334
2020	119.400	13,38	348.890
2021	122.910	13,83	363.349

Sumber Data : BPS Provinsi Jateng 2021

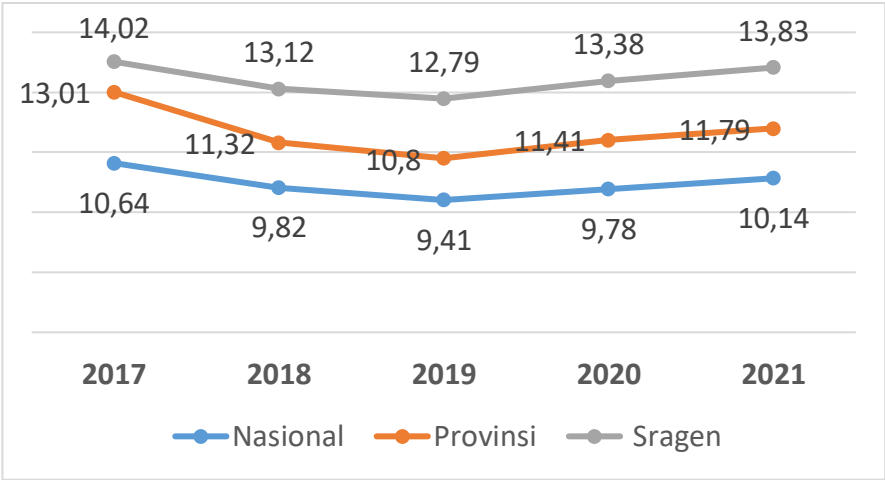
Dibandingkan wilayah sekitar, garis kemiskinan Kabupaten Sragen pada tahun 2021 termasuk dalam kategori menengah dan cenderung rendah. Dengan garis kemiskinan 363.349, Kabupaten Sragen memiliki garis kemiskinan dibawah rata-rata wilayah yang mencapai 405.212. Selain Kabupaten Sragen, lima daerah lainnya juga memiliki garis kemiskinan dibawah rata-rata wilayah yaitu Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan dan Ngawi. Hal tersebut mengindikasikan tingkat konsumsi minimal masyarakat Sragen relatif lebih sedang dibanding wilayah sekitar, dimana sebagian besar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan primer. Selanjutnya, garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk miskin.



Gambar 2.28
Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Sragen dan
Wilayah Sekitar Tahun 2021
Sumber Data : BPS Jawa Tengah,2022

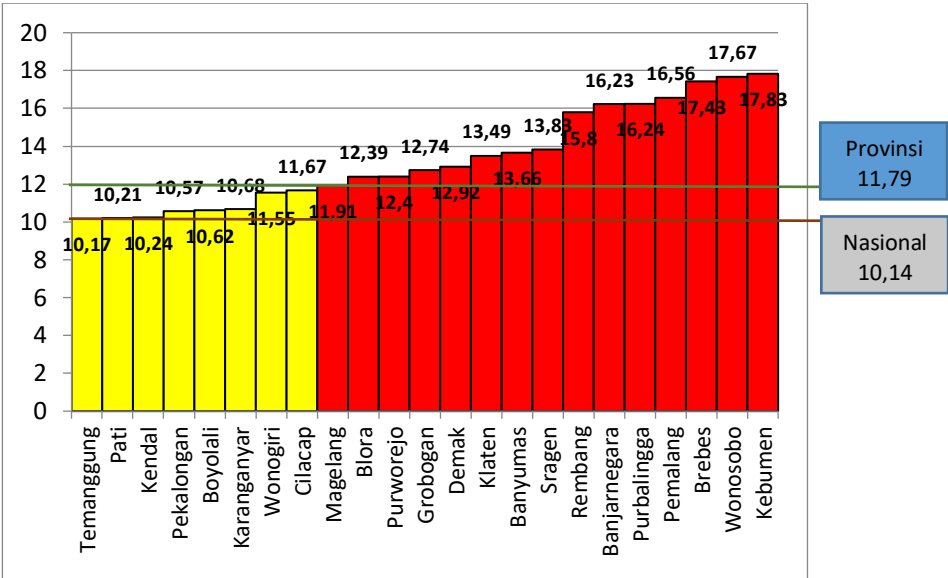
persentase penduduk miskin dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen mencapai 14,38% dan pada

tahun 2019 sebanyak 12,79%. Namun demikian, sejak tahun 2020 persentase penduduk miskin kembali naik menjadi 13,38% dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 13,83%. Peningkatan tersebut dipengaruhi pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat beraktivitas dari rumah dan menghindari kerumunan. Akibatnya, konsumsi masyarakat sebagai penggerak ekonomi berkurang drastis dan kemiskinan bertambah. Dibandingkan provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen sejak tahun 2016-2021 selalu lebih tinggi. Bahkan, persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen juga lebih tinggi dari angka nasional. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Sragen merupakan salah satu dari zona merah kemiskinan nasional dan provinsi sebagaimana terlihat pada gambar.



Gambar 2.29
Perbandingan Perkembangan persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021
Sumber Data : BPS, 2022

Gambar berikut menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen merupakan salah satu wilayah zona merah kemiskinan dengan tingkat kemiskinan melebihi tingkat kemiskinan provinsi dan nasional. Selain Kabupaten Sragen, terdapat 9 daerah lain diantaranya Klaten, Kebumen, Brebes, Purbalingga dll. Dengan selisih tingkat kemiskinan yang cukup besar dengan tingkat kemiskinan Jawa Tengah, tugas berat dihadapi Pemerintah Kabupaten Sragen untuk mengentaskan kemiskinan masyarakatnya.



Gambar 2.30
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota yang Lebih Tinggi
Dibanding Provinsi dan Nasional, Tahun 2021
Sumber Data : BPS, 2022

Selanjutnya kinerja penurunan penduduk miskin Kabupaten Sragen dibandingkan dengan target RKPD menunjukkan gambaran yang cukup baik. Meski di tahun 2017, realisasi belum mencapai target tapi pada tahun 2018 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Sragen dapat mencapai target. Di tahun tersebut, realisasi persentase penduduk miskin 13,12% dengan target RKPD 13,16% untuk tahun 2018 dan di tahun 2019 realisasinya mencapai 12,79% dengan target 12,86%. Namun demikian, pandemi Covid-19 menjadikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen naik lagi melebihi target. Demikian halnya dengan tahun 2021, capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen lebih tinggi dari target. Data target dan capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

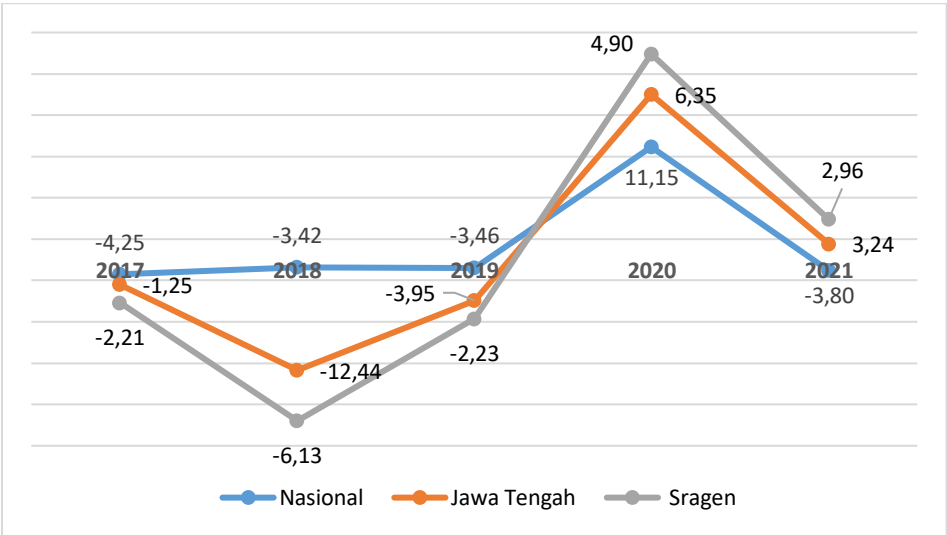
Tabel 2.20
Target dan Capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten
Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Target RKPD	Sragen	Jawa Tengah	Nasional
2017	13,86	14,02	13,01	10,12
2018	13,36	13,12	11,32	9,66
2019	12,86	12,79	10,80	9,22
2020	12,36	13,38	11,41	10,19
2021	11,86	13,83	11,79	9,71

Sumber Data : BPS-Bappeda Kab. Sragen, 2022

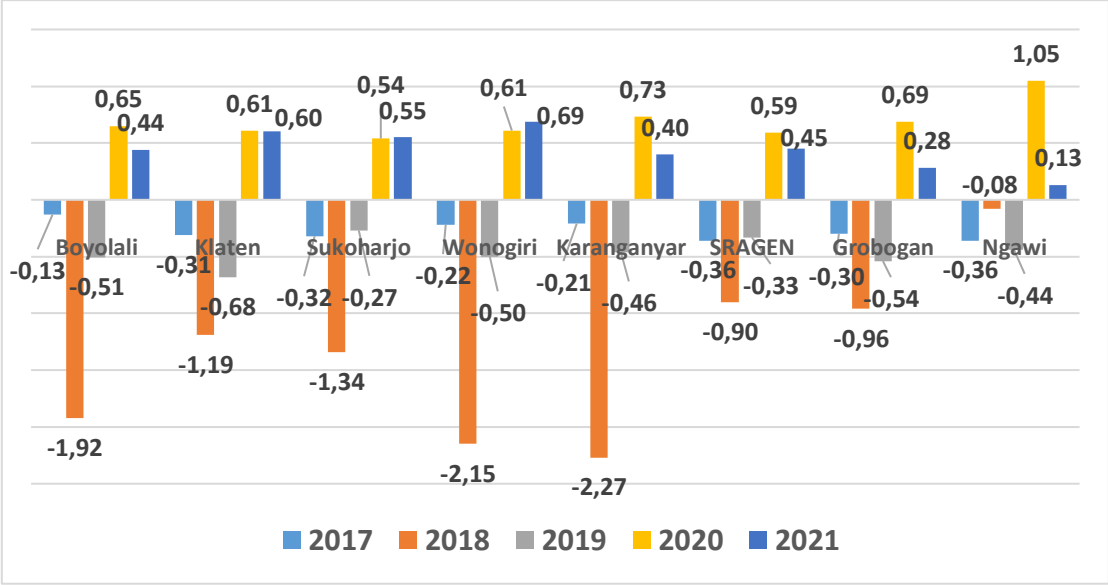
Analisis selanjutnya adalah membandingkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kabupaten Sragen dibandingkan provinsi dan nasional sebagaimana ditampilkan pada gambar. Dibandingkan provinsi dan nasional, kinerja penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Sragen relatif lebih baik. Pada periode 2017-2019, Sragen

memiliki nilai penurunan lebih kecil dibanding provinsi dan nasional. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021, terjadi peningkatan penduduk miskin baik di Sragen, provinsi maupun nasional yang utamanya disebabkan oleh keberadaan pandemi Covid-19 dan pertumbuhan di Sragen lebih tinggi. Artinya, upaya penanganan pandemi provinsi dan nasional lebih baik dibanding Sragen dalam mencegah terjadinya peningkatan penduduk miskin. Selanjutnya, kinerja penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Sragen juga dapat dilihat dengan membandingkan perubahan penduduk miskin dengan wilayah sekitar sebagaimana ditampilkan pada gambar.



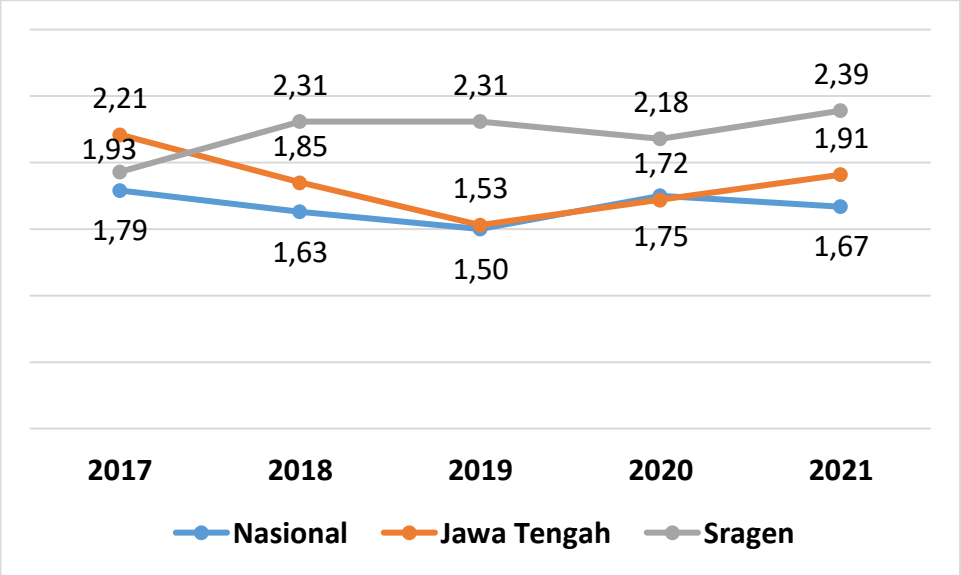
Gambar 2.31
Pertumbuhan Penduduk Miskin Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
dan Nasional Tahun 2017-2021
Sumber Data : BPS, 2022

Gambar selanjutnya menunjukkan perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa kinerja penurunan penduduk miskin Kabupaten Sragen perlu peningkatan terlihat dari masih rendahnya penurunan penduduk miskin di Kabupaten Sragen dibanding daerah lain.



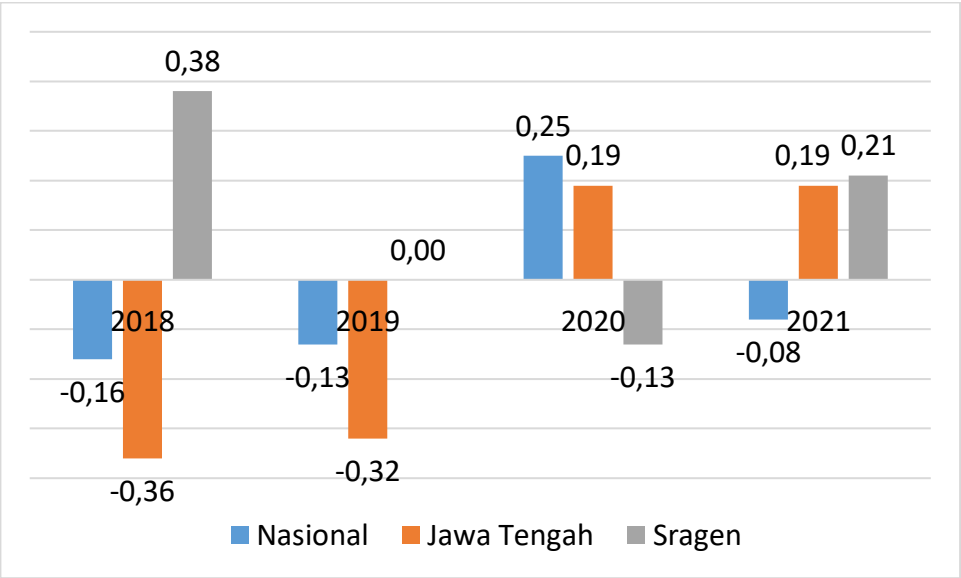
Gambar 2.32
Pertumbuhan Penduduk Miskin Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021
Sumber Data : BPS, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sragen pada Desember 2021 sebesar 2,39 dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebesar 2,18. Dibanding Jawa Tengah dan Nasional, sejak tahun 2018 P1 Kabupaten Sragen selalu lebih tinggi. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2019 dimana P1 Sragen mencapai 2,31 sedangkan P1 Jawa Tengah 1,53 dan P1 Nasional 1,50. Data P1 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.33
P1 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021
Sumber Data : BPS, 2022

Analisa pertumbuhan P1 menunjukkan bahwa pertumbuhan P1 Kabupaten Sragen cenderung tinggi dibanding Jawa Tengah dan Nasional. Pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2018 dimana P1 Kabupaten Sragen tumbuh 0,38 sedangkan Jawa Tengah dan Nasional tumbuh negatif masing-masing -0,16 dan -0,36. Pertumbuhan P1 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.34
Pertumbuhan P1 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018-2021
Sumber Data : BPS, 2022

Dibandingkan dengan wilayah sekitar, P1 Kabupaten Sragen sangat tinggi. Pada periode tahun 2017-2021, P1 Kabupaten Sragen selalu lebih tinggi dari rata-rata wilayah sekitar. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2019 dimana P1 Kabupaten Sragen 2,31 dan rata-rata P1 wilayah sekitar 1,35. Sejak tahun 2018-2021, nilai P1 Kabupaten Sragen merupakan yang tertinggi sedangkan pada tahun 2017 P1 Klaten merupakan yang tertinggi. Data P1 Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel.

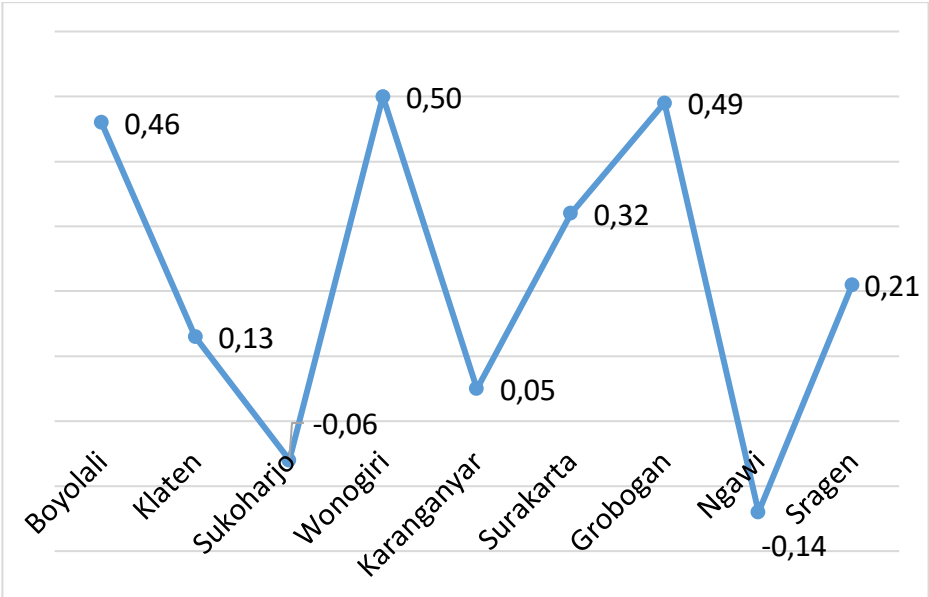
Tabel 2.21
P1 Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Boyolali	1,96	1,26	1,02	1,30	1,76
Klaten	2,46	1,72	1,46	1,66	1,79
Sukoharjo	0,93	0,97	0,87	0,97	0,91
Wonogiri	1,80	1,71	0,82	1,08	1,58
Karanganyar	1,85	1,70	1,45	1,56	1,61
Surakarta	1,87	1,47	1,60	1,51	1,83
Grobogan	2,03	1,67	0,90	1,17	1,66
Ngawi	1,98	1,96	2,65	2,37	2,23
Rata-rata	1,86	1,56	1,35	1,45	1,67
Sragen	1,93	2,31	2,31	2,18	2,39

Sumber Data : BPS, 2022

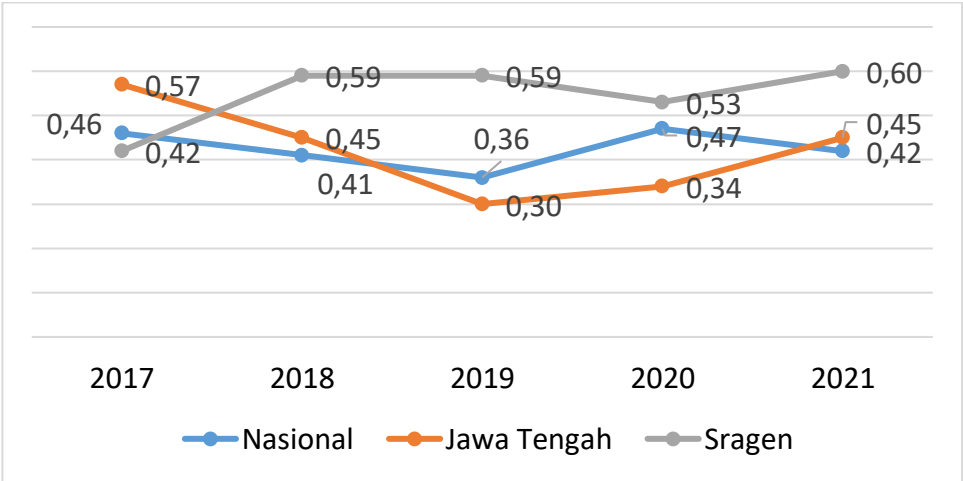
Analisa pertumbuhan P1 Kabupaten Sragen dan daerah sekitar menunjukkan pada tahun 2021, nilai Kabupaten Sragen relatif

terkendali. Dengan nilai 0,21 pertumbuhan P1 Kabupaten Sragen termasuk sedang. Pertumbuhan P1 tertinggi terdapat di Grobogan mencapai 0,49 sedangkan Boyolali mencapai 0,46. Pertumbuhan P1 terendah terdapat di Ngawi mencapai -0,14.



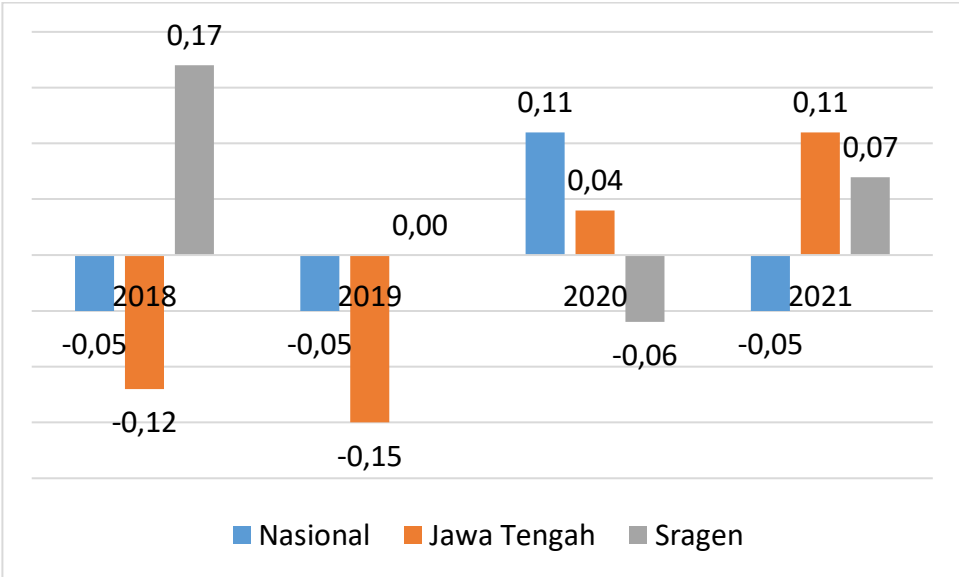
Gambar 2.35
 Pertumbuhan P1 Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar
 Tahun 2021
 Sumber Data : BPS, 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sragen pada Desember 2021 sebesar 0,60 dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang mencapai 0,53. Dibanding Jawa Tengah dan Nasional, sejak tahun 2018 P2 Kabupaten Sragen selalu lebih tinggi. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2019 dimana P2 Sragen mencapai 0,59 sedangkan P2 Jawa Tengah 0,30 dan P2 Nasional 0,36. Data P2 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.36
 P2 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional
 Tahun 2017-2021
 Sumber Data : BPS, 2022

Analisa pertumbuhan P2 menunjukkan bahwa pertumbuhan P2 Kabupaten Sragen cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021, P2 Kabupaten Sragen 0,07 lebih rendah dibanding Jawa Tengah yang mencapai 0,11 dan lebih tinggi dibanding Nasional yang mengalami pertumbuhan negatif -0,05. Pada periode 2018-2021, pertumbuhan tertinggi P2 Kabupaten Sragen terjadi pada tahun 2018 mencapai 0,17 sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 mencapai -0,06. Sedangkan Jawa Tengah mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 mencapai 0,11 dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2019 mencapai -0,15. Untuk Nasional, pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2020 dengan nilai 0,11 dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 dan 2018 mencapai -0,05. Pertumbuhan P2 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.37
Pertumbuhan P2 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018-2021
Sumber Data : BPS, 2022

Dibandingkan dengan wilayah sekitar, P2 Kabupaten Sragen sangat tinggi. Pada periode tahun 2018-2021, P2 Kabupaten Sragen selalu lebih tinggi dari rata-rata wilayah sekitar. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2019 dimana P2 Kabupaten Sragen 0,59 dan rata-rata P2 wilayah sekitar 0,29. Data P2 Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel.

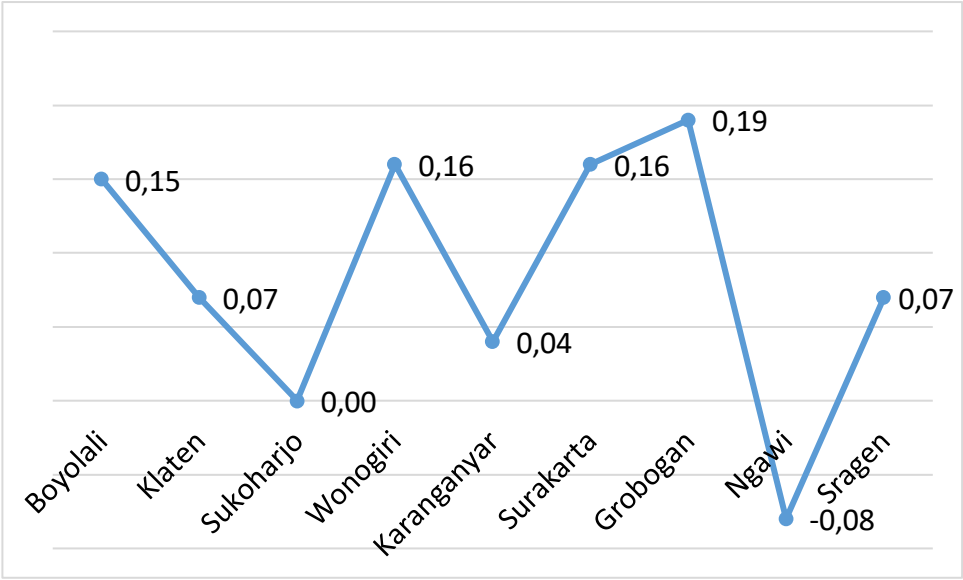
Tabel 2.22
P2 Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Boyolali	0,53	0,25	0,14	0,23	0,38
Klaten	0,61	0,38	0,27	0,31	0,38
Sukoharjo	0,17	0,17	0,14	0,21	0,21
Wonogiri	0,43	0,41	0,11	0,18	0,34
Karanganyar	0,43	0,43	0,35	0,33	0,37
Surakarta	0,44	0,35	0,48	0,38	0,54

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Grobogan	0,56	0,35	0,13	0,18	0,37
Ngawi	0,40	0,40	0,72	0,55	0,47
Rata-rata	0,45	0,34	0,29	0,30	0,38
Sragen	0,42	0,59	0,59	0,53	0,60

Sumber Data : BPS, 2022

Analisa pertumbuhan P2 Kabupaten Sragen dan daerah sekitar menunjukkan pada tahun 2021, nilai Kabupaten Sragen relatif terkendali. Dengan nilai 0,07 pertumbuhan P2 Kabupaten Sragen termasuk sedang. Pertumbuhan P2 tertinggi terdapat di Grobogan mencapai 0,19 sedangkan Boyolali mencapai 0,15. Pertumbuhan P2 terendah terdapat di Ngawi mencapai -0,08.



Gambar 2.38
 Pertumbuhan P2 Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar
 Tahun 2021
 Sumber Data : BPS, 2022

Sesuai Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Wakil Presiden, Nomor: B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022, Kabupaten Sragen termasuk dalam 19 daerah di Jawa Tengah yang menjadi sasaran prioritas pengentasan kemiskinan. Selain Kabupaten Sragen, daerah-daerah lainnya adalah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes.

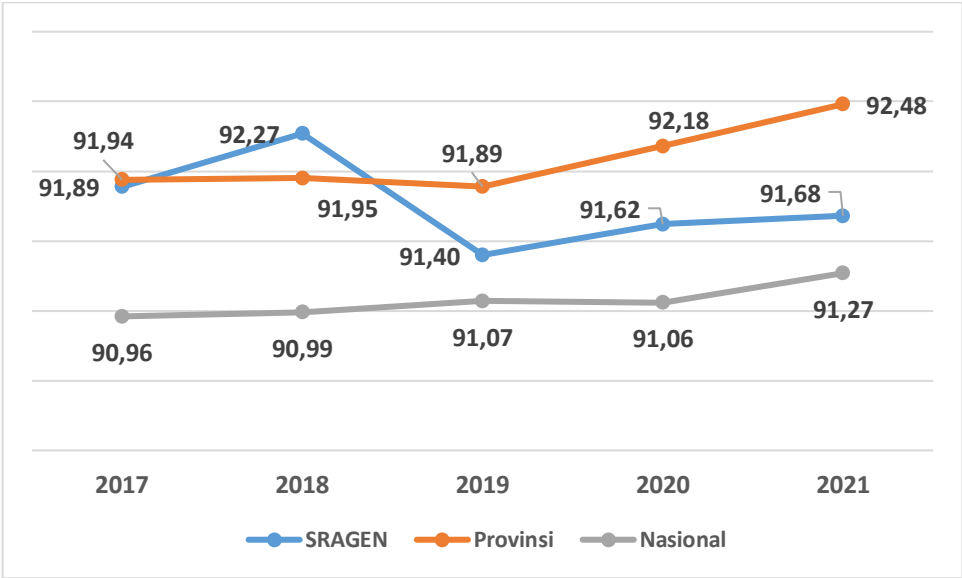
Berdasarkan surat edaran tersebut terdapat 309 keluarga yang termasuk dalam kelompok miskin ekstrem. Setelah melalui verifikasi dan validasi lapangan didapatkan terdapat 32 keluarga yang tidak ditemukan sehingga keluarga miskin ekstrem yang ada berjumlah 277 keluarga terdapat di 5 kecamatan dan tersebar di 25 desa. Guna mengatasi kemiskinan ekstrem tersebut, model penanggulangan yang dilakukan Kabupaten Sragen dengan memfokuskan pengentasan di

Desa Jabung Kecamatan Plupuh sebagai Pilot Project untuk kemudian direplikasi untuk desa-desa lain.

Aspek kesejahteraan masyarakat dari aspek **kesetaraan dan keadilan gender**. Kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia (sama seperti definisi IPM), namun terpilih berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100. Dikatakan tidak ada kesenjangan apabila nilai IPG sama dengan IPM.

Capaian IPG Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017-2021 cenderung turun. Pada tahun 2017 nilai IPG Kabupaten Sragen sebesar 91,94 dan pada tahun 2021 turun menjadi 91,68. Meskipun pada tahun 2018 nilai IPG Kabupaten Sragen sempat naik menjadi 92,27. Dibandingkan IPG Provinsi, IPG Kabupaten Sragen lebih rendah dengan selisih 0,80 sedangkan dibandingkan IPG Nasional IPG Kabupaten Sragen lebih tinggi dengan selisih 0,41.



Gambar 2.39
Perkembangan IPG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021
Sumber Data: BPS 2022

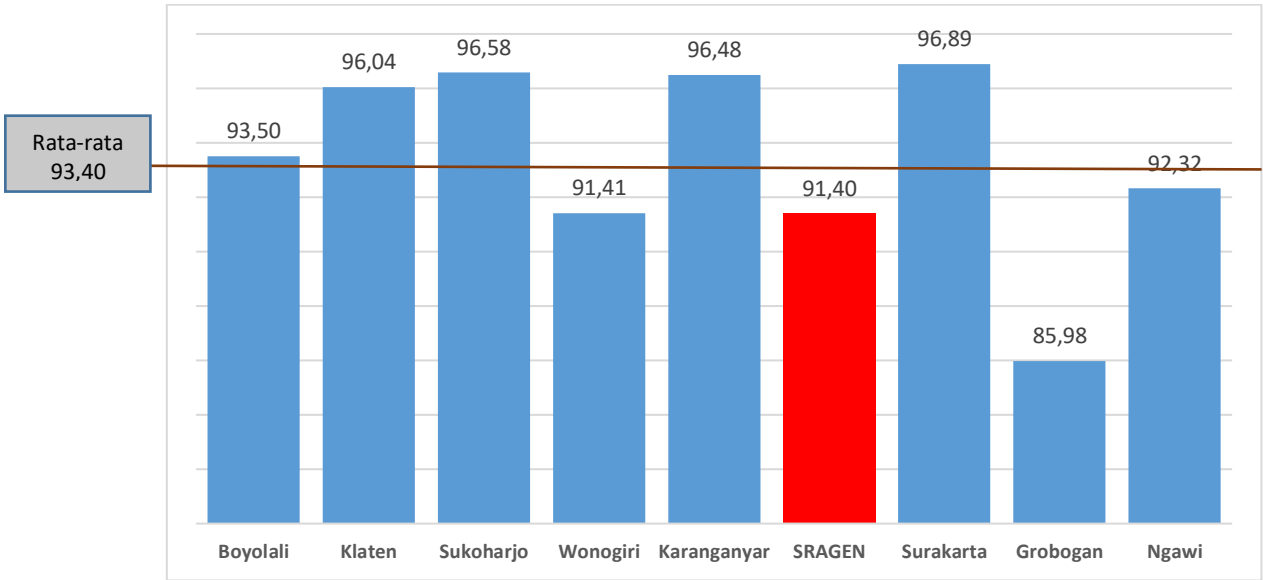
Dibandingkan target RKPD, kinerja IPG Kabupaten Sragen belum baik. Berdasarkan tabel berikut diketahui bahwa sejak tahun 2017-2021, capaian IPG Kabupaten Sragen masih dibawah target RKPD. Selain itu, mencermati IPG Jawa Tengah dan target RKPD terlihat bahwa target yang ada melebihi capaian Jawa Tengah. Hal tersebut mengisyaratkan perlunya mempertimbangkan capaian Jawa Tengah dan Nasional dalam menentukan target RKPD agar capaian berikutnya bisa memenuhi target.

Tabel 2.23
Target dan Capaian IPG Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Target RKPD	Sragen	Jawa Tengah	Nasional
2017	92,70	91,94	91,89	90,96
2018	92,89	92,27	91,95	90,00
2019	93,08	91,40	91,89	91,07
2020	93,27	91,62	92,18	91,06
2021	93,46	91,68	91,27	92,48

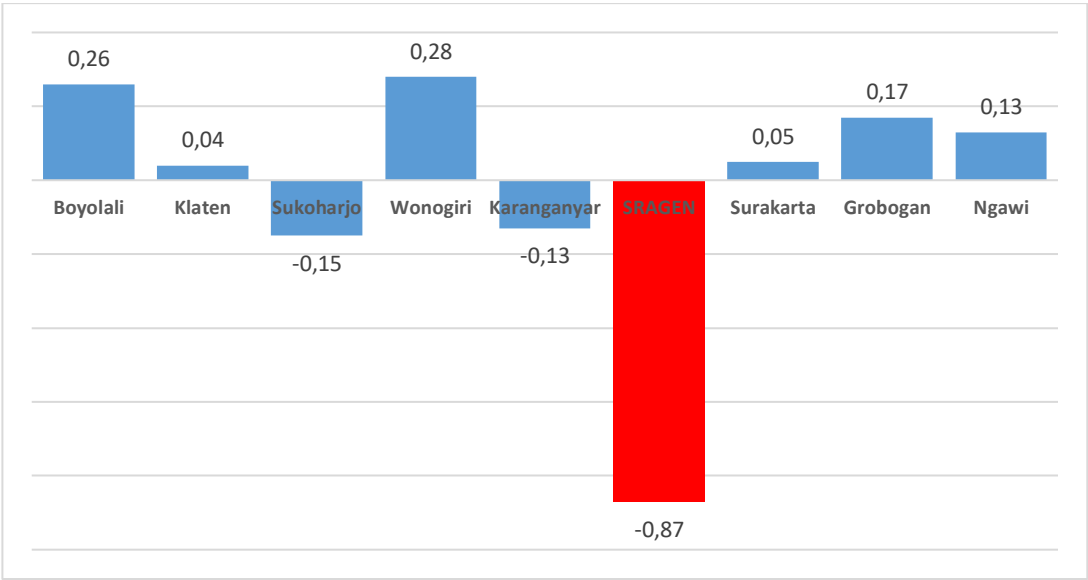
Sumber Data: BPS 2022

Gambar selanjutnya tentang perbandingan IPG Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar. Dibandingkan wilayah sekitar, IPG Kabupaten Sragen merupakan yang terendah kedua setelah Grobogan yang memiliki IPG 85,98. IPG tertinggi dimiliki Surakarta dengan nilai 96,89. Selanjutnya Sukoharjo, Karanganyar dan Klaten masing-masing 96,58 untuk Sukoharjo, 96,48 untuk Karanganyar dan 96,04 untuk Klaten. Keempat daerah tersebut memiliki IPG pada kisaran 96-an. Selisih IPG Kabupaten Sragen yang berada pada kisaran 91-an cukup besar dibandingkan dengan keempat daerah tersebut. IPG Kabupaten Sragen juga lebih rendah dari nilai IPG rata-rata yang mencapai 93,40.



Gambar 2.40
IPG di Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar
Tahun 2021
Sumber : BPS , 2022

Selanjutnya membandingkan pertumbuhan IPG Kabupaten Sragen dengan wilayah sekitar. Pertumbuhan IPG Kabupaten Sragen di Tahun 2021 turun drastis mencapai -0,87 dengan nilai IPG pada tahun 2020 sebesar 92,27 dan pada tahun 2021 mencapai 91,40. Nilai pertumbuhan tersebut merupakan penurunan paling besar dibanding daerah lain. Selain Kabupaten Sragen, Sukoharjo dan Karanganyar juga mengalami penurunan tapi lebih kecil masing-masing -0,15 untuk Sukoharjo dan -0,13 untuk Karanganyar.



Gambar 2.41
Pertumbuhan IPG Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar
Tahun 2021
Sumber Data: BPS , 2022

Indikator komposit IPG hampir sama dengan indikator komposit IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Sumbangan Pendapatan. Namun demikian, dalam IPG, indikator komposit masing-masing nilai terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk melihat tingkat kesenjangannya. Tabel 2.32 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 capaian UHH perempuan sebesar 77,54 tahun lebih tinggi dibandingkan UHH laki laki sebesar 73,91 tahun. Kondisi tersebut juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada tiga indikator lainnya yaitu HLS, RLS dan Pengeluaran Per Kapita, capaian perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kondisi tersebut juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Khususnya pada indikator sumbangan pendapatan dapat dipengaruhi akibat kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki. Untuk melihat secara rinci capaian komposit IPG Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel.

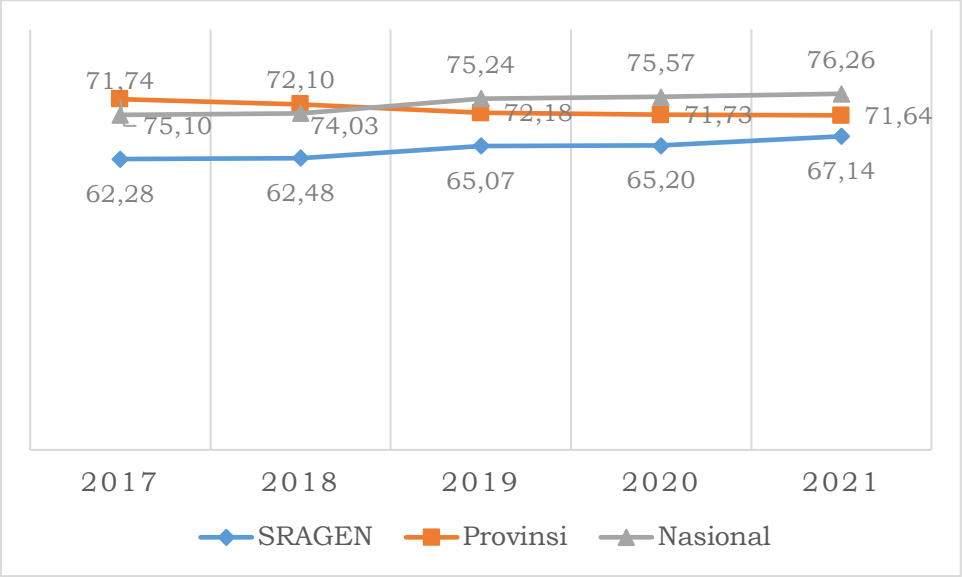
Tabel 2.24
Perkembangan Indikator Komposit IPG Kabupaten Sragen
Tahun 2017-2020

No	Indikator	2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	UHH	73,69	77,38	73,74	77,43	73,76	77,45	73,91	77,54
2	HLS	12,46	12,65	12,47	12,65	12,82	12,66	12,85	12,82
3	RLS	7,84	6,3	7,89	6,6	8,12	6,61	8,41	6,93
4	Pengeluaran per kapita	16.236	10.985	16.660	11.180	17.164	11.422	16.975	11.292

Sumber Data: BPS , 2021

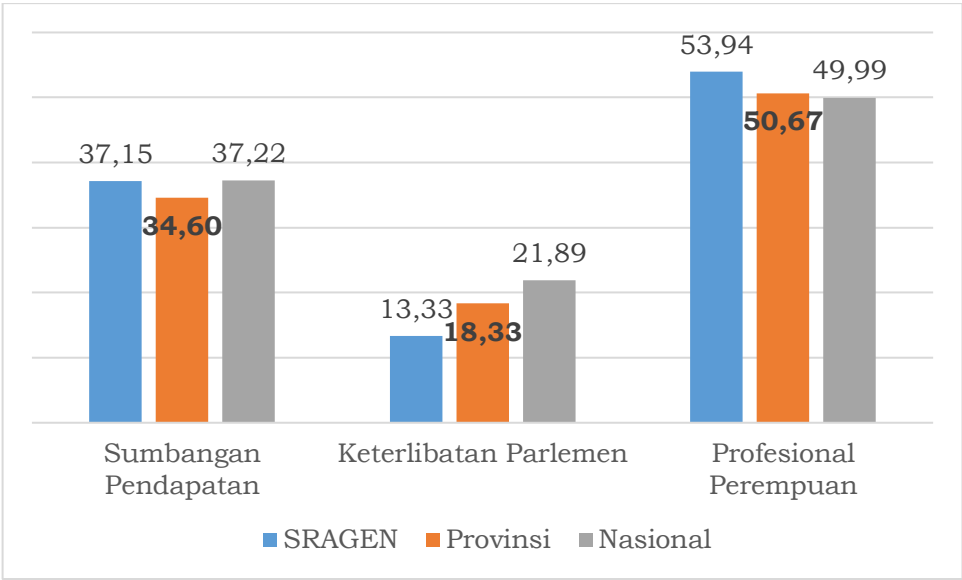
Indeks Pemberdayaan Gender atau disingkat IDG merupakan angka pembentuk yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat

mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. IDG Kabupaten Sragen dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2017 sebesar 62,28 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 67,14. Hal tersebut relevan dengan kondisi Nasional yang terus meningkat menjadi 76,26 pada tahun 2021 sedangkan IDG Provinsi pada tahun 2021 justru turun menjadi 71,64. Peningkatan IDG Kabupaten Sragen yang terjadi tiap tahun dirasa masih kurang signifikan karena nilai IDG Kabupaten Sragen masih dibawah IDG Provinsi meski sejak tahun 2017 IDG Provinsi terus mengalami penurunan. Perkembangan IDG tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.42
IDG Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021
Sumber Data: BPS , 2022

Selanjutnya, analisis perbandingan IDG Kabupaten Sragen, Provinsi, dan Nasional beserta dengan komponennya di tahun 2021 menunjukkan bahwa kondisi keterlibatan perempuan di Parlemen perlu lebih ditingkatkan lagi. Berdasarkan gambar diketahui bahwa diantara ketiga komponen pembentuk IDG, komponen keterlibatan perempuan di parlemen yang ada di Kabupaten Sragen lebih rendah dibanding nilai Provinsi dan Nasional. Sebaliknya, jumlah profesional perempuan dan besaran sumbangan pendapatan oleh perempuan cukup baik.



Gambar 2.43
Komponen IDG Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional
Tahun 2021
Sumber : BPS , 2022

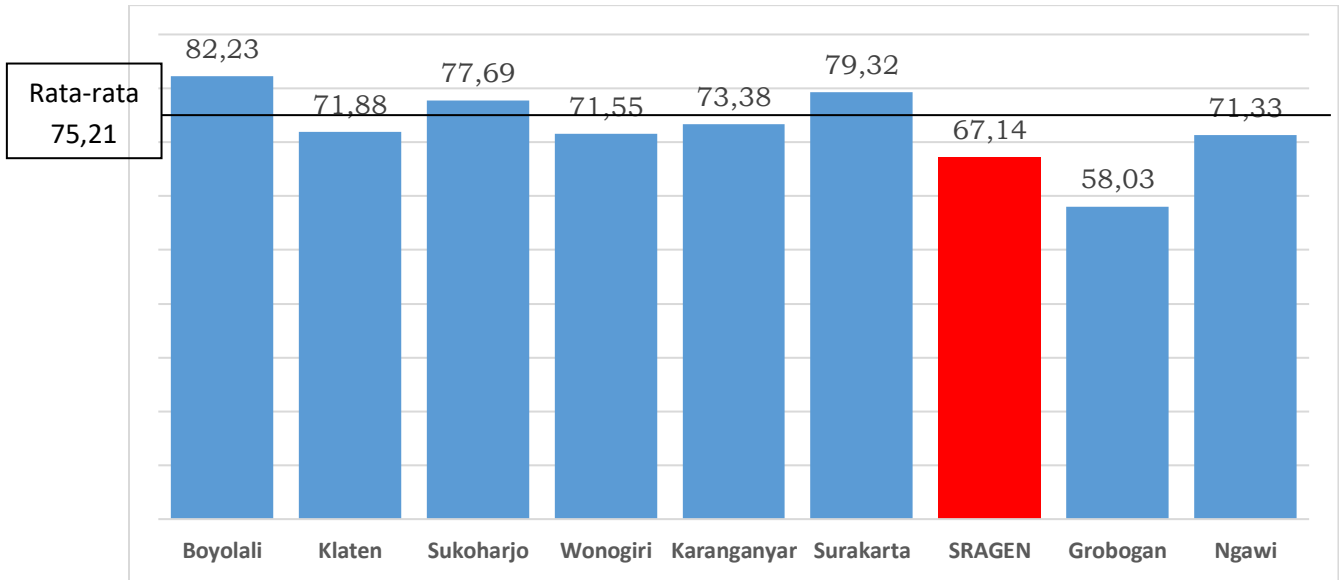
Jika dibandingkan dengan target RKPD, IDG Kabupaten Sragen cukup baik. Meski tahun 2017 dan 2018 capaian IDG Kabupaten Sragen belum memenuhi target RKPD tapi sejak tahun 2019 sampai dengan 2021, target yang ada terlampaui. Selisih terkecil antara target dan realisasi terjadi pada tahun 2020 dimana targetnya 64,75 sedangkan capaiannya 65,20 sehingga terdapat selisih 0,45. Sebaliknya tahun 2021 merupakan selisih terbesar dengan target 65,25 dan capaian 67,14 sehingga terdapat perbedaan 1,89. Target dan Capaian IDG Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.25
Target dan Capaian IDG Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional
Tahun 2017-2021

Tahun	Target RKPD	Sragen	Provinsi	Nasional
2017	63,25	62,28	75,10	71,74
2018	63,75	62,48	74,03	72,10
2019	64,25	65,07	72,18	75,24
2020	64,75	65,20	71,73	75,57
2021	65,25	67,14	71,64	76,26

Sumber Data: BPS , 2022

Gambar berikutnya menunjukkan perbandingan IDG Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar pada tahun 2021. Gambar tersebut menunjukkan IDG Kabupaten Sragen termasuk kelompok terendah. IDG tertinggi terdapat di Boyolali sebesar 82,23 selanjutnya Surakarta dengan nilai 79,32. IDG Kabupaten Sragen juga dibawah rata-rata wilayah yang mencapai 75,21.



Gambar 2.44
IDG Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2021
Sumber Data: BPS , 2022

Selanjutnya, menganalisis IDG Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar dalam lima tahun terakhir yaitu 2017-2021. Selama periode tersebut IDG Kabupaten Sragen lebih rendah dibanding rata-rata wilayah sekitar. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2019 dimana IDG Kabupaten Sragen 65,07 dan rata-rata IDG wilayah sekitar 73,31 sehingga terdapat selisih 8,24. Sedangkan selisih terendah terdapat pada tahun 2017 dimana IDG Kabupaten Sragen 62,28 dan rata-rata IDG wilayah sekitar 67,81 artinya terdapat selisih 5,53. IDG Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
IDG Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar
Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Boyolali	66,28	65,61	81,88	81,95	82,23
Klaten	59,60	60,25	72,35	69,42	71,88
Sukoharjo	76,11	76,17	78,52	77,98	77,69
Wonogiri	64,04	63,80	71,88	71,56	71,55
Karanganyar	74,27	80,51	74,76	74,29	73,38
Surakarta	77,25	77,10	77,88	79,42	79,32
Grobogan	56,01	53,70	56,31	57,18	58,03
Ngawi	68,93	70,95	72,89	72,88	71,33
Rata-Rata Wilayah	67,81	68,51	73,31	73,09	73,18
Sragen	62,28	62,48	65,07	65,20	67,14

Sumber Data: BPS , 2022

Dalam peningkatan kualitas perempuan di Kabupaten Sragen dilihat dari indikator komposit IDG dari tahun 2017 hingga tahun 2021, keterlibatan perempuan di parlemen cenderung meningkat, yaitu dari 8,89% di tahun 2017 meningkat 13,33% di tahun 2021.

Dilihat dari indikator komposit perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi nilainya cenderung turun. Pada tahun 2017 persentasenya sebesar 51,68 dan berkurang menjadi 48,95% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 naik 53,94%.

Sebaliknya indikator komposit Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 persentasenya sebesar 37,13 dan meningkat menjadi 37,18% pada tahun 2018 selanjutnya turun menjadi 37,15 pada tahun 2021. Data indikator komposit IDG Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.27
Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Sragen
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	8,89	8,89	11,11	11,36	13,33
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	51,68	50,20	49,03	48,95	53,94
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	37,13	37,11	37,18	37,14	37,15

Sumber Data: BPS , 2022

Predikat Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya, baik itu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Sejak tahun 2008, Kabupaten Sragen sudah berkomitmen untuk menjadikan wilayah ini sebagai Kabupaten Layak Anak yaitu:

- 1. Tahun 2008 sebagai Inisiator KLA
- 2. Tahun 2009, 2012, 2013 dan 2018 KLA Tingkat Pratama
- 3. Tahun 2019, 2020, 2021 Tingkat Madya

Implementasi KLA di Kabupaten Sragen yang meliputi :

- 1. **Penguatan kelembagaan Kabupaten Layak Anak** sesuai Perda nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan KLA telah dibentuk Gugus tugas KLA, RAD KLA, Profil Anak, APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak), Pembentukan dan optimalisasi Forum Anak baik kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, Peningkatan peran lembaga masyarakat, dan dunia usaha dengan adanya perjanjian kerja sama, CSR dsb, Kerjasama dengan akademisi (Universitas Sebelas Maret Surakarta), Pelatihan-pelatihan Konvensi Hak Anak.

Tahun 2021 terdapat 20 Kecamatan Layak Anak dan 128 Desa/Kelurahan Layak Anak.

2. Hak Sipil dan Kebebasan

Terkait dengan pemenuhan hak sipil anak, Kabupaten Sragen telah melakukan:

- Kemudahan kepemilikan akte kelahiran bagi anak-anak terlantar dan SE Bupati Sragen akte gratis tanpa kecuali
- Pemenuhan ILA dengan menyediakan perpustakaan (712 perpustakaan keliling, taman baca dan **di masa pandemi ada inovasi E-Perpustakaan**, dan layanan WIFI terbatas di Fasilitas Umum dan Ruang bermain ramah anak
- Kabupaten Sragen sudah memiliki **PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak)** yang terstandarisasi oleh Kementerian PPPA tingkat Pratama Yaitu Perpustakaan Daerah Kab. Sragen
- Forum Anak/Kelompok anak diberikan kesempatan dan didorong untuk berpartisipasi di setiap kluster dalam KLA, diantaranya dalam Musrenbang, penyusunan RKPD, Monev IPS, Psikososial Sebaya dsb

3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pernikahan Usia Anak Perda No 9 Tahun 2018 tentang KLA pasal 18 dan SE Bupati **“Jo Kawin Bocah”**. Usaha-Usaha untuk mencegah antara lain Pelatihan Pra Nikah untuk Remaja (Kemenag) sosialisasi (DPPKBPPPA, Kemenag, P2TP2A, PKK, Aisyah, Forum Anak dll).

- Terdapat beberapa Lembaga Konsultasi Keluarga: PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) (1), PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) (1), LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga), BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja, Posyandu Remaja).
- Kabupaten Sragen memiliki 15 Lembaga Pengasuhan Alternatif/LKS yang sudah terakreditasi, meningkat dari Tahun 2021 yang berjumlah 8
- Adanya PAUD HI(Ditetapkan dengan SK Kepala Dinas, Pelatihan KHA bagi Pengampu PAUD)
- RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak)
Ada beberapa RBRA (Krido Anggo, Sukowati, Alun2, GOR, Edupark, Taman Harmoni, dsb), di tingkat Kecamatan dan Desa memiliki RBRA dan, di semua RBRA merupakan KTR dan punya akses dan Fasilitas Bagi anak Disabilitas,

- RASS (Rute Aman Selamat Sekolah) dengan adanya Jalur Sepeda, ZOSS, Zebra cross dsb

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- Perwujudan Wajar 12 Tahun oleh pemerintah didukung oleh Lembaga masyarakat, adanya beasiswa, dan PKBM
- Adanya Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan. Adanya Sekolah ADIWIYATA, Sekolah Sehat, Sekolah Inklusi, Sekolah Tanpa Kekerasan, Guru Terlatih KHA, Papan SRA kurang lebih 95 %, Persentase jumlah SRA Tingkat PAUD= 90.%, SD= 90%, SMP/SMA= 90%.
- Kabupaten Sragen memiliki 4 Pusat Kreativitas anak (PKA) yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas PERKIM, Pelatihan PKH bagi pengelola PKA, PKA bisa diakses semua anak, Pengawasan dilakukan Dewan Pendidikan, Dewan Kesenian Daerah Sragen, Lembaga Masyarakat yang berkontribusi adalah FKMETRA (Forum Komunikasi Media Tradisional)

5. Perlindungan Khusus

- Pencegahan dalam Perlindungan Khusus dan Layanan bagi Anak Korban dengan:

Pembentukan P2TP2A, PKSAI, LK3, P4A Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta pembentukan Desa Save4 C (15 desa); PKS P2TP2A dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan; MOU P2TP2A dengan LAPAS

- Pembebasan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)

Untuk pencegahan Pembentukan Satgas Penanganan BPTA, Penyusunan SOP Penarikan Pekerja Anak dan Perda Perlindungan Tenaga Kerja

- Situasi Darurat (Anak Korban Pornografi, Napza, HIV/AIDS, Bencana, Konflik)

- Pemberian layanan Anak Korban Covid bekerja sama dengan UNICEF melakukan asesment dan psikososial terhadap anak Yatim Piatu/Yatim/Piatu karena Covid, yang juga melibatkan konselor sebaya dari Forum Anak Vaksinasi Covid untuk anak
- Penanganan Anak Korban HIV/AIDS kerjasama dengan KPAI (Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia) dan Yayasan SPASI

- Pelayanan Anak Penyandang Disabilitas, minoritas dan Perilaku menyimpang:

PLA (Pusat Layanan Autis), Adanya layanan pendidikan bagi anak Disabilitas, Fasilitas kantor, Umum dsb yang Ramah Disabilitas, Forum Buah Hati, Peksos *Go To School*, Rumah singgah untuk PSM

- Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Tahun 2020: 4 anak, Tahun 2021: 16 anak (12 kasus kekarantinaan/prokes). Dilakukan kesepakatan dan dikembalikan pada orangtua.

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Pada Desember 2021 Kabupaten Sragen (dengan pendekatan Kota Surakarta) mengalami inflasi sebesar 0,71, angka tersebut merupakan inflasi bulanan tertinggi selama tahun 2021 sedangkan inflasi terendah pada tahun 2021 terjadi pada bulan Juni mencapai -0,22 atau dengan kata lain terjadi deflasi. Sedangkan inflasi tahunan pada tahun 2021 sebesar 2,58 dan lebih tinggi dibanding inflasi tahun 2020 yang mencapai 1,38. Dibanding provinsi dan nasional, inflasi di Sragen lebih tinggi baik untuk inflasi bulan desember tahun 2021 maupun inflasi tahun 2021. Data inflasi bulan desember tahun 2021 dan inflasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.28
Kondisi Jalan kabupaten Tahun 2016-2021

Uraian	Inflasi Tahun 2021	
	Desember	Tahunan
Sragen (Surakarta)	0,71	2,58
Provinsi	0,64	1,70
Nasional	0,57	1,87

Sumber Data: BPS, 2022

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Layanan umum bidang infrastruktur ditandai dengan kondisi jalan Kabupaten dan jembatan. Panjang jalan Kabupaten tahun 2021 kurang lebih 1.020,25 km, meliputi 445,72 km jalan aspal dan 565,37 km jalan beton dan 9,16 km jalan batuan.

Kondisi jalan Kabupaten Sragen Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 2.29
Kondisi Jalan kabupaten Tahun 2016-2021

Kondisi Jalan Kabupaten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%
Baik	474,00	46,46	607,19	59,51	742,71	72,80	780,37	76,49	798,237	78,24	808,105	79,21
Sedang	72,63	7,12	45,21	4,43	66,13	6,48	64,16	6,29	59,707	5,85	58,672	5,75

Kondisi Jalan Kabupaten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%
Rusak Ringan	298,47	29,25	148,67	14,57	127,65	12,51	103,04	10,10	97,330	9,54	92,087	9,03
Rusak Berat	175,15	17,17	219,18	21,48	83,76	8,21	72,68	7,12	64,975	6,37	61,385	6,02

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, 2021

Sampai dengan Desember tahun 2021, panjang jalan kondisi baik 808,105 Km atau 79,21%, kondisi sedang 58,672 km atau 5,75%, rusak ringan 92,087 km atau 9,03% dan rusak berat 61,386 Km atau 6,02%. Jika disandingkan dengan target capaian di RPJMD prosentase jalan dengan kondisi mantab tahun 2021 sebesar 80,85%. Kondisi mantap adalah kondisi jalan baik dan sedang maka capaian jalan kondisi baik 79,21% dan sedang 5,75% totalnya mencapai 84,96% sehingga melebihi target 4,11%.

Sedangkan jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.30
Kondisi Jembatan Tahun 2016-2021

Kondisi Jembatan Kabupaten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Baik	268	89,93	269	90,27	271	90,94	272	91,28	272	91,28	273	91,61
Sedang	17	5,70	15	5,03	14	4,70	14	4,70	14	4,70	14	4,69
Rusak Ringan	8	2,68	8	2,68	7	2,35	7	2,35	7	2,35	6	2,01
Rusak Berat	5	1,68	6	2,01	6	2,01	5	1,68	5	1,68	5	1,68

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, 2021

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa jumlah jembatan di Kabupaten Sragen sebanyak 298 unit terdiri dari kondisi baik 273 unit atau 91,61%, kondisi sedang 14 unit atau 4,69%, kondisi rusak ringan 6 unit atau 20,39% dan rusak berat 5 unit atau 1,68%. Sedangkan pembangunan jembatan di akhir RPJMD tahun 2021 ditargetkan 93,85%.

Infrastruktur pertanian berupa kondisi jaringan irigasi tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.31
Kondisi saluran irigasi Tahun 2019 dan 2021

Kondisi saluran irigasi Kabupaten	2019		2020		2021	
	m	%	m	%	m	%
Baik	217.876	82,55	206.905	78,40	207.655	78,68
Sedang	33.101	12,54	29.258	11,09	27.181	10,299
Rusak Berat	12,939	4,9	27.752	10,52	29.079	11,019

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, 2021

Panjang saluran irigasi teknis di 2021 adalah 263.915 meter terdiri dari panjang jaringan irigasi primer 63.132 meter dan panjang saluran irigasi sekunder 200.783 meter. Dimana panjang saluran irigasi kondisi baik adalah 207.655 meter atau 78,68%, kondisi sedang 27.181 meter atau 10,299%, dan kondisi rusak berat 29.079 meter atau 11,019%.

Selain itu, kondisi layanan infrastruktur di Kabupaten Sragen juga dapat dilihat dari capaian indeks bina marga SDA, indeks keciptakaryaan dan indeks penataan ruang. Indeks Bina Marga SDA mengukur kualitas kondisi jalan dan kualitas kondisi irigasi. Sedangkan, indeks keciptakaryaan mengukur capaian air minum dan penanganan air limbah, kualitas drainase, penataan bangunan gedung dan lingkungannya, serta pembinaan jasa konstruksi.

Tabel 2.32
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Indikator Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan air minum pedesaan	104,07	104,06	100,40	105,51
2	Pelayanan sanitasi berbasis masyarakat	102,73	100,01	100,09	116,70

Pada tahun 2021, capaian indeks Bina Marga SDA sebesar 79% dan indeks ciptakarya sebesar 69, oleh karena itu ditargetkan pada tahun 2022 indeks ini dapat meningkat sebesar 2-3%.

Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan indeks yang mencerminkan capaian bidang penataan ruang yang mengukur perencanaan tata ruang dan kepatuhan pemanfaatan ruang. Indeks kepatuhan pemanfaatan ruang mewakili rasio penilaian KKPR dan rasio kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pengukuran terbaru yang dimiliki oleh bidang penataan ruang. Pada tahun 2021, semua KKPR yang diterbitkan telah sesuai dengan tata ruang yang sudah ditetapkan, dan diharapkan pada tahun- tahun selanjutnya hal tersebut tidak berubah.

Layanan umum bidang pendidikan. Kewenangan bidang pendidikan pada kabupaten/kota adalah pada pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal. Dalam Pengelolaan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal, pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal; pemberian ijin pendirian PAUD, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan Non Formal (kursus).

Sebagai bentuk komitmen pemerintah pada pengembangan akses dan mutu PAUD, pada tahun 2013 Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang bertujuan menjamin: (a) terpenuhinya

kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur; serta (b) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD. Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu kelembagaan PAUD telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Sejalan dengan kebijakan di tingkat Pusat, Pemerintah Kabupaten Sragen juga telah berupaya menyediakan dan mengembangkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan PAUD.

Data jumlah sekolah, murid dan guru menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Sragen tahun ajaran 2016/2017- 2020/2021 sebagai berikut.

Tabel 2.33
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2012/2013 s.d. 2017/2018

Uraian	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021
Jumlah Sekolah:	1.384	1.348	1.481	1.495	1.486
• TK/RA	531	581	617	628	622
• SD/MI	646	646	657	656	657
• SLTP/MTs	119	121	121	121	120
• SLTA/MA/SMK	88	*)	86	90	87
Jumlah Murid:	14.283	10.890	12.891	13.575	13.736
• TK/RA	1.411	1.537	1.691	2.036	1.567
• SD/MI	6.756	6.144	5.831	6.209	6.483
• SLTP/MTs	3.066	3.209	2.817	2.778	2.852
• SLTA/MA/SMK	3.050	*)	2552	2.552	2.834
Jumlah Guru:	189.321	153.957	194.318	198.396	193.814
• TK/RA	18.991	21.772	22.775	23.963	22.341
• SD/MI	89.012	88.874	88.602	87.546	86.131
• SLTP/MTs	43.706	43.311	43.250	43.733	43.710
• SLTA/MA/SMK	37.612	*)	39691	43.154	41.632

Sumber Data: BPS, 2021

*)Tidak tersedia data SLTA karena sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sragen tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 2.34
Capaian Indikator SPM Pelayanan Pendidikan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja			2021		
				Target	Realisasi	% capaian
1	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota					
		1.	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen.			
			a. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak < 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	96	96	100,00
			b. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak < 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	94	94	100,00
		2.	Jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar untuk SD dan MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP dan MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas.			
			a. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan tidak melebihi 32 orang untuk SD/MI	98	98	100,00
			b. Setiap rombongan belajar SD/MI telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi dan papan tulis.	100	100	100,00
			c. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan tidak melebihi 36 orang SMP/MTs.	99	99	100,00
			d. Setiap rombongan belajar SMP/MTs telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi dan papan tulis.	100	100	100,00
		3.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 orang siswa dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demostrasi dan eksperimen peserta didik.			
			a. Di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium yang dilengkapi meja dan kursi cukup untuk 36 peserta didik	90,0	90	100,00
			b. Di setiap SMP/MTs memiliki satu set peralatan IPA untuk demontrasi dan eksperimen peserta didik	87,0	87	100,00
		4	Di setiap SD dan MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan disetiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.			
			a. Di setiap SD dan MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya	99	99	100,00
			b. Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	98	98	100,00
		5.	Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru setiap satuan pendidikan.			
			a. Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik	90	90	100,00
			b. Di setiap SD dan MI Tersedia 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru untuk setiap satuan pendidikan.	87	87	100,00

No.	Indikator Kinerja		2021		
			Target	Realisasi	% capaian
	6.	Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap kelompok mata pelajaran.			
	a.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	89	89	100,00
	7.	Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.			
	a.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV	93	93	100,00
	b.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang yang telah memiliki sertifikat pendidik.	88	88	100,00
	8.	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 49% dan 20%			
	a.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak $\geq 70\%$ (untuk daerah khusus $\geq 40\%$)	91	91	100,00
	b.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik $> 35\%$ (untuk daerah khusus $> 20\%$)	91	91	100,00
	9.	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris			
	a.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.	88	88	100,00
	10.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.			
	a.	Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	95	95	100,00
	11.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.			
	a.	Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	95	97	102,11
	12.	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.			
	a.	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah/ madrasah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100	100	100,00
	13.	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif			
	a.	Kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu	96	96	100,00

No.	Indikator Kinerja			2021		
				Target	Realisasi	% capaian
			satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.			
			b. Kabupaten/kota memiliki rencana tetapi belum melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	82	82	100,00
			c. Kabupaten/kota tidak memiliki rencana untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	0		
		14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan di lakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan			
			a. Setiap SD/MI mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama <u>> 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.</u>	95	95	100,00
			b. Setiap SMP/MTs mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama <u>> 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.</u>	98	98	100,00
2	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan					
		15.	Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah di sertifikasi oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik			
			a. Buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS) yang disediakan sekolah sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah.	98	98	100,00
			b. Perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	90	90	100,00
		16.	Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah di sertifikasi oleh pemerintah mencakup mata pelajaran dengan perbandinga satu set untuk setiap peserta didik			
			a. Buku teks semua yang disediakan sekolah sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah.	98	98	100,00
			b. Perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	96	96	100,00
		17.	Setiap SMP dan MTS menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster IPA			
			a. Setiap SD?MI memiliki satu set alat peraga IPA secara lengkap.	93	93	100,00
		18.	Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.			
			a. Setiap SD/MI memiliki 100 judul pengayaan dan 10 buku referensi	94	94	100,00
			b. Setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	90	90	100,00
		19.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk 24 jam tatap muka di dalam kelas, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan			

No.	Indikator Kinerja			2021		
				Target	Realisasi	% capaian
			kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.			
			a. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	90,00	90	100,00
			b. Setiap guru tetap SD/MI bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	90,00	90	100,00
			c. Setiap guru tetap SMP/MTs bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	93,00	93	100,00
		20.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran di satuan pendidikan selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :			
			Kelas I : 18 jam per minggu	90	90	100,00
			Kelas II : 18 jam per minggu	90	90	100,00
			Kelas II : 24 jam per minggu	90	90	100,00
			Kelas IV-VI : 27 jam per minggu	90	90	100,00
			Kelas VII-IX : 27 jam per minggu	90	90	100,00

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kab.Sragen, 2021

Dari 20 indikator Bidang Pendidikan, semuanya sudah mencapai mencapai 100%. Bahkan terdapat indikator yang memiliki realisasi lebih dari 100% yaitu indikator kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik memiliki realisasi 102,11%.

Layanan umum bidang kesehatan. Terdapat beberapa keterkaitan dan beberapa aspek yang dapat mendukung meningkatnya kinerja yang dihubungkan dengan pencapaian pembangunan kesehatan, diantaranya adalah: 1. Indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir, yang terdiri dari indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas dan status gizi, 2. Indikator hasil antara yang terdiri atas indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup masyarakat, akses dari mutu pelayanan kesehatan serta 3. Indikator proses dan masukan yang terdiri dari indikator-indikator untuk pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan dan kontribusi sektor terkait.

Dari 25 Puskesmas yang ada, semua sudah terakreditasi dan sudah on-line serta sudah melayani UGD 24 jam. 10 puskesmas dia antaranya sudah melaksanakan pelayanan rawat inap sehingga penanganan medis dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat.

Dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi dan Balita telah dilaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta penyuluhan oleh tenaga kesehatan dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten dan juga di rumah sakit, namun masih terjadi kematian ibu yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kasus pendarahan, pre-eklamsi/eklamsi, infeksi, penyakit kronis dan penyakit degeneratif.

Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Sragen hingga akhir November 2021 mencapai 35 kasus. Jumlah kasus kematian ibu meningkat 59,09% dibandingkan kasus AKI pada 2020 yang hanya 22 kasus. Sementara angka kematian bayi/balita (AKB) 2021 turun 16,67% bila dibandingkan 2020. Kasus AKB hingga November 2021 sebanyak 80 kasus. Sedangkan kasus AKB 2020 sebanyak 96 kasus. Sebanyak 35 kasus AKI itu terdiri atas 25 kasus disebabkan karena Covid-19 dan 10 kasus lainnya karena preeklamsia, jantung, paru-paru, dan pendarahan. Kasus AKB pada November 2021 sebanyak 80 kasus. Kasus AKB itu lebih banyak daripada kasus AKI. Sementara jumlah AKB pada 2019 lebih banyak, sampai 141 kasus. Angka tersebut turun pada 2020 menjadi 96 kasus dan di 2021 turun lagi. Salah satu upaya untuk menekan kasus kematian bayi/balita dengan menggiatkan air susu ibu (ASI) eksklusif. Masyarakat dan kader kesehatan juga memiliki peran yang penting dalam mengenali masalah kesehatan yang terjadi, yaitu sebagai motor penggerak di masyarakat untuk mensosialisasikan penanggulangan kematian Ibu dan bayi. Selain itu, resiko kematian Ibu akibat kehamilan atau persalinan dapat ditekan jika ibu mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

Peran serta masyarakat di bidang kesehatan dapat dilihat dari jumlah posyandu balita. Sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat 1.585 posyandu yang tersebar di 208 desa dan kelurahan. Untuk meningkatkan kekebalan pada bayi dari penyakit dilakukan pencegahan dengan imunisasi (PD3I).

Peningkatan pelayanan kesehatan semakin ditingkatkan pada tahun 2013-2020 terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, yang pengelolaan administrasinya ditangani oleh UPTPK melalui pemberian jaminan kesehatan daerah di samping program jamkesmas yang didanai dari APBN. Untuk penanganan Covid-19, hingga Desember 2021 kondisi menunjukkan kondisi yang cenderung melandai. Data terakhir Januari 2022 menyebutkan bahwa Sragen masuk dalam kategori penularan rendah. Meskipun demikian, ancaman varian baru Omicron semakin mengkhawatirkan. Hingga Januari 2022, tercatat 800 kasus pada minggu ke-2. Jumlah tersebut didominasi berasal dari warga yang bepergian ke negara dengan kasus Omicron tinggi. Upaya percepatan vaksinasi menjadi salah satu cara guna menekan penyebaran varian ini. Adanya program tuntas vaksin, capaian cakupan vaksinasi Covid-19 di Sragen mengalami peningkatan signifikan.

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen sebelum program tuntas vaksin, cakupan vaksinasi Covid-19 untuk dosis 1 mencapai 78,21% (606.736 warga), dosis 2 mencapai 72,89% (565.456 warga). Kemudian untuk lansia, dosis 1 mencapai 73,28% (87.192 warga), untuk dosis 2 mencapai 66,92% (79.623 warga). Sementara cakupan vaksinasi per 27 Desember 2021 atau setelah dilakukannya program ini, dosis 1 mencapai 87,65% (679.960 warga) dan dosis 2 73,85% (572.915 warga). Kemudian untuk lansia dosis 1 mencapai 76,87% (91.463 warga) dan dosis 2 mencapai 68,11% (81.044 warga).

Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sragen tahun 2018-2021 sebagai berikut.

Tabel 2.35
Capaian Indikator SPM Pelayanan Kesehatan Tahun 2021 (%)

No.	Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89,68	93,36	93,91	95,50
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99,96	99,97	99,97	99,89
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98,60	99,97	99,52	99,35
4	Pelayanan Kesehatan Balita	99,53	99,86	94,60	96,75
5	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Dasar	100,09	97,12	16,03	100,00
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 - 59) thn	69,85	52,07	5,26	98,10
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut > 60 Tahun	56,27	30,42	11,59	95,05
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	42,42	86,40	9,19	86,57
9	Pelayanan Kesehatan penderita DM	95,46	47,02	119,22	78,14
10	Penderita Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	97,36	93,65	22,37	17,43
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	98,86	98,47	97,84	98,21
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	99,13	44,66	93,91	95,50

Sumber Data: DKK Kab. Sragen, 2021

Layanan umum bidang Perumahan. Dalam upaya penyediaan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas PMD, MATRA dan BAZIS Kabupaten Sragen melalui berbagai program dan kegiatan. Pada Tahun 2015 jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen berdasarkan data PPLS adalah 51.885 unit, sementara berdasarkan data PBDT 2015 yang dijadikan acuan perhitungan SPM Perumahan adalah 44.588 unit.

Sementara Jumlah Rumah layak huni pada Tahun 2016 berdasarkan pendataan Bappeda Tahun 2016 adalah 168.236 unit.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah layak huni serta perbaikan RTLH sebanyak 3.007 unit yang bersumber dana dari APBN, DAK, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten, Dana Desa dan CSR (Matra dan Lembaga swasta). Melalui program dan berbagai sumber dana yang sama, 1.703 unit RTLH juga telah dibantu pemugarannya pada tahun 2018. Sedangkan untuk Tahun 2019 RTLH yang tertangani sebanyak 1.835 unit dengan program dan kegiatan yang sama. Pada Tahun 2020 Jumlah rumah tidak layak huni tertangani dengan program dan kegiatan yang sama sebanyak 1.149. Untuk Tahun 2021 RTLH yang tertangani sebanyak 671 unit dengan sumber dana yang sama dengan tahun - tahun sebelumnya. sehingga dalam kurun waktu Tahun 2016–2021 jumlah RTLH Kabupaten Sragen yang tertangani sebanyak 10.829 unit. Pada akhir Tahun 2021 jumlah Rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen adalah 33.579 unit dan Jumlah rumah layak huni sebesar 229.661 unit.

Tabel 2.36
Penanganan RTLH Kabupaten Sragen dari Sumber Dana APBD
Tahun 2021

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH ANGGARAN
1	Karangpelem	Kedawung	3	22,500,000.00
2	Karangudi	Ngrampal	3	22,500,000.00
3	Gondang	Gondang	1	7,500,000.00
4	Srimulyo	Gondang	2	15,000,000.00
5	Mlale	Jenar	1	7,500,000.00
6	Dawung	Jenar	2	15,000,000.00
7	Gentanbanaran	Plupuh	2	15,000,000.00
8	Gedongan	Plupuh	3	22,500,000.00
9	Jekawal	Tangen	2	15,000,000.00
10	Katelan	Tangen	1	7,500,000.00
11	Gemantar	Mondokan	2	15,000,000.00
12	Sumberejo	Mondokan	1	7,500,000.00
13	Donoyudan	Kalijambe	1	7,500,000.00
14	Jetiskarangpung	Kalijambe	2	15,000,000.00
15	Bukuran	Kalijambe	1	7,500,000.00
16	Blimbing	Sambirejo	1	7,500,000.00
17	Jambeyan	Sambirejo	1	7,500,000.00

18	Mojorejo	Karangmalang	3	22,500,000.00
19	Sepat	Masaran	3	22,500,000.00
20	Pantirejo	Sukodono	3	22,500,000.00
21	Jenalas	Gemolong	2	15,000,000.00
22	Tegaldowo	Gemolong	1	7,500,000.00
23	Genengduwur	Gemolong	2	15,000,000.00
24	Kwangen	Gemolong	3	22,500,000.00
25	Krikilan	Masaran	5	37,500,000.00
26	Banaran	Sambungmacan	1	7,500,000.00
27	Karanganyar	Sambungmacan	2	15,000,000.00
28	Sambiduwur	Tanon	2	15,000,000.00
29	Gading	Tanon	1	7,500,000.00
30	Ngargotirto	Sumberlawang	2	15,000,000.00
31	Kacangan	Sumberlawang	1	7,500,000.00
JUMLAH			60	450,000,000.00

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sragen

Tabel 2.37
 Penanganan RTLH Kabupaten Sragen dari Sumber Dana CSR
 Tahun 2021

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH ANGGARAN	CSR
1	Jekani	Mondokan	2	Rp 14,000,000	RTLH BAZNAS
2	Jekani	Mondokan	1	Rp 5,000,000	RTLH PDAM
3	Jekani	Mondokan	5	Rp 25,000,000	RTLH PMI
4	Jekani	Mondokan	1	Rp 5,000,000	RTLH PT. ZAIN PUTRA MANDIRI
5	Tlogotirto	Sumberlawang	5	Rp 25,000,000	RTLH PMI
6	Tlogotirto	Sumberlawang	2	Rp 10,000,000	RTLH BAZNAS
7	Tlogotirto	Sumberlawang	1	Rp 5,000,000	RTLH PDAM
8	Tlogotirto	Sumberlawang	1	Rp 5,000,000	RTLH PT. ZAIN PUTRA MANDIRI
9	Ngrombo	Tangen	5	Rp 25,000,000	RTLH PMI
10	Ngrombo	Tangen	1	Rp 5,000,000	RTLH PT. ZAIN PUTRA MANDIRI

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH ANGGARAN	CSR
11	Ngrombo	Tangen	1	Rp 5,000,000	RTLH PDAM
12	Ngrombo	Tangen	2	Rp 14,000,000	RTLH BAZNAS
JUMLAH			27	143,000,000.00	

Sumber : UPTPK, 2021

Berdasarkan indeks penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pada tahun 2021, capaian rasio antara jumlah rumah layak huni dan luas kawasan kumuh yang tertangani adalah sebesar 43,4%. Indeks tersebut merupakan salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur capaian penanganan kawasan kumuh yang masuk dalam SK Penetapan Lokasi Kumuh Kabupaten Sragen dan mengukur capaian penanganan rumah tidak layak huni yang berada di kawasan permukiman kumuh.

Capaian Indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2018- 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.38
 Capaian Indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2021 (%)

No	Indikator Kinerja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100,00	99,50	97,14	94,70
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	100,00	121,53	120,90	118,02
3	Sampah yang terangkut di wilayah pelayanan	67,55	65,89	71,00	72,94
4	Sampah yang terolah	14,58	15,32	17,15	19,51

Sumber Data: Disperkim dan Dinas LH Kab. Sragen, 2021

Pelayanan persampahan masih harus didorong peningkatannya, baik dalam pengangkutan maupun dalam pengolahannya.

Layanan umum bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kabupaten Sragen termasuk wilayah yang aman dan kondusif. Beberapa peristiwa demonstrasi dan kejahatan lainnya dapat tertangani dengan baik dan tanpa gejolak. Hal tersebut karena dukungan dan peran masyarakat dan aparaturnya yang cukup positif bagi penciptaan lingkungan yang tertib dan nyaman.

SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sragen, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Capaian Indikator SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2021 sebagai berikut.

Tabel 2.39
 Capaian Indikator SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2021 (%)

No.	Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan penegakan perda dan perkada (100%) Th 2015	88,84	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan patroli siaga tibus tranmas (3 x patroli dalam sehari) Th. 2014)	2,74	12,56	13,92	5,88
3	Cakupan rasio petugas Linmas (1 org/RT) Th. 2014)	100,00	100,00	100,00	122,26
4	Pelayanan informasi rawan bencana	100,00	100,00	100,00	
5	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	100,00	100,00	
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	100,00	100,00	
7	Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	100,00	100,00	100,00	

Sumber Data: Satpol PP dan BPBD Kab. Sragen, 2021

Layanan umum bidang Sosial. Kabupaten Sragen merupakan salah satu daerah yang bebas pengemis, gelandangan dan anak jalanan pada titik-titik lampu merah jalan raya. Hal tersebut tak luput dari peran Dinas Sosial dan Perangkat Daerah terkait dalam penertiban PMKS tersebut. Pembinaan terhadap PMKS juga dilaksanakan secara aktif dalam rangka mengurangi penyakit masyarakat (Pekak) yang ada.

Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Sragen tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.40
 Capaian Indikator SPM Bidang Sosial Tahun 2018-2021

No.	Indikator Kinerja SPM Bidang Sosial	2018	2019	2020	2021
1	% PMKS yang Ditangani = (target jumlah PMKS yang ditangani/jumlah total PMKS) x 100%	88,67	88,57	80,00	106,20
2	% Penanganan PPKS yang mendapat rehabilitasi sosial	23,00	66,90	72,20	100,00
3	% Pemberian Asistensi Lanjut Usia Dan Asistensi orang dengan kecacatan	21,00	100,00	100,00	100,00
4	% Penyandang cacat fisik mental serta lanjut usia yang mendapat pembinaan	3,00	12,75	9,05	8,21
5	Sarana Panti asuhan / panti jompo yang memperoleh sarana prasarana	100,00	100,00	100,00	100,00
6	% penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya) yang telah terbina	0,23	100,00	100,00	0,00
7	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terawat	100,00	100,00	100,00	100,00
8	% PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	38,00	50,00	66,60	71,42

Sumber Data: Dinas Sosial, 2021

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Aspek daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

a. Pertanian.

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan di Jawa Tengah. Produk pertanian yang terutama adalah pertanian tanaman pangan terutama padi, di samping tanaman pangan lainnya.

Tabel 2.41
Capaian Produksi Pertanian Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi pertanian tanaman pangan utama (ton)						
	a) Padi	654.672	646.039	634.455	649.401	668.553	703.460
	b) Jagung	158.211	165.617	164.393	173.312	181.827	155.444
	c) Kedelai	9.266	5.117	13.251	8.245	704	1.364
2	Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (ton)						
	d) Mangga	6.521	24.387	14.307	13.623	18.207	12.891
	e) Cabe	3.465	2.173	3.011	2.384	3.047	3.123
	f) Bawang merah	2.027	2.823	2.348	1.382	2.057	2.237

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

Produksi padi pada tahun 2021 berkisar 703.460 ton, mengalami peningkatan dari tahun 2020 berkisar 668.553 ton atau naik 5,22%. Sedangkan produksi padi pada tahun 2020 berkisar 668.553 ton, mengalami peningkatan dari tahun 2019 berkisar 649.401 ton atau naik 2,9%. Kabupaten Sragen masih merupakan salah satu lumbung pangan nasional, terutama padi.

Salah satu indikator indeks daya saing daerah adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP di Jawa Tengah yang menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, sebagai berikut.

Tabel 2.42
Perkembangan NTP Jawa Tengah 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
NTP	101,49	103,48	103,64	106,00	101,49	103,18

Sumber Data: BPS, 2021

Penjelasan mengenai besaran NTP sebagai berikut.
NTP > 100 berarti petani mengalami surplus, yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani meningkat;
NTP = 100 berarti petani mengalami impas (BEP), yang menunjukkan bahwa tidak ada perubahan tingkat kesejahteraan petani;

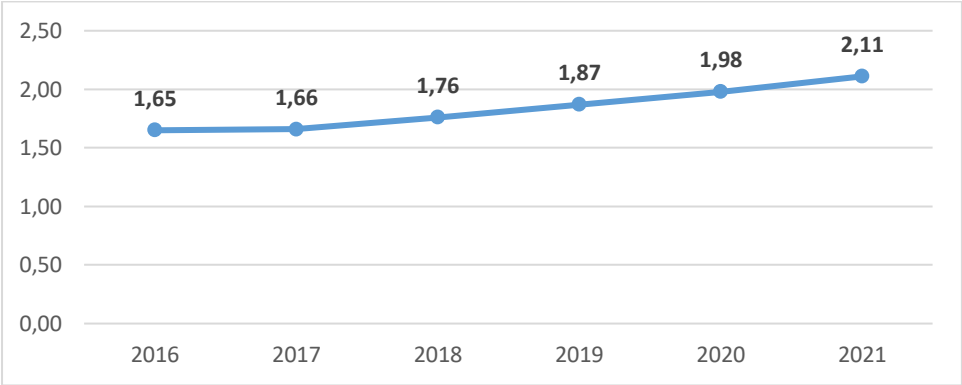
NTP < 100 berarti petani mengalami defisit, yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani menurun.

Data NTP Jawa Tengah per Desember 2021 sebesar 103,18 dan NTP per Desember 2020 sebesar 101,49 atau naik 1,69. Sedangkan NTP Jawa Tengah per Desember 2020 sebesar 101,49 dan NTP per Desember 2019 sebesar 106. Dengan demikian dalam periode 2019-2020, NTP mengalami penurunan 4,51. Kenaikan NTP Jawa Tengah dalam periode 2020-2021 diharapkan berimbang pada meningkatnya keberdayaan petani di Kabupaten Sragen.

b. Investasi

Indikator Indeks Daya Saing Daerah lainnya yaitu nilai investasi daerah. Nilai investai daerah di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 menunjukkan perubahan yang fluktuatif.

Data Tahun 2016 jumlah ijin proyek sebanyak 982 dengan nilai investasi sebesar Rp 1.501.864.000.000,00. Tahun 2017 pemohon perijinan sebanyak 1.330 berkas dengan nilai investasi sebesar Rp 1.660.392.778.000,00, tahun 2018 pemohon perijinan sebanyak 843 berkas dengan nilai investasi sebesar Rp 1.771.494.694.000,00, tahun 2019 terdapat 863 pemohon dengan nilai investasi 1.873.362.412.029,00 dan tahun 2020 mencapai Rp1.980.110.009.290,00 dengan jumlah proyek 13.911. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah proyek mencapai 6.072 dengan nilai investasi Rp.2.112.628.600.673,00



Gambar 2.45
Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Sragen
Tahun 2016-2020
Sumber Data : Dinas PMPTSP Kabupaten Sragen, 2021

Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian Penanaman Modal pada tahun 2016-2021 disampaikan secara rinci seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.43
Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Investor	700	982	843	863	1.3911	6.072

No	Indikator Kinerja Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah perizinan yang dilakukan pengawasan	98	132	130	81		190
3	indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan dan nonperizinan	79,00	80,38	81,08	81,91	82,20	86,50
4	% perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan secara online	20	39	32	44	44	86,02

Sumber Data : Dinas PMPTSP Kabupaten Sragen, 2021

Dalam kurun waktu 6 tahun, jumlah investasi cenderung meningkat, tenaga kerja yang terserap, hasil survey kepuasan masyarakat, dan jumlah investor, utamanya dari sektor PMDN. Berbagai upaya peningkatan pelayanan perijinan terus dilakukan untuk menarik investor selain juga karena penunjang lain iklim investasi seperti infrastruktur dan kondusifitas wilayah.

Selama kurun waktu 6 tahun, terdapat investasi di berbagai bidang antara lain di bidang Pertanian; Industri; Listrik dan gas; Konstruksi; Perdagangan & Reparasi, Hotel dan Restoran, Trasportasi, gudang dan telekomunikasi; Perumahan; Kawasan Industri dan Perkantoran serta jasa lainnya.

c. Inovasi

Dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata, Kabupaten Sragen melakukan sejumlah inovasi diantaranya inovasi New kemukus yang bertujuan mengubah wisata kemukus menjadi wisata keluarga dan religi melalui pelurusan sejarah Pangeran Samudro, percepatan revitalisasi dan pengembangan wisata kemukus. Selain itu, sejumlah kegiatan juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat misalnya program desa pemajuan kebudayaan di Sangiran yaitu program temu kenali dan rencana aksi dalam bentuk pasar budaya bersama desa-desa di sekitar Sangiran baik yang berada di Sragen maupun Karanganyar. Demikian halnya dengan kegiatan Sangirun 25K *Night Trail Run* yaitu lari bersama sepanjang 25 kilometer dalam rangka memperingati 25 tahun ditetapkannya Situs Sangiran sebagai warisan budaya dunia. Kegiatan-kegiatan tersebut juga diharapkan berdampak pada peningkatan optimalisasi layanan Trans Jateng Koridor Solo - Sangiran – Sumberlawang.

Kegiatan pendampingan inovasi daerah sebagai media monitoring dan evaluasi inovasi penyelenggara pemerintah senantiasa dilakukan untuk menjamin konsistensi implementasi inovasi Perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/Keluarahan. Sedangkan untuk mengakomodir inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat dilaksanakan kegiatan lomba kreatifitas dan inovasi (Krenova) yang terdiri dari 3 kriteria yaitu pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Daerah pada Tahun 2021

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja utama, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Presentase penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021

No	Aspek/Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi s/d Smt 2 Th 2021	Tingkat Capaian (%)
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,5	3,75	57,7
2	PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu rupiah	45.150	40.754	90,26
3	Laju Inflasi	%	3	2,58	86
4	Indeks Gini	Indeks	0,30 – 0,35	-	-
5	Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	%	10	36	360
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	72,5	74,08	102,2
7	Indeks Pembangunan Gender	Skor	93,46	91,68	98,10
8	Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	65,25	67,14	102,90
9	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3,87	4,76	77
10	% Penduduk Miskin	%	11,86	13,83	83,39

Sumber Data: BPS, Bappeda Litbang, 2021, Diolah

Pandemi Covid 19 di tahun 2021 masih belum berakhir akan tetapi beberapa sektor sudah mulai pulih dan membaik dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi masih lebih rendah dari target, terkait dengan menurunnya jumlah produksi akibat adanya pembatasan tenaga kerja dalam rangka mengurangi kerumunan karena pandemi Covid 19. Demikian juga dengan indikator makro yang lain misalnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka masih belum bisa memenuhi target bahkan lebih rendah dibanding tahun 2020.

2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Per Urusan Tahun 2021

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2021 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2021 yang terbagi atas kelompok urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (untuk indikator kinerja dan targetnya) sedangkan untuk Nama Program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD dan Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari beberapa kategori predikat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 tahun 2017, yaitu:

- Tercapai, untuk capaian kinerja diatas 99% ($X > 99\%$) dideskripsikan dengan tanda 
- Akan Tercapai, untuk capaian kinerja diatas 50% sampai dengan 99% ($99\% \geq X > 50\%$) dideskripsikan dengan tanda 
- Perlu Upaya Keras, untuk capaian kinerja dibawah 50% ($X > 50\%$) dideskripsikan dengan tanda 

Berikut evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2021 Semester II:

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Capaian kinerja urusan Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator Kinerja Utama urusan ini adalah Harapan Lama Sekolah dengan capaian 12,84 tahun dalam arti lamanya anak pada umur 7-25 tahun bersekolah mencapai 0,84 tahun penduduk Kabupaten Sragen sudah mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 12,83 tahun atau mengalami kenaikan sebesar 0,01 tahun artinya bahwa ada kenaikan penduduk Kabupaten Sragen yang bersekolah 0,01 pada jenjang perguruan tinggi. Sampai dengan Semester II pada Tahun 2021, indikator yang mendukung capaian Harapan Lama Sekolah cukup baik terlihat dari 27 indikator sebagian besar realisasinya memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 62% memenuhi target dan ada sekitar 37% tidak memenuhi target, secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.45
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pendidikan
RKPD Kab.Sragen Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	571.715.650.584	100	505.353.452.878	100	88,39		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
	Angka Kelulusan (AL) PAUD 4-6 Tahun	86	165.415.868.905	86	159.285.489.639	100,00	96,29		
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,9		99,7		99,80			
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,700		100		100,30			
	Angka Kelulusan Kesetaraan/Paket A/B/C	100		98		98,00			
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	104,7		105,5		100,78			
	Angka Partisipasi Kasar PAUD umur 4-6 Tahun	86		59		68,60			
	Angka Partisipasi Kasar SD /MI/ Paket A	116,67		109,5		93,82			
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS / Paket B	117,87		119,9		101,75			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,94		81,13		81,18			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	93,2		74,89		80,35			
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	98,9		99,82		100,93			
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	99		87,38		88,26			
	Angka Putus Sekolah (APS) SD /MI	0,1		0,04		160,00			
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,04		0		200,00			
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan pemrosesan izin pendirian pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	100	201.600.000	100	201.600.000		100		

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen, 2021

Salah satu keberhasilan urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator tingkat kelulusan siswa baik jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTS yang mencapai 100% artinya peserta didik yang terdaftar pada peserta ujian sekolah dapat tuntas 100%. Sedangkan untuk Pendidikan kesetaraan baru mencapai 98%. Untuk Rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.46
persentase Kelulusan Peserta Didik Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Tahun Ajaran 2020/2021

No.	Jenjang Pendidikan	Peserta Ujian			Lulusan			
		L	P	Jumlah	L	p	Jumlah	%
1	SD	6.477	5.972	12.449	6.477	5.972	12.449	100
2	SMP	5.660	4.282	9.942	5.660	4.282	9.942	100
3	MI	1.046	988	2.034	1.046	988	2.034	100
4	MTs	1.445	1.283	2.728	1.445	1.283	2.728	100

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen, 2021

Jumlah siswa SD/MI baik negeri maupun swasta yang lulus sebanyak 15.177 siswa dan semuanya lulus 100%. Nilai kelulusan ditentukan oleh tingkat kehadiran siswa, nilai raport dan hasil

rapat dewan guru sekolah. Jumlah siswa SMP/MTs baik negeri maupun swasta yang lulus sebanyak 11.976 siswa dan semuanya lulus 100%.

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B nilainya 119,9 artinya jumlah siswa yang bersekolah SMP melebihi jumlah anak usia sekolah SMP. Untuk capaian angka partisipasi murni baik SD/MI/Paket A hanya mencapai 81% dan capaian APM SMP/MTs/Paket B lebih rendah lagi hanya mencapai 74,89%. Untuk angka partisipasi sekolah SMP (APS) SMP/MTs/Paket B juga masih perlu dioptimalkan untuk perencanaan tahun berikutnya karena hanya mencapai 87,38%.

2) Kesehatan

Pencapaian kinerja RKPD urusan Kesehatan pada tahun 2021 mengalami kenaikan 0,14 poin tercermin dari capaian Usia Harapan Hidup masyarakat Sragen sebesar 75,85. Capaian ini didukung oleh 16 indikator yang menjadi ukuran, 4 indikator termasuk dalam kategori tercapai, 8 indikator akan tercapai dan yang belum tercapai masih ada 4 indikator. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan kesehatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Kesehatan

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Balita	100	106.582.695,770	94,6	75.610.020,222	94,6	70,94	→	→
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100		99,52		99,52		→	
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100		99,97		99,97		→	
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100		93,91		93,91		→	
	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100		97,84		97,84		→	
	Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga TB	100		93,6		93,6		→	
	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Dasar	100		16,03		16,03		↓	
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut > 60 Tahun	100		80,47		80,47		→	
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 - 59) thn	100		5,26		5,26		↓	
	Pelayanan Kesehatan penderita DM	100		9,19		9,19		↓	
	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	100		11,59		11,59		↓	
	Penderita Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	100		119,22		119,22		●	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM kesehatan	100		100		100		●	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	100	8.102.848.833	70	7.623.880.050	70		→	→
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100	3.829.427.720	100	3.673.613.855	100	95,93	●	→
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	3	486.881.563,165	3	368.076.668,166	100	75,60	●	→

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Kab Sragen, 2021, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa presentase peningkatan kompetensi SDM kesehatan, cakupan pelayanan masyarakat bidang kesehatan dan indeks kepuasan RSUD Sragen dan Gemolong sudah tercapai. Sedangkan indikator yang masih perlu upaya keras dan ditingkatkan adalah pelayanan kesehatan pada anak pedidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan penderita DM dan hipertensi.

Untuk pelayanan kesehatan terduga TB sampai akhir tahun 2021, jumlah penderita TB Paru di Kabupaten Sragen sebanyak 425 orang dan sebanyak 398 orang mendapatkan pelayanan sesuai standar sehingga persentase cakupan pelayanan TB Paru sesuai standar mencapai 93,6%.

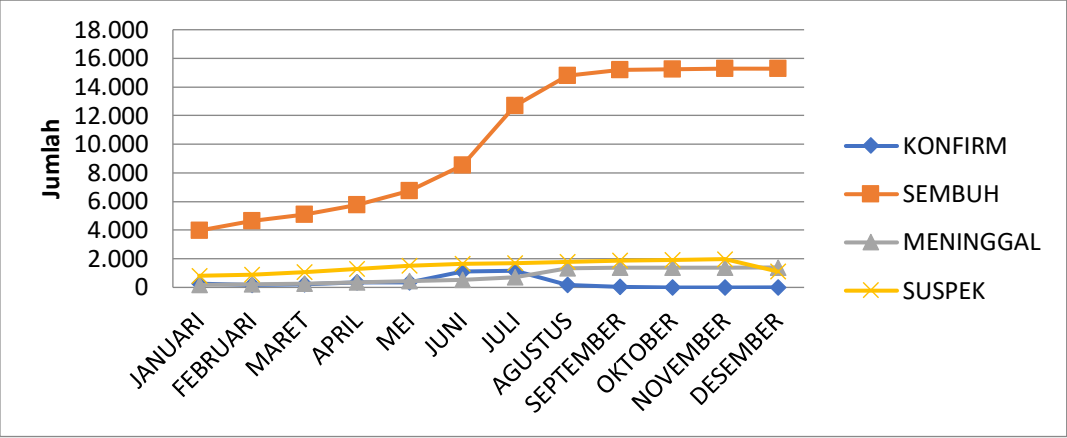
Meskipun pelayanan kesehatan bayi baru lahir sudah cukup baik, akan tetapi presentase balita gizi buruk masih ada sebesar 0,012 yang diukur dari status gizi berdasar indikator berat badan dan tinggi badan. Selain itu, masih adanya *kasus KEK (Kekurangan Energy Kronik) pada ibu hamil* di Kabupaten Sragen merupakan masalah yang perlu menjadi perhatian, karena terkait dengan meningkatnya kasus kematian ibu dan bayi. Sampai dengan akhir tahun 2021 sudah terjadi 37 kasus kematian ibu dan 102 kasus kematian bayi. Oleh karena itu pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin masih perlu ditingkatkan.

Selain itu Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk Kabupaten Sragen sampai dengan Semester II Tahun 2021

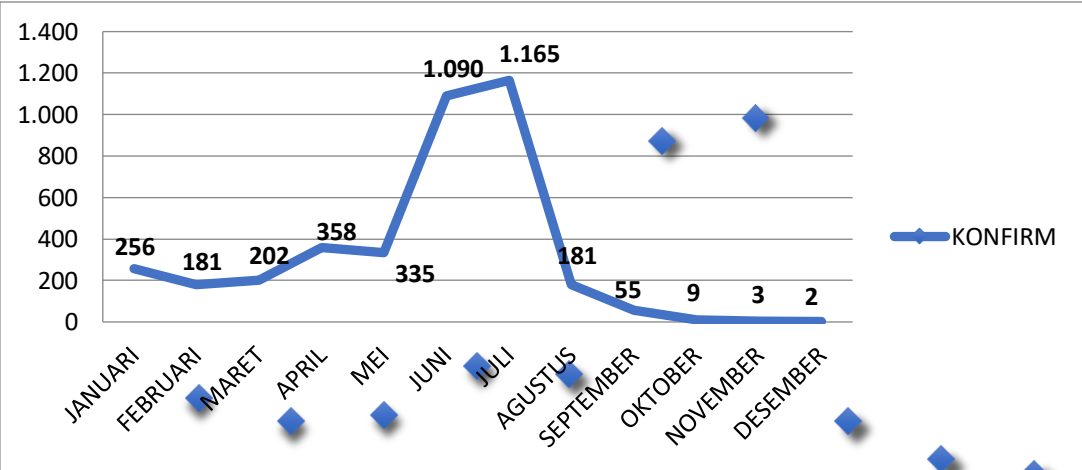
sebanyak 95 penderita atau rasionya 10,63. Penyakit menular lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah masyarakat yang terinfeksi HIV/AIDS sebanyak 128 kasus. Sedangkan upaya untuk pencegahan penyakit tidak menular dengan dilakukan skrining awal/posbindu.

Pembangunan Sarana Prasarana kesehatan terus ditingkatkan dengan pembangunan Gedung Puskesmas Karangmalang, Puskesmas Kedawung 1 dan pembangunan RSUD Tangen Tipe D. Sarana Prasarana Kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sragen adalah 2 RSUD Type C yaitu RSUD Soehadi Prijonegoro dan RSUD Soeratno Gemolong. Selain itu terdapat 25 puskesmas di semua kecamatan yang telah terakreditasi 100%. Kinerja urusan kesehatan juga tidak lepas dari keberadaan *Public Safety Center* (PSC) dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang sewaktu-waktu dapat diandalkan masyarakat Sragen saat terjadi kegawatdaruratan misalnya korban kecelakaan.

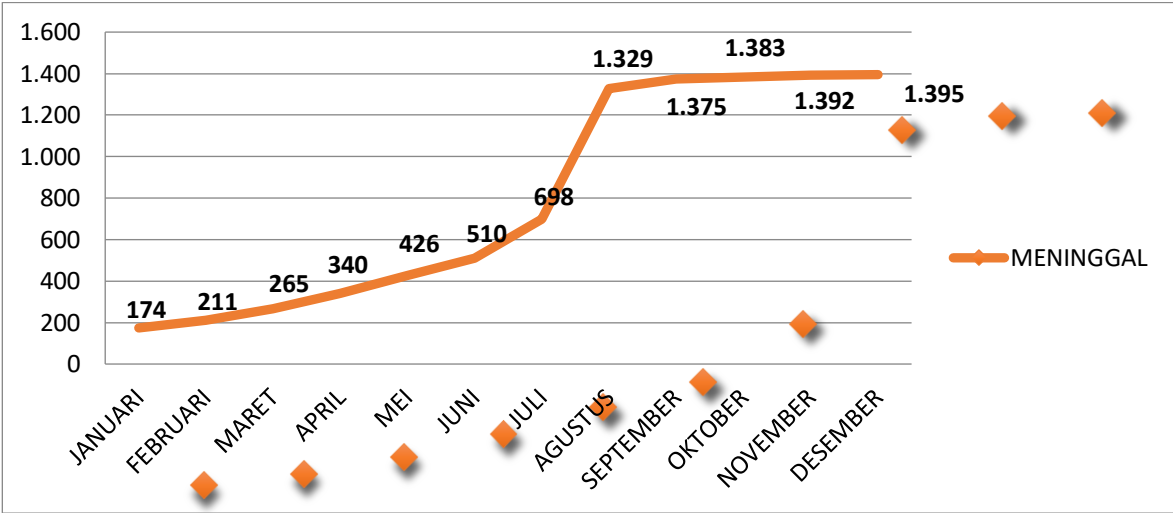
Kinerja urusan kesehatan menjadi vital karena terjadinya pandemi COVID 19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Di Kabupaten Sragen memperlihatkan grafik yang fluktuatif terhadap peningkatan pasien positif Covid 19 yang puncaknya terjadi pada bulan Juni dan Juli dengan total pasien 3.837 jiwa yang menyebabkan angka kematian sebanyak 9.498 jiwa tercatat sampai akhir tahun 2021. Hingga saat ini masih dilakukan langkah-langkah untuk mencegah penambahan kasus pasien positif covid 19, salah satunya dengan vaksinasi covid-19. Dapat dilihat pada grafik kasus terinfeksi terjadi penurunan yang sangat signifikan pada Semester II tahun 2021. Penyediaan sarana prasarana mulai merata pada semua daerah yang awalnya disediakan dari Dana Tak Terduga termasuk penyediaan Rumah Sakit Darurat yang berlokasi di Teknopark Ganesha Sukowati yang terdiri dari 24 kamar. Saat ini semua rumah sakit Type C sudah mempunyai sarana yang memadai untuk menangani pasien positif Covid 19. Selain itu juga peran serta masyarakat yang mendukung isolasi mandiri untuk pasien yang tidak memerlukan perawatan intensif dari fasilitas kesehatan. Informasi tentang perkembangan kasus COVID 19 bisa dilihat di <http://corona.sragenkab.go.id>.



Gambar 2.46
Data Kasus Covid-19 Tahun 2021
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Sragen, 2022



Gambar 2.47
Perkembangan kasus terinfeksi COVID-19 di Kabupaten Sragen Bulan
Januari-Desember Tahun 2021
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Sragen, 2022



Gambar 2.48
Penambahan Kasus Meninggal COVID-19 di Kabupaten Sragen Bulan
Januari-Desember Tahun 2021
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Sragen, 2022

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada tahun 2021, Urusan pekerjaan umum di Kabupaten Sragen masih dilaksanakan oleh 2 Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pencapaian indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 terlihat dari 9 indikator yang menjadi ukuran, 4 indikator dapat tercapai dan 5 indikator masih belum tercapai.

Tabel 2.48
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran irigasi dalam kondisi baik	91	7.181.999.539	77,91	5.098.990.336	85,62	71,00		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	85,3	11.326.215.656	68,01	10.977.485.707	79,73	96,92		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	85	3.009.267.900	83,07	3.008.995.870	97,73	70,21		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	61,2	349.999.491	50,55	335.856.475	82,60	95,96		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik	72,28	15.294.898.690	72,28	13.626.117.800	100,00	89,09		
	Persentase layanan perijinan PBG dan SLE	100		100		100,00			
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	89	49.680.743.519	79,21	43.754.134.447	89,00	88,07		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Index Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	100	697.432.590	100	675.096.004	100,00	96,80		
	Index Perencanaan Tata Ruang	40		35		87,5			

Sumber Data: DPUPR, Disperkim, Kab Sragen, 2021, diolah

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan pada tabel.

Rehabilitasi jembatan yang dilaksanakan tahun 2021 yaitu Jembatan Cemeng di Kecamatan Sambungmacan yang merupakan kewenangan kabupaten serta Jembatan Plosokerep di Kecamatan Karangmalang.

Kondisi jalan di Kabupaten Sragen sampai dengan Semester II sebagai berikut:

Tabel 2.49
Kondisi Jalan Kabupaten Sragen per 31 Desember 2021

Kondisi Jalan Kabupaten	2021	
	(km)	%
Baik	808,105	79,21
Sedang	58,672	5,75
Rusak Ringan	92,087	9,03
Rusak Berat	61,385	6,02

Sumber: DPU Kab Sragen, 2021

Sampai dengan akhir Desember 2021, dari total panjang jalan 808,105 km, 79,21% dalam kondisi baik. Sehingga persentase jalan kondisi mantap (baik + sedang) sebesar 84,96%. Yang masih perlu diperhatikan adalah jalan kondisi rusak baik ringan maupun berat sebesar 15,05%.

Terkait dengan penanganan infrastruktur irigasi, dari total 50 embung di Kabupaten Sragen, sebanyak 3 embung dalam kondisi rusak/bocor/tidak berfungsi. Luas layanan embung tersebut bervariasi mulai dari 7-258 Ha sawah. Yang paling luas adalah **Embung Tewel, Plosokerep** dan **Ngepringan**. Untuk persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, capaiannya sampai dengan tahun 2021 sebesar 78,63% atau sepanjang 207.506 m2 dari total panjang saluran (baik primer maupun sekunder) 263.915 m2. Rehabilitasi Embung Slendro di Kecamatan Gesi pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan akibat dari adanya *refocussing* anggaran sebesar Rp 499.999.792,00.

Pada indikator kinerja Penataan Ruang tercapai persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang melebihi target yang ditetapkan. Sampai dengan Semester II tahun 2021 sudah memberikan rekomendasi Ijin Pengendalian Pemanfaatan Ruang (IPPT) seanyak 239 buah, pemberian advise planning serta informasi tata ruang kepada masyarakat sebanyak 325 buah, dan pemberian rekomendasi izin perubahan pemanfaatan tanah sebanyak 312 buah.

Meskipun capaian saluran drainase kondisi baik sudah sesuai yang ditargetkan, akan tetapi pada kenyataanya masih perlu ditingkatkan. Tersedianya drainase dalam kondisi baik dapat membantu menjaga lingkungan pemukiman dan mencegah bencana banjir terutama di area perkotaan Sragen yaitu Kecamatan Sragen dan Karangmalang. Dibawah ini bisa dilihat perkembangan panjang drainase (terbuka) di perkotaan Sragen.

Tabel 2.50
Kondisi Drainase di Kabupaten Sragen Tahun 2021

Kondisi Jalan Kabupaten	2021	
	(km)	%
Baik	808,105	79,21
Sedang	58,672	5,75
Rusak Ringan	92,087	9,03
Rusak Berat	61,385	6,02

Sumber Data: DPU Kab. Sragen, 2021

Sampai dengan tahun 2021, presentase drainase kondisi baik dan sedang mencapai 61,84%. Jumlah ini masih perlu ditingkatkan mengingat panjang drainase dalam kondisi rusak berat masih 38,16% dan Kabupaten Sragen berpotensi banjir jika musim penghujan. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Sragen melakukan Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong di beberapa wilayah lain di perkotaan Sragen antara lain: Widoro, Krapyak, Mageru, Tamansari, Krapyak dan Bangak.

Terkait layanan akses air bersih, pada tahun 2021 dilaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan di 37 lokasi yang tersebar di 11 kecamatan.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pencapaian kinerja urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2021 (Semester II) cukup baik, hal ini terlihat dari pencapaian Indikator Kinerjanya.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut didukung oleh 4 indikator kinerja yang menjadi ukuran. Sampai dengan akhir tahun 2021, 3 indikator dapat tercapai. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 (Semester II) pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Capaian Kinerja dan		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani	100	457.165.440	100	410.567.390	100,0	89,81		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Strategis Perkotaan Kondisi Baik	70		69,84		99,77			
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase perumahan yang terlayani psu	70	2.049.950.929	61,4	1.945.738.000	87,7	94,92		
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) di Kawasan Pencegahan Kumuh yang Tertangani atau Terfasilitasi	100	1.124.456.000	100	1.124.456.000	100,0	100,00		

Sumber Data: Disperkim, Dinsos Kab. Sragen, 2021, diolah
Sampai dengan Semester II tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menangani 41.062 unit RTLH, yang berasal dari Dana Pemerintah Pusat (BSPS, DAK, APBD PROV, DANA DESA dan BANKEU) sebesar Rp. 18.305.964.541,00 dan APBD.

Untuk penataan lingkungan dilakukan penataan Eks Gedung Panca Marga dan eks Gedung Koperasi untuk relokasi PKL dari Alun-alun. Selain itu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan pemeliharaan Gedung Sasana Manggala Sukowati dan Stadion Taruna.

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Bupati Sragen Nomor: 648/437/003/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sragen yang baru seluas 86,79 hektar dan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman seluas 2,44 hektar. Kawasan kumuh perkotaan penanganannya akan dimulai Tahun 2023.

Sedangkan terkait penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilakukan penataan di Taman Kridoanggo, Taman Sukowati Sragen (Penataan Tahap II dan Masterplan), Lapangan Suci Gemolong, dan Makam Perno (DED). Untuk pemeliharaan RTH dilakukan pemeliharaan Kanstin dan Taman Kecil, Taman Edupark dan Taman Sukowati.

5) **Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Pencapaian kinerja urusan wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2021 ditangani oleh 2 Perangkat daerah yaitu Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	% Penegakan Perda	%	100,00	76,67
2	Tingkat waktu penanganan korban bencana Kebakaran	menit	15	21
3	Tingkat waktu penanganan korban bencana lain	jam	2	2

Sumber Data: Satpol PP dan BPBD Kab Sragen, diolah, 2021

Untuk capaian indikator Tingkat waktu penanganan korban bencana Kebakaran yang ditargetkan 15 menit tidak dapat tercapai dengan terjadinya 82 kejadian kebakaran (dalam daerah) dan 2 kejadian (luar daerah) di tahun 2021 dimana banyak kebakaran skala besar (kebakaran rumah maupun di home industri) terjadi. Selain kebakaran juga banyak terjadi kejadian bencana lain: Laka air, pohon tumbang, Banjir, tanah longsor, Evakuasi sarang tawon, evakuasi ular, tanah amblas, dan angin kencang dengan total 348 kejadian dengan perkiraan total kerugian Rp.194.050.000,00 yang dialami oleh 209 jiwa/72 KK.

Penegakan Perda dan Perbup di tahun 2021 termasuk pemakaian masker di tempat-tempat strategis. Capaiannya tidak bisa 100% karena ada beberapa kasus yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun misalnya kasus pendirian Tower.

Capaian kinerja utama tersebut didukung oleh 4 capaian kinerja program yang menjadi ukuran dan hasilnya cukup baik. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 (Semester II) pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan	100	1.578.749.316	100	1.439.740.616	100	91,20		
	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100		99,9		99,90			
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan non kebakaran	100	978.999.942	100	968.523.006	100	98,93		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana	100	2.555.982.778	100	2.555.982.778	100	91,92		

Sumber Data: Satpol PP, BPBD, Kecamatan Kab Sragen, 2021, diolah

Capaian kinerja untuk indikator persentase penyelesaian penegakan Perda sangat baik yaitu sebesar 99,97%. Dari jumlah kasus pelanggaran selama tahun 2021 sebanyak 7.246 kasus, dapat terselesaikan sebanyak 7.244 kasus dan 2 kasus masih dalam proses penyelesaian. Meskipun di tahun 2021 ini tidak ada anggaran khusus untuk Operasi Penertiban PKL, dari kegiatan Patroli wilayah yang dilakukan, Satpol PP juga melakukan penertiban PKL. Dari kegiatan ini, menemukan pelanggaran sebanyak 366 kasus, yang terdiri dari pelanggaran K3 sebanyak 152 kasus dan pelanggaran PKL sebanyak 214 kasus.

Untuk kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal, meskipun anggaran dikelola oleh Bagian Perekonomian Setda, tetapi pelaksana kegiatan di lapangan dikoordinir oleh Satpol PP Kab. Sragen. Disamping melakukan kegiatan operasi di lapangan, juga melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 10 kali untuk 500 orang.

Untuk kegiatan Penanganan Covid-19 dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen, mulai bulan Januari s/d Desember 2021. Kegiatan penertiban PGOT, miras dilakukan sekaligus pada waktu melaksanakan patroli wilayah dan berdasarkan juga aduan dari masyarakat. Penertiban PKL difokuskan pada tempat-tempat di sepanjang jalan Raya Sukowati.

Penanganan kebakaran tahun 2021 di wilayah Kabupaten Sragen selama tahun 2021 terjadi sebanyak 112 kasus. Dari 112 kasus ini, yang *respon time* sampai dengan 15 menit sebanyak 48 kasus (42,86%) dan sisanya 64 kasus (57,14%) *respon time* lebih dari 15 menit. Tidak tercapainya kinerja ini karena jumlah armada yang tidak memadai dan belum adanya pos-pos kebakaran di setiap kecamatan. Selain penanganan kebakaran, ada evakuasi lain yang dilakukan Bidang Damkar, yaitu pelepasan anting/cincin 13 kali, penyelamatan kambing/kucing 4 kali, evakuasi tawon 309 kali dan penangkapan ular 21 kali.

Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan ketrampilan untuk membantu menciptakan kondisi yang aman, tertib dan tenteram.

Jumlah Linmas di Kabupaten Sragen sebanyak 6.811 orang dan yang terlatih kurang lebih hanya 25% karena keterbatasan anggaran dan pada tahun 2021 tidak ada pembinaan maupun pelatihan untuk Linmas kegiatan lebih diarahkan pada Pemberdayaan Anggota Linmas dalam penjagaan palang Kereta Api tidak berpintu. Tahun 2021 ini ada 14 titik lokasi palang KA tidak berpintu yaitu:

- Wilayah Kec. Kalijambe (Kaliwuni, Karangjati Seren, Perempatan Kalijambe)
- Wilayah Kec. Miri (Ngebuk)
- Wilayah Kec. Masaran (Craken Kreet, Kedung Bulus Kreet)
- Wilayah Kec. Sidoharjo (Bedowo Jetak, Belakang SPBU Sidoharjo, KUD Duyungan, Makam Gesing)
- Wilayah Kec. Gemolong (Yakssi Ngembatpadas, Dempul)
- Wilayah Kec. Gondang (Mentir Wonotolo, Kenteng Wonotolo)

Untuk bencana selain kebakaran ditangani oleh BPBD. Capaian kinerja untuk indikator Tingkat waktu penanganan korban bencana kurang dari 2 jam dari target kinerja 2 jam dalam setiap respon. Faktor pendorong keberhasilan kinerja untuk pencapaian target respon time penanganan korban bencana didukung oleh adanya SATGAS dan PUSDALOPS yang dimiliki oleh BPBD. Jumlah SATGAS Penanggulangan Bencana Kab. Sragen sebanyak 25 personil, yang diakomodir. Disamping itu, pada tahun 2021 BPBD Kab. Sragen mendapatkan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp.1.177.530.450,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.102.446.928,00 (93,62%).

Untuk pelayanan informasi rawan bencana dengan dilakukan sosialisasi rawan bencana kekeringan dan rawan bencana longsor di 35 desa. Untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang diperuntukan untuk 85 orang dari total 1.117 relawan yang ada di kabupaten Sragen, yang saat ini terdata di Pusdalops BPBD Kab. Sragen yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat.

Dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan didukung oleh SATGAS PB dilakukan pencarian dan pertolongan 96 kali, lebih banyak dari yang ditargetkan, termasuk kegiatan kemanusiaan pencarian korban hanyut di sungai dan pengambilan jenazah korban kecelakaan maupun kriminalitas.

6) Sosial

Pencapaian kinerja utama urusan Sosial adalah penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) tercapai 7,4% pada tahun 2021. Dengan adanya pandemi COVID 19, pencapaian kinerja indikator Urusan Sosial pada tahun 2021

Semester II sudah baik, hal ini di dukung adanya program dari Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu Bantuan Jaminan Hidup (JADUP) bagi Keluarga Isolasi Mandiri Covid -19 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan anggaran bersumber dari **Mitra Kesejahteraan Rakyat** (MATRA), BAZNAS, dan APBD Kabupaten Sragen tahun 2021 sebanyak 4.742 Orang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan Sosial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Sosial

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	4.819.362.329	100	4.285.321.846	100	88,90		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	% PSKS yang difasilitasi	100	417.000.000	100	416.401.500		100		
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah korban tindak kekerasan dan migran bermasalah yang terdampingi	100	85.000.000	83	71.488.300	83	84,00		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	% Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi sosial Lansia terlanjar,anak (terlanjar, bermasalah dg hukum, berkebutuhan khusus), CACAT, tuna sosial, PGOT, FM, KTK	100	982.365.500	79	950.605.590	79	79		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	% PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100	3.720.842.630	95	3.523.098.150	95	95		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	% Korban bencana alam dan bencana sosial yang tertangani	100	180.000.000	46	144.000.000	46	80		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah TMP yang dikelola (Dirawat)	100	162.000.000	100	162.000.000	100	100		

Sumber Data: Dinas Sosial, Kab Sragen, 2021, diolah

Pandemi Covid -19 telah berdampak pada seluruh masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Selain Bantuan Jaminan Hidup (JADUP) bagi Keluarga Isolasi Mandiri Covid -19, Pemerintah Kabupaten Sragen juga melaksanakan Program antara lain Jaring Pengaman Sosial yang mencakup Bantuan Sosial. Jaring Pengaman Sosial (JPS) Keluarga terdampak Covid-19 di Kabupaten Sragen yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen bersumber dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) tahap I sebanyak 10.000 orang dan tahap II sebanyak 21.113 Orang. Penerima Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) Keluarga terdampak Covid-19 dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Sosial bersinergi dengan TNI (Kodim 0725 Sragen, Polri dan Kemensos berupa beras 5 Kg ditambah paket Sembako dari Pemerintah Kabupaten Sragen senilai Rp. 50.000
- Sasarannya adalah Keluarga terdampak Covid -19 selain penerima PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan

Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai) (Bantuan Langsung Tunai, BLT, BLT DD, KJS (Kartu Jateng Sejahtera), Beras Bulog PPKM Intruksi Presiden antara lain:

- Pengemudi Becak Kayuh, Bentor, Bendi
- PKL Se-Kabupaten Sragen
- DKDS dan Pepadi

Kabupaten Sragen juga menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sragen sebagai berikut :

- PKH (Program Keluarga Harapan) sebanyak 37.642 KPM, Bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cara transfer langsung oleh Bank Himbara ke Rekening masing-masing KPM. Proses pencairan dilakukan di E-Warong/ATM dan diambil secara Tunai.
- BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebanyak 55.240 KPM, Bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cara transfer langsung oleh Bank Himbara ke Rekening masing-masing KPM. Proses pencairan dilakukan di E-Warong yang telah terdaftar dan dibelanjakan/ditukarkan dengan bahan pangan Sembako sesuai Ketentuan, dan besaran bantuannya adalah 200.000/KPM
- PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebanyak 303.692 KPM dalam bentuk pelayanan kesehatan.
- KJS (Kartu Jateng Sejahtera) Tahap III Sebanyak 215 KPM
- BST (Bantuan Sosial Tunai) di bayarkan secara komunitas, outlet di Kantor Pos Rp. 600.000,- perbulan, Pencairan tahap X sebanyak 23.898 KPM, Tahap XI sebanyak 24.884 KPM, Tahap sebanyak 24.173 KPM Tahap IV sebanyak 22.500 KPM.
- Beras PPKM Bulog 10 Kg Instruksi Presiden sebanyak 98.320 KPM
- Bantuan Beras dari Kemensos 5 Kg sebanyak 3.000 KPM

Perkiraan jumlah PPKS di Kabupaten Sragen tercatat 115.202 jiwa yang terdiri dari tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban trafficking, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban bencana sosial, Perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, dan Keluarga bermasalah sosial psikologis.

Secara umum capaian indikator pada sasaran Peningkatan penanganan PPKS sudah tercapai dengan jumlah PPKS pada tahun 2021 sebanyak 108.467 orang terelisasi 115.202 Orang. Penanganan selama tahun 2021 oleh Pemerintah Kabupaten Sragen antara lain:

- Bantuan kepada 320 KRSE masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,00
- Bantuan RTLH sebanyak 177 Orang masing-masing sebesar Rp.7.500.000,00
- Bantuan Kepada Lanjut Usia Terlantar sebanyak 169 orang (dari total lansia tahun 2021 sebanyak 1.420 orang) masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00. Secara umum melihat kondisi lansia di Kabupaten Sragen, diperlukan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut peduli dan berpartisipasi dalam mengurus lansia terlantar karena permasalahan sosial lansia adalah tanggung jawab bersama.
- Bantuan Modal Usaha kepada Penyandang Disabilitas sebanyak 24 Orang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00
- Bantuan Modal usaha untuk Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran bermasalah sebanyak 30 Orang, masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00
- Bantuan kepada orang kehabisan bekal sebanyak 41 orang masing Rp. 200.000,00
- Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Berat sebanyak 40 Orang (dari Total 7.735 orang) masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00
- Sampai dengan Semester II tahun 2021 telah dilakukan penanganan anak bermasalah sebanyak 25 anak akibat korban incest, pemerkosaan, adopsi dan anak jalanan. Meningkatnya Jumlah Penerimaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Sebagian Besar Berasal Dari Wilayah Jawa Timur Dan Tidak Sedikit Anak-Anak Sragen Yang Ikut Terjaring Mengingat Sragen Wilayah Perbatasan Sehingga Akses Pengaruh Lingkungan Terhadap Anak Jalanan Semakin Besar. Penanganan dan Perlindungan bagi anak baik korban, pelaku dan juga anak dalam situasi rentan sampai tahap terminasi serta dalam rangka perlindungan anak sementara kita titipkan di rumah singgah yang sebetulnya kurang layak bagi anak
- Untuk pelayanan sosial bagi penyandang cacat ada Panti Raharjo milik Pemprov Jateng di Kabupaten Sragen, selain itu juga ada milik Swasta yaitu Sinar Elim dan Benih Kasih. Jumlah penyandang cacat 6.977 orang

Faktor-faktor pendorong keberhasilan urusan Sosial antara lain:

- Program penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah, pemerintah desa serta dunia usaha (RTLH, Verval Data, BPNT, PKH, PBI-JK, KJS, BST)
- Program Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan keluarga terdampak Covid-19 yaitu Jaminan Hidup (JADUP) dan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) baik yang masuk dalam data DTKS maupun yang tidak masuk data DTKS.

- Komitmen kelembagaan tingkat daerah sampai desa/kelurahan.
- Adanya regulasi yang mendukung baik Perda dan Perbup.

Keberhasilan dalam penanganan PPKS tidak lepas dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berfungsi untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dalam membantu menangani masalah-masalah PPKS. Adapun PSKS garapan Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagai berikut.

Tabel 2.55
PSKS Kabupaten Sragen per 31 Desember 2021

No	JENIS PSKS	Jumlah
1.	Pekerja Sosial Profesional	2 Orang
2.	Pekerja Sosial Masyarakat	909 Orang
3.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	33 Orang
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	14 Panti
5.	Karang Taruna	208 Desa
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1 Lembaga
7.	Penyuluh Sosial Masyarakat	15 Orang
8.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	20 Orang
9.	Dunia Usaha	33 Lembaga
10.	Pendamping PKH	139 Orang

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Beberapa faktor penghambat keberhasilan Urusan Sosial antara lain:

- Regulasi dari Kementrian Sosial yang sering berubah-ubah;
- Aksesibilitas data DTKS dan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) di berikan kepada Penerima Bantuan Sosial tidak melalui Dinas Sosial Kabupaten Sragen, melainkan melalui Bank Himbara;
- Tingginya jumlah PPKS di Kabupaten Sragen sebanyak 108.467 Orang tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
- Penduduk miskin dengan kondisi keterlantaran dan tidak potensial;
- Karakteristik masyarakat miskin yang cenderung mempunyai sikap mental pasrah, merasa nyaman dengan bantuan sosial yang selama ini diterima;
- Ketegasan dari pengambil kebijakan terutama di tingkat desa yang merasa enggan mengeluarkan warga dari data kemiskinan dengan berbagai faktor seperti kedekatan, unsur politis dan lainnya;
- Masih terjadinya ketidaktepatan sasaran beberapa program perlindungan dan bantuan sosial berdasarkan sumberdata Kemensos melalui SIKS-NG

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Pencapaian kinerja pada urusan tenaga kerja tahun 2021 (Semester II) sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran dan 6 diantaranya tercapai. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan tenaga kerja disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Tenaga Kerja

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	1.844.045.785	100	1.655.001.787	100	89,75		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	50.000.000	100	49.839.900	100	99,68		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100	148.652.200	100	141.050.950	100	94,89		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja Yang ditempatkan	100	137.554.340	48,52	69.082.880	48,52	50,22		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran pemeriksaan perusahaan	100	114.996.918	100	87.858.300	100	84,11		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase penempatan transmigran terhadap calon transmigrans	100	21.911.998	100	22.973.720	100	104,85		

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen, 2021, diolah

Presentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2021 sebesar 79% dari target yang telah ditetapkan. Jumlah pencari kerja sampai dengan Semester II tahun 2021 sebanyak 4.278 orang yang didominasi oleh lulusan SD sebanyak 1,87%, SMP sebanyak 11,76%, SMA sebanyak 76,44%, Diploma sebanyak 3,23%, Sarjana S1 6,64%, dan Sarjana Strata 2 sebanyak 0,07%. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen berhasil menempatkan tenaga kerja di dalam negeri maupun ke luar negeri sebanyak 2.273 orang. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan melalui:

- Antar Kerja Lokal (AKL) yaitu penempatan kerja pada lingkup Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.793 orang;
- Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yaitu penempatan kerja di luar Provinsi Jawa Tengah sebanyak 126 orang;
- Antar Kerja Antar Negara (AKAN) yaitu penempatan kerja di luar negeri sebanyak 306 orang;
- Bursa Kerja Khusus (BKK) yaitu penempatan kerja melalui Bursa Kerja Khusus dari Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kabupaten Sragen sebanyak 48 orang;

Dengan adanya pandemi COVID 19, banyak masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Peluang kerja (lowongan) juga semakin sempit karena banyak usaha yang bangkrut. Hal ini yang membuat naiknya pengangguran.

Tabel 2.57
Dampak COVID 19 terhadap Ketenagakerjaan Kabupaten Sragen Bulan Januari– Desember 2021

No	Kategori	Jumlah (orang)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus tus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Ketersediaan Peluang Pekerjaan	225	108	-	-	-	286	253	142	92	1.325	356	201
2	Peluang Kartu Prakerja	-	-	421.705	421.705	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penempatan	394	172	-	-	172	312	18	35	20	32	409	184
4	Lolos Kartu Pra Kerja	-	-	-	1.144	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengangguran	9.763	9.878	10.128	10.186	9.956	9.644	9.626	9.591	9.571	9.539	9.130	8.946
6	Karyawan Ter-PHK, habis Kontrak & dirumahkan	-	-	-	1.621	1.714	-	-	5	8	-	-	-

Sumber : Disnaker, Desember 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat Program Kartu Prakerja telah di hentikan mulai Bulan Mei Tahun 2021 oleh pemerintah pusat. Jumlah pengangguran yang terdaftar sudah mengalami penurunan sampai pada akhir Desember 2021 sebanyak 8.946 orang. Disamping itu kondisi Pemutusan Hubungan kerja juga mengalami penurunan, akibat situasi sosial dan ekonomi masyarakat sudah mulai pulih dengan seiringnya penurunan kasus covid 19 di kabupaten sragen.

Tabel 2.58
Jumlah Karyawan yang ter PHK, habis kontrak dan dirumahkan (sampai dengan Desember 2021)

No	Nama Perusahaan	Jml PHK (org)	Keterangan
1	PT BATI	200	Kenaikan Harga Bahan Baku
2	PT. TIGA PILAR SEJAHTERA	18	Pensiun (12) Resign (6)
	JUMLAH	218	

Sumber : Disnaker, Desember 2021

Sejak ditetapkannya tanggap darurat COVID 19 di Kabupaten Sragen pada pertengahan Maret 2020 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar maka banyak masalah yang memaksa perusahaan mengurangi jumlah karyawannya dengan menurunnya omset penjualan maupun kesulitan memperoleh bahan baku. Sampai dengan bulan Desemeber 2021 tercatat 218 karyawan yang terPHK, habis kontrak maupun dirumahkan dari 5 Perusahaan di Kabupaten Sragen.

Di samping kegiatan seperti tersebut di atas, juga dilakukan tahapan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) cukup bervariasi di 8 (delapan) Perusahaan yaitu; PT. PAN

BROTHERS, PT. BINTANG ASAHI TEKSTIL INDUSTRI (BATI), INDAH LOGISTIK CARGO, PT. DMST II, PT. PRIMA STONE PERSADA, PT. SAPI GUNUNG, PT. ATHENA TAGAYA (OUTSOURCHING PT.SPS), PT. DMDT VIII, Selama tahun 2019 terdapat 9 kasus perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang dapat diselesaikan, melibatkan 155 orang pekerja dengan kasus PHK, Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, dan Keluh Kesah.

Dengan masih adanya kasus-kasus ini seperti ini dapat diartikan masih kurangnya tingkat pemahaman baik pekerja maupun pengusaha tentang regulasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan asumsi masih diperlukan mediasi untuk mewujudkan penyelesaian secara PB/ Persetujuan Bersama.

Selaras dengan kondusifnya Kabupaten Sragen, pembangunan pada urusan ketenagakerjaan mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sragen pada tahun tahun 2020 sebesar Rp.1.815.914,00 sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar 0,74% menjadi sebesar Rp.1.829.500,00 dan tahun 2022 meningkat 1,29% menjadi Rp.1.839.429,00

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian kinerja pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2021 (Semester II) cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 11 indikator yang menjadi ukuran, 7 indikator tercapai. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 (Semester II) pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	5.060.301.370	100	4.403.196.731	100%	87%		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% PD yang telah menyusun program/kegiatan responsif gender dan anak	39,29	296.997.770	64,28	272.496.353	164%	92%		
	% Kelembagaan PUG yang aktif	32,8		50		152,44			
	% Partisipasi perempuan di lembaga eksekutif	49,22		56,4		114,59			
	% Partisipasi perempuan di lembaga legislatif	13		13,3		102,31			
	Rasio KDRT	3,9		0,0023		199,94			
	Cakupan korban perempuan dan anak kekerasan yang mendapat pelayanan pengaduan	50		100		200,00			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT Perempuan	0,32	14.999.720	0,00165	14.629.720	199,94	98%		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase peningkatan kapasitas DEKELA dalam Pemenuhan Hak Anak	38,46		38,46		100,00	71%		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio KDRT Anak	0,01	24.999.760	0,007	23.069.760	70,00	92%		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rasio Akseptor KB Baru	11	79.999.700	76,56	75.603.900	696,00	95%		
	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	1		0,24		24,00			
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	63	7.379.977.180	74,74	6.126.941.738	118,63	83%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	% SMA/SMK/MA yang memiliki kelompok PIK Remaja	3	795.799.570	3,896	736.463.570	129,87	93%		
	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif	1		1		100,00			

Sumber Data: DPPKBPA Kab. Sragen, 2021, diolah

Sampai dengan Semester II Tahun 2021, di Kabupaten terdapat 230 pejabat eselon perempuan dari 4.588 ASN perempuan atau 5,013% dalam eksekutif dan sekitar 13,3% atau 6 orang anggota Legislatif perempuan dari total 45 orang anggota legislatif. Tahun 2021, perangkat daerah yang telah menyusun program/kegiatan responsif gender sebanyak 64,28%, artinya pengarusutamaan gender sudah menjadi perhatian. Terdapat kenaikan 4,28% dibanding tahun 2020. Terkait dengan KDRT yang selalu menjadi fenomena gunung es, di tahun 2021 dari total 24 (dua puluh empat) Kasus Kekerasan terdiri dari 2 (dua) Kasus KDRT Anak, 5 (lima) Kasus KDRT Perempuan, 12 (dua belas) Kasus Pemerkosaan dan 5 (lima) Kasus Pelecehan Seksual, didalamnya terdapat total korban yang dilaporkan sebanyak 27 orang dan semua korban telah terlayani semua.

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan IV tahun 2021, ini menunjukkan kinerja cukup baik kecuali untuk indikator yang

masih rendah khususnya Rasio KDRT, Rasio KDRT Perempuan, Rasio KDRT Anak, yang masih sedikit dan belum mencapai target hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi sedangkan pada kenyataannya data Kasus KDRT yang dilaporkan masih terlalu sedikit.

Terkait dengan pemenuhan hak anak, sudah dibentuk forum anak sebanyak 83 dan desa / kelurahan ramah anak sebanyak 80 unit yang sudah di SK kan.

3) Pangan

Pencapaian kinerja pada urusan pangan tahun 2021 menurun. Kondisi ini terlihat dari capaian Indikator Kinerja Utama yaitu Skor Pola Pangan Harapan sampai akhir tahun hanya mencapai 85,9. Pencapaian Angka ini didukung oleh 10 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2020 pada urusan Pangan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pangan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	1.794.550.000	100	1.571.422.851	100	87,57		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	- Penguatan Cadangan Pangan - Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	50 ton	1.099.358.000	2 ton	1.090.691.320	40%	99,21		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase kelompok petani yang mendapat pembinaan	2 kelompok	242.000.000	2 kelompok	234.723.250	100	96,99		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	- Skor pola pangan harapan - Ketersediaan energi per kapita - Ketersediaan protein per kapita	1 buku	12.000.000	1 buku	10.452.704	100	87,11		
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	% kelompok petani yang mendapat pembinaan		74.550.000	9	73.213.100	100	98,21		

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Sragen, 2021, diolah

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian di semua lini usaha, termasuk sektor pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan hidup. Oleh karena itu, kondisi ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 menjadi hal yang serius untuk diperhatikan sebab menyangkut dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dampak pandemi ini sangat berpengaruh terhadap indikator ketahanan pangan berupa ketersediaan pangan, diversifikasi pangan, keterjangkuan pangan, dan stabilitas harga pangan.

Kegiatan **Pekarangan Pangan Lestari (P2L)** terbukti mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah merebaknya wabah Covid 19 yang terjadi saat ini. Salah satu

upaya untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) serta berorientasi meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kegiatan P2L merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat/ **Kelompok Wanita Tani (KWT)** untuk budidaya berbagai jenis tanaman melalui kebun bibit, demplot kelompok dan pekarangan anggota yang dilakukan di lahan tidur maupun pekarangan sekitar tempat tinggal dengan menggunakan polibag maupun barang yang tidak terpakai. KWT Wijaya Kusuma di Desa Celep Kecamatan Kedawung merupakan salah satu KWT yang sudah merasakan manfaat dari kegiatan P2L ini. Pada masa wabah ini, banyak masyarakat yang tidak berani pergi ke pasar karena beresiko kerumunan dan tertular, dengan adanya P2L ini apapun yang mau di masak untuk dikonsumsi sudah ada semua di pekarangan, tinggal petik sudah ada semua. Hasil dari P2L ini selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga bisa menambah penghasilan dengan menjual produk ke pasar. Pada tahun 2021 ini lokasi pengembangan P2L berada di Kecamatan Sragen, Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Masaran.

Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi budaya dan agama. Indikator untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dinilai dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (gram/kap/hari dan kilogram/kap/tahun), konsumsi energi penduduk (kkal/kap/hari), dan konsumsi protein penduduk (gram protein/kap/hari). Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kualitas konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Adapun kelompok pangan tersebut mencakup : (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain yang masing-masing memiliki standar pangan.

Pada tahun 2021 AKG tersebut mengalami penyesuaian dalam WNPX tahun 2012, dan telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 75 tahun 2013 sebesar 2.150 kilokalori/kapita/hari dan 57 gram/kapita/hari. Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan Kementerian Pertanian tahun 2001 yaitu: (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4)

Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%. Selanjutnya, berdasarkan hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan dengan masing-masing pembobotnya diperoleh skor PPH. Dari tahun ke tahun skor PPH di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan.

Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stok dan cadangan beras. Pembangunan infrastruktur kemandirian pangan seperti lumbung pangan adalah salah satu alternatif untuk mengelola cadangan pangan daerah. Pada tahun 2021 dibangun 2 lumbung pangan yaitu di Kecamatan Ngrampal dan Kedawung.

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Sragen masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan terjadinya bencana alam. Jumlah desa/kelurahan rawan pangan tinggi di Kabupaten Sragen masih 1,4% dari jumlah total desa/kelurahan. Upaya untuk mengatasi kerawanan dan kerentanan pangan maka melalui Kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibentuklah Desa Mandiri Pangan (DMP), yaitu desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem produksi dan subsistem distribusi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Pada tahun 2021 ada 2 desa mandiri pangan yaitu di desa Kedungwaduk Kecamatan Karangmalang dan Desa Gabus Kecamatan Ngrampal. Untuk kriteria desa mandiri pangan didasarkan pada peta *Food Security dan Vulnerability Atlas (FSVA)* yang berwarna merah (desa miskin). Untuk kriteria pemilihan diserahkan ke kabupaten berdasarkan peta FSVA provinsi Jawa Tengah.

Mengingat begitu besarnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pasar tradisional untuk mendapatkan pangan segar, pengawasan keamanan pangan segar di pasar tradisional sangat urgen dilakukan. Pendaftaran PSAT merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat khususnya *Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)*. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pelaku usaha yang ingin memperoleh nomor pendaftaran PSAT harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Sampai saat ini di Kabupaten Sragen masih banyak pelaku usaha beras yang belum memiliki nomor pendaftaran PSAT. Sampai dengan tahun 2021 dari 1.000 jumlah pelaku usaha baru 4% yang bersertifikat. Kondisi ini diprediksi disebabkan beberapa hal diantaranya masih kurangnya sosialisasi tentang pendaftaran PSAT, pendaftaran yang sifatnya masih sukarela, dan kondisi pelaku usaha yang memang secara administrasi maupun teknis belum mampu memenuhi semua persyaratan yang ada.

4) **Pertanahan**

Pencapaian kinerja pada urusan pertanahan tahun 2021 cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 1 indikator yang menjadi ukuran, yaitu jumlah pendataan tanah aset milik daerah yang ditangani. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan pertanahan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pertanahan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100	9.300.000.000	100	8.443.659.583	100	90,79		
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Jumlah dokumentasi, inventarisasi dan identifikasi aset pertanahan (titik)	280 titik	1.983.364.550	280 TITIK	1.970.198.240	100	99,34		

Sumber Data: Setda Kab. Sragen, 2021, diolah

Untuk urusan pertanahan, tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan kegiatan Pengadaan 2 (dua) bidang tanah dan persertifikatan tanah di Kel. Sine, Kec. Sragen untuk Kantor Pemda Terpadu dan 1 bidang di Kecamatan Miri. Selain itu juga pendataan 200 titik aset tanah milik pemerintah kabupaten sragen. Selain itu dilakukan update aplikasi dan pendataan aset tanah serta hibah ke BPN.

5) **Lingkungan Hidup**

Pencapaian kinerja pada urusan lingkungan hidup tahun 2021 (Semester II) sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 13 indikator yang menjadi ukuran, 4 indikator di antaranya termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, hanya 1 indikator yang kategori capaiannya Tinggi dan 8 indikator yang kategori capaiannya Sangat Rendah. Capaian ini umumnya karena minimnya anggaran.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 (Semester II) pada urusan lingkungan hidup disajikan pada tabel berikut ini.

Salah satu indikator kinerja utama pengelolaan Lingkungan Hidup adalah nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian nya di Tahun 2020 sebesar 62,46 Termasuk kategori Kurang Baik, sehingga Kabupaten Sragen masih perlu lebih keras melakukan upaya pengelolaan lingkungan untuk dapat memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat. Nilai ini merupakan akumulasi dari:

- Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan Skor Sangat baik (97,84), menurun dibandingkan tahun 2020 98,35
- Indeks Kualitas Air dengan Skor 40, hasil dari analisis primer pada 3 sungai dengan pengambilan sampah di hulu dan hilir sungai. Nilai ini naik dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 30.
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan skor 35,59, turun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 42,84, menunjukkan RTH di Kabupaten Sragen masih terbatas

Tabel 2.62
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021
pada Urusan Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	13.277.282.155	100	1094.494.108	100	91,09		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen RPPLH, KLHS RPJMD dan KLHS RDTR yang disusun		200.000.000		181.268.900		90,63		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan dokumen KLHS untuk KRP	100	510.737.180	100	496.898.576	100	97,29		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	RTH yang terpelihara dengan baik (lokasi)	100	230.901.650	100	229.484.400	100	99,39		
ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah jenis usaha dan /kegiatan yang mengelola limbah	100	70.082.000	100	61.060.000	100	87,13		
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Dokumen indentifikasi kearifan lokal								
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis lingkungan hidup (sekolah adiwiyata)	100	49.578.580	100	33.663.400	100	67,9		
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LIMGKUNGAN HIDUP	% kegiatan dan/usaha yang taat pengelolaan lingkungan	100	15.000.000		2.549.800		17,00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	% sampah terolah (wilayah yang mendapat pelayanan dari pemerintah Kabupaten)	17	3.467.281.163	19,51	407.630.700	114,76	98,28		

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup, Disperkim Kab. Sragen, 2021, diolah

Untuk mendorong pencapaian indikator kinerja utama tersebut, Dinas Lingkungan hidup melakukan:

- Pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup dilakukan pemeliharaan rutin di 6 sungai: Sungai Garuda, Nglorog, Mungkung, Gambiran, Swideran I Swideran II. Untuk pengelolaan RTH dilakukan pemeliharaan RTH: Taman Mageru, Taman Sukowati Sragen, Alun-Alun Sasono Langen Putro, Taman Edupark, Tanaman bunga lain, Median Jalan Raya Sukowati, dan Taman Krido Anggo.
- Pemeliharaan 7 Hutan Kota: Hutan Kota Technopark, Hutan Kota Kroyo, Hutan Kota Karangmalang, Hutan Kota Karangtengah, Hutan Kota Ngoncol Nglorog, Hutan Kota Plumbungan, Karangmalang, Hutan Kota Ngablak dan Hutan Kota Terik Plumbungan, Karangmalang.
- Pengelolaan persampahan dengan area pelayanan pengangkutan sampah masih terbatas di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Sragen, Karangmalang, Gemolong, Sidoharjo,

Masaran dan Ngrampal dengan persentase sampah yang terangkut di wilayah pelayanan sebesar 72,94% sampai dengan akhir tahun 2021, naik dibanding tahun 2020 yang sebesar 71%.

- Membuat sumur resapan di Kelurahan Kragilan, Kecamatan Gemolong, Sragen (4 lokasi) dan di Kalijambe (1 lokasi)
- Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan dan mengurangi lahan kritis dengan cara pengadaan bibit tanaman yang diperbantukan di 2 desa (Slendro dan Tanggan, Kec. Gesi) dengan jenis sebagai berikut.
 - Jambu air (650 batang)
 - Tatebuya (50 batang)
- Mendorong sekolah-sekolah di Kabupaten Sragen mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (sekolah adiwiyata). Sampai dengan tahun 2021 ada 35 sekolah adiwiyata yang terdiri dari 19 sekolah adiwiyata tingkat kabupaten 3 sekolah adiwiyata tingkat provinsi, dan 6 sekolah adiwiyata tingkat nasional dan 7 sekolah adiwiyata TK mandiri. Meningkat dibanding jumlah sekolah adiwiyata tahun 2020.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencapaian kinerja pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2021 (Semester II) cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran, 6 indikator tercapai. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	7.152.676.668	100	6.361.701.458	100	88,94		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk ber-KTP	99	789.675.000	98,08	742.484.000	99,08	94,02		
Program pencatatan Sipil	Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran	95	316.221.192	93,90	315.516.192	98,84	99,78		
	Kepemilikan Akta Kelahiran	92		51,31		55,77			
	Rasio Pasangan Berakta Nikah	100		100		100			
	Cakupan Akta Kematian	40		50,04		125,09			
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan Database Kependudukan	100	50.544.000	100	50.191.000	100	99,30		
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan Database Kependudukan	100	21.287.000	100	19.937.000	100	93,66		

Sumber Data: Dispendukcapil Kab. Sragen, 2021, diolah

Rasio Penduduk ber-KTP tercapai dengan kategori baik. Dari target yang ditetapkan 99% tercapai 98,08%. Dari jumlah total penduduk Kabupaten Sragen 755.792 orang Wajib KTP, yang sudah memiliki KTP-Elektronik (sudah perekaman KTP-Elektronik) sebanyak 741.313 orang. Untuk Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran tercapai 93,90%, Data capaian kinerja. Dari 279.277 orang Penduduk Kabupaten Sragen Usia 0-18 Tahun, yang sudah memiliki Akta Kelahiran sebesar 262.246 orang.

Kepemilikan Akta Kelahiran hanya tercapai 51,31%, dari 279.277 orang Penduduk Usia 0-18 Tahun, yang sudah memiliki Akta Kelahiran sebesar 262.246 orang. Untuk Rasio Pasangan Berakta Nikah tercapai 100%. 7.290 pasangan nikah (Non-Muslim), semuanya sudah memiliki Akta Perkawinan. Cakupan Akta Kematian tercapai 50,04%, dari 63.994 penduduk yang meninggal, yang sudah memiliki Akta Kematian sebanyak 32.020 orang.

Dari uraian indikator kinerja Program Pencatatan Sipil tersebut di atas, rata-rata capaian kinerja tercapai 73,81% dengan rata-rata tingkat capaian kinerja 94,93%. Meskipun demikian, Kepemilikan Akta Kelahiran dan Cakupan Akta Kematian harus menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, karena masih sangat banyak penduduk Kabupaten Sragen yang belum memiliki Akta Kelahiran dan masih banyak penduduk Kabupaten Sragen yang sudah meninggal tetapi belum memiliki Akta Kematian.

Ketersediaan Database Kependudukan tercapai 100%. Capaian kinerja tersebut berdasarkan ada/tersedianya database kependudukan di Kabupaten Sragen, baik di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen maupun seluruh Kecamatan se-Kabupaten Sragen.

Database Kependudukan yang dipakai Kabupaten Sragen masih menggunakan aplikasi SIAK. Rata-rata capaian kinerja kependudukan dan pencatatan sipil sudah tinggi (KTP, Akta Nikah, bayi berakta kelahiran) akan tetapi masih ada yang masih rendah capaiannya yaitu kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian.

Pada tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sudah melaksanakan berbagai inovasi pelayanan publik antara lain sebagai berikut.

- Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - SEMEDI (Sehari Mesti Jadi)
 - BARATA (Bayi Lahir Ber-Akta)
 - PAWARTA (Pasien Wafat Ber-Akta)
- Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pecel Pindang (Percepatan Layanan Pindah Datang)
 - Lapur Kakak (Layanan Bagi Purna Tugas Langsung Mendapatkan KTP dan KK)
- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Pandu Online (Pelayanan Kependudukan Terpadu Online) berbasis *web* dan *android*.
 - Aktivasi/Validasi NIK melalui *whatsapp* dan *google form*.
 - Si Anton (Sistem Antrian Online)
- Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - Terpana Doa (Tertib Penataan Dokumen Akta-akta Pencatatan Sipil)
 - ATM KIA (Anjungan Tempat Mencetak KIA)

Selama masa pandemi Covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara *online* melalui **Pandu Online (Pelayanan Kependudukan Terpadu Online)** berbasis *web* dan *android* dan berkas bisa dikirim oleh petugas pos ke rumah.

7) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pencapaian kinerja utama pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2021 (Semester II) dilihat dari capaian Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yang memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Capaian dari Indeks Desa Membangun (IDM) sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat 4 Desa dengan status Mandiri (Desa Kreet, Desa Bedoro, Desa Duyungan, Desa Jetak), 78 Desa dengan status Maju, 113 Desa dengan status Berkembang dan tersisa 1 Desa dengan status Tertinggal yaitu Desa Jenar, Kecamatan Jenar.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan pemberdayaan masyarakat desa disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV		Tingkat Capaian (%)		Predikat Kinerja	
Program Penataan Desa	Tingkat Fasilitasi Penataan Desa	Desa	4	37.075.970	4	25.385.253	100	68,5		
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kerjasama yang disepakati	Kerjasama	1	129.220.260	1	128.425.510	100	99,4		
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	Persentase	100	284.321.160	100	268.418.719	100	94,4		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tingkat Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	17	144.145.790	18	130.916.930	108	90,8		

Sumber Data: Dinas PMD Kab. Sragen, 2021, diolah

Capaian urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak lepas dari belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Sragen yang pada tahun 2021 serapannya mencapai 100% yaitu sebesar Rp.111.545.960.000,00 dan realisasi Dana Desa juga mencapai 100% sebesar Rp 175.365.649.000,00. Sebagai salah satu upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa,

maka diluncurkan program TMMD Sengkuyung I di Desa Jekani, Kecamatan Mondokan, TMMD Sengkuyung II di Desa Tlogotirto Kecamatan Sumberlawang, TMMD Sengkuyung III di Desa Banyuurip, Kec Jenar serta Karya Bhakti TNI Manunggal Guyub Rukun di Desa Ngrombo Kecamatan Tangen.

Semenjak diberikannya Dana Desa dan diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya menambah pendapatan masyarakat desa/pengembangan lembaga ekonomi desa maka banyak Desa mulai berbenah membuat BUMDes. Dari total 196 desa di Kabupaten Sragen, hanya 4 desa saja yang belum memiliki BUMDes. BUMDes yang aktif dinilai berdasarkan kualifikasinya antara lain:

- Kelembagaan,
- Aturan/legalitas,
- Usaha BUMDes,
- Administrasi, pelaporan dan eprtanggungjawaban,
- Permodalan dan Aset
- Dampak BUMDes terhadap masyarakat Desa

Dari total 192 desa yang memiliki BUMDes, ada 1 BUMDes dengan klasifikasi Maju yaitu Desa Gawan Kecamatan Tanon, 1 BUMDes dengan Klasifikasi Berkembang yaitu desa Karangmalang Kecamatan Masaran, 80 BUMDes dengan klasifikasi Tumbuh, dan 110 BUMDes dengan klasifikasi Dasar. Mayoritas BUMDes di Kabupaten Sragen memiliki usaha perdagangan dan simpan pinjam.

Klasifikasi Desa swasembada dari hasil input aplikasi Podeskel milik Pemprov Jateng, yaitu desa yang sudah maju dengan sangat sedikitnya pengaruh adat istiadat terhadap kegiatan ekonomi. masyarakat berinteraksi dengan masyarakat luar berjalan dengan baik untuk fungsi perdagangan dan pemanfaatan teknologi. Ciri-Ciri Desa Swasembada:

- Mata pencaharian di desa tersebut sudah beragam.
- Adat istiadat di desa tersebut telah mengalami perubahan.
- Gotong royong meningkat.
- Terjadi perubahan pola pikir karena adanya pengaruh dari luar.
- Pemerintahan desa sudah mulai berkembang.

Untuk capaian desa swasembada sampai dengan akhir tahun 2021 sudah mencapai 36 desa, dengan tingkatan Mula, Lanjut dan Madya dan tipologi masyoritas persawahan. Desa-desa tersebut dinilai dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik dan peran serta masyarakatnya dalam pembangunan.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pencapaian kinerja utama pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2021 dapat dilihat dari capaian indikator laju pertumbuhan penduduk tahun 2021. Akan tetapi sampai dengan laporan ini disusun, BPS belum selesai menghitungnya. Capaian kinerjanya didukung oleh capaian 7 indikator yang menjadi ukuran, 6 indikator tercapai Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	5.060.301.370	100	4.403.196.731	100%	87%		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rasio Akseptor KB Baru	11%	79.999.700	76,56%	75.603.900	696%	95%		
	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	1 desa		0,24desa		24%			
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	63%	7.379.977.180	74,74%	6.126.941.738	119%	83%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	% SMA/SMK/MA yang memiliki kelompok PIK Remaja	3	795.799.570	3,89%	736.463.570	130%	93%		
	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif	1		1		100%			

Sumber Data: DPPKBPA Kab. Sragen, 2021, diolah

Berdasarkan data bulan November 2021 Rasio akseptor KB baru sebanyak 76,56 yang artinya pencapaian KB baru dibandingkan dengan PPM (perkiraan permintaan masyarakat) yang ditetapkan dari Propinsi, Peserta KB baru sebanyak 17.816 orang dan PPM sebanyak 23.270 orang. Keberhasilan program KB juga tidak lepas dari peran penyuluh KB. Sampai dengan akhir Desember tahun 2021 terdapat 50 penyuluh KB untuk 208 desa/kelurahan atau sekitar 24%.

Untuk capaian Cakupan Peserta KB Aktif sebanyak 74,74 yang didapat dari Pasangan KB Aktif (PA) sebesar 140.475 pasangan sedangkan Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 187.962 pasangan.

Untuk capaian kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Lansia dan Remaja) sebanyak 657 yang tersebar di 208 desa/kelurahan. Sedangkan Petugas lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) baru 50 orang yang mendampingi 208 desa/kelurahan.

Capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai Semester II tahun 2021, ini

menunjukkan kinerja cukup baik kecuali untuk indikator Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) yang belum mencapai target.

9) Perhubungan

Pencapaian kinerja utama pada urusan perhubungan tahun 2021 berpredikat sedang, hal ini tercermin dari capaian Indikator Presentase pemenuhan jalan dari target 72% dapat tercapai 69,9%, meningkat disbanding tahun 2020 yang hanya sebesar 53,73%. Capaian ini didukung oleh 2 indikator yang menjadi ukuran, 1 indikator tercapai. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan perhubungan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Perhubungan

Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	1.079.584.646	87,67	951.081.822	87,67	88,10	➡	➡
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	72	150.000.000	67,22	149.000.000	93,36	99,3	➡	●
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peralatan Keselamatan Kapal	70	0	37	0	52,86		➡	

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kab. Sragen, 2021, diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian pemenuhan perlengkapan jalan dapat dilihat dari Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang sampai dengan akhir Desember Tahun 2021 terdiri dari Rambu lalu lintas 1.298 Unit ATCS 8 Unit, Halte 16 Unit, LPJU 5.814 Unit total perlengkapan jalan kurang lebih 7.136 Unit, dari total 10.200 unit kebutuhan perlengkapan jalan. Sehingga pada tahun 2021 akhir dari RPJMD persentase pemenuhan perlengkapan jalan hanya bisa mencapai 67,22% dari target 72% karena pada tahun 2021 tidak ada pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas di jalan seperti Rabu-Rabu, RPPJ, Warning Lamp, dan Water Barrier hanya diprioritaskan pada perawatan/pemerliiharaan penerangan jalan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan di jalan.

Berdasarkan SK. Bupati Nomor : 551.22/315 /003/ 2020 terdapat 6 (enam) Terminal type C di Kabupaten Sragen, yaitu : Kragilan, Batujamus, Gondang, Tangen, Pasar Bunder, Sumberlawang dan Gemolong dan 1 (satu) Terminal Type B yaitu Terminal Pilangsari

Tabel 2.67
Daftar Terminal Tipe C di Kabupaten Sragen Keadaan Tahun 2020

NO.	NAMA TERMINAL	LOKASI	STANDAR SOP		KETERANGAN
			SUDAH	BELUM	
1	Gemolong	Ds. Gemolong, Kec.Gemolong	√		SK.Bupati Sragen No.551.2/315/003/2020 Tgl.3/8/2020 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Tipe C di Wilayah Kab.Sragen
2	Sumberlawang	Ds.Ngandul Sblawang	√		
3	Jamus	Ds.Mojodoyong, Kec.Kedawung	√		
4	Tangen	Ds.Katelan, Kec.Tangen	√		
5	Gondang	Ds.Gondang, Kec.Gondang	√		
6	Joko Tingkir	Ds.Nglangon, Kec.Sragen	√		

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Sementara itu, data arus penumpang di terminal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.68
Arus Penumpang dan Bus Cepat Kabupaten Sragen
Tahun 2018-2020

No	Jumlah Total	2018			2019			2020		
		Terminal			Terminal			Terminal		
		Pilang sari	Sumber lawang	Gemolong	Pilangsari	Sumber lawang	Gemolong	Pilang sari	Sumber lawang	Gemolong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(8)
1	B u s	49,307	6,039	5,027	59,400	12,223	20,467		9,303	12,756
2	R i t	49,307	18,118	10,054	59,400	18,118	25,129		9,303	12,756
3	Penumpang									
	-Datang	49,307	398,593	125,736	59,400	398,593	326,677		286,794	165,828
	-Turun	117,029	279,992	102,527	44,714	279,992	82,925		191,925	44,646
	-Naik	339,666	280,309	109,119	141,394	280,309	90,464		190,790	51,024

No	Jumlah Total	2018			2019			2020		
		Terminal			Terminal			Terminal		
		Pilang sari	Sumber lawang	Gemolong	Pilangsari	Sumber lawang	Gemolong	Pilang sari	Sumber lawang	Gemolong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(8)
	-Berangkat	49,307	398,910	132,328	59,400	398,910	334,216		285,659	172,206

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Sragen

Dari data diatas pada diketahui bahwa data penumpang pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dikarenakan adanya pandemi.

Tabel 2.69
Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angkutan umum massal							
1	Cakupan wilayah terlayani transportasi	%	82	72	63	54	31,5

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sragen, 2020

Layanan angkutan umum yang masih beroperasi sampai dengan akhir tahun 2020 hanya sebanyak 31,5%. Hal ini dikarenakan banyak kendaraan umum yang sudah berusia tua dan maraknya transportasi online (ojek maupun mobil) dengan kondisi kendaraan yang lebih bagus, bersifat private, pelayanan cepat sampai tujuan, praktis serta biaya lebih murah. Rute Solo (Terminal Tirtonadi) – Sragen (Terminal Sumberlawang) merupakan pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN Sangiran) dimana terdapat halte yang berada di gerbang masuk Sangiran dan gerbang masuk Kemukus, dimana untuk rute Trans Jateng tersebut membutuhkan biaya operasional pertahun di 2021 mencapai Rp 8,7 miliar namun pendapatan di 2021 hanya sebesar Rp 1,1 Miliar Subsidi untuk rute tersebut dianggap Pemprov terlalu besar.

Total penumpang di tahun 2021 sebanyak 327.786 orang dimana sebagian besar merupakan penumpang paket tour wisata di Solo yang berminat untuk ke museum Sangiran, penumpang dari Sragen jumlahnya belum signifikan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jateng berharap Kabupaten Sragen di tahun 2022 mulai memberi perhatian dengan rute tersebut mengingat di tahun ini pariwisata Kemukus menjadi primadona di Sragen. Pemprov berharap untuk tahap awal ada mobilisasi anak sekolah mencoba menggunakan Trans Jateng. Dengan perbandingan kabupaten/kota lain telah ada

promosi mobilitas anak sekolah untuk penggunaan BST. Untuk itu Pemerintah Kabupaten telah berkoordinasi untuk mobilisasi paket edutrip tersebut untuk anak sekolah yang akan dilaksanakan pada masa libur panjang sekolah.

Jumlah kendaraan wajib uji selama lima tahun kedepan semakin berkurang dikarenakan banyak kendaraan angkutan barang beroperasi dan mutasi ke luar Jawa, disamping itu juga banyak kendaraan yang dimakan usia terutama angkutan penumpang umum yang dianggap sudah tidak layak beroperasi untuk dikanibalisasi dipilih onderdil yang bisa digunakan dan dijual secara rosokan. Data jumlah uji kendaraan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.70
Jumlah Uji Kendaraan Tahun 2021

Tahun	Bus/ Penumpang			Barang			Total
	Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total	
2021	421	8	429	8970	53	9023	9452

Pelanggaran dijalan juga masih cukup banyak, dikarenakan biaya perawatan dengan pemasukan belum bisa seimbang sehingga mengabaikan kelaikan kendaraannya dengan kata lain mengabaikan keselamatan di jalan, seperti uji mati dan pelanggaran muatan.

Pada tahun 2022, urusan perhubungan juga mencakup Program Pengelolaan Pelayaran yang pada tahun 2021 belum ada. Berdasarkan data terakhir terdapat 120 kapal yang beroperasi di Kabupaten Sragen, dan dari 120 kapal tersebut pada tahun 2022 ditargetkan terdapat 30 kapal (20%) yang dapat memenuhi standar keselamatan kapal. Kondisi eksisting peralatan keselamatan kapal antara lain: life jacket 399 buah, dan lifebuoy 9 buah, sementara seharusnya ada 972 buah life jacket dan 108 life buoy.

10) Komunikasi dan Informatika

Pencapaian kinerja pada urusan komunikasi dan informatika tahun 2021 belum signifikan. Kondisi ini terlihat dari 3 indikator capaian. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan komunikasi dan informatika disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan
Komunikasi dan Informasi

Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	534.005.120	80	516.336.573	80	96,69	➡	➡
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat	100	1.138.948.430	100	1.035.948.430	100	90,96	➡	➡
APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	1.883.322.410	100	1.728.535.346	100	91,78	●	➡

Sumber Data: Diskominfo, 2021, Diolah

Indikator persentase informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat tercapai dengan kategori baik. Informasi publik ini disampaikan melalui media cetak, radio, pertunjukan rakyat, baliho, videotron, media sosial, kelompok informasi masyarakat, dan sosialisasi secara langsung.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terutama di era digital saat ini, Pemerintah Kabupaten Sragen juga mendorong kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hasil dari implementasi kebijakan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik diukur dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pencapaiannya di tahun 2021 menurun dibanding tahun 2020 yaitu 3,05. Sedangkan di tahun 2020 sebesar 3,35. Hal ini disebabkan diberlakukannya Permenpan RB Nomor 32 tahun 2020 tentang Evaluasi SPBE dimana parameter indikator penilaian dari 34 indikator menjadi 47 indikator sehingga ada beberapa indikator yang belum bisa dipenuhi

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan maka sejak tahun 2017 Pemkab Sragen mengatur pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemkab Sragen sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik. Untuk tahun 2021, pengukuran keberhasilannya terlihat dalam capaian indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dirilis oleh Kementrian Kominfo sebesar 63,62. Meningkat dibanding tahun 2020 yang hanya 50,3.

Dari 51 Perangkat Daerah, hanya 38 Perangkat Daerah yang memiliki website yang aktif dan update. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk tahun 2021 agar informasi pembangunan secara update dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pencapaian kinerja pada urusan Koperasi dan UKM tahun 2021 untuk sub urusan UMKM berupa kenaikan presentase usaha mikro menjadi kecil sebesar menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,66%. Sementara di tahun 2020 persentasenya sebesar 2,55%.

Pencapaian kinerja indikator UMKM yang mengakses pembiayaan bank/keuangan sebesar 0,21% dari 20% yang ditargetkan. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan UMKM untuk mengakses pinjaman modal dari bank. Karena tidak mampu mengembalikan pinjaman sehubungan adanya berbagai pembatasan ruang gerak pada situasi pandemi covid-19.

Disisi lain adanya perubahan kriteria usaha mikro berdasarkan PP nomer.7 Tahun 2021 dimana semula omset usaha mikro maksimal Rp.300 juta per tahun menjadi Rp. 2 miilyard per tahun. Kemudian aset usaha mikro berubah dari semula maksimal Rp.50 juta menjadi Rp. 1 milyar. Hal tersebut mengakibatkan jumlah usaha mikro yang semula bisa dikategorikan naik kelas menjadi usaha kecil berdasarkan kriteria lama menjadi tidak tercapai dengan adanya kriteria baru tersebut.

Sementara untuk capaian kinerja pertumbuhan UMKM telah didukung pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro dalam bentuk pameran UMKM dan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan keamanan pangan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijin P-IRT (Pengrajin Industri Rumah Tangga). Namun demikian pertumbuhan UMKM tidak tercapai sejumlah 67.004 UMKM dari 68.125 UMKM atau tercapai sebesar 98%. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan usaha UMKM sehingga menghambat UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen sampai dengan Semester II tahun 2021 pada urusan Koperasi UKM disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	5.093.020.747	100	4.559.370.815	100	89,52		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Ijin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	100	144.998.550	0	142.082.600	-	97,99		
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	83	56.239.610	33,17535545	51.218.610	39,97031	91,07		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi	100	64.985.000	107	63.181.120	106,5078	97,22		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	% pertumbuhan omset koperasi yang dibina	100	116.981.490	124,78	112.694.580	124,78	96,34		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan UMKM	100	401.307.510	98,35	394.714.760	98,35	98,36		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	% meningkatnya usaha mikro menjadi kecil	1,5	1.619.757.898	0,662435468	1.380.843.050	44,16236	85,24997		

Sumber Data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sragen, 2021, diolah

Jumlah semua koperasi di Kabupaten Sragen adalah 1.162 dengan rincian sebagai berikut :

- Koperasi Aktif sebanyak 210 berdasarkan keaktifan RAT 3 tahun terakhir dengan koperasi yang melakukan RAT tutup buku tahun 2020 sejumlah 179 Koperasi.
- Koperasi Tidak Aktif sebanyak 952 yang terdiri dari 486 Koperasi yang di rekomendasikan untuk di bubarkan berdasarkan Perubahan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dan 466 Koperasi Tidak Aktif yang tidak melaksanakan RAT 3 tahun terakhir.

Dalam usaha pengawasan dan pembinaan Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sragen melakukan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi tutup buku tahun 2020 dengan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 sejumlah 150 Koperasi dengan hasil sebagai berikut :

- Koperasi berpredikat Sehat yaitu dengan skor penilaian 80-100 sejumlah 46,67%
- Koperasi berpredikat Cukup Sehat yaitu dengan skor penilaian 66-79,99 sejumlah 52,67%
- Koperasi berpredikat Dalam Pengawasan yaitu dengan skor penilaian 51-65,99 sejumlah 0,66%
- Tidak ditemukan Koperasi berpredikat Dalam Pengawasan Khusus

Adapun ketidaktercapaian target koperasi sehat tahun buku 2020 tahun pelaksanaan kegiatan tahun 2021 disebabkan oleh berbagai hal, yaitu :

- Masa RAT Koperasi tahun tutup buku 2020 bertepatan dengan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimana regulasi/peraturan saat itu tidak memungkinkan koperasi untuk melaksanakan RAT dengan pertemuan tatap muka guna pengendalian covid -19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kemudian memberikan himbauan berdasarkan Intruksi Bupati tentang PPKM yang berisikan koperasi dapat melakukan RAT dengan cara elektronik melalui media daring atau dengan cara tertulis sehingga masih banyak koperasi tidak melaksanakan RAT.
- Pandemi Covid-19 juga berdampak pada meningkatnya kredit macet yang dialami koperasi.
- Sejumlah anggota koperasi dalam masa pandemi covid-19 juga melakukan penarikan simpanan secara besar-besaran sehingga berdampak pada usaha dan likuiditas koperasi.

12) Penanaman Modal

Pencapaian kinerja utama pada urusan Penanaman Modal tahun 2021 tergolong baik yaitu tercapainya target Nilai investasi sebesar 1,98 Trilyun. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 terdapat 6.072 proyek/ investor dengan realisasi investasi sebesar 2,112 trilyun rupiah, namun capaian ini belum begitu menggembirakan mengingat sektor usaha yang didominasi UMKM baru yang mendaftar dan tidak semuanya diverifikasi terkait ketentuan dari BKPM bahwa usaha dengan omzet dibawah 500 juta sudah dikategorikan sebagai UMKM baik pendaftaran usahanya dilakukan secara *offline* melalui OSS maupun *online*. Akan tetapi hal ini sudah menjadi catatan yang cukup bagus mengingat masih dalam masa pandemi *COVID 19*. Dari 6.072 proyek/ investor di tahun 2021 diperkirakan menyerap tenaga kerja sebesar 21.833.

Capaian ini didukung oleh 7 indikator keberhasilan yang ada, hanya 1 yang tercapai. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan Penanaman Modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021
pada Urusan Penanaman Modal

Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	5.239.913.440	100	4.471.253.840	100	85,33		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	32	59.957.700	30	59.006.100	93,75	98,41		
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	12	150.754.300	10	148.895.045	83,33	99		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	85	162.367.950	82,2	146907700	96,71	90,48		
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	10	469.208.140	8	316.547.340	80,00	67,46		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	40	50.315.200	38	49.296.000	95	97,97		

Sumber Data: DPMPTSP Kab. Sragen, 2021, diolah

Dari tabel terlihat bahwa masih perlu ditingkatkan persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang dapat meningkatkan minat investor PMA/OPMDN, indeks kepuasan masyarakat bidang Perizinan dan Non Perizinan, serta presentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM,

Secara umum urutan sektor investasi yang menyumbang realisasi investasi di Kabupaten Sragen sebagai berikut;

Tabel 2.74
Realisasi Investasi Per Sektor di Kabupaten Sragen Tahun 2021

No	Sektor	Rekap Tahun 2021		
		Proyek	Investasi	Naker
1	Industri Makanan	353	488,689,636,557	2
2	Industri Tekstil	154	367,287,209,220	5
3	Jasa Lainnya	691	365,474,288,834	2
4	Perdagangan & Reparasi	2	313,148,928,208	6
5	Industri Lainnya	97	206,760,923,578	1
6	Konstruksi	209	78,229,933,636	486
7	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	1	75,231,990,631	2
8	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	27	62,612,750,000	131
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	11	40,639,240,000	62
10	Industri Mineral Non Logam	19	29,162,700,000	74
11	Hotel dan Restoran	306	21,523,950,000	621

No	Sektor	Rekap Tahun 2021		
		Proyek	Investasi	Naker
12	Industri Kayu	40	19,711,900,000	161
13	Trasportasi, Gudang dan Telekomunikasi	74	13,193,050,000	203
14	Pertambangan	58	11,033,500,000	325
15	Listrik, Gas dan Air	274	10,555,050,009	498
16	Perikanan	87	2,593,300,000	157
17	Industri Dasar Logam, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	69	2,214,000,000	119
18	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	22	1,336,000,000	61
19	Industri Mesin, Elektronik, Peralatan Listrik, Instrumen Kedokteran dan Optik	26	920,500,000	65
20	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	28	877,000,000	49
21	Kehutanan	11	721,000,000	52
22	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	11	691,000,000	25
23	Industri kulit, Barang dari Kulit dan Alas Sepatu	1	20,750,000	12
	Jumlah	6	2,112,628,600,673	22

Sumber Data: DPMPTSP, 2021

Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Periode II Tahun 2021 melibatkan kurang lebih 2.200 populasi dengan sampel sebanyak 327. Jumlah populasi dan sampel adalah penerima layanan baik perizinan dan nonperizinan, baik yang dilayani secara *offline* maupun secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS), Sistem Informasi Perizinan Online Sragen (SI-PIONER), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIM-BG), dan aplikasi lain. Responden juga bisa mengisi survei kepuasan masyarakat secara *online* atau daring melalui website dengan alamat <https://dpmptsp.sragenkab.go.id/skm/survei>.

Dengan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) yang telah dilakukan mampu meraih indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan dan nonperizinan sebesar 86,50%, dengan kategori BAIK (B) melebihi target yang ditetapkan (82,00). Adapun hasil rekapitulasi unsur penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.75
 Penilaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP
 Kabupaten Sragen Tahun 2021

No	Indikator	Nilai Per unsur	Jumlah Nilai Per unsur : Jml kuesioner yang terisi	NRR Per unsur x 0,111
1	Biaya / Tarif	1.285	3,93	0,44
2	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1.248	3,82	0,42
3	Perilaku Pelaksana	1.128	3,45	0,38
4	Kompetensi Pelaksana	1.106	3,38	0,38
5	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1.097	3,35	0,37
6	Persyaratan	1.095	3,35	0,37
7	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	1.083	3,31	0,37
8	Sarana dan Prasarana	1.079	3,3	0,37
9	Waktu Penyelesaian	1.057	3,23	0,36

Sumber: DPMPTSP, 2021

Jika dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat pada Periode I, terdapat dua unsur yang mengalami pergeseran, sedangkan tujuh unsur yang lain tidak mengalami perubahan. Kedua unsur yang mengalami pergeseran adalah unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur bertukar dengan unsur Kompetensi Pelaksana. Pada Periode I Tahun 2021 lalu unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur berada di urutan nomor 4 dan pada Periode II Tahun 2021 turun ke urutan nomor 5. Sebaliknya unsur Kompetensi Pelaksana pada Periode I berada urutan 5 sedangkan pada periode II pada urutan 4. Hasil rekapitulasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Unsur dengan **nilai tertinggi** adalah unsur **Biaya/tarif**. Hal ini dapat diartikan bahwa pada pemberian layanan perizinan, biaya yang dipungut sesuai dengan ketentuan. Tingginya unsur ini dikarenakan sebagian besar perizinan gratis, hanya beberapa jenis perizinan yang dikenakan biaya/tarif retribusi seperti reklame, izin trayek dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dapat dikatakan pula bahwa kemungkinan adanya pungutan di luar ketentuan sangat kecil.
- Unsur dengan **nilai terendah** adalah **unsur waktu penyelesaian**. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Pada periode I Tahun 2021 waktu

penyelesaian juga menempati nilai terendah. Untuk jenis perizinan yang membutuhkan waktu penyelesaian lama adalah perizinan dan nonperizinan yang membutuhkan rekomendasi dari dinas teknis, misalnya seperti IMB / PBG dan izin kerja untuk tenaga kesehatan. Berkaca dari hasil pada periode I tersebut, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen melakukan upaya perbaikan, antara lain;

- Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis dari instansi teknis (misal dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), setiap OPD teknis menugaskan pegawainya untuk memberikan pelayanan di tempat layanan (*front office*) DPMPTSP Kabupaten Sragen. Diharapkan dengan ditempatkannya pegawai dinas teknis di kantor DPMPTSP, koordinasi akan lebih mudah dilaksanakan.
- Dalam aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online Sragen (SI PIONER), dinas teknis, diberikan hak akses sehingga dalam hal pemberian rekomendasi pemohon cukup mengajukan persyaratan satu kali melalui DPMPTSP setelah itu Dinas Kesehatan dapat mengakses dan memberikan rekomendasi melalui aplikasi SI PIONER.
- Selain itu, pemohon dapat mengetahui status permohonan perizinan melalui menu lacak dokumen di <https://sipioner.sragenkab.go.id/lacak> atau di <https://dpmptsp.sragenkab.go.id/>. Dengan demikian, pemohon bisa mengetahui sejauh mana perizinan mereka telah diproses.
- Pemohon juga dapat memanfaatkan beberapa kanal pengaduan untuk menyampaikan saran masukan maupun keluhan mereka atas layanan yang diberikan DPMPTSP. Kanal pengaduan tersebut sebagai sarana refleksi bagi pihak pemberi pelayanan untuk perbaikan ke depan.
- Unsur dengan **nilai terendah** kedua adalah unsur Sarana dan Prasarana. Sarana dan Prasarana memang menjadi permasalahan tersendiri mengingat ruang perkantoran yang tidak begitu luas, sehingga beberapa standar layanan tidak dapat dipenuhi misalnya ruang *laktasi*, ruang tunggu yang kurang memadai, ruang khusus tim teknis, ruang bebas merokok.

PMPTSP juga telah berusaha melakukan perbaikan secara maksimal dengan menambah jumlah petugas *front office*, menyediakan mesin antrian, menambah komputer, printer dan *scanner* dokumen agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik serta sarana layanan lainnya. Berbagai aplikasi perizinan pun

dapat diakses pemohon secara langsung, sehingga pemohon tidak harus datang ke kantor DPMPSTSP Kabupaten Sragen untuk mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Wewenang Perizinan sebanyak 93 wewenang Perizinan dan Nonperizinan, yang terdiri dari 49 jenis wewenang perizinan melalui Online Single Submission (OSS) dan 44 jenis wewenang perizinan yang dilayani dengan aplikasi SI-PIONER (Sistem, Informasi Perizinan Online Sargen) maupun SIM BG. Semua jenis wewenang perizinan/ nonperizinan yang melalui OSS dilaksanakan secara *online*, sedangkan 31 jenis wewenang perizinan/nonperizinan yang melalui SI-PIONER, sehingga perizinan yang dilaksanakan secara *online* sebanyak 80 (86,02%)

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pencapaian kinerja utama pada urusan pemuda dan olahraga tahun 2021 cukup baik yang dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Jumlah perolehan medali di tingkat provinsi sebanyak 5 medali. Meskipun di awal tahun berbagai kerjuaraan dan pertandingan ditunda. Kegiatan-kegiatan kepemudaan banyak yang tidak dilaksanakan terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Dari target pengiriman pemuda berprestasi 8 orang hanya terealisasi 2 orang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan pemuda dan olahraga disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan
Kepemudaan dan Olahraga

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	5.600.890.770	100	5.264.987.907	100	94,00		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase pemuda berprestasi	100	135.943.880	50	63.204.110	50	46,49		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh	100	1.059.972.690	50	1.058.998.490	50	99,91		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan kapasitas kepramukaan	100	1.250.000.000	100	1.250.000.000	100	100		

Sumber Data: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kab. Sragen, 2021, diolah

Dengan adanya pandemi COVID 19, pada awal Tahun 2021 belum semua event olahraga dapat diselenggarakan pelaksanaannya, sehingga pada Triwulan I event olahraga POPDA

SMA/SMK se-Provinsi Jateng diselenggarakan secara virtual. Pada Triwulan IV ada beberapa event olahraga yang diselenggarakan, sehingga Kabupaten Sragen dapat mengirimkan atletnya, antara lain Kejurprov Karate dan PON dan PEPARNAS Tahun 2021 di Papua. Berikut ini tabel perolehan medali yang diperoleh atlet-atlet Kabupaten Sragen.

Tabel 2.77
Perolehan Medali Tahun 2021

NO	CABANG OLAHRAGA	MEDALI			EVENT
		Emas	Perak	Perunggu	
1	Tarung Derajat	2	2	0	POPDA Virtual Jateng 2021
2	Senam	0	1	0	POPDA Virtual Jateng 2021
3	Panahan	0	1	0	POPDA Non Virtual Jateng 2021
4	Panahan	2	2	3	POPDA Karesidenan 2021
5	Bola Voley Putri	0	1	0	POPDA Karesidenan 2021
6	Bola Voley Putri	0	1	0	PON Papua 2021
7	Renang	0	2	0	PON Papua 2021
8	Karate	1	0	1	Kejurprov Jateng
9	Angkat Berat	3	0	0	PEPARNAS Papua 2021
10	Atletik	2	1	3	PEPARNAS Papua 2021
11	Blind Judo	0	0	2	PEPARNAS Papua 2021
12	Bulutangkis	1	3	0	PEPARNAS Papua 2021
13	Menembak	1	0	1	PEPARNAS Papua 2021
14	Panahan	2	0	1	PEPARNAS Papua 2021
15	Tenis Meja	1	2	1	PEPARNAS Papua 2021
16	Tolak Peluru	1	0	0	PEPARDA Jateng 2021
17	Lompat jauh	1	0	0	PEPARDA Jateng 2021
18	Atletik	0	1	0	PEPARDA Jateng 2021
19	Boccia	0	1	1	PEPARDA Jateng 2021
	Jumlah	17	18	13	

Sumber Data: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, KONI, NPC, Tahun 2021

Untuk pemeliharaan sarana prasarana olahraga yang berstandar (Stadion Taruna dan GOR Diponegoro) dilaksanakan oleh Dinas Perkim, sedangkan Dispora melakukan pembinaan dan pemeliharaan sarpras olahraga di masyarakat. Pada tahun 2021 dilakukan pembinaan 5 Cabor antara lain: Sepakbola,

Bulutangkis, Bola Voli, Sepeda dan Tenis Meja dalam bentuk pengadaan alat olahraga.

Untuk pengembangan organisasi keolahragaan, Pemerintah Daerah Kab. Sragen juga memberikan Hibah pelaksanaan kegiatan olahraga untuk KONI, Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) dan National Paralympic Committee (NPC) sebanyak Rp 975.000.000,00 dan dapat terserap 100%. Sedangkan untuk pengembangan kepemudaan, Pemkab memberikan Hibah kepada Kwarcap Kepramukaan sebesar Rp1.250.000.000,00.

14) Statistik

Pencapaian kinerja pada urusan statistik tahun 2021 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari ketersediaan buku data statistik pembangunan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan statistik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Statistik

Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Capaian Kinerja dan		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data sektoral yang tersedia, terintegrasi dan terbaru	50%	70.000.000	50%	69.997.900	100	100,00		

Sumber Data: Diskominfo, Bappeda Litbang, 2021, diolah

15) Persandian

Pencapaian kinerja pada urusan persandian tahun 2021 tidak dapat dicapai sesuai indicator yang telah ditetapkan karena pergeseran paradigma persandian. Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan persandian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.79
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Persandian

Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Capaian Kinerja dan		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase peningkatan pemahaman PD terhadap keamanan informasi	25%	646.800.000	25%	645.800.000	100	99,85		

Sumber Data: Dinas Kominfo Kab. Sragen, 2021, diolah

16) Kebudayaan

Pencapaian kinerja urusan kebudayaan tahun 2021 cukup baik meskipun termasuk salah satu sector yang terpuruk dengan adanya Pandemi COVID 19. Kondisi ini terlihat dari 5 indikator yang menjadi ukuran, 4 indikator dapat tercapai. Perkembangan capaian target kinerja tahun 2021 pada urusan kebudayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Kebudayaan

Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan/OPK yang dilindungi	45	1.619.999.120	34,4	1.546.642.340	76,44	95,47		
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase obyek kesenian yang dikembangkan	25	234.999.900	20	214.999.900	80	91,49		
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah yang diinventarisasi	30	20.000.000	25	20.000.000	83,33	100		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase obyek yang diduga cagar budaya (ODCB) yang dilestarikan	100	139.998.865	98,54	139.998.865	99	100		
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Masyarakat yang mengapresiasi museum	35	14.999.780	30	14.999.780	85,71	100		

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen, 2021, diolah

Untuk pengembangan kebudayaan telah dilaksanakan:

- Dialog Kebudayaan tentang Cagar Budaya, museum, kesejarahan dan nilai tradisi, kesenian, dan budaya kontemporer. Diikuti 40 orang, dengan mengangkat 2 tema: Bedah manuskrip “Kitab Primbon Haji Imam Tabbri dari Donoyudan, Kalijambe yang selesai ditulis tahun 1857; Bedah manuskrip “Tata Caranipun Tiyang Mantu Ing Tanah Sukowati”, karya Bupati Panji Soemanagara, ditulis sekitar tahun 1930.
- Saresehan aliran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Dilaksanakan saresehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME diikuti oleh warga dari representasi 4 organisasi penghayat yang ada di Kabupaten Sragen.
- Workshop Kawruh Bahasa Jawa. Dilaksanakan 1 kali dengan diikuti 20 peserta siswa dan guru tingkat SMP negeri, swasta, madrasah di Kabupaten Sragen. Tema yang diangkat adalah tentang “Waspada Dumateng Bebaya Sak Iring Kita”, bekerjasama dengan Satuan Damkar Kabupaten Sragen untuk mengenalkan kepada peserta tentang bahaya domestik di rumah, peran ambulan. Materi dan kegiatan disampaikan dalam bahasa Jawa.

Untuk Pembinaan Sejarah, telah dilaksanakan:

- Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan untuk menginventarisasi data potensi Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Sragen. Pada tahun 2021 berhasil diperoleh 10 data dari kategori OPK Teknologi Tradisional dan 13 data dari kategori OPK Pengetahuan Tradisional.
- Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka. Dapat terlaksana sesuai target, yakni melakukan perekaman dan digitalisasi 2 manuskrip: Kitab Adam Makdum, milik keluarga BKPH Poerbadiningrat (saudara PB X) yang dirawat warga Tanggan,

Gesi, Sragen. Karya ditulis manual dengan tangan oleh R.Ng. Sindusastra tahun 1873 merujuk karya sastra R.Ng. Roggawarsito III; Buku Tembang Djawi (Serat Kempalan Warni-warni), ditulis oleh S.Saman, warga Kroyo, Karangamalang pada tahun 1957.

Dalam hal pelestarian cagar budaya, capaiannya sampai akhir tahun 2021 adalah:

- Temuan benda cagar budaya yang diregistrasi sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak 37 *Obyek Yang Diduga Cagar Budaya (ODCB)*, sekaligus yang dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya sebagai dasar proses Penetapan Cagar Budaya.
- Penyelamatan Benda Cagar Budaya dari Penyerahan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2021 ini capaian yang diperoleh sebanyak 11 buah Benda. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap benda-benda yang dilindungi Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai upaya Pelestarian dan dikelola serta dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran bagi kalangan pelajar maupun akademisi dari tingkat PAUD, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- Pemanfaatan Cagar Budaya dengan pelaksanaan Kemah Budaya. Untuk Pengelolaan Permuseuman dilakukan Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala dengan target 10 Data Baru masuk didalam Sistem Informasi Cagar Budaya (SISCA) namun di tahun ini dapat memasukkan 37 data baru. Sehingga capaian kinerja Tahun 2021 melebihi target.

Pengembangan Kesenian Tradisional telah dilakukan:

- Pentas Seni di Taman Mini Indonesia Indah [TMII] Jakarta; Pagelaran Wayang Kulit; Festival Kesenian Sukowati; Pentas Seni Wayang Kulit Kranggan Rt 15 (tidak jadi dilaksanakan karena masih pandemi); Pagelaran Wayang Kulit Bersih Desa; Parade Seni dan Budaya; Music Heritage; Sragen Art Festival dan Hibah sarana dan prasana Komunitas Musik PMCS.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional: Hibah Asosiasi Dalang/Pepadi, Hibah ke Dewan Kesenian Daerah Sragen (DKDS) dan Penerbitan Kartu Identitas Seniman. Dari target 1235 hanya teralisasi 600 lembar kartu seniman. Kondisi ini karena banyak kartu seniman yang masih lama habis masa berlakunya.
- Apresiasi dan Pentas Seni Pelajar
- Pelatihan Seni Budaya dan Bantuan peralatan seni Reog (Tidak jadi dilaksanakan karena setelah diverifikasi, lembaga calon penerima bantuan belum memenuhi persyaratan

administratif, antara lain: surat keterangan terdaftar dari Kemenkumham belum ada).

- Peningkatan Kapasitas Kesenian Tradisional dengan pemberian Bantuan Alat Musik Gamelan

17) Perpustakaan

Pencapaian kinerja utama urusan wajib Perpustakaan pada tahun 2021 terganggu dengan ditutupnya layanan perpustakaan di Kabupaten Sragen. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan Perpustakaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Perpustakaan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	801.416.897	100	732.972.153	100	91,46		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah kunjungan	100	696.952.170	21,12	688.786.169	21,12	98,83		
	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	100		21,20		21,20			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	% Perangkat Daerah yang tertib kearsipan	100	28.901.000	100	28.901.000	100	100,00		

Sumber Data: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Sragen 2021, diolah

Perpustakaan Kabupaten Sragen terdiri dari 1 perpustakaan daerah dan 3 perpustakaan kecamatan (Perpustakaan Gondang, Gemolong dan Jenar), 208 perpustakaan desa, 644 perpustakaan SD/MI, 110 perpustakaan SMP/MTs, 78 perpustakaan SLTA. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, jumlah kunjungannya 35.055 karena masih dalam situasi Pandemi COVID 19, semua layanan perpustakaan umum dan kecamatan tidak dapat beroperasi secara maksimal antara lain: Layanan Anak, layanan perpustakaan keliling (Perling) baik di Sekolah SD, Car Free Day (CFD), Taman Krido Anggo, Lapas dan Pojok Baca Taman Sukowati, sehingga praktis pengunjung perpustakaan di harapkan memaksimalkan layanan I-Sragen yang dapat diakses masyarakat tanpa harus datang ke perpustakaan.

Selama masa pandemi jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan. Perpustakaan sekolah belum optimal membuka layanan karena KBM dilaksanakan sebagian secara daring. Perpustakaan desa dan kecamatan mengurangi jam buka layanan dan membatasi jumlah pengunjung. Tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mendapatkan Dana DAK untuk penambahan pengadaan bahan pustaka sebanyak 2.866 Eksemplar dan 2.600 Judul. Sehingga Jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan Kabupaten sampai tahun 2021 berjumlah 64.033 eksemplar dan 44.254 judul.

18) Kearsipan

Keberhasilan Urusan Kearsipan ditentukan oleh capaian indikator kinerja urusan kearsipan tahun 2021 yaitu persentase unit kerja yang telah menerapkan arsip secara baku dengan target capaian kinerja sebesar 76%. Indikator ini didukung oleh 2 indikator kinerja. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2021 urusan Kearsipan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.82
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Kearsipan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	801.416.897	100	732.972.153	100	91,46		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	% Perangkat Daerah yang tertib kearsipan	100	28.901.000	100	28.901.000	100	100,00		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELEMATAN ARSIP	Jumlah arsip tekstual dan non tekstual yang terkelola dengan baik	78	39.150.000	60	39.150.000	76,92	100,00		

Sumber Data: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Sragen, 2021, diolah

Pencapaian penerapan arsip baku dilakukan dengan beberapa program. Tahun 2021 dilakukan Akuisisi di 3 OPD, pendataan Arsip 6 OPD, dan pemusnahan Arsip 1 OPD. Dari 35 OPD yang dibinam yang menerapkan arsip secara baku, hanya 12 unit kerja/SKPD yang menerapkan arsip secara baku. Namun karena pandemi Covid-19, terdapat *refocussing* anggaran dan masih diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga kurang optimalnya kegiatan pembinaan maupun pengelolaan arsip.

c. Urusan Pilihan
1) Kelautan dan Perikanan

Pencapaian kinerja urusan pilihan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 5 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, 3 indikator tercapai. Sedangkan realisasi keuangan sudah cukup baik. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan kelautan dan perikanan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.83
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan
Kelautan dan Perikanan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi		7.069.395.004		7.244.572.744	100	102,48		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3244642 KG	25.000.000	2434195 KG	21.833.450	75,02%	87,33		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	65000000 KG	1.696.804.079	41737800 KG	1.266.704.150	64,212	74,65		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah poklshar penerima pelatihan	4 kelompok	25.000.000	4 kelompok	23.284.780	100	93,14		

Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen, 2021, diolah

Produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 2.434.195 kg, capaian ini meningkat 4,23% dibanding tahun 2020. Meski capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun capaian ini hanya 75,02% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2021. Faktor penyebabnya adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang berimbas pada pembatasan aktifitas jual-beli di pasar dan menurunnya daya beli masyarakat terhadap hasil perikanan. Karena hasil tangkapan nelayan kurang laku di pasar sehingga banyak nelayan beralih ke mata pencaharian lain yang lebih bisa menunjang pemenuhan kebutuhan ekonominya.

Produksi perikanan budidaya tahun 2021 sebesar 42.418.140 kg, capaian ini meningkat 3,40% dibanding tahun 2020. Meski capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun capaian ini hanya 64,21% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2021. Capaian produksi perikanan budidaya yang tidak tercapai adalah sektor budidaya Karamba Jaring Apung (KJA) di Waduk Kedung Ombo (WKO). Hal ini dikarenakan satu-satunya perusahaan budidaya KJA di WKO yaitu PT. Aqua Farm yang tiap tahunnya menyumbang produksi +/- 3.000.000 kg menutup usahanya. Selain itu faktor alam seperti terjadinya upweeling di WKO mampu menyebabkan kematian ikan secara masal.

Sedangkan lokasi perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Sragen meliputi WKO, Waduk Ketro, Waduk Gebyar, Waduk Botok, Waduk Brambang, Cekdam Ngepringan dan sungai di sepanjang Bengawan Solo. Jenis ikan yang ditangkap antara lain nila, tawes, mujahir, kutuk, betutu, udang, lele, belut, tombro/mas, patin dan katak. Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Perikanan tahun 2021 ada 13 kelompok, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sejumlah 53 UPI. Jumlah Rumah Tangga Petani Nelayan di Kabupaten Sragen ada 974.

2) Pariwisata

Pencapaian kinerja utama urusan pilihan pariwisata dapat dilihat dari pencapaian presentase kenaikan kunjungan wisatawan. Akan tetapi dengan adanya pandemi COVID 19,

sektor ini lah yang paling terpuruk sehingga tidak mungkin tercapai apalagi dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengharuskan semua destinasi wisata ditutup pada awal pandemi. Demikian juga usaha jasa pariwisata seperti Hotel/penginapan/ Guest house, Restoran/warung makan, Panti Pijat, Salon Kecantikan, Karaoke, Kerajinan di sekitar Obyek Wisata serta Biro Perjalanan Wisata (BPW) mengalami stagnasi bahkan mengalami zero pemasukan jika pemiliknya tidak berinovasi beralih usaha.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan pariwisata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.84
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pariwisata

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi wisata yang tertata	100	5.653.802.885	100	5.211.796.720	100	92,18		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	5	129.998.980	5	129.748.980	100	99,81		

Sumber Data: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Sragen, 2021, diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, hanya ada 41.318 orang kunjungan wisatawan di ODTW milik Pemerintah Kabupaten Sragen. Rincian jumlah kunjungan wisatawan per Triwulan selama tahun 2021.

Tabel 2.85
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sragen Tahun 2021 (orang)

No	ODTW	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Jumlah
1	PAP Bayanan	0	0	0	3,82	3,82
2	Gunung Kemukus	3,396	3,295	0	4,796	11,487
3	Kolam Renang Kartika	0	0	0	0	0
4	Museum Sangiran	0	8,674	0	17,337	26,011
	Jumlah	3,396	11,969	0	25,953	41,318

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab Sragen, 2021

Selama pandemi COVID 19 tahun 2021, Pemkab Sragen mengambil kebijakan dengan membuka obyek wisata secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ketika pandemi Covid 19 sudah melandai pada akhir akhir Triwulan 4 Tahun 2021 semua obyek wisata sudah dibuka untuk umum, kecuali Kolam Renang Kartika. Event pariwisata tahunan di OW Gunung Kemukus yaitu **Prosesi Larap Langse** tetap dilaksanakan

dalam masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Personil (peraga kesenian) yang terlibat dikurangi jumlahnya. Acara **Rebut Toya** (pembagian air bekas cucian slambu makam) ditiadakan untuk menghindari terjadinya kerumunan massa. Pentas wayang kulit juga ditiadakan, diganti dengan tahlilan doa bersama.

Tabel 2.86
Jumlah Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Tahun 2021 (Rp)

No	ODTW	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Jumlah
1	Tiket Masuk Museum Sangiran	0	69,427,000	0	144,578,000	214,005,000
2	Tiket Masuk PAP Bayanan & Ngunut	0	0	0	19,814,000	19,814,000
3	Tiket Masuk Gunung Kemukus	24,762,000	26,191,000	0	32,866,000	83,819,000
4	Tiket Masuk Kolam Renang Kartika	0	0	0	0	0
5	Parkir Masuk PAP Bayanan & Ngunut	0	0	0	2,098,000	2,098,000
6	Parkir Masuk Gunung Kemukus	1,075,000	1,075,000	0	3,160,000	5,310,000
	Jumlah	25,837,000	96,693,000	0	202,516,000	325,046,000

Sumber Data: Dispora, 2021

Tahun 2021, ODTW Pemandian Air Panas Bayanan mendapatkan alokasi DAK Fisik dari pemerintah pusat untuk pembangunan:

- Pembangunan Mushola/Tempat Ibadah 1 unit
- Pembangunan Gazebo 20 unit
- Pembangunan Panggung Kesenian/Amphiteater 1 unit
- Pembangunan Lampu Taman Tenaga Surya 20 unit
- Pembangunan Tempat Parkir 660 M2
- Penataan Lansekap 2 paket
- Pembangunan Toliet (jaringan air bersih, sumur, pompa, jaringan lisrik dll) 2 paket

Dari sumber DAK Non Fisik juga, pada tahun 2021 dilakukan pelatihan dalam upaya pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang pariwisata, antara lain.

- Pelatihan Digitalisasi Branding Pemasaran dan Penjualan
- Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Daya Tarik Wisata
- Pelatihan Kebersihan Lingkungan Sanitasi dan Pengelolaan Sampah
- Pelatihan Pemandu Wisata Buatan
- Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata

- Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Hyginietas Sajian Kuliner
- Pelatihan Tata Kelola Bisnis dan Pemasaran

Selain itu juga dilaksanakan kegiatan yang menunjang promosi dan pemasaran pariwisata yang dananya bersumber dari DAK Non Fisik, antara lain: Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata 1 paket; Pembuatan Konten Promosi Multimedia 1 paket; Pembuatan Tourism Map 137 eksemplar.

3) Pertanian

Kabupaten Sragen menjadi lumbung padi dalam skala nasional dan peringkat tiga di Provinsi Jawa Tengah. Luasan penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Sragen tahun 2021 seluas 39.824 hektar dengan rincian lahan sawah irigasi seluas 25.507 hektar dan lahan sawah tadah hujan 14.317 hektar. Tanaman padi, jagung, kedelai merupakan *standing crops* utama di Kabupaten Sragen. Varietas padi yang biasanya ditanam yaitu *Ciherang*, *Inpari 32*, *Pepe*, *Mikongga* dan *Situbagendit*. Varietas jagung biasanya jagung *hibrida*, *komposit*, dan *lokal* sedangkan varietas kedelai yang ditanam yaitu *Grobogan* dan *Anjasmoro*. Dari lahan pertanian tersebut dihasilkan produksi padi sebesar 703.460 ton GKP setara dengan produksi beras 387.395 ton beras, produksi jagung sebesar 155.444 ton dan kedelai 1.364 ton. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.

Capaian tersebut didukung oleh 13 indikator kinerja, 10 indikator termasuk dalam kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 (Semester II) pada urusan pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pertanian

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi		7.069.395.004		7.244.572.744	100	102,48		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3244642 KG	25.000.000	2434195 KG	21.833.450	75,02%	87,33		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	65000000 KG	1.696.804.079	41737800 KG	1.266.704.150	64,212	74,65		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah poklahsar penerima pelatihan	4 kelompok	25.000.000	4 kelompok	23.284.780	100	93,14		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	jumlah kelompok penerima bantuan ternak	169	19.473.876.350	67	18.515.312.331	100	95,08		
	Jumlah petani tembakau yang mendapat pelatihan	70		70		100			
	peterernakan ikan								
	Jumlah bulan pemeliharaan ternak AUT di UPT AUT-RPH	12 bulan	159999880	12 bulan	156850000	100	98,03132352		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah kelompok penerima bantuan ternak	2 kelompok	299999930		262.068.400	100	87,36		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah tersedianya desinfectan	260 liter	108.499.180	260 liter	102.847.300	100	94,79085464		
	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan RPH di UPT AUT-RPH	12 bulan		12 bulan		100			
	Jumlah sampel yg diuji	120 sampel		120 sampel		100			
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah unit (paket) pengadaan dan rehab sarpras pasar hewan	2 paket	309.999.766	2 paket	306.372.350	100	98,83		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok penerima pelatihan	4 kelompok	49.999.920	4 kelompok	47.716.350	100	95,43		

Sumber Data: Distanketapang, Disnakkan Kab. Sragen, 2021, diolah

Indikator dan target kinerja urusan pertanian tahun 2021 adalah produksi tanaman pangan utama padi, jagung dan kedelai yang dihitung per satuan luas lahan (kuintal/hektar). Capaian kinerja urusan pertanian sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 adalah:

- Produktivitas Padi 65,02 Kui/Ha
- Produktivitas Jagung 70,06 Kui/Ha
- Produktivitas Kedelai 16,27 kui/Ha

Pencapaian kinerja urusan pertanian ini tidak lepas dari peran petani. Bagaimana petani mengolah tanah sebelum ditanam, pengaturan pengairan, proses memilih bibit unggul, proses penanam bibit padi, proses pemupukan, hingga padi dapat dipanen tepat waktu harus dilakukan dengan disiplin. Selain itu penguatan kelembagaan petani khususnya di **kelompok tani** dan **gabungan kelompok tani** (gapoktan) perlu lebih ditingkatkan lagi. Sampai dengan Desember 2021 ini jumlah kelompok tani yang terdaftar di Kabupaten Sragen sebanyak 1.350 kelompok dan tergabung dalam 205 gapoktan. Tidak hanya itu penguatan kelembagaan penyuluhan juga perlu penguatan dari segi personil karena peran penyuluh dalam mendampingi petani di lapangan.

Kondisi ideal setiap desa itu mempunyai satu Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Namun realita dilapangan memang jauh dari harapan, jumlah penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Sragen adalah sebanyak 90 orang dengan wilayah binaan sebanyak 205 desa. Secara rerata seorang penyuluh harus menangani petani di tiga desa sehingga membuat pendampingan tidak berlangsung efektif dan optimal. Ditambah lagi pada tahun 2021 ini masih ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro jadi kegiatan yang sifatnya memberikan bimbingan teknis kepada petani dalam jumlah banyak dan berskala besar belum dapat dilaksanakan. Hal ini juga terlihat pada kegiatan pemasaran/promosi produk pertanian unggulan juga tidak dapat dilaksanakan karena masih adanya pembatasan pada masa pandemi.

Selain tanaman pangan utama Kabupaten Sragen juga penghasil tanaman hortikultura dan perkebunan. Tanaman hortikultura yang dominan yaitu **bawang merah dan cabe besar**. Sampai dengan Desember 2021 jumlah produksi tanaman hortikultura mencapai 4.558 ton. Untuk tanaman bawang merah di Kabupaten Sragen sudah ada demplot kerjasama dengan **Bank Indonesia** yang berlokasi di Desa Kendal, Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen. Sedangkan sentra untuk tanaman cabe berlokasi di Kecamatan Kedawung. Untuk tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Sragen yaitu **tebu**. Sampai dengan Desember 2021 produksi tanaman perkebunan mencapai 30.944 ton.

Kabupaten Sragen merupakan penghasil **padi organik**. Luasan pengembangan padi organik sampai dengan Desember 2021 sebesar 230 hektar tersebar di tiga desa yaitu desa Jetis, Jambeyan dan Sukorejo Kecamatan Sambirejo. Ketiga desa tersebut sudah mendapatkan sertifikasi dari lembaga *sertifikasi INOFICE*. Pengembangan padi organik direncanakan seluas 1.500 hektar dengan lokasi Kecamatan Sambirejo, Kedawung dan Gondang. Tentunya diperlukan dukungan saprodi, pendampingan PPL di wilayah sentra, fasilitasi sertifikasi, kerjasama dengan asosiasi padi organik dan mengundang investor/eksportir untuk bekerjasama dalam hal pemasaran produk.

Ketersediaan infrastruktur pertanian masih menjadi faktor penentu peningkatan produktivitas pertanian utama. Pada tahun 2021 dibangun infrastruktur pertanian yang berupa sumur dalam, jaringan irigasi tersier, embung, dam parit dan jalan usaha tani. Pembangunan sumur dalam di 10 lokasi yaitu di Kecamatan Masaran, Sragen, Ngrampal, Kalijambe, Karangmalang, Sidoharjo, Sambirejo, Gondang, Kedawung dan Sukodono. Pembangunan dam parit di Kecamatan Sambirejo dan embung pertanian di Kecamatan Miri. Untuk pembangunan jaringan irigasi di desa Pengkok Kecamatan Kedawung. Dalam rangka memperlancar

akses pemasaran produk pertanian maka tahun 2021 ini dibangun jalan usaha tani yang berlokasi di 8 kecamatan yaitu di kecamatan Kalijambe, Miri, Karangmalang, Ngrampal, Sragen, Kedawung, Masaran dan Sidoharjo.

Peran strategis mekanisasi pertanian melalui alsintan adalah proses menjadi lebih cepat, dengan pemanfaatan alsintan lebih menguntungkan karena dapat menghemat waktu pengolahan tanah, menekan biaya produksi dan masa tanamnya bisa lebih cepat, sehingga dalam satu tahun bisa dua atau tiga kali tanam. Pada tahun 2021 terdapat bantuan alsintan sebanyak 228 unit untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.

Ketersediaan air yang kurang dan iklim yang tidak mendukung ini dapat juga memicu serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang meluas. Hama tikus penyebab utama kerusakan di seluruh fase pertumbuhan padi dan jagung. Luasan serangan pada saat ini seluas 342 Ha kriteria ringan yang tersebar di 11 kecamatan meliputi Kec. Sragen (2 Ha), Karangmalang (12 Ha), Kedawung (5 Ha), Sidoharjo (25 Ha), Ngrampal (2 Ha), Gondang (80 Ha), Sambungmacan (30 Ha), Tanon (72 Ha), Gemolong (4 Ha), Kalijambe (25 Ha), Plupuh (65 Ha), Sukodono (5 Ha) dan Jenar (15 Ha). Upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah dengan memerintahkan kepada petugas lapangan agar melakukan gerakan pengendalian serentak bersama dengan kelompok tani setempat. Adapun upaya pengendalian yang sudah dilaksanakan seluas 444 hektar.

Berkaitan dengan endemis hama tikus di Kabupaten Sragen, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah dibantu oleh **Laboratorium PHP Palur Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah** utamanya dalam penyediaan obat tikus (Tiran, Rodentisida, Basmikus). Selain itu pada tahun 2021 ini juga telah mengadakan rumah burung hantu sebanyak 20 paket, burung hantu (*tyto alba*) sebanyak 20 ekor dan 563 unit emposan belerang untuk menanggulangi hama tikus.

Subsidi pupuk kerap menjadi sorotan karena dinilai tidak tepat sasaran dan juga keluhan kelangkaan. Selisih antara kebutuhan dan jumlah yang disubsidi oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab produksi dan produktivitas tidak optimal. Untuk Kabupaten Sragen ketersediaan pupuk bersubsidi tahun 2021 adalah sebesar 38.660,84 ton.

4) Perdagangan

Pencapaian kinerja utama urusan perdagangan pada tahun 2021 dapat dilihat dari Nilai Ekspor perdagangan dengan capaian 2.897.989 US\$. Selain itu juga capaian indikator *kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB*, akan tetapi sampai laporan ini dibuat nilainya masih dalam proses penghitungan BPS Kabupaten

Sragen. Indikator Kinerja utama tersebut didukung oleh capaian 4 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dan 3 indikator masuk dalam kategori Sangat Tinggi dan Tinggi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan perdagangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Perdagangan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	15.160.201.069	100	14.228.230.885	100	93,85		
Program : PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar yang memenuhi ketentuan	58	2.215.681.990	50	2.199.558.490	86,2069	99,27		
Program : STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting	100	46.250.000	100	45.739.600	100	98,78		
Program : PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor perdagangan	3332900 USD	13.750.000	2897989 USD	13.665.600	86,95097	99,39		
Program : STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTP yang ditera	100	154.570.150	87,12857143	153.456.560	87,12857	99,28		
Program : PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase produk unggulan yang bisa diterima pasar internasional	41	10.000.000	42,85714286	9.881.450	104,5296	98,81		
Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase administrasi keuangan yang tercukupi	100	15.160.201.069	100	14.228.230.885	100	93,85252		
Program : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase pertumbuhan industri	2,01	982.895.770	0,607483792	876.267.570	30,22307	89,15		

Sumber Data: Disperindag Kab. Sragen, 2021, diolah

Dari target nilai ekspor perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2021 yang ditarget 3.332.900 US\$ realisasinya hanya 2.897.989 US\$ atau 86,97%. Penyebab tidak tercapainya target ini adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang belum berakhir yang menyebabkan perlambatan ekonomi global dan menyebabkan penurunan permintaan ekspor.

Jumlah kelompok pedagang/usaha informasi di Kabupaten Sragen ada 23 kelompok dengan rincian 19 Kelompok PKL di luar kecamatan Sragen Kota dan 4 kelompok PKL di wilayah Sragen Kota yaitu PKL Ngupoyo Upo, PKL Taruno Mulyo, PKL CFD Sukowati dan PKL Pasar Tiban. Dari 23 Kelompok pedagang/usaha informal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2021 ditarget melaksanakan pembinaan sebesar 17% atau setara 4 kelompok pedagang, namun karena keterbatasan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya bisa membina 2 kelompok PKL saja yaitu Kelompok PKL di Kecamatan Sumberlawang dan Sambungmacan. Sehingga secara prosentase dari target 17% cakupan bina kelompok pedagang/usaha informaal hanya tercapai 8,7% atau 51,15% dari target.

Jumlah kelompok pedagang/usaha informasi di Kabupaten Sragen ada 23 kelompok dengan rincian 19 Kelompok PKL di luar

kecamatan Sragen Kota dan 4 kelompok PKL di wilayah Sragen Kota yaitu **PKL Ngupoyo Upo, PKL Taruno Mulyo, PKL CFD Sukowati dan PKL Pasar Tiban**. Dari 23 Kelompok pedagang/usaha informal tersebut hanya bisa membina 2 kelompok PKL saja yaitu Kelompok PKL di Kecamatan Sumberlawang dan Sambungmacan atau hanya tercapai 8,7% karena keterbatasan anggaran. Tahun 2021 juga dihasilkan 3 DED yaitu DED Pasar Barong Kecamatan Sumberlawang, DED Pasar Saren di Kecamatan Kalijambe dan Review DED Pasar Nglangon yang akan direvitalisasi di tahun 2022.

Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dilakukan dengan ketercapaian indikator **persentase** alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera dengan target 100% dan tercapai 87,13% dengan capaian kinerja juga 87,13%. Capaian ini diperoleh dari target 7.000 alat UTTP yang ditera pada tahun 2021 UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa melaksanakan tera/tera ulang atas 6.099 alat UTTP. Meskipun secara kuantiti jumlah UTTP tidak terpenuhi namun dari segi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi tera/tera ulang dari target Rp. 88.000.000 bisa tercapai Rp. 90.008.500. Hal ini disebabkan karena UPT Metrologi Legal lebih berfokus melaksanakan tera/tera ulang pada alat UTTP yang mempunyai nilai retribusi lebih besar.

Keberhasilan pemasaran produk dalam negeri terlihat dengan ketercapaian indikator prosentase produk unggulan yang bisa diterima pasar internasional dengan target 41% dengan realisasi 42,85% dan capaian kinerja 104,53%. Hal ini tercapai dari 7 produk unggulan Sragen yaitu batik, goyor, mebel, beras organik, konveksi, makanan olahan, kerajinan bambu terdapat 3 produk unggulan yang bisa diterima pasar internasional yaitu batik, furniture dan makanan olahan.

Selama tahun 2021 tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting cukup stabil antara lain berupa tersedianya beras, gula pasir, minyak goreng, daging, telur, susu, dll meskipun telur mengalami lonjakan harga terutama menjelang hari Raya Natal dan tahun baru. Factor pendorong tercapaiannya target adalah pengawasan pelaku usaha terkait distribusi barang pokok dan barang penting serta pemantauan dan pengendalian harga di 30 pasar.

Sarana dan prasarana perdagangan yang tersedia di Kabupaten Sragen sampai akhir Desember 2021.

Tabel 2.89
Sarana dan prasarana perdagangan yang tersedia
di Kabupaten Sragen

No.	Sarpras Perdagangan yang berizin	Jumlah
1	Pasar tradisional	46
2	Supermarket/swalayan	2
3	Minimarket	72
4	Pertokoan	27.612

Sumber Data: Disperindag Kab. Sragen, 2021, diolah

Pemerintah Kabupaten Sragen melakukan pemeliharaan berkala untuk pasar tradisional tersebut. Dari 46 pasar yang ada di Kabupaten Sragen sampai dengan Semester II tahun 2021 terdapat 23 pasar yang memenuhi ketentuan atau 50% dari target 58%. persentase ketercapaian target mencapai 86,21%. Pada tahun 2021 Pemkab Sragen merevitalisasi 1 pasar yaitu Pasar Barong di Kecamatan Sumberlawang dengan sumber dana dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI dengan anggaran Rp. 3.805.000.000. Untuk 22 pasar yang lain sudah direvitalisasi secara bertahap dari tahun 2015 -2020. Dari 46 pasar yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan semua sarana dan prasarana persampahannya dalam kondisi baik. Armada sampah, alat kebersihan dan tenaga kebersihan tercukupi di semua pasar sehingga realisasinya bisa tercapai 100%.

5) Perindustrian

Pencapaian kinerja urusan perindustrian pada tahun 2021 dapat dilihat dari capaian% kontribusi industri pengolahan dalam PDRB ADHB. Akan tetapi sampai dengan laporan ini disusun data masih proses penghitungan di BPS. Selama beberapa tahun terakhir capaiannya mendominasi di Kabupaten Sragen. Capaiannya didukung oleh capaian kinerja 6 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan. Dari 9 ukuran, 4 indikator tercapai. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan perindustrian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.90
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Perindustrian

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase administrasi keuangan yang tercukupi	100	15.160.201.069	100	14.228.230.885	100	93,85252		
Program PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase pertumbuhan industri	2,01	982.895.770	0,607483792	876.267.570	30,22307	89,15		

Sumber Data: Disperindag Kab. Sragen, 2021, diolah

Dengan adanya pandemi COVID 19, industri banyak mengalami kendala untuk berkembang sehingga capaian% pertumbuhan industri hanya mencapai 0,61%. Rincian jenis industri, jumlah unit industri, penyerapan tenaga kerja, jumlah produksi dan nilai produksi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91
Perkembangan Industri Kecil, Sedang dan Besar
di Kabupaten Sragen Tahun 2021

No	Jenis Industri (2021)	Jumlah Unit industri	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Jumlah Produksi (ton/ pcs/unit/kg)	Nilai Produksi (Juta)
1.	Kecil	19.680	40.981	298.138.622	450.683,00
2.	Sedang	21	19.615	14.943.372	1.406.250
3.	Besar	7	16.730	1.195.415	1.598.899

Sumber Data: Disperindag Kab. Sragen, 2021

Persentase pertumbuhan industri dari target 2,01% tercapai 0,61%. Capaian ini diperoleh dari jumlah IKM di Kabupaten Sragen tahun 2020 sebesar 19.580. Pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah industri sebanyak 119 IKM terdiri dari 112 IKM (data dari DPMPTSP) dan 7 industri menengah besar yang masuk dalam SiiNAS.

Prosentase unit usaha IKM yang mendapat pembinaan dari target 4,24% tercapai 1,75%. Jumlah IKM di Kabupaten Sragen sebesar 19.680. Dari total 19.680 IKM tersebut pada tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai target pembinaan 4,24% atau 835 IKM. Namun karena keterbatasan anggaran pada tahun 2021 hanya membina 345 orang atau 1,75% dari jumlah IKM yang ada. Pembinaan dilaksanakan dengan sumber dana dari anggaran DBHCHT, jenis pembinaan yang dilakukan adalah pelatihan pelinting rokok.

6) Transmigrasi

Pencapaian kinerja urusan Transmigrasi pada tahun 2021 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 1 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan urusan Transmigrasi dan termasuk kategori Baik. Walaupun masih di masa pandemi COVID 19 tapi masih memungkinkan untuk melaksanakan perpindahan penduduk (Transmigrasi) dengan Protokol Kesehatan yang memadai.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2020 pada urusan transmigrasi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Transmigrasi

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase penempatan transmigran terhadap calon transmigrans	100	21.911.998	100	22.973.720	100	104,85		

Sumber Data: Disnaker Kab. Sragen, 2021.

RKPD Kab.Sragen Tahun 2023

Dengan terlaksananya kegiatan Transmigrasi ini sehingga pencapaian target kinerja telah berhasil 100% dari target yang telah tentukan sebanyak 1 KK ke provinsi Kalimantan Tengah.

d. **Urusan Penunjang Pemerintahan**

1) **Penunjang Sekretariat Daerah**

Pencapaian kinerja utama fungsi Administrasi Pemerintahan pada tahun 2021 terlihat dari capaian indeks SAKIP dan Nilai IKM pelayanan publik. SAKIP merupakan sistem yang digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil meliputi proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran kinerja. Capaian Kabupaten Sragen tahun 2020 yang diberikan pada tahun 2021 adalah B dengan skor 61,98.

Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan publik pada tahun 2021 sebesar 82,43 yang berarti pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen di tahun 2021 masuk dalam kategori **Baik**. Kondisi ini didukung oleh capaian kinerja 20 Kecamatan, Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian LPBJ, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Administrasi Pembangunan), Sekretariat DPRD, Diskominfo, Inspektorat dan DPMPTSP. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan Administrasi Pemerintahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021
pada Urusan Sekretariat Daerah

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	32.881.093.715	100	29.921.686.813	100	91,00		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100	3.187.808.604	100	1.416.961.890	50	44,45		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase pelaksanaan program pemerintah dan kesejahteraan rakyat	100	14.314.564.660	94,64	13.548.381.981	94,65	94,65		

Sumber Data: Setda, Diskominfo, Inspektorat, OPD terkait lain, 2021, diolah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah terdiri dari:

a) Bagian Kesejahteraan Rakyat:

Kelompok masyarakat yang mendapat bantuan hibah/bantuan sosial (Bagian Kesra Setda) antara lain: Hibah Pokmas, Bansos Pokmas, Hibah/Lembaga, sarana prasarana, Bantuan Sosial keagamaan meliputi: Madin, Ponpes, TPQ, Beasiswa 1, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

b) Bagian Perekonomian Setda:

BUMD yang sehat dan mendapatkan fasilitas sarana

prasarana maupun penyertaan modal tahun 2021 dari Pemerintah Kabupaten Sragen antara lain: PT. Bank Jateng Cab. Sragen ; PT. BPR BKK Karangmalang; PT. BPR Syariah Sukowati; PT. BKK Jateng Cab Sragen; PD. BPR Djoko Tingkir; PDAM (Perumda Air Minum); Perumda Bengkel Terpadu; Perumda Percetakan dan Penerbitan; PT. Gentrade; serta Bengkel Terpadu.

c) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Selama tahun 2021, jumlah paket pengadaan LPSE sebanyak 129 paket dan 12 standarisasi.

d) Bagian Hukum

Jumlah produk Hukum yg dipublikasikan terdiri dari 8 peraturan Daerah dan 80 Peraturan Bupati.

e) Bagian Organisasi

Dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 yang dilaksanakan pada 63 Unit pelayanan diperoleh hasil nilai rata-rata 82,43. Pelayanan di Kabupaten Sragen secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik;

Pada tahun 2021 dilaksanakan pengukuran Kematangan Organisasi Daerah dengan menggunakan aplikasi SIKOD dan diperoleh hasil tingkat Kematangan Organisasi Daerah di Kabupaten Sragen sebesar 31,54 (kategori Sedang)

Ketiga tahap Penyederhanaan Birokrasi (PB) yaitu Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan, Penyesuaian Sistem Kerja. Pada tahun 2021 di Kabupaten Sragen telah melaksanakan dua tahapannya yaitu Penyederhanaan Struktur Organisasi yang mendasarkan pada Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Serta penyetaraan jabatan dengan terbitnya Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

Selain itu pada akhir tahun 2021 dilakukan pelantikan 235 pejabat yang terdiri dari 2 pejabat eselon III dan 233 pejabat eselon IV, yang mendasarkan pada Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Pada tahun 2021 dikirimkan 11 inovasi pelayanan publik ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di KemenpanRB namun tidak ada yang lolos top 40.

f) Bagian Pemerintahan

Nilai LPPD masih menggunakan nilai tahun 2018 dengan skor 3,3624 (sangat tinggi), yang terbaru belum dikeluarkan

Kemendagri. Adanya penundaan pelaksanaan pilkades antar waktu sehingga hanya 5 desa yang dilakukan monitoring pilkades.

2) Sekretariat DPRD

Tabel 2.94
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Sekretariat DPRD

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Fasilitasi pelayanan kepada DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD	70	16.900.000.000	65	16.871.779.092	92,86	99,83	➡	●
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100	29.426.699.156	100	27.554.817.879	100	93,64	●	➡

3) Pengawasan

Pencapaian kinerja utama fungsi pengawasan pada tahun 2021 tergolong sangat baik yaitu dengan nilai Tingkat kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Level 3 dan Tingkat maturitas SPIP level 3. Kondisi ini didukung oleh tercapainya target indikator kinerja. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan pengawasan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pengawasan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	7.589.391.174	100	6.908.582.690	100	91,03	●	➡
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	100	1.780.533.820	304	1.772.828.400	114	99,57	●	●
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan	7 Laporan	431.451.970	11 Laporan	429.748.300	133,33	99,50	●	●

Sumber Data: Inspektorat Kab. Sragen, 2021, diolah

Jumlah tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori bidang pengawasan sebanyak 31 orang yang terbagi menjadi P2UPD (di bawah Kemendagri) dan Auditor (di bawah BPKP) dan mulai tahun 2021 sudah melaksanakan pemilihan sesuai Tugas dan fungsi masing masing fungsional

Inspektorat Sragen juga menangani aduan yang disampaikan melalui kanal Lapor Bu Yuni, Web Inspektorat, SP4N lapor dan laporan gratifikasi. Selama tahun 2021 telah menangani 20 aduan baik klarifikasi dan audit investigasi yang terdiri dari Pelimpahan Polres dan Kejaksaan serta aduan masyarakat

Terkait dengan review akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, jumlah PD yang hasil evaluasi LKjIP nya minimal B untuk

Evaluasi tahun 2020 yang dilaksanakan tahun 2021 adalah 96,42%.

4) Perencanaan

Pencapaian kinerja Fungsi Perencanaan pada tahun 2021 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari tercapainya 2 indikator kinerja. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan Perencanaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Perencanaan

Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketercapaian mekanisme perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100	949.067.800	100	878.586.680	100	92,57		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Program RKPD dan APBD	95	948.547.000	95	929.782.115	100	98,02		
	Persentase keselarasan Program RKPD dan RPJMD	95	483.722.750	95	480.332.400	100	99,30		

Sumber Data: Bappeda Litbang, 2021, diolah

Dengan masih merebaknya wabah Covid 19, pencapaian indikator kinerja urusan perencanaan pada tahun 2021 bisa dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat dari 2 (dua) program yang dilaksanakan, yaitu program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, telah dilaksanakan dan menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meski dalam pelaksanaan kegiatan, sebagian dilaksanakan secara virtual, melalui aplikasi zoom meeting, seperti dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten, yang diikuti OPD melalui aplikasi *zoom meeting* dari kantor masing-masing. Sementara kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka, dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, seperti pada waktu desk dengan OPD *downline*. Dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan program ini adalah:

- RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2021.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2021 tentang RKPD kabupaten Sragen Tahun 2022.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2021.
- Buku Data Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sragen.
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Renja OPD per triwulan, Laporan Evaluasi RKPD Semester I tahun 2021, Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026.

5) Keuangan

Pencapaian kinerja utama fungsi keuangan pada tahun 2021 dapat dilihat dari capaian indikator:

- a) persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi PAD Kabupaten Sragen tahun 2021 sebesar Rp 537.265.408.211,00. Nilai ini meningkat 36% dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp394.464.906.604,00. Kenaikan tersebut disumbang oleh Pajak (hotel; restoran; reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak air tanah; Pajak mineral bukan logam dan batuan; dan Restribusi (pelayanan persampahan/kebersihan; pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; penyediaan dan/atau penyedotan kakus; pelayanan tera/tera ulang, terminal,rumah potong hewan, izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum), Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, dan Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta yang paling tinggi dalam pendapatan BLUD RSUD.
- b) Opini BPK atas laporan keuangan daerah. Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan untuk tahun 2021 mendapatkan predikat WTP. Kabupaten Sragen sudah 7 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Perkecualian).

Capaian Indikator utama tersebut didukung oleh ketercapaian kinerja 4 indikator dari 5 indikator kinerja yang ditargetkan.Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan keuangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Keuangan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	51.140.505.534	100	35.810.121.359	100	70,02		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan keuangan akhir tahun BPKPD yang tersusun	100	354.244.327.460	100	345.140.642.368	100	97,43		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah yang dengan baik	100	2.574.862.700	100	2.140.518.821	100	83,13		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah		4.453.405.410		4.082.109.110	12,91	91,66		

Sumber Data: BPKPD Kab. Sragen, 2021, diolah

Mayoritas Kabupaten/kota di Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari kecilnya proporsi PAD terhadap pendapatan total daerah. Akan tetapi proporsi PAD Kabupaten Sragen berhasil melebihi dari yang ditargetkan yaitu

sebesar 12,91%. Realisasi PAD Kabupaten Sragen sampai dengan akhir Desember tahun 2021 sebesar Rp 426.161.049.798,00. PAD ini diperoleh dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan total pendapatan daerahnya adalah Rp.2.143.528.995.300,00.

Untuk penyerapan APBD tahun 2021, Kabupaten Sragen hanya mencapai 84,19% karena banyak kegiatan yang tidak bisa maksimal dilaksanakan saat pandemi COVID 19. Penyerapan APBD tahun 2021 sebesar Rp2.089.069.225.265,00. Pada akhir tahun semua Perangkat Daerah harus tertib administrasi keuangan dengan membuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

6) Kepegawaian

Pencapaian kinerja utama fungsi kepegawaian pada tahun 2021 tercermin dari Indeks Profesional ASN dan Tingkat Kedisiplinan ASN. Capaian IP ASN tahun 2021 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang adalah 70,08. Capaian IP ASN tahun 2021 hanya 61,3 termasuk kategori rendah. Untuk capaian Kedisiplinan ASN sampai dengan akhir Desember 2021 tercapai 99%.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung oleh capaian kinerja 14 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan fungsi kepegawaian. 5 indikator tercapai dan 9 indikator belum tercapai. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan kepegawaian disajikan pada tabel.

Jumlah ASN yang pensiun tahun 2021 sebanyak 687 orang. Hal ini diatasi dengan adanya penerimaan CPNS. Pengadaan CPNS tahun 2021 dengan jumlah pelamar 1.570 dan lolos seleksi administrasi 1.249 berkas, dan hanya 59 yang dinyatakan lulus. Selama tahun 2021, ada 8 Kasus Indisipliner Pegawai Yang ditangani.

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN merupakan amanat utama dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Sistem tersebut tidak hanya menimbulkan rasa keadilan di kalangan pegawai, juga dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja. Pemerintah Kabupaten Sragen sudah menyusun Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Kabupaten Sragen melalui Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/2593/035/2020 tentang Pembentukan Tim Penilaian Sistem Merit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang selanjutnya dinilai oleh Tim Penilai dari KASN (Komite Aparatur

Sipil Negara). Aspek-aspek yang dinilai dalam penilai Sistem Merit tersebut adalah Perencanaan Kebutuhan pegawai; Pengadaan ASN; Pengembangan Karir; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan; dan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai.

Tabel 2.91
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Kepegawaian

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi		8.738.525.240						
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100		49	4.292.516.530	49%	49		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kedisiplinan ASN (%)	93,3	2.122.694.760		1.956.600.314	100	92		
									
	% kasus indisipliner pegawai yang terselesaikan	100				100			
	Jumlah ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat (orang	2200		1806		82,09			
	Jumlah penerima penghargaan ASN yang berprestasi (orang)	150		59		39,33			
	% unit kerja yang tertib administrasi kepegawaian	100%		100%		100			
	jumlah pemulangan ASN yang pensiun	400		687		171,75			
	jumlah ASN yang terupdate melalui simpeg (record)	10181		348		3,42			
	% PD yang terisi jabatan pimpinan tinggi pratama	100		48		48			
	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas	526		185		35,1711			
	% aparatur ASN yang telah mengikuti diklat kepemimpinan	42,3		30		70,92199			
	% ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional yang menunjang kemampuan aparatur dalam pemahaman pelaksanaan tugas	39,8				0			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah peserta yang memiliki kompetensi melalui pelatihan dan diklat	447	2.125.330.900	283	2.047.399.413	100	96		

Sumber Data: BKPSDM Kab. Sragen, 2021, diolah

Untuk tahun 2021, Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen ditetapkan pada kategori III (Baik), dengan nilai 259.5 (dua ratus lima puluh Sembilan koma lima) dan Indeks 0,63 (nol koma enam tiga). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, Kabupaten Sragen mendapatkan nilai 242, indeks 0,59 kategori II sebutan Kurang.

Selama tahun 2021, jumlah ASN yang telah mengikuti kompetensi pelatihan dan diklat sebanyak 283 peserta, dengan rincian: Prajabatan sebanyak 250 peserta; Diklat Pendidikan Kepemimpinan Administrator Tk. II: 3 peserta, Diklat Pendidikan Kepemimpinan Administrator Tk. III: 30 peserta.

7) Penelitian dan Pengembangan

Pencapaian kinerja unsur penelitian dan pengembangan pada tahun 2021 termasuk baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja indikator yang menjadi ukuran keberhasilan unsur penelitian dan pengembangan, indikator tersebut dalam kategori Sangat Tinggi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 pada urusan Penelitian dan Pengembangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan
Penelitian dan Pengembangan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Inovasi daerah yang di Implementasikan	10	483.722.750	10	480.332.400	100	99,30		

Sumber Data: Bappeda Litbang, Kab. Sragen, 2021, diolah

e. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dengan indikator kinerja utama angka kriminalitas. Di tahun 2021, kasus kriminalitas yang dilaporkan sebanyak 252 dan yang selesai sebanyak 187 kasus. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2020 dengan laporan 309 kasus dan yang berhasil diselesaikan 220 kasus.

Tabel 2.93
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 pada Urusan Pemerintahan Umum

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian %		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran tercukupi	100	560.376.220	100	511.686.945	100	91,31		
	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik								
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	75 peserta	49.771.530	75 peserta	48.071.200	100	96,58		
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	jumlah hibah parpol yang memiliki kursi di DPRD	8 parpol	1.091.164.400	8	1.091.066.300,00	100	99,99		
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi penyuluhan ormas	95 orang	19.986.950	95 orang	18.856.200	100	94,34		
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah peserta sosialisasi PAKEM	100 orang	29.849.750	100 orang	27.274.200	100	91,37		
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah bulan operasional TPGKDN/Penanganan konflik sosial	12	1.531.976.990	12	1.487.667.900	100	97,17		

Sumber Data: Bappeda Litbang, Kab. Sragen, 2021, diolah

Dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat dilakukan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dengan total 75 peserta sosialisasi dan dilakukan juga sosialisasi 4

pilar kebangsaan dengan 38 kali pelaksanaan sosialisasi dan total 1900 peserta sosialisasi.

Partai Politik yang terdaftar dan mendapatkan bantuan ada 8 partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai PKB, Partai PDIP, Partai PAN, Partai Golkar, Partai PKS dan Partai Nasdem, dengan total bantuan Rp.1.083.064.000,00. Jumlah organisasi masyarakat yang terdaftar ada 343 Ormas. Selain itu dilakukan pula penyuluhan terhadap Organisasi Masyarakat dengan total peserta sebanyak 95 orang.

f. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 20 Kecamatan dengan indikator kinerja utama nilai IKM. Rincian IKM per kecamatan tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.94
Tabel IKM Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	Sragen	85,38	B	Baik
2	Karangmalang	82,12	B	Baik
3	Sidoharjo	84,80	B	Baik
4	Masaran	81,41	B	Baik
5	Kedawung	83,30	B	Baik
6	Ngrampal	84,50	B	Baik
7	Sambungmacan	80,52	B	Baik
8	Gondang	85,68	B	Baik
9	Tanon	83,84	B	Baik
10	Plupuh	85,76	B	Baik
11	Gemolong	87,40	B	Baik
12	Kalijambe	80,83	B	Baik
13	Sumberlawang	82,86	B	Baik
14	Miri	84,04	B	Baik
15	Gesi	82,75	B	Baik
16	Sukodono	85,67	B	Baik
17	Mondokan	85,42	B	Baik
18	Jenar	86,01	B	Baik
19	Tangen	82,80	B	Baik
20	Sambirejo	88,04	B	Baik

Sumber Data: Bagian Oganisasi, 2022

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja program RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2021 dari 189 program dan 332 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja seluruh OPD sebesar 87,24% sedangkan tingkat capaian realisasi anggarannya 86,96%.

Rangkuman Evaluasi Kinerja Pembangunan Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen diukur dari ketercapaian program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2021 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan

Kabupaten Sragen pada Tahun 2016-2021, dari 233 indikator program pembangunan daerah, sebanyak 166 indikator (71,2%) berstatus telah tercapai; 43 (18,5%) indikator berstatus akan tercapai; dan 24 indikator (10,3%) berstatus perlu upaya keras.

Tabel 2.95
Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan
Kabupaten Sragen Tahun 2021

No	Status Pencapaian Indikator 2021	Jumlah Indikator	Persentase
1	Tercapai	166	71,20
2	Akan tercapai	43	18,50
3	Perlu Upaya Keras	24	10,30

Sumber Data: Bappeda Litbang, 2022

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, seperti aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2021. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis daerah.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2021, maka permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Sragen pada masing-masing urusan sebagai berikut.

2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- a. Urusan Pendidikan
 - 1) Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar PAUD umur 4-6 Tahun.
 - 2) Angka Partisipasi Murni jenjang SD/MI dan SMP/MTs masih perlu ditingkatkan.
 - 3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs masih perlu ditingkatkan.
 - 4) Masih adanya Angka Putus sekolah SD/MI.
- b. Urusan Kesehatan
 - 1) Masih kurang optimalnya pelayanan ibu hamil, bayi baru lahir dan balita yang mengakibatkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi.
 - 2) Masih rendahnya pelayanan Kesehatan pada Anak Pendidikan Dasar.
 - 3) Masih rendahnya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15 - 59) tahun.
 - 4) Masih rendahnya Pelayanan Kesehatan penderita DM.
 - 5) Masih rendahnya pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi.
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Masih rendahnya capaian pengelolaan dan pengembangan sistem air minum baik pedesaan maupun perkotaan.
 - 2) Masih banyak saluran drainase yang rusak.

- 3) Bangunan Gedung pemerintah kondisi baik masih perlu ditingkatkan.
 - 4) Masih perlu ditingkatkan persentase jalan kondisi mantap karena mendukung perekonomian daerah.
 - 5) Masih belum optimalnya capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
 - 6) Masih rendahnya dokumen rencana tata ruang yang mendapat persetujuan substansi.
- d. Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman.
- 1) Masih rendahnya infrastruktur strategis perkotaan kondisi baik
 - 2) Masih adanya permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani.
 - 3) Perlunya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin, pekerja/buruh dan masyarakat dengan keterbatasan akses pembiayaan.
- e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 1) Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.
 - 2) Masih belum optimalnya penegakan Perda.
 - 3) Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana.
- f. Urusan Sosial
- 1) Belum optimalnya penanganan PPKS terlantar.
 - 2) Belum optimalnya cakupan korban bencana alam dan bencana sosial yang tertangani.
 - 3) Perlunya optimalisasi penanganan korban tindak kekerasan dan migran bermasalah yang terdampingi.

2.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- a. Urusan Tenaga Kerja
- 1) Masih rendahnya penempatan tenaga kerja.
 - 2) Angka pengangguran terbuka cukup tinggi.
 - 3) Masih rendahnya peserta pelatihan yang terserap DUDI
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
- 1) Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak melalui upaya pencegahan dan pelayanan korban KDRT perempuan dan anak.
 - 2) Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas lembaga dalam partisipasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.
 - 3) Partisipasi perempuan di lembaga legislatif masih relatif rendah.
 - 4) Masih rendahnya pendampingan forum anak.
- c. Urusan Pangan
- 1) Masih rendahnya tingkat pemenuhan infrastruktur kemandirian pangan.
 - 2) Masih perlu ditingkatkan Penguatan Cadangan pangan masyarakat.
 - 3) Masih perlu ditingkatkan penurunan desa/kel rawan pangan

- 4) Masih rendahnya jaringan irigasi tersier kondisi baik.
 - 5) Masih rendahnya luasan lahan pengendalian OPT.
- d. Urusan Pertanahan
- 1) Masih rendahnya penanganan sengketa dan konflik tanah.
 - 2) Masih rendahnya pendataan titik aset tanah.
- e. Urusan Lingkungan Hidup
- 1) Masih rendahnya Sistem Pengelolaan Persampahan.
 - 2) Belum optimalnya penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
 - 3) Masih rendahnya layanan persampahan, belum mencapai semua kecamatan.
 - 4) Semakin parahnya pencemaran Sungai Bengawan Solo yang mengakibatkan menurunnya kualitas air.
 - 5) Belum optimalnya pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
 - 6) Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan.
 - 7) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
 - 8) Masih rendahnya persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup.
- f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- 1) Masih rendahnya kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk Kabupaten Sragen.
 - 2) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan.
 - 3) Belum optimalnya penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun.
- g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1) Masih rendahnya persentase desa mandiri dan masih ada desa tertinggal (Status IDM).
 - 2) Belum optimalnya peran lembaga ekonomi desa.
 - 3) Belum optimalnya kualitas dan peran Badan Usaha Milik Desa.
 - 4) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat perdesaan.
- h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 1) Masih rendahnya angka kesertaan KB MKJP.
 - 2) Masih rendahnya angka prevalensi kontrasepsi moder (mCPR).
 - 3) Masih perlu ditingkatkan Penguatan Peran PIK-Remaja Proyek Nasional dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu, apalagi dengan tingginya angka pernikahan dini.
- i. Urusan Perhubungan
- Masih rendahnya sarana prasarana perhubungan kondisi baik.
- j. Urusan Komunikasi dan Informatika
- 1) Masih rendahnya keterbukaan informasi publik.
 - 2) Masih kurangnya sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika.
 - 3) Belum adanya infrastruktur SPBE.
- k. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 1) Masih rendahnya jumlah koperasi sehat dan koperasi aktif.

- 2) Masih rendahnya kompetensi SDM koperasi.
 - 3) Belum pulihnya sebagian UMKM akibat dampak pandemi dengan penurunan omset dan aset.
- l. Urusan Penanaman Modal
 - 1) Masih rendahnya nilai investasi PMDN/PMA.
 - 2) Masih perlunya dioptimalkan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan.
 - 3) Masih rendahnya pelaku usaha yang menyampaikan LKPM.
 - 4) Masih kurang optimalnya penyusunan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal.
 - m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1) Masih rendahnya persentase capaian kapasitas kepemudaan dan kepramukaan.
 - 2) Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga.
 - n. Urusan Statistik

Masih belum optimalnya Cakupan data sektoral yang tersedia dan terintegrasi.
 - o. Urusan Persandian

Masih rendahnya persentase pemahaman perangkat daerah terhadap keamanan informasi.
 - p. Urusan Kebudayaan
 - 1) Masih rendahnya perlindungan Obyek Pemajuan Kebudayaan/OPK.
 - 2) Masih rendahnya persentase obyek kesenian yang dikembangkan.
 - 3) Masih rendahnya persentase Sejarah yang diinventarisasi.
 - 4) Masih rendahnya persentase Masyarakat yang mengapresiasi museum.
 - 5) Kurang optimalnya pelestarian obyek yang diduga cagar budaya (ODCB).
 - q. Urusan Perpustakaan
 - 1) Masih kurangnya koleksi bahan Pustaka yang bisa menarik minat pengunjung.
 - 2) Belum optimalnya upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
 - 3) Masih belum semua perpustakaan sekolah terakreditasi.
 - r. Urusan Kearsipan
 - 1) Masih rendahnya pengelolaan arsip statis dan dinamis.
 - 2) Masih Rendahnya SDM pengelolaan kearsipan.

2.3.3 Urusan Pilihan

- a. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - 1) Masih rendahnya produksi perikanan tangkap dan budidaya.
 - 2) Masih rendahnya pengolahan hasil perikanan.
- b. Urusan Pariwisata
 - 1) Keterbatasan sarana prasarana dan belum optimalnya fasilitas rekreatif di obyek wisata yang mampu menjadi magnet kunjungan wisata.

- 2) Masih rendahnya pelaku wisata yang bersertifikat.
 - 3) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Jasa Pariwisata yang berdaya saing.
 - 4) Masih kurangnya promosi wisata dan belum ada kalender wisata yang khas.
 - 5) Masih kurangnya pembinaan produk-produk dan pelaku Ekraf.
- c. Urusan Pertanian
- 1) Masih perlu ditingkatkan produksi tanaman pangan utama dan hortikultura (padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabe merah).
 - 2) Masih rendahnya jaringan irigasi kondisi baik.
 - 3) Masih rendahnya persentase Luasan lahan pengendalian OPT.
 - 4) Masih perlu dioptimalkan kenaikan kelas petani.
 - 5) Perlunya ditingkatkan produksi daging kambing/domba, sapi, unggas.
 - 6) Masih rendahnya prasarana peternakan kondisi baik.
- d. Urusan Perdagangan
- 1) Masih perlu ditambah sarana prasarana perdagangan/pasar yang memadai.
 - 2) Masih perlu ditingkatkan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
 - 3) Masih rendahnya IKM/UMKM pelaku ekspor.
 - 4) Masih rendahnya produk unggulan yang diterima pasar internasional.
- e. Urusan Perindustrian;
- 1) Masih rendahnya persentase industri yang terintegrasi dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
 - 2) Perlunya upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sentra industri sesuai RPIK.
 - 3) Masih rendahnya persentase success rate industri yang mendapat izin setelah difasilitasi.
- f. Urusan Transmigrasi
- Rendahnya persentase transmigran yang ditempatkan karena kurangnya minat peserta.

2.3.4 Urusan penunjang

- a. Urusan Setda
- 1) Masih rendahnya monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah .
 - 2) Perlunya pemanfaatan *policy brief* Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan keagamaan, perekonomian dan pembangunan.
 - 3) Perlunya rekomendasi kebijakan bidang hukum.
 - 4) Perlunya peningkatan indeks tata Kelola pengadaan.
- b. Urusan Sekretariat DPRD
- 1) Belum optimalnya penetapan Raperda Tepat waktu.
 - 2) Belum optimalnya Tingkat fasilitasi pelayanan kepada DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. Urusan Perencanaan dan litbang

- 1) Perlunya penyelarasan antar dokumen perencanaan jangka Panjang, menengah dan tahunan.
 - 2) Perlunya peningkatan kualitas mekanisme perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan perundangh-undangan.
 - 3) Perlunya perumusan inovasi yang mampu menjawab permasalahan pembangunan.
 - 4) Perlu adanya penelitian dan pengembangan yang menjadi solusi permasalahan pembangunan.
- d. Urusan pengawasan
- 1) Perlunya optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal.
 - 2) Perlunya peningkatan kapasitas APIP.
 - 3) Perlunya Menyusun dokumen manajemen resiko (MRI).
- e. Urusan Kepegawaian
- 1) Perlunya peningkatan indeks profesionalitas ASN.
 - 2) Perlunya optimalisasi sistem merit pegawai.
 - 3) Masih rendahnya persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi.
- f. Urusan Keuangan
- 1) Tingginya ketergantungan pada dana transfer sehingga diperlukan upaya-upaya peningkatan PAD baik berupa pajak maupun restribusi.
 - 2) Perlu dioptimalkan kemampuan SDM OPD dalam menyusun laporan Keuangan sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP) maupun pengelolaan Barang Milik Daerah yang dengan baik.

2.3.5 Urusan Pemerintahan Umum

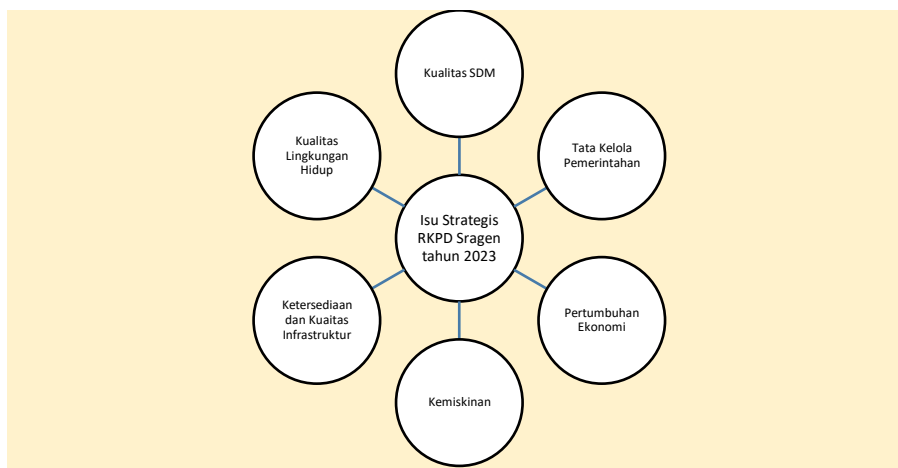
- a. Masih rendahnya persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- b. Masih rendahnya persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik dan ketahanan bangsa.
- c. Masih rendahnya ormas yang paham terhadap UU Ormas.
- d. Masih adanya potensi konflik sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban.

2.3.6 Urusan Kewilayahan

- a. Masih perlu optimalisasi pelayanan sesuai standar kepada masyarakat di lini terendah (desa/kelurahan maupun kecamatan).
- b. Masih perlunya pembinaan desa dan pemberdayaan lembaga desa.
- c. Masih perlu ditingkatkan sarana prasarana kelurahan kondisi baik.

2.4 Isu Strategis

Berdasarkan uraian gambaran kondisi daerah yang telah dikemukakan mulai pada awal Bab II dan hasil identifikasi permasalahan per urusan sebagaimana dikemukakan di atas, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sragen dalam tahun 2023 yaitu:



Gambar 2.49
Isu Strategis RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023

2.4.1 Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan telah menjadi isu yang penting di tingkat nasional maupun regional. Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi. Kabupaten Sragen memiliki nilai indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 sebesar 60,36, naik dibandingkan tahun 2020 yaitu 60,28 dan masuk kategori B. Kategori B memiliki arti kualitas penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten sudah berjalan cukup baik, namun penerapan reformasi birokrasi pada tingkat OPD belum merata terhadap seluruh OPD, antara lain:

- Dalam penataan peraturan perundang-undangan, Pemkab Sragen telah membangun aplikasi sistem penataan perundang-undangan meskipun belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga belum diketahui optimalisasi penggunaan aplikasi tersebut.
- Telah disusun dokumen identifikasi penyederhanaan jabatan, namun belum sepenuhnya dilakukan tindak lanjut hasil dari identifikasi tersebut.
- Peta proses bisnis telah dibuat akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Sragen, sehingga belum terlihat efektivitas struktur organisasi yang selaras dengan kinerja organisasi yang dihasilkan.
- Upaya untuk meningkatkan tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) telah diupayakan melalui pembangunan arsitektur SPBE. Hal tersebut tergambar pada hasil pengukuran Indeks SPBE Pemkab Sragen tahun 2021 sebesar 3,03 pada kategori baik.
- Dalam Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di Kabupaten Sragen belum melaksanakan penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karier individu/pemberian *reward and punishment* terhadap pegawai secara optimal.

- f) Implementasi penguatan kebijakan pengawasan masih perlu diperkuat khususnya pada level OPD. Pada upaya peningkatan integritas, Pemerintah Kabupaten Sragen telah membangun 2 Unit Kerja menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), namun belum berhasil mendapat predikat WBK pada tahun 2021.

2.4.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Isu kualitas sumber daya manusia merupakan isu penting dan menjadi perhatian baik dalam lingkungan global, nasional, maupun regional. Pada lingkungan global, isu ini muncul dalam tujuan SDGs yang ketiga dan keempat mengenai kesehatan dan pendidikan. Sementara pada lingkungan nasional isu ini muncul pada RPJMN dengan agenda meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Agenda yang mirip juga muncul di lingkungan regional yang membawa agenda peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Isu kualitas sumber daya manusia merupakan isu strategis daerah. Capaian IPM Kabupaten Sragen tahun 2021 yaitu 74,08 dan terbilang rendah di kawasan Solo Raya.

Selain IPM, dalam lingkungan global gender juga muncul sebagai salah satu tujuan SDGs. Dimunculkannya isu tersebut dalam SDGs sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender di tengah masyarakat dunia. Kesadaran yang sama secara nyata juga muncul di Kabupaten Sragen yang dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya mewujudkan kesetaraan gender. Upaya tersebut di lapangan diimplementasikan bersama dengan upaya mewujudkan perlindungan anak di Kabupaten Sragen. Namun, secara umum berbagai upaya dalam mewujudkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di Sragen masih perlu dioptimalkan lagi. Ruang untuk optimalisasi juga sangat terbuka lebar di tahun-tahun mendatang, maka dari itu penempatan isu pengarusutamaan gender dan perlindungan anak sebagai isu strategis daerah dapat menjadi langkah awal upaya optimalisasi tersebut.

2.4.3 Pertumbuhan Ekonomi

PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Tahun 2021 PDRB mengalami kenaikan 3,75%. Pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung dan telah sampai pada tahun ketiga membawa perubahan yang signifikan terutama dalam aspek perekonomian.

Perkembangan ekonomi secara global masih dalam tren pemulihan meskipun mengalami perlambatan akibat penyebaran kasus Covid-19 yang kembali meningkat di berbagai negara pada triwulan III tahun 2021. Pemulihan ekonomi global memicu peningkatan harga komoditas

terutama harga komoditas energi utamanya gas alam dan batubara, yang menyebabkan lonjakan biaya input industri.

Kondisi perekonomian di Kabupaten Sragen di masa sebelum pandemi masih memiliki beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Ditambah dengan adanya dampak pandemi, menjadikan isu pertumbuhan ekonomi ini semakin mencuat ke permukaan. Pada akhirnya kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi menjadi isu strategis yang harus mendapatkan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Sragen untuk segera dicarikan pemecahannya.

2.4.4 Kemiskinan dan Pengangguran

Persoalan kemiskinan telah menjadi isu yang terus-menerus membayangi pembangunan ekonomi. Terbukti dari berbagai tingkatan lingkungan yang ada memasukkan isu kemiskinan ini sebagai tujuan maupun agenda yang perlu segera diwujudkan. Kemiskinan ini juga menjadi isu yang strategis bagi Kabupaten Sragen, sebabnya tidak lain adalah masih tingginya angka kemiskinan di Sragen. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sragen tahun 2021 sebanyak 122.910 jiwa. Perbandingan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Solo Raya menguatkan bahwa isu kemiskinan harus benar-benar menjadi perhatian. Meskipun pembangunan ekonomi yang dilakukan telah menghasilkan berbagai kemajuan di Sragen. Namun pencapaiannya masih jauh dari apa yang diharapkan untuk dapat mewujudkan perekonomian yang menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi masyarakat miskin disertai dengan adanya perlindungan dan pemenuhan hak dasar dari mereka secara berkesinambungan.

Sejalan dengan isu ekonomi dan kemiskinan, isu mengenai tingkat pengangguran juga menjadi isu strategis bagi Kabupaten Sragen. Isu pengangguran sebagaimana kemiskinan pada dasarnya merupakan isu yang kompleks. Sebagai gambaran, sebelumnya muncul asumsi bahwa makin tinggi pendidikan makin mudah dalam mencari pekerjaan. Padahal pada faktanya dari data yang ada asumsi ini tidaklah sepenuhnya benar. Sehingga dalam mengatasi isu terkait tingkat pengangguran terbuka ini diperlukan upaya yang komprehensif dengan melibatkan banyak aspek. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Sragen untuk dapat mengatasi isu ini baik dari sisi permintaan maupun penawaran tenaga kerja. Sehingga selain diperlukan adanya ketersediaan lapangan kerja yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Pada sisi yang lain diperlukan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan memadai dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sragen sebesar 4,75% namun mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 4,76%. Terutama dengan adanya pandemi COVID 19 yang membuat semua sektor perekonomian terpuruk, dengan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja meningkat sebesar 71,74%, sementara tahun 2020 hanya sebesar 68,44% atau sebanyak 481.762 jiwa.

2.4.5 Kualitas Infrastruktur Wilayah

Perbaikan kualitas infrastruktur masuk ke dalam tujuan SDGs pada tingkatan global. Sementara di tingkatan nasional isu infrastruktur ini menjadi prioritas bagi pemerintah pusat dengan agenda memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan urusan pekerjaan umum (kondisi jalan dan jembatan, drainase, saluran irigasi, bangunan, air minum, sanitasi, penataan ruang), permukiman dan perumahan rakyat, pertanahan, serta perhubungan. Di Kabupaten Sragen isu ini juga menjadi isu strategis karena masih belum meratanya pembangunan infrastruktur. Kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur membawa dampak pada semua sektor pembangunan baik pembangunan manusia, peningkatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.6 Kualitas Lingkungan Hidup

Perkembangan di tingkat global saat ini semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Tren ini juga terjadi di tingkat daerah dengan memasukkan isu ini sebagai isu strategis bagi daerahnya. Hal ini yang juga terjadi di Kabupaten Sragen dengan menelaah kondisi lingkungan hidup saat ini. Dari data yang ada terkait kualitas lingkungan hidup menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen masih memiliki banyak persoalan, salah satunya pencemaran lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator kinerja yang mencerminkan tingkat pencemaran lingkungan. Indeks ini dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). Berdasarkan dokumen IKLH yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, IKLH Kabupaten Sragen pada Tahun 2020 adalah sebesar 55,64, yaitu berada pada posisi “kurang baik”. Apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat bukan tidak mungkin dapat menimbulkan ancaman, mulai dari krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Kondisi yang demikian diperparah dengan meningkatnya kasus pencemaran lingkungan baik sebagai akibat makin padatnya penduduk, aktivitas industri, maupun masih rendahnya kesadaran masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sragen dalam hal ini perlu melakukan penanganan secara berkelanjutan. Guna memastikan keberlanjutan dari kualitas lingkungan hidup yang tetap baik.

-oOo-

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2023

Kerangka perekonomian daerah Kabupaten Sragen yang meliputi indikator ekonomi makro daerah tahun 2021-2023 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Indikator Ekonomi Kabupaten Sragen Tahun 2021-2023

No	Indikator Ekonomi Makro	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,75	4,29	5,3
2.	Laju Inflasi yoy (%)*)	2,18	3±1	2,5±1
3.	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	40,75	42,21	44,15
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,76	4,37	4,07
5.	Angka Kemiskinan (%)	13,83	12,28	11,73

Sumber Data: BPS-Bappeda Litbang, 2022 (data diolah)

*) Data BI

Pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Kabupaten Sragen cukup terdampak akibat pandemi Covid-19 terlihat dari capaiannya pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi menjadi sebesar -1,81%. Seperti halnya dengan perekonomian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, perekonomian daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2021 juga mulai beranjak naik lebih baik. Pada tahun 2021, perekonomian di Kabupaten Sragen mencapai 3,75%. Nilai tersebut masih berada di atas Jawa Tengah yang mencapai 3,32% dan Nasional sebesar 3,70%. Prediksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3-5,9% dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 5,0-5,6% tentunya menjadi peluang dan dorongan yang positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sragen.

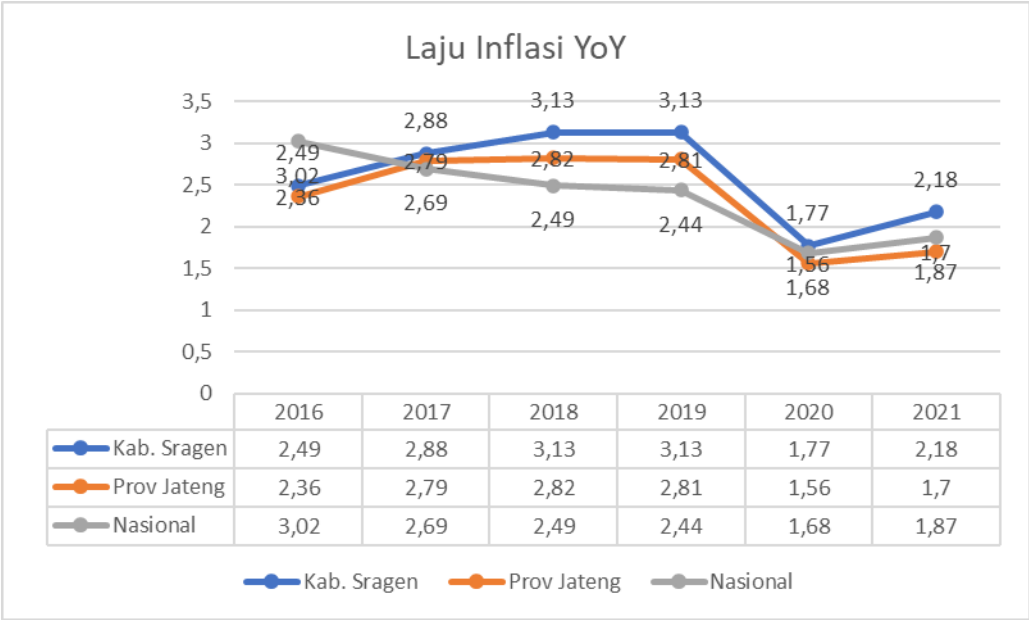
Kondisi pandemi Covid-19 diharapkan sudah menurun statusnya menjadi endemi mulai tahun 2022 dan semakin kondusif pada tahun 2023 nanti, sehingga dinamika perekonomian Kabupaten Sragen diharapkan juga dapat merangkak naik yang didukung dengan semakin meningkatnya geliat perekonomian Nasional dan Jawa Tengah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat memberikan dampak tidak langsung yang positif terhadap mesin investasi. Upaya untuk mendorong produksi nasional yang berdaya saing, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta kebijakan nasional penurunan impor, diharapkan dapat memperbaiki kinerja perekonomian nasional, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian di daerah. Kebijakan Pemerintah Pusat melalui DAU tambahan untuk kelurahan, Dana Insentif Daerah, serta Dana Desa secara tidak langsung juga akan memberikan pengaruh positif dalam mendorong perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang strategis untuk segera dapat ditingkatkan karena menjadi penyebab dan pembawa dampak luas bagi banyak sektor. Demikian pula dengan isu kemiskinan dan pengangguran

yang juga merupakan puncak dari dampak pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dengan mendasarkan pada kondisi realisasi tahun 2021 serta perkembangan status pandemi Covid 19 yang semakin kondusif untuk pergerakan masyarakat, Kabupaten Sragen pada tahun 2023 bertekad untuk optimis dapat bangkit dan pulih dari keterpurukan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen tahun 2021 berdasarkan data PDRB ADHK meningkat cukup signifikan pada semua lapangan usaha, kecuali untuk lapangan usaha: Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha: Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Industri Pengolahan. Kondisi ini tentunya diharapkan juga terjadi pada tahun 2022 dan 2023.

Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Sragen dalam periode 2016-2021 bersifat fluktuatif antara 1,77%-3,13%. Inflasi *year on year* tahun 2021 sebesar 2,18%, laju inflasi ini berada di atas laju inflasi Jawa Tengah 1, 7% dan laju inflasi Nasional sebesar 1,87%.



Sumber Data: BPS, 2021

Gambar 3.1. Perkembangan Laju Inflasi Kab.Sragen Tahun 2016-2021 dan Perbandingannya dengan Prov.Jawa Tengah dan Nasional

Data IHK Kabupaten Sragen Maret 2021 sebesar 105,76, meningkat daripada nilai IHK Desember 2020 sebesar 104,61. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga untuk komoditi-komoditi tertentu yang dikonsumsi masyarakat. Pada tahun 2023, laju inflasi diharapkan dapat ditekan pada 2,5 ±1 atau lebih rendah daripada tahun 2022 guna meningkatkan daya beli

masyarakat yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan dinamika perekonomian di Kabupaten Sragen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Data realisasi TPT tahun 2020 dari BPS sebesar 4,75%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT tahun 2019 (3,34%). TPT Kabupaten Sragen tahun 2021 sebesar 4,76% lebih tinggi daripada capaian pada tahun 2020. TPT pada tahun 2022 dan 2023 diharapkan tidak semakin meningkat.

Kemiskinan menjadi isu nasional dan regional yang memerlukan komitmen Pemerintah Daerah dalam penanganannya. Angka Kemiskinan Kabupaten Sragen tahun 2021 sebesar 13,83%, lebih tinggi jika dibandingkan data tahun 2020 sebesar 13,38%. Upaya pencapaian target angka kemiskinan tahun 2022 dan 2023 harus dilakukan dengan keras dan kinerja yang terstruktur dengan baik, apalagi saat ini masa pandemi Covid-19 diharapkan dapat semakin kondusif setelah dilaksanakannya upaya-upaya proses dalam setiap kegiatan masyarakat serta penuntasan vaksinasi untuk semua masyarakat.

Strategi pencapaian indikator ekonomi makro daerah tahun 2023 adalah:

1. Memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pertumbuhan 3 (tiga) lapangan usaha dominan penyumbang PDRB ADHK yaitu: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Ketiga sektor dominan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2022 dan 2023 dengan asumsi bahwa masa pandemi berubah status menjadi endemi dan semakin kondusif untuk pergerakan masyarakat.
2. Mendorong pemberdayaan UMKM dan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap memantapkan eksistensi sektor pertanian sebagai sektor basis daerah dan lumbung pangan Jawa Tengah. Rencana strategis nasional untuk menerbitkan Undang-Undang tentang Pemberdayaan UMKM dan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja, diharapkan semakin menguatkan keberdayaan UMKM dan usaha perekonomian lainnya dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Meningkatkan keterampilan, keahlian dan keunggulan kompetitif angkatan kerja, penciptaan iklim usaha yang kondusif serta penguatan kelembagaan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik guna meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa di Kabupaten Sragen tahun 2023.
5. Memantapkan perwujudan *smart city* yang telah mulai dibangun dalam tahun anggaran 2019 dan 2020. Dengan terwujudnya *smart city* diharapkan semakin meningkatkan pelayanan publik yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan perekonomian daerah secara luas, pelan tapi pasti, dapat semakin meningkatkan keberdayaan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

6. Menekan laju inflasi dalam level yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 guna mengendalikan tingkat harga yang tidak terlalu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat dengan mendorong jumlah dan kualitas produk lokal serta meningkatkan penggunaan bahan baku dari dalam negeri dan mengurangi penggunaan bahan impor.
7. Penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa. Strategi ini juga merupakan dukungan kepada kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dari Pemerintah dan Provinsi Jawa Tengah. PKE Kabupaten Sragen pada tahun 2023 merupakan kegiatan penanganan kemiskinan berbasis desa sebagai kelanjutan dari PKE tahun 2022, melalui: 1) bantuan pembangunan RTLH; 2) pemberian bantuan jaminan hidup (jadup), serta 3) bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
8. Dukungan penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen secara umum dengan:
 - a. Tetap mengoptimalkan data survey Pemerintah Daerah terhadap rumah tangga miskin yang mengajukan usulan bantuan dalam rangka mengurangi kesenjangan Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan yang masih banyak salah sasaran, yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial dari pusat ke rumah tangga miskin tidak tepat sasaran.
 - b. Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat miskin.
 - c. Mengoptimalkan manfaat Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), serta DAU Kelurahan dan Dana Pendampingnya untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dalam hal peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perkembangan dan peningkatan taraf hidup.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	REALISASI APBD					Pertumbuhan Rata-rata(%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	PENDAPATAN	2.026.080.498.300	2.030.849.188.640	2.132.781.974.513	2.041.721.845.529	2.161.356.078.716	1,71
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	404.569.404.722	334.303.284.344	368.325.799.601	394.464.906.604	537.265.408.211	9,03
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	82.767.722.185	85.863.439.123	99.967.537.333	111.442.618.797	107.148.796.972	6,95
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.932.041.017	13.282.289.683	14.003.791.602	13.082.205.330	13.583.333.151	-2,09
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.135.271.110	14.420.486.661	18.993.727.825	19.992.082.624	22.249.581.299	12,57
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	292.734.370.410	220.737.068.877	235.360.742.841	249.947.999.853	394.283.696.789	11,49
1.2	DANA TRANSFER	1.614.177.543.701	1.617.114.451.754	1.682.083.134.912	1.558.259.528.925	1.535.382.790.505	-1,16
1.2.1	DANA TRANSFER PUSAT (Dana Perimbangan)	1.401.311.726.811	1.405.508.762.647	1.489.466.585.984	1.396.824.595.917	1.352.403.144.026	-0,78
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.396.772.271	27.428.743.938	21.040.338.635	30.630.429.867	38.765.724.777	7,15
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.049.016.918.000	1.049.016.918.000	1.083.308.681.000	991.204.614.000	984.484.500.000	-1,48
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	317.898.036.540	320.063.100.709	326.942.160.349	329.819.536.050	301.079.257.249	-1,25
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	0	9.000.000.000	58.175.406.000	45.170.016.000	28.073.662.000	162,06
1.2.1.5	Dana Desa	160.952.188.596	146.148.323.000	168.044.095.000	171.103.129.000	175.365.649.000	2,52

RKPD Kab.Sragen Tahun 2023

NO	URAIAN	REALISASI APBD					Pertumbuhan Rata-rata(%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.2.2	DANA TRANSFER ANTAR DAERAH	212.865.816.890	211.605.689.107	192.616.548.928	161.434.933.008	182.979.646.479	-3,10
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	140.512.835.823	146.164.831.107	152.570.506.808	134.344.347.567	174.684.467.479	6,62
1.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	72.352.981.067	65.440.858.000	40.046.042.120	27.090.585.441	8.295.179.000	-37,52
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.333.549.877	79.431.452.542	82.373.040.000	88.997.410.000	88.707.880.000	248,64
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.333.549.877	79.431.452.542	82.373.040.000	88.997.410.000	88.707.880.000	248,64
2	BELANJA	2.202.045.180.704	2.236.802.757.132	2.092.140.283.903	2.130.438.476.217	2.862.621.612.545	7,83
2.1	BELANJA OPERASI	1.445.948.167.125	1.445.248.328.424	1.475.138.100.568	1.476.448.907.568	2.642.838.819.764	20,28
2.1.1	Belanja Pegawai	1.001.918.136.755	978.441.332.938	964.110.433.401	955.249.023.590	2.073.422.877.612	28,08
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	379.501.632.370	393.845.190.625	423.304.936.617	421.120.115.989	491.994.262.010	6,89
2.1.3	Belanja Bunga	0	1.599.943.821	11.807.951.070	4.636.738.547	0	159,10
2.1.4	Belanja Hibah	40.836.398.000	57.262.561.040	48.993.049.480	86.512.829.442	66.477.230.142	19,80
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.692.000.000	14.099.300.000	26.921.730.000	8.930.200.000	10.944.450.000	1,55
2.2	BELANJA MODAL	349.519.743.025	428.218.853.657	249.326.386.054	268.507.459.807	211.772.001.931	-8,17
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0	578.120.000	11.000.000	39.713.061.242	4.140.790.850	120.246,72
2.4	BELANJA TRANSFER	406.577.270.554	362.757.455.051	367.664.797.281	345.769.047.600	3.870.000.000	-28,57
	DEFISIT BELANJA	-175.964.682.404	-205.953.568.492	40.641.690.610	-88.716.630.688	-701.265.533.829	67,37
3	PEMBIAYAAN	191.837.633.273	337.734.818.465	167.598.252.752	-33.694.381.188	525.899.884.829	-438,81
3.1	REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	206.837.633.273	359.006.818.465	277.929.112.252	82.386.498.312	528.476.884.829	130,52
3.2	REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000.000	21.272.000.000	110.330.859.500	116.080.879.500	2.577.000.000	91,98
	SILPA TAHUN BERKENAAN	15.872.950.869	131.781.249.973	208.239.943.362	-122.411.011.876	-175.365.649.000	168,18

Sumber: BPKPD dan Bappeda Litbang Kabupaten Sragen, 2022

Sumber Penerimaan Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sragen tahun 2017-2021 sebesar 1,75% pertahun dengan pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,03%, Dana Transfer (Pemerintah Pusat dan Antar Daerah) mengalami penurunan rata-rata sebesar -1,16% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar 12,61%. Proporsi masing-masing pos Pendapatan Daerah pada tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3
Prosentase Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2017-2021

NO.	URAIAN	%				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18,50	15,36	16,01	17,83	22,99
1.2	Dana Transfer	73,81	74,28	73,11	70,42	65,71
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7,69	10,36	10,88	11,75	11,30
	Pendapatan Daerah	100	100	100	100	100

Sumber: BPKPD Kabupaten Sragen, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, ketergantungan Kabupaten Sragen kepada Dana Transfer masih sangat tinggi meskipun semakin turun pada setiap tahunnya. Pada sisi lain, proporsi PAD semakin meningkat meskipun nilainya kecil, demikian pula dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 rata-rata meningkat sebesar 7,83% pertahun. Proporsi Belanja Pegawai rata-rata sebesar 51% dari total Belanja Daerah, sedangkan proporsi Belanja Modal rata-rata sebesar 13% dari total Belanja Daerah. Masih tingginya proporsi Belanja Pegawai tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Sragen terhadap Dana Transfer

masih sangat tinggi. Sedangkan proporsi Belanja Modal masih sangat rendah, terutama pada tahun 2021 berkaitan dengan adanya penyesuaian belanja modal untuk belanja barang dan jasa sebagai salah satu langkah kebijakan penanganan melonjaknya jumlah orang yang terparap Covid-19.

Pembiayaan Daerah dalam tahun 2017-2021 turun sangat signifikan karena kenaikan Penerimaan Pembiayaan masih sangat kecil dibandingkan dengan kenaikan Pengeluaran Daerah. Adanya SiLPA yang cukup besar pada setiap tahunnya sebagian besar merupakan SiLPA BLUD dan Belanja earmark.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Tabel 3.4
APBD Kabupaten Sragen Tahun 2022 dan
Proyeksi Keuangan & Kerangka Pendanaan Kabupaten Sragen Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD TAHUN 2022 (Rp)	RKPD TAHUN 2023 (Rp)
1	PENDAPATAN	2.169.769.096.035	2.183.302.131.716
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	352.767.656.665	367.235.308.226
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	91.000.000.000	105.000.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.634.102.060	20.746.342.060
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.500.000.000	25.270.331.999
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	228.633.554.605	216.218.634.167
1.2	DANA TRANSFER	1.812.001.439.370	1.816.066.823.490
1.2.1	DANA TRANSFER PUSAT (Dana Perimbangan)	1.645.950.439.370	1.664.988.823.490
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.325.759.000	30.325.759.000
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	984.484.500.000	984.484.500.000
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	434.040.812.470	453.079.196.590
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	14.427.722.900	14.427.722.900
1.2.1.5	Dana Desa	182.671.645.000	182.671.645.000
1.2.2	DANA TRANSFER ANTAR DAERAH	166.051.000.000	151.078.000.000
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	150.000.000.000	150.000.000.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.051.000.000	1.078.000.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.000.000.000	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.000.000.000	0
2	BELANJA	2.399.604.632.516	2.513.351.948.819
2.1	BELANJA OPERASI	1.738.290.201.238	1.702.228.327.397
2.1.1	Belanja Pegawai	1.137.549.785.550	1.091.865.023.777
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	527.512.442.868	529.705.012.520
2.1.3	Belanja Bunga	2.328.750.000	5.000.000.000
2.1.4	Belanja Subsidi	0	2.500.000.000
2.1.5	Belanja Hibah	60.990.422.600	56.243.291.100
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.908.800.220	16.915.000.000
2.2	BELANJA MODAL	316.136.068.278	441.002.420.558
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.497.618.000	10.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	339.680.745.000	360.121.200.864
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.890.000.000	4.890.000.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	334.790.745.000	355.231.200.864
	DEFISIT BELANJA	-229.835.536.481	-330.049.817.103
3	PEMBIAYAAN	229.860.411.681	330.049.817.103

RKPD Kab.Sragen Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD TAHUN 2022 (Rp)	RKPD TAHUN 2023 (Rp)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	279.860.411.681	405.049.817.103
3.1.1	Penggunaan SILPA	233.610.411.681	291.299.817.103
3.1.2	Pinjaman kepada Pihak ketiga	46.250.000.000	113.750.000.000
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	75.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	25.000.000.000	0
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	25.000.000.000	75.000.000.000

Sumber : BPKPD, Bappeda Litbang, 2022

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Asumsi Pendapatan Daerah Tahun 2023 didasarkan pada beberapa variabel yaitu: penetapan asumsi kondisi makro berupa presentase pertumbuhan ekonomi dan prosentase tingkat inflasi yoy; data presentase penerimaan pendapatan tahun-tahun sebelumnya; serta data presentase piutang pajak daerah tahun-tahun sebelumnya. Asumsi Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah, berasal dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah tahun 2023 diprediksikan meningkat melalui kebijakan intensifikasi pajak saat ini serta melihat progress penerimaan pajak dalam 5 tahun sebelumnya, optimis dapat terus meningkat. Meskipun sempat turun cukup signifikan pada estimasi realisasi tahun 2021, namun dengan perkembangan kondisi pascapandemi yang semakin membaik diharapkan mampu meningkatkan potensi penerimaan pajak. Pajak yang potensinya besar adalah Pajak Penerangan Jalan, PBB dan BPHTB.
 - b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah tahun 2023 optimis dapat ditingkatkan dari tahun 2022 berdasarkan kondisi daerah yang semakin bangkit dan kondusif pascapandemi Covid 19. Potensi retribusi yang diprediksi meningkat adalah retribusi jasa umum dan jasa usaha.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 diasumsikan meningkat dari pos bagian laba atas penyertaan modal BUMD.
 - d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah diprediksikan meningkat dengan semakin membaiknya kondisi pascapandemi menjadi endemi.
2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada dasarnya merupakan alokasi dana perimbangan dari pemerintah Pusat dan Provinsi. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2023 untuk Dana Bagi Hasil, DAU dan DID diasumsikan sama dengan alokasi TKDD Tahun 2022, sedangkan untuk DAK disesuaikan dengan rencana usulan tahun 2023. Pendapatan transfer Pusat tahun 2023 akan dilakukan penyesuaian dengan

kebijakan alokasi TKDD tahun 2023 yang baru akan disampaikan pada Bulan Oktober 2022. Pendapatan transfer antar daerah dari Provinsi Jawa Tengah diprediksikan dari alokasi untuk TMMD dan SPPD (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Hibah. Pendapatan Hibah untuk BOS Reguler diasumsikan sama dengan tahun 2022 hanya saja nilainya digeser ke DAK Non Fisik.

Dengan mendasarkan pada laporan realisasi pendapatan daerah tahun 2021 dan *progress* pendapatan daerah tahun 2022 s.d. Triwulan I serta potensi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2022, Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2023 diprediksikan sebesar Rp 2.183.302.131.716,00 yang terdiri atas: PAD sebesar Rp 367.235.308.226,00; Dana Transfer sebesar Rp 1.633.395.178.490,00; serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 182.671.645.000,00.

Semakin meningkatnya kebutuhan alokasi anggaran untuk pembangunan daerah dipastikan tidak dapat tercukupi anggarannya dari Pendapatan Daerah yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan pembangunan daerah tetap dilaksanakan dengan melalui mekanisme pengusulan penganggaran kepada Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) dan Pemerintah Pusat (APBN), baik berupa anggaran dari APBN Sektorial Kementerian/Lembaga, Tugas Pembantuan (TP), maupun anggaran bantuan/hibah Pemerintah lainnya.

Arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Di samping itu perlu dilakukan upaya peningkatan dana perimbangan termasuk Dana Bagi Hasil dari Provinsi serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Sragen.

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak lama dan Wajib Pajak baru antara lain melalui pendataan obyek pajak lama dan baru; serta pemberian sosialisasi kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Tarif pajak dan retribusi pada saat ini masih mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009, dan ke depannya akan mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang saat ini masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.513.351.948.819,00 yang diarahkan untuk belanja-belanja sebagai berikut.

1. Belanja Operasi diarahkan untuk memenuhi kewajiban belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Sosial. Proporsi Belanja Pegawai Tahun 2023 Non Tunjangan Guru sebesar 35,17% atau sebesar Rp 1.055 Milyar.

Belanja Pegawai diupayakan penurunannya secara bertahap menuju pencapaian amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 yaitu maksimal 30% di luar Tunjangan Guru.

Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa seluruh Perangkat Daerah baik untuk kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

Terkait dengan rencana penggunaan dana pinjaman untuk pembangunan prasarana infrastruktur pada tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 160 Milyar kepada Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen harus melakukan Belanja Bunga pada tahun 2023 sebesar Rp 5 Milyar.

Belanja Subsidi diarahkan untuk pemberian subsidi bunga bagi UMKM yang mendapatkan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) yang merupakan kebijakan baru Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk mendukung pemulihan dan keberdayaan UMKM pascapandemi Covid 19 melalui pemberian pinjaman usaha oleh bank milik daerah.

Belanja Hibah pada tahun 2023 diarahkan untuk memenuhi kewajiban hibah bagi lembaga/organisasi yang telah berbadan hukum dan tidak dibdrikan secara berterusan setiap tahun kecuali untuk lembag/organisasi yang dapat diberikan secara rutin berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 diarahkan untuk pemberian bantuan sosial kepada perorangan yang sedang menghadapi risiko sosial.

2. Belanja Modal diarahkan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak guna meningkatkan arus lalu lintas manusia, barang dan jasa.
3. Belanja Tidak Terduga yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berdiri sebagai pos belanja tersendiri diarahkan dalam rangka mengakomodasi: alokasi indikatif APBD berkaitan dengan kegiatan yang mendesak ataupun darurat.
4. Belanja Transfer berupa Belanja Bagi Hasil serta Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Belanja Daerah tahun 2023 juga diarahkan dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* dalam setiap tahunnya yaitu:

1. Belanja Pendidikan (termasuk belanja gaji dan tunjangan) minimal 20% dari total Belanja Daerah;
2. Belanja Kesehatan minimal 10% dari Total Belanja Daerah Non Belanja Gaji ASN;

3. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Dana Perimbangan yang bersifat umum setelah dikurangi DAK;
4. Belanja Infrastruktur yang bersifat umum dan atau belanja pemulihan ekonomi akibat pandemi minimal 25% dari total Belanja Daerah;
5. Menuju Belanja Pegawai Non Tunjangan Profesi Guru maksimal 30%.

Rencana Belanja dalam Rancangan RKPD Tahun 2023 ini akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan peraturan perundangan yang berlaku dalam penyusunan perencanaan penganggaran daerah.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah tahun 2023 dari sisi Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dalam rangka menyeimbangkan belanja daerah.
2. Pinjaman pada pihak ketiga.

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA di Kabupaten Sragen pada tahun 2023 melalui pinjaman untuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur sebesar Rp 113,750 Milyar.

Pembiayaan Daerah dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 diarahkan untuk pengembalian cicilan pokok pinjaman daerah yang jatuh tempo sebesar Rp 75 Milyar.

-oOo-

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

Dalam upaya pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Sragen sebagaimana RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, serta untuk menjamin keselarasan pembangunan daerah tahun 2023, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1
Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2023

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
1	Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,72
		Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89
			Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,15
		Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan keluarga	Angka Harapan Hidup	Tahun	76,02
		Sasaran 1.3. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,92
			Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	KLA Predikat Madya
2	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis tek-nologi	Tujuan 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/ Indeks	B
		Sasaran 2.1. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP)	Predikat/ Nilai	BB (70,30)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83
			Tingkat kemandirian keuangan daerah	%	18,35
		Sasaran 2.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi	Indeks SPBE	Indeks	3
3	Misi 3: Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan ketahanan pangan	Tujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3
		Sasaran 3.1.	Pendapatan perkapita	Rp Juta/tahun	30,07
		Meningkatnya pendapatan perkapita			
		Sasaran 3.2.	Nilai realisasi penanaman modal	Trilyun Rp	1,55
		Meningkatnya investasi daerah			
		Sasaran 3.3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,4
4	Misi 4: Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja	Tujuan 4: Menurunkan angka kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja	Angka kemiskinan	%	12,98
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,07
		Sasaran 4.1.	Persentase penurunan angka kemiskinan	%	0,2
		Menurunnya angka kemiskinan			
		Sasaran 4.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,24
		Menurunnya angka pengangguran			

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
5	Misi 5:	Tujuan 5: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Indeks	74,29
	Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong	Sasaran 5.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Indeks infrastruktur	Indeks	76,81
		Sasaran 5.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,4

Sumber: RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan good governance dalam meningkatkan pelayanan publik yang prima”** sesuai dengan prioritas RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2023 dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dengan sasaran:

- a. Transformasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Setda, Kecamatan, Disdukcapil, Sekretariat DPRD dan Bappeda Litbang, dengan fokus layanan:
 - 1) Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik, melalui teknologi informasi.
 - 2) Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik dan penguatan pelayanan terpadu, termasuk pembangunan mall pelayanan publik dan pembangunan Pemda Terpadu.
 - 3) Penguatan ekosistem inovasi daerah.
- b. Penataan kelembagaan dan penguatan akuntabilitas kinerja organisasi, melalui:
 - 1) Penataan kelembagaan instansi pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan proses bisnis.
 - 2) Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang holistik, integratif, tematik dan spasial.
 - 3) Penguatan pembinaan dan pengawasan serta perluasan implementasi sistem integritas.
- c. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui:
 - 1) Peningkatan implementasi sistem merit ASN dan penerapan manajemen talenta;
 - 2) Peningkatan kualitas SDM aparatur.
- d. Peningkatan pendapatan asli daerah, melalui optimalisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah dengan tetap mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah.
- e. Penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah, melalui pemantapan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah .
- f. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kondusivitas daerah, melalui:

- 1) Optimalisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
- 2) Penguatan ideologi Pancasila dan ketahanan bangsa serta fasilitasi konflik sosial,
- g. Peningkatan upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi bencana, melalui:
 - 1) Penguatan penanggulangan bencana secara holistik dan integratif;
 - 2) Peningkatan kampanye pencegahan kebakaran.
- h. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui:
 - 1) Peningkatan kapasitas aparatur dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa;
 - 2) Penguatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
- i. Penguatan penerapan SPBE terintegrasi, melalui:
 - 1) Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
 - 2) Penguatan keterbukaan informasi publik;
 - 3) Penguatan implementasi kebijakan tata kelola satu data;
 - 4) Penguatan keamanan informasi.
- j. Penguatan tata kelola kearsipan, melalui:
 - 1) Penguatan pembinaan dan pengawasan sistem kearsipan;
 - 2) Penerapan sistem kearsipan berbasis elektronik.

2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat dengan sasaran:

- a. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan berkualitas termasuk pembangunan SDN Unggul di setiap Kecamatan, melalui:
 - 1) Peningkatan partisipasi sekolah pada usia sekolah;
 - 2) Peningkatan kualitas kelulusan siswa;
 - 3) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk insentif GTT dan PTT secara bertahap;
 - 4) Perluasan cakupan pemberian beasiswa;
 - 5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 6) Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - 7) Pengembangan kurikulum berbasis pembelajaran budaya;
 - 8) Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan digital;
 - 9) Peningkatan ketersediaan dan keanekaragaman koleksi perpustakaan;
 - 10) Peningkatan pembinaan pemuda dan organisasi pemuda;
 - 11) Peningkatan pembinaan dan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, melalui:
 - 1) Peningkatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan;
 - 3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - 4) Peningkatan cakupan pelayanan jaminan Kesehatan;
 - 5) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.

- 6) Penurunan prevalensi stunting melalui: optimalisasi pelayanan preventif puskesmas, peningkatan penyuluhan dan perawatan kesehatan ibu hamil keluarga miskin, peningkatan sarpras posyandu, penguatan pola pikir masyarakat tentang pola hidup sehat, pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, peningkatan pemanfaatan SDG hewan/tanaman, optimalisasi layanan Keluarga Berencana, optimalisasi pemanfaatan pekarangan serta penyediaan Air Bersih dan Sanitasi.
- c. Peningkatan Pengarusutamaan gender serta perlindungan anak, melalui:
 - 1) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) serta perencanaan dan penganggaran berbasis gender (PPRG);
 - 2) Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan;
 - 3) Penguatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak dan jejaring (networking) dengan segenap pemangku kepentingan;
 - 4) Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan anak.
- d. Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah, melalui:
 - 1) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pola ruang dalam RTRW;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana struktur ruang dalam RTRW;
 - 3) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - 4) Pengelolaan dan pengembangan sistem air bersih dan air minum;
 - 5) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic;
 - 6) Penyediaan sarana dan prasarana bidang perhubungan;
 - 7) Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.

3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, dengan sasaran:

- a. Peningkatan pendapatan perkapita, melalui:
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan;
 - 2) Peningkatan jumlah IKM;
 - 3) Penguatan upaya perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM;
 - 4) Peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - 5) Peningkatan promosi destinasi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - 6) Mendorong Pengembangan Atraksi Wisata;
 - 7) Peningkatan Kualitas Amenitas Wisata.
- b. Peningkatan Investasi Daerah melalui:
 - 1) Peningkatan iklim usaha yang berdaya saing Peningkatan iklim usaha yang berdaya saing;
 - 2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah;
 - 3) Peningkatan tata kelola pertanahan.
- c. Skor pola pangan harapan masyarakat, melalui peningkatan akses, distribusi, keamanan, dan keanekaragaman pangan serta penguatan cadangan pangan.

4. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran: peningkatan peran sosial dan lintas sektoral seperti Pendidikan, kesehatan, Infrastruktur, melalui:

a. Penurunan angka kemiskinan melalui:

- 1) Penanganan kemiskinan ekstrem untuk 3 desa yaitu: Ds. Bukuran Kec.Kalijambe, Ds. Bonagung Kec. Tanon dan Ds.Ngargotirto Kec.Sumberlawang.
- 2) Peningkatan cakupan dan kualitas layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), diantaranya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten;
- 3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- 4) Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan yaitu berupa bantuan Sosial bencana alam dan sosial serta operasional penanganan bencana alam dan sosial.

b. Penurunan angka pengangguran dengan fokus layanan:

- 1) Perluasan lapangan kerja berbasis ekonomi/potensi lokal melalui sektor IKM dan UKM;
- 2) Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;
- 3) Penempatan tenaga kerja;
- 4) Pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi Covid-19 seperti pelaku UKM, penduduk miskin dan rentan miskin, penganggur akibat PHK, dan lainnya;
- 5) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin melalui program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, melalui beberapa sumber dana pemerintah di antaranya APBN, APBD, BUMD, Jaminan Kesehatan, Bantuan Pendidikan bagi Keluarga tidak mampu dan pemberian bantuan kepada fakir miskin dan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE);
- 6) Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- 7) Penguatan Sektor Perdagangan melalui pemberian fasilitasi dan dukungan bagi perkembangan koperasi, UKM dan sektor informal;
- 8) Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor Pertanian dan Pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;
- 9) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program *link and match*;
- 10) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan *friendly* bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya.

5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan sasaran Peningkatan kualitas lingkungan melalui:

- 1) Penguatan upaya pencegahan, penanggulangan serta pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Peningkatan upaya pengurangan sampah;
- 3) Peningkatan upaya penanganan sampah.

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.2
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, dan Fokus Pembangunan Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2023

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus layanan	OPD
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sragen Tahun 2021 nilainya SAKIP 61,98 kategori B - Rendahnya kemandirian fiskal daerah dan bergantung dana transfer pusat serta minimnya kontribusi PAD asli daerah - Belum optimalnya penyerapan APBD tahun 2021	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi	Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik, melalui teknologi informasi.	Setda, Kecamatan, Disdukcapil, Sekretariat DPRD
			Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik dan penguatan pelayanan terpadu, termasuk pembangunan mall pelayanan publik dan pembangunan Pemda Terpadu .	
			Penguatan ekosistem inovasi daerah.	Bappeda Litbang
			Penataan kelembagaan instansi pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan proses bisnis.	Setda
			Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	Bappeda Litbang
			Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang holistik, integratif, tematik dan spasial.	
			Penguatan pembinaan dan pengawasan serta perluasan implementasi sistem integritas;	Inspektorat
			Peningkatan implementasi sistem merit ASN dan penerapan manajemen talenta; dan	BKPSDM
			Peningkatan kualitas SDM aparatur	BKPSDM
			Peningkatan pendapatan asli daerah, melalui optimalisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah dengan tetap mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah	BPKPD
			Penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah, melalui pemantapan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah	
			Optimalisasi penegakan peraturan daerah dan	Satpol PP

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus layanan	OPD
			peraturan kepala daerah	
			Penguatan ideologi Pancasila dan ketahanan bangsa serta fasilitasi konflik sosial	Badan Kesbangpolinmas
			Penguatan penanggulangan bencana secara holistik dan integratif; dan	BPBD
			Peningkatan kampanye pencegahan kebakaran	DPMD
			Peningkatan kapasitas aparatur dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa;	
			Penguatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	Diskominfo
			Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	
			Penguatan keterbukaan informasi publik	
			Penguatan implementasi kebijakan tata kelola satu data	Diskominfo
			Penguatan keamanan informasi	
			Penguatan pembinaan dan pengawasan sistem kearsipan; dan	Dinas Arsipus
			Penerapan sistem kearsipan berbasis elektronik	
• Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen terendah kedua se-Soloraya, namun diatas Provinsi • Angka kematian ibu (AKI) tahun 2021 di Kabupaten Sragen masih relatif tinggi • Perlindungan Perempuan dan anak di Sragen masih perlu perhatian	Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat	Peningkatan partisipasi sekolah pada usia sekolah;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan kualitas kelulusan siswa;	
			Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk insentif GTT dan PTT secara bertahap.	
			Perluasan cakupan pemberian beasiswa;	
			Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;	
			Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan; dan	
			Pengembangan kurikulum berbasis	

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus layanan	OPD
			pembelajaran budaya	Dinas Arsipus
			Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan digital;	
			Peningkatan ketersediaan dan keanekaragaman koleksi perpustakaan	
			Peningkatan pembinaan pemuda dan organisasi pemuda; dan	Dinas Pemuda OlahRaga dan Pariwisata
			Peningkatan pembinaan dan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
			Peningkatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan;	Dinas Kesehatan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan	
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
			Peningkatan cakupan pelayanan jaminan Kesehatan	
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	
			Penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Sragen	Dinkes, DP2KBP3A, Distan KP, DPUPR, Disnakan, Dinsos, Diskominfo, Dikbud
			Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) serta perencanaan dan penganggaran berbasis gender (PPRG); dan	Dinas KBP3A
			Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan	
			Penguatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak dan jejaring (networking) dengan segenap pemangku kepentingan; dan	
			Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan anak	
• Perlambatan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen	Pertumbuhan ekonomi dan Kualitas	3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan	Dinas Pertanian & Disnakan

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus layanan	OPD
	Infrastruktur Wilayah			
• Perlunya peningkatan Tiga sektor unggulan Kabupaten Sragen (sektor perdagangan, mengalami penurunan) • Melambatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil • Jalan kondisi baik 639,71km (62,70%) rusak sedang 187,83 km (18,41%), rusak ringan 154,55 Km (15,15%) dan rusak berat 38,17 Km (3,74%). • Belum meratanya pembangunan infrastruktur • Meningkatkan Laju pertumbuhan penduduk			Peningkatan jumlah IKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Penguatan upaya perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM	
			Peningkatan sarana distribusi perdagangan	
			Peningkatan promosi destinasi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;	Dinas PORPAR
			Mendorong Pengembangan Atraksi Wisata; dan	
			Peningkatan Kualitas Amenitas Wisata	
			Peningkatan iklim usaha yang berdaya saing Peningkatan iklim usaha yang berdaya saing; Peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah	DPMPTSP
			Peningkatan tata kelola pertanahan	Disperkimtaru
			Skor pola pangan harapan Masyarakat, melalui Peningkatan akses, distribusi, keamanan, dan keanekaragaman pangan serta penguatan cadangan pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pola ruang di dalam RTRW	Disperkim Taru
			Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana struktur ruang di dalam RTRW	
			Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	DPU
			Pengelolaan dan pengembangan sistem air bersih dan air minum Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	
			Penyediaan sarana dan prasarana bidang	Dinas Perhubungan

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus layanan	OPD
			perhubungan Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Disperkim Taru
• Angka Kemiskinan Masih Tinggi • Masih banyaknya jumlah RTLH yang belum tertangani • Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sragen	Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	4. Percepatan Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), diantaranya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten; Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; dan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan yaitu berupa bantuan Sosial bencana alam dan sosial serta operasional penanganan bencana alam dan sosial	Dinas Sosial
			Pengelolaan Pendidikan SD, SMP dan NonFormal/kesetaraan, melalui operasional manajemen Kartu Indonesia Pintar sekolah dasar dan operasional manajemen Program Indonesia Pintar baik SMP maupun NonFormal.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Pengelolaan Jaminan.	
			Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau terkena relokasi Program Kabupaten; Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau terkena relokasi Program Kabupaten Penanganan RTLH dikawasan kumuh	Disperkimtaru
			Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	BKBP3A
			Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin secara integratif	DPU, Disperkimtaru Kesehatan

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus layanan	OPD
			Perluasan lapangan kerja berbasis ekonomi/potensi lokal melalui sektor IKM dan UKM; Penguatan Sektor Perdagangan melalui pemberian fasilitasi dan dukungan bagi perkembangan koperasi, UKM dan sektor informal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja Penempatan tenaga kerja Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan friendly bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program link and match;	Dinas Tenaga Kerja
			Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);	DPMD
			Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor Pertanian dan Pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;	Dinas Pertanian Ketahanan pangan
• Belum optimalnya Pengelolaan persampahan • Masih rendahnya Kualitas	Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Penguatan upaya pencegahan, penanggulangan serta pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Peningkatan upaya pengurangan sampah Peningkatan upaya penanganan sampah	DLH

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus layanan	OPD
Lingkungan Hidup				

Sumber: RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

Tabel 4.3
Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Nasional

KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024	RKPD 2023	
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	PROGRAM
1	2	3	4
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Penataan Desa
		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
PN 1.1	Meningkatnya Daya Dukung Dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			Program Pengembangan Ekspor
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
PN 1.2	Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Dan Daya Saing Perekonomian	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
PN 2	Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
PN 2.2	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Barat Indonesia (Kbi)	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial

KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024	RKPD 2023	
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	PROGRAM
1	2	3	4
		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
PN 2.3	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. Meningkatnya Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk
		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
PN 3.1	Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk
		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
PN 3.2	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Program Penanganan Bencana
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
			Program Pemberdayaan Sosial
		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
PN 3.3	Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan Dan Pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
PN 3.4	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Perlindungan Perempuan
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
			Program Perlindungan Khusus Anak

KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024	RKPD 2023	
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	PROGRAM
1	2	3	4
		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
PN 3.5	Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin Dan Rentan	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
PN 3.6	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial
PN 4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk
		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
		Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
PN 4.1	Menguatnya Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memantapkan Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
PN 4.2	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan Dalam Pembangunan	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Program Pembinaan Sejarah
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Pengelolaan Permuseuman
PN 4.5	Meningkatnya Ketahanan Keluarga Untuk Memperkukuh Karakter Bangsa	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
PN 4.6	Meningkatnya Budaya Literasi Untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovasi Dan Kreatif	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
			Program Perizinan Penggunaan Arsip
PN 5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024	RKPD 2023	
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	PROGRAM
1	2	3	4
		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman
		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
PN 5.1	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman
		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
PN 5.3	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
PN 5.3	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
PN 6.1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
PN 6.2	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana Dean Bahaya Iklim	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
PN 6.3	Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi Dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (Grk) Terhadap Baseline	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			Program Penanggulangan Bencana
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Non Urusan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024	RKPD 2023	
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	PROGRAM
1	2	3	4
PN 7.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Perekonomian Dan Pembangunan
		Sekretariat Dprd	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
		Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah
		Pendidikan Dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi
		Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Non Urusan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
PP 1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Perumahan
			Program Kawasan Permukiman
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
			Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
			Program Penatagunaan Tanah
			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
			Program Pengelolaan Pelayaran
PP 2	Infrastruktur Ekonomi	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024	RKPD 2023	
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	PROGRAM
1	2	3	4
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
PP 3	Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
PP 4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
PP 5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (Umkm) Dan Koperasi	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
			Program Pengembangan Umkm
PP 6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
PP 7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tkdn	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
PP 8	Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal

KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024	RKPD 2023	
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	PROGRAM
1	2	3	4
			Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Sumber: Bappeda Litbang, Diolah.

4.3 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Jenis pelayanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 6 (enam) Urusan wajib antara lain Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Urusan Sosial dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Jenis pelayanan dasar pada Standar SPM Urusan Pendidikan mencakup 4 (empat) jenis pelayanan dasar sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.4
Realisasi Capaian Penerapan SPM Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jml Orang yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jml Orang yang Akan Terlayani	Target Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD)	94.017	94.017	100%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan.	3.836	3.836	100%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	30.225	30.225	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jml Orang yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jml Orang yang Akan Terlayani	Target Capaian
4	Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah anak usia 12-15 tahun yang sudah atau sedang belajar (SMP, MTs)	46.038	46.038	100%

Sumber: Laporan Capaian Penerapan SPM Kab. Sragen tahun 2021, Bag. Pemerintahan Setda, 2022

2. Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Kesehatan mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar sebagai berikut.

Tabel 4.5
Realisasi Capaian Penerapan SPM Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jml Oanrg yang Berhak Mendapatkan Layanan	Juml ah Orang yang Akan Terlayani	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	13.382	13.382	100%
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai Standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	12.300	12.300	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	12.302	12.302	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar	50.699	50.699	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	cakupan pelayanan Kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	118.251	118.251	100%

Sumber: Laporan Capaian Penerapan SPM Kab. Sragen tahun 2021, Bag. Pemerintahan Setda, 2022

3. Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pekerjaan Umum mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar sebagai berikut.

Tabel 4.7
Realisasi Capaian Penerapan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang yang Akan Terlayani	Capaian =%
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	9,812	9,812	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang yang Akan Terlayani	Capaian =%
2	Penyediaan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Berhak Memperoleh pengolahan air Layanan limbah domestik	1,625	1,625	100%

Sumber: Laporan Capaian Penerapan SPM Kab. Sragen tahun 2021, Bag. Pemerintahan Setda, 2022

4. Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar sebagai berikut.

Tabel 4.6
Realisasi capaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	RAPBD 2021	Jumlah Orang Yang Terlayani	APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakkan Hukum Perda Dan Perkada	-	-	-	-	-
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	842.721	27,880,250	842.721	27.769.400	100%
3.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiaga An Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan KesiapsiagaanTerhadap Bencana	842.721	425,821,820	842.721	391.375.738	100 %
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	156.801	2,297,903,800	156.801	2.110.337. 640	100 %
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			112	968.523.006	100%

5. Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Sosial mencakup 4 (empat) jenis pelayanan dasar sebagai berikut.

Tabel 4.7
Realisasi Capaian Penerapan SPM Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian Indikator SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi Capaian = (4) : (6) X 100%
			Jumlah Orang yang akan Terlayani	RAPBD 2021	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	330	505.365.500	330	496.685.250	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang Memperoleh di luar panti	361	350.365.500	361	346.277.750	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	150 Rehabilitasi sosial	320.000.000	150	303.720.340	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	209 orang	657.365.500	209 orang	641.885.250	100%

Sumber: Laporan Capaian Penerapan SPM Kab. Sragen tahun 2021, Bag. Pemerintahan Setda, 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, ada perubahan nomenklatur indikator kinerja khususnya untuk Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Trantibumlinmas dan Sosial. Sedangkan target SPM Kabupaten Sragen tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8
Target SPM Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator kinerja pencapaian	Target
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya
2	Pendidikan Kesetaraan	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
		Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator kinerja pencapaian	Target
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%

Tabel 4.9
Target SPM Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator kinerja pencapaian	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

Tabel 4.10
Target SPM Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator kinerja pencapaian	Target
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

Tabel 4.11
Target SPM Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator kinerja pencapaian	Target
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah uang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah warga negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda Kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	100%

Tabel 4.12
Target SPM Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator kinerja pencapaian	Target
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%

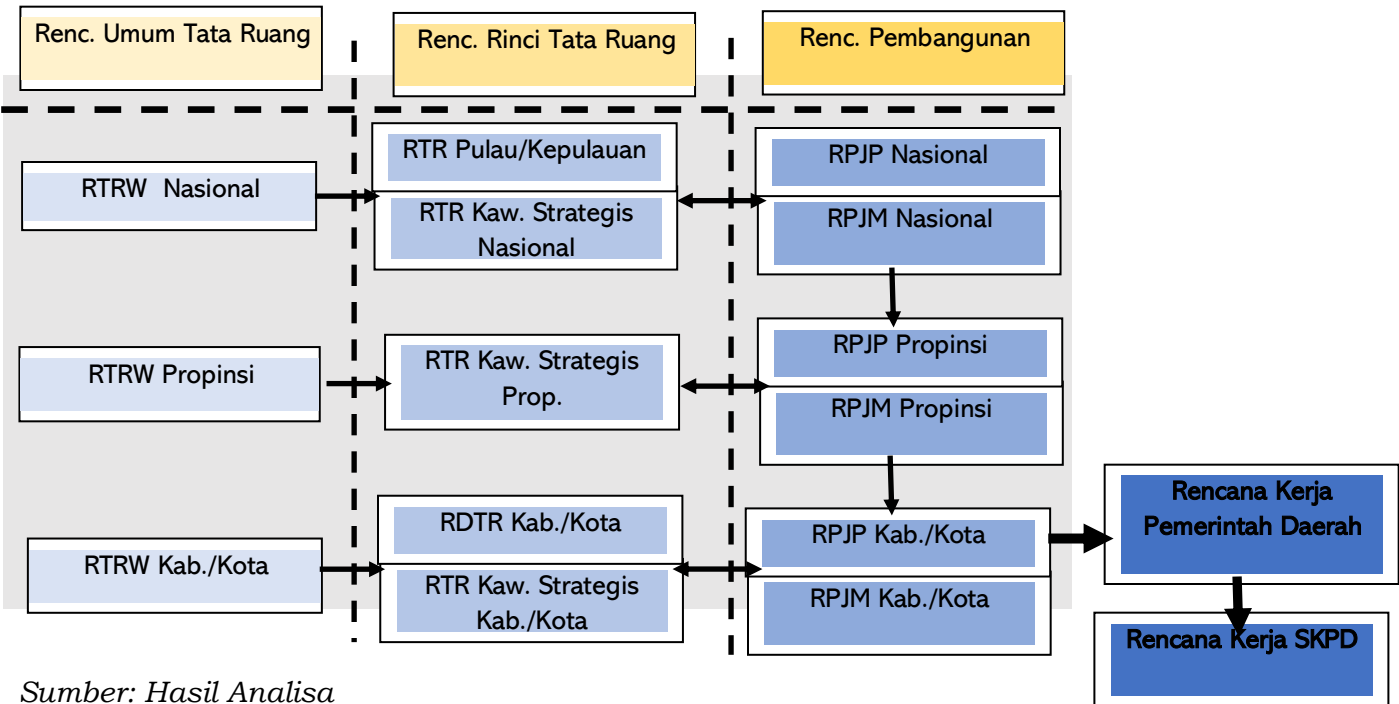
4.4 Rencana Pengembangan Wilayah Tahun 2023

4.4.1 Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Pembangunan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah serta memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Pembangunan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja sehingga apa yang sudah direncanakan di dalam rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang Kabupaten / kota dapat terwujud. Adapun Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Pembangunan dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: Hasil Analisa

Gambar 4.1 Hubungan Rancangan Awal RKPD terhadap Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen

Berdasarkan gambar di atas untuk Kabupaten Sragen dijelaskan sebagai berikut.

1. Rencana Umum Tata Ruang:

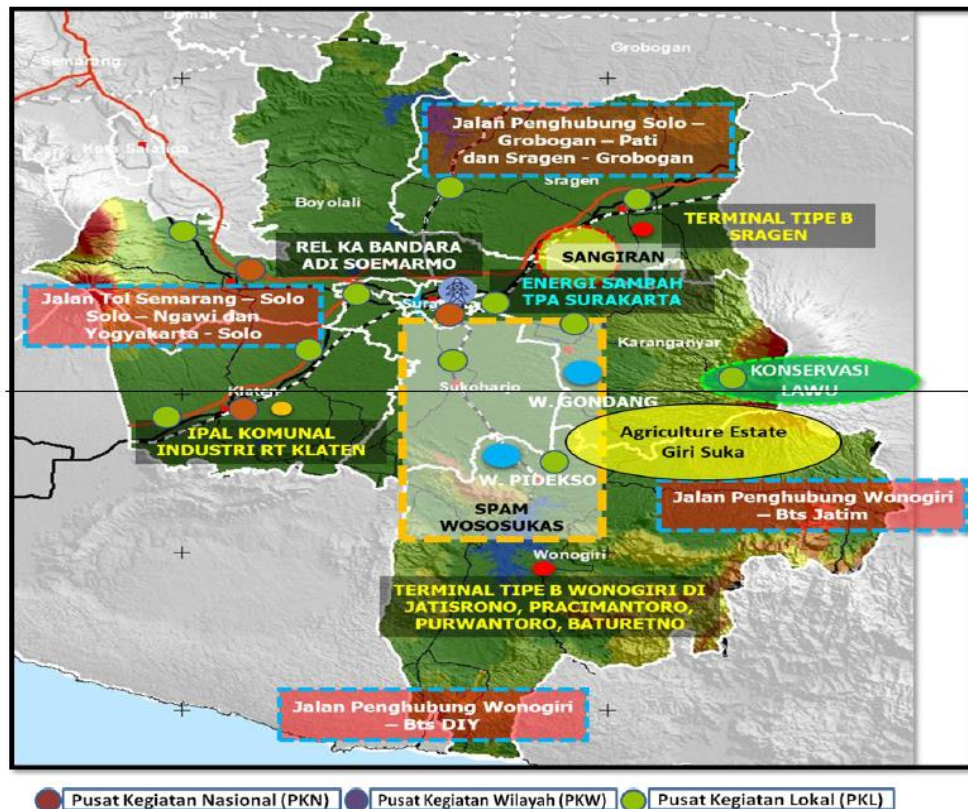
- a. Sesuai dengan definisi RTRWN, Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Dengan pengertian ini, suatu PKN harus mempunyai fasilitas-fasilitas yang jangkauan pelayanannya minimal meliputi lebih dari satu provinsi, seperti misalnya pelabuhan laut berskala internasional atau nasional, baik kelas utama ataupun pengumpan, atau juga bandar udara internasional ataupun nasional, atau juga kegiatan industri manufaktur yang proses input-outputnya melampaui skala Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk Kabupaten Sragen merupakan bagian dari PKN Perkotaan Surakarta-Solo yang wilayahnya meliputi Kota Surakarta dan sekitarnya.
- b. Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2020 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 maka:
 - i. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di Kawasan Perkotaan Sragen dan Kawasan Perkotaan Gemolong
 - ii. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri Kawasan Perkotaan Sambungmacan; Kawasan Perkotaan Tangen; Kawasan Perkotaan Gondang; Kawasan Perkotaan Kalijambe; Kawasan Perkotaan Masaran; dan Kawasan Perkotaan Sumberlawang.
 - iii. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi:
 - Desa Tegaldowo dan Desa Purworejo berada di Kecamatan Gemolong;
 - Desa Taraman berada di Kecamatan Sidoharjo;
 - Desa Karang Jati berada di Kecamatan Kalijambe;
 - Desa Jeruk berada di Kecamatan Miri;
 - Desa Pendem dan Desa Pagak berada di Kecamatan Sumberlawang;
 - Desa Gawan berada di Kecamatan Tanon;
 - Desa Dari berada di Kecamatan Plupuh;
 - Desa Jati Tengah berada di Kecamatan Sukodono;
 - Desa Tanggan berada di Kecamatan Gesi;
 - Desa Banyuurip berada di Kecamatan Jenar;
 - Desa Karangmalang dan Desa Kliwonan berada di Kecamatan Masaran;
 - Desa Mojokerto berada di Kecamatan Kedawung;
 - Desa Saradan dan Desa Plosokerep berada di Kecamatan Karangmalang;
 - Desa Sambungmacan dan Desa Banaran berada di Kecamatan Sambungmacan;
 - Desa Gabus berada di Kecamatan Ngrampal;
 - Desa Blimbing dan Desa Dawung berada di Kecamatan Sambirejo;
 - Desa Srimulyo berada di Kecamatan Gondang;
 - Desa Dukuh berada di Kecamatan Tangen dan;
 - Desa Kedungupit berada di Kecamatan Sragen.

2. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Sragen:

- a. Sesuai dengan arahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia, dimana untuk Kabupaten Sragen memiliki **Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Sangiran dan sekitarnya.**
- b. Berdasarkan amanat Perda Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2020 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 dalam rangka menunjang penataan ruang Kabupaten, Kabupaten Sragen perlu menyusun Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dalam bentuk RDTR yang meliputi: a. kawasan perkotaan Sragen; b. kawasan perkotaan Gemolong; c. kawasan kota industri Gondang-Sambungmacan; d. Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo dan sekitarnya; e. Kecamatan Miri dan sekitarnya; dan f. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Sangiran dan sekitarnya.

3. Rencana Pembangunan Kabupaten Sragen:

Dalam rencana sistem perwilayahan skala regionalisasi Jawa Tengah termasuk ke dalam bagian wilayah Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Rencana Sistem Perwilayahan Regionalisasi adalah wilayah yang memiliki keterkaitan fungsional kota-kota dan hinterland yang ada di sekitarnya baik dari segi perencanaan sarana maupun prasarana. Dalam rencana sistem perwilayahan skala regionalisasi Jawa Tengah termasuk ke dalam bagian wilayah Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten.. Kebijakan pengembangan wilayah untuk Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada kebijakan wilayah pengembangan SUBOSUKOWONOSRATEN. Sektor unggulan wilayah adalah pariwisata, industri dan pertanian. Arah pengembangan wilayah Subosukowonosraten adalah “Pembangunan Wilayah Subosukawonosraten Berbasis Pariwisata Terpadu yang Didukung oleh Pertanian dan Industri Pengolahan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Gambaran arah pengembangan yang ada di Wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber Data: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Gambar 4.2 Arah Pengembangan Wilayah Subosukowonosraten

Berdasarkan Gambar Arah Pengembangan Wilayah Subosukowonosraten untuk Kabupaten Sragen berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sangiran merupakan salah satu program prioritas nasional. Berdasarkan PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 s/d 2025 untuk KSPN Sangiran memiliki Daya Tarik Wisata (DTW) utama meliputi:

- Situs Manusia Purba Sangiran
- Makam P. Samudro Gn. Kemukus
- Taman Wisata Kedung Kancil

Mengingat keterkaitannya dengan Daya Tarik Wisata (DTW) lain di daerah sekitar serta menitik-beratkan pada wisata budaya, maka beberapa DTW yang memiliki kedekatan lokasi dan keterkaitan karakteristik wisata budaya diantaranya:

- Destinasi utama Situs Manusia Purba Sangiran yang terdiri 5 museum di masing masing klaster dan memiliki 1 menara pandang,
- Kawasan Wisata Makam Pangeran Samudro Gunung Kemukus yang memiliki tradisi Larap Slambu mengambil tempat di Waduk Kedungombo,
- Petilasan Joko Tingkir,
- dan Desa Wisata Batik dengan lokasi yang sebagian besar berada di Zona Cagar Budaya Sangiran.

4.4.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen

A. Indikasi Program Berdasarkan RTRW Kabupaten Sragen

Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2020 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031, pada Tahun 2023 Kabupaten Sragen memiliki Indikasi Program diantaranya:

- Perencanaan Pengembangan Wilayah Pusat Pelayanan Kawasan untuk Kawasan Perkotaan Sambungmacan; Kawasan Perkotaan Tangen; Kawasan Perkotaan Gondang; Kawasan Perkotaan Kalijambe; Kawasan Perkotaan Masaran; dan Kawasan Perkotaan Sumberlawang;
- Program Penyelenggaraan Jalan untuk:
 - Ruas jalan Sumberlawang - Ngargotirto - Boyolayar – Batas;
 - Ruas jalan kabupaten di luar jalan lokal primer,
 - Penyelenggaraan Jalan Desa
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air,
- Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
- Program Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Program Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Program Sistem Jaringan Persampahan Wilayah
- Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Sragen
- Program Pengembangan Kawasan Perkantoran Terpadu
- Program Pengembangan Pasar Tradisional yang bersih, aman, nyaman dan sehat.

2. Kegiatan Strategis Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022

Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 -2026, Tema pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023 yaitu **Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan *good governance* dalam meningkatkan pelayanan publik yang prima**, agar selaras dengan visi misi RPJMD maka Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2023 akan melaksanakan beberapa kegiatan strategis di antaranya:

1. Pembangunan Kantor Pemda Terpadu

Berlatar belakang pesatnya laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan tanggap serta kondisi eksisting keberadaan Kantor Pemda Sragen dirasa kurang memadai dan kurang ideal sehingga Pemerintah Kabupaten Sragen merencanakan adanya pemusatan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam 1 kawasan terpadu.

Dengan pembangunan kantor organisasi perangkat daerah dalam 1 kawasan bertujuan agar memudahkan koordinasi antar OPD dan terciptanya kelancaran aktivitas kegiatan perkantoran dan juga masyarakat. Lokasi Pembangunan Kantor Pemda Terpadu berada di Jl.

Sutomo dan jarak dari lokasi lama ± 2,5 km ke arah Barat dengan luas lahan sekitar ± 37.708 m2.

Pembangunan Pemda Terpadu akan mulai dilakukan pada Tahun 2023 yang terdiri dari: Kantor Bupati dan Wakil Bupati, Setda, BPKPD, Bappeda Litbang, BKPSDM, Satpol PP, Diskominfo, Inspektorat, badan Kesbangpol, DPMD, UPTK, Disperkimtaru.

Adapun rencana pembagian zona kawasan terdiri dari zona parkir, zona area publik, zona pedestrian, zona transit/lapangan upacara dan zona perkantoran. Zona perkantoran rencana dibangun menjadi 5 lantai dengan fungsi lantai 1 hingga lantai 4 area perkantoran dan lantai 5 direncanakan untuk aula/ball room dan data center/ruang arsip.

2. New Kemukus

Berlatar belakang Pemerintah Kabupaten Sragen ingin mengubah image dan mindset masyarakat terkait mitos Gunung Kemukus yang negatif menjadi wisata budaya & keluarga, Kawasan Gunung Kemukus termasuk bagian dari KSPN Sangiran dan sekitarnya (Pendukung Destinasi Pariwisata Prioritas/ DPP Borobudur), serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kawasan New Kemukus. Untuk menghilangkan stigma negatif tidak mudah dan harus butuh kerja keras dan Kerjasama dari seluruh elemen bagi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, Akademisi dan juga dukungan dari masyarakat luas.

Keseriusan dalam penataan dan pengelolaan New Kemukus yang didukung oleh seluruh element dapat terlihat sejak Tahun 2015 hingga saat ini, yang dapat dilihat pada table dibawah berikut:

Tabel 4.13
Kegiatan Penataan dan Pengelolaan New Kemukus

No.	Tahun	Kegiatan	Ket
1	2015	Pembangunan Jembatan Barong Dan Pengecoran Jalan Ruas Barong-Brojol.	
2	2019	Kajian Awal Perencanaan	
		Pembuatan Tempat Pertemuan & Tangga Menuju Makan	
		Penyelenggaraan Prosesi Larap Selambi tiap 1 Suro	
3	2020	Melakukan Penertiban Bangunan Liar di Area Sabuk Hijau WKO	
		Penyelenggaraan Prosesi Larap Selambi tiap 1 Suro	
4	2021	Pengadaan Tanah untuk Gerbang Masuk Barong	
		Melakukan FGD Bersama BPPW dan UNS	
		Penyediaan Bis Trans Jateng Rute Solo-Sangiran-Gemolong-Kemukus-Sumberlawang	
		Penyelenggaraan Prosesi Larap Selambu tiap 1 Suro	
		Pembangunan New Kemukus Multiyears	
5	2022	Pembelian Lahan di 4 lokasi untuk pembangunan TPS3R, Lahan Parkir, Gapura Masuk Sisi Barat dan View Deck.	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Pengoptimalan potensi wisata Sangiran-Kemukus dan WKO melalui “Kedaireka” yang berkerjasama dengan Perguruan Tinggi UNS dan DIKTI.	
		Pelatihan Pembuatan Souvernir untuk masyarakat di sekitar Kemukus.	
		Kemukus Bersolawat	
		Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara (BAST) dari Kementrian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng	

No.	Tahun	Kegiatan	Ket
		kepada Pemerintah Kabupaten Sragen untuk 8 kegiatan yang telah dibangun Tahun 2020-2021.	
		Beatifikasi Kawasan Kemukus dan Bantuan Rumah Swadaya dari Kementrian PUPR.	
6	2023	Pentas Event Rutin Tahunan Larap Lambu	
		Pelaksanaan Roadmap Kemukus	

Sumber: Hasil Analisa

Kegiatan Penataan dan Pengelolaan New Kemukus tidak hanya sampai dengan Tahun 2021, pihak Pemerintah Kabupaten Sragen terus berupaya mengubah citra negatif Gunung Kemukus dari objek wisata negative menjadi objek wisata keluarga. Selain itu diperlukan juga kajian terhadap mitologi untuk meluruskan sejarah keberadaan Gunung Kemukus, sehingga masih dibutuhkan peran serta dari berbagai element untuk mewujudkan New Kemukus sesuai harapan Pemerintah Kabupaten Sragen.

3. Revitalisasi Pasar Kota Sragen

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang -Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang berisi beberapa kegiatan strategis di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sragen yang masuk dalam wilayah SUBOSUKAWANASRATEN memiliki 6 kegiatan strategis, yaitu:

- Pembangunan Fly Over/Underpass Pilangsari, Kab. Sragen dengan nilai investasi 175 Milyar;
- Peningkatan struktur dan kapasitas Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer/batas Kab. Grobogan, Kab. Sragen dengan nilai investasi 19 Milyar;
- Pembangunan Jembatan Ganevo, Kab. Sragen dengan nilai investasi 30 Milyar;
- **Revitalisasi Pasar Kota Kabupaten Sragen dengan nilai investasi 200 Milyar;**
- Pengembangan Amenitas Kawasan Wisata Sangiran, Kab. Sragen dengan nilai investasi 50 Milyar;
- Pengembangan Sapi Kab. Sragen dengan nilai investasi 50 Milyar.

Berdasarkan 6 kegiatan strategis di atas untuk Kabupaten Sragen pada Tahun 2023 akan melaksanakan Revitalisasi Pasar Kota Kabupaten Sragen oleh Pemerintah Pusat dengan nilai investasi 200 Milyar dan Pemerintah Kabupaten Sragen wajib untuk menyiapkan kegiatan pendukung untuk menunjang kegiatan Revitalisasi Pasar Kota. Pasar Kota Kabupaten Sragen rencana dibangun tiga lantai dengan luas bangunan 43.500 m2.

4. Pembangunan Jembatan Gilirejo Lama - Gilirejo Baru Tahap II

Kabupaten Sragen akan membangun jembatan untuk menyambungkan Gilirejo Lama dengan Gilirejo Baru, Kecamatan Miri pada Tahun 2022. Proyek pembangunan jembatan terpanjang kedua di Jawa Tengah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah. Untuk 2022 disiapkan anggaran Rp15,3 miliar yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membangun fondasi jembatan yang akan memiliki panjang sekitar 600 meter tersebut. Sedangkan proyek lanjutan tahap II akan dilanjutkan di Tahun 2023 dengan usulan pendanaan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan DED Jembatan Gilirejo Baru – Gilirejo Lama telah dilakukan pada tahun 2017. Kemudian Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan Gilirejo Baru – Gilirejo Lama dilakukan pada tahun 2021 dengan anggaran Rp. 1.000.000.000,00. Pada tahun 2022 akan dilaksanakan Pembangunan Jembatan Gilirejo Baru - Gilirejo Lama dengan anggaran Rp. 15.300.000.000,00 bersumber Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah dan sebelumnya dilakukan kegiatan Reviu Desain Pembangunan Jembatan Gilirejo Baru - Gilirejo Lama. Proses pembebasan lahan yang belum selesai rencana akan dilanjutkan pada 2022 Perubahan dan 2023. Sementara untuk lanjutan kegiatan pembangunan akan diusulkan pada tahun anggaran 2023 melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah.

5. Rencana Pendirian Politeknik Pariwisata Negeri (Poltekpar) Jawa Tengah di Kabupaten Sragen

Rencana pendirian Poltekpar berlokasi di Kecamatan Gemolong seluas ± 201.875 m² yang merupakan lokasi yang strategis karena merupakan pusat pertumbuhan kedua setelah Kecamatan Sragen. Rencana lokasi Poltekpar yang terletak di Kelurahan Kwangen seluas ± 146.295 m² dan di Kelurahan Ngembatpadas ± 46.605 m² dan Kelurahan Gemolong ± 8.975 m². Pendirian Poltekpar ini merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Sragen dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pada Tanggal 17 Mei 2022 telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Antara Pemerintah Kabupaten Sragen Dengan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Kemudian Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif pada pertengahan Tahun 2022 akan mulai melakukan pembuatan DED untuk Pembangunan Poltekpar Jawa Tengah di Kabupaten Sragen serta sudah mulai membuka Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Poltekpar Bali di Kabupaten Sragen.

Target pada Tahun 2023 Pembangunan Kampus Poltekpar Jawa Tengah di Kabupaten Sragen Tahap I akan segera dilaksanakan. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan

Ekonomi Kreatif akan melakukan investasi dengan total investasi yang akan diberikan sebesar ± 400 Milyard dengan pelaksanaan pembangunan secara bertahap.

Tabel 4.14

Kesiapan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah
Berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 Dan Perpres Nomor 80 Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan Rencana Induk Pembangunan Kawasan	Bentuk Koordinasi dengan Badan Usaha Pengelolaan Kawasan	Penyesuaian Dokumen Perencanaan yang Telah Dilaksanakan	Kerja Sama Dengan Daerah Lain/ Pihak Ketiga (Pemanfaatan Pembangunan Ekonomi)	Rencana Pelaksanaan	Sumber Anggaran
1	Pembangunan <i>Fly Over/Underpass</i> Pilangsari, Kab. Sragen dengan nilai investasi 175 Milyar	Koordinasi dengan Kementerian PUPERA karena rencananya akan dilakukan alih status jalan kabupaten menjadi jalan nasional (<i>ring road</i>)	- Menyusun Studi Kelayakan - Menyusun dokumen lingkungan	-	2023-2024	APBN
			- Reviu Desain Jalan Pilangsari – Fly Over Pilangsari 2020 Perubahan - Penyusunan Dokumen Feasibility Study Jembatan Pilangsari – Pelemgadung 2020 Perubahan - Reviu Desain Fly Over Pilangsari 2020 Perubahan - Melakukan proses pembebasan lahan untuk perluasan <i>Fly Over/Underpass</i> tahun 2021 - Menyusun DED dan RAB			APBDKAB
2	Peningkatan struktur dan kapasitas Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer/batas Kab. Grobogan, Kab. Sragen dengan nilai investasi 19 Milyar	- Koordinasi dengan Dinas BMCK Provinsi Jawa Tengah, karena jalan tersebut menjadi kewenangan Provinsi - Kegiatan fisik tahun 2021	- DED menggunakan APBD Propinsi Jateng Tahun 2020 - Pembebasan Lahan	-	2021-2023	APBN & APBD Prov. Jateng
3	Pembangunan Jembatan Ganevo, Kab. Sragen dengan nilai investasi 30 Milyar	- Koordinasi dengan Dinas BMCK Provinsi Jawa Tengah, karena jalan tersebut menjadi kewenangan Provinsi - Pekerjaan fisik (Kontruksi Bawah) sudah selesai dilaksanakan dengan anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - Pengantian Jembatan Ganevo dianggarkan dengan anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	-	-	2020-2022	APBD Prov. Jateng
4	Revitalisasi pasar Kab. Sragen dengan nilai investasi 200 Milyar	Telah dilakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	- Menyusun Studi Kelayakan - Menyusun DED dan RAB - Menyusun dokumen	-	2022-2023	APBN

RKPD Kab.Sragen Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan Rencana Induk Pembangunan Kawasan	Bentuk Koordinasi dengan Badan Usaha Pengelolaan Kawasan	Penyesuaian Dokumen Perencanaan yang Telah Dilaksanakan	Kerja Sama Dengan Daerah Lain/ Pihak Ketiga (Pemanfaatan Pembangunan Ekonomi)	Rencana Pelaksanaan	Sumber Anggaran
		Jawa Tengah agar kegiatan tersebut dapat diusulkan ke pusat untuk dibiayai dengan anggaran APBN melalui Kemendag dan Kemen PUPERA	lingkungan - Menyusun dokumen ANDALLALIN - Menyusun Perijinan PBG - Menyiapkan anggaran APBD Kabupaten untuk pembangunan pasar darurat selama masa konstruksi			
5	Pengembangan Amenitas Kawasan Wisata Sangiran, Kab.Sragen dengan nilai investasi 50 Milyar	Telah dilakukan koordinasi dengan Balai Pengelola Situs Manusia Purba Sangiran (BPSMPS) Kemendikbud selaku pengelola kawasan	- Menyusun DED dan RAB - Menyusun dokumen lingkungan - Menyusun Perijinan PBG	-	2022-2023	APBN
6	Pengembangan Sapi Kab. Sragen dengan nilai investasi 50 Milyar	Sudah dilakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah agar kegiatan tersebut dapat diusulkan ke pusat untuk dibiayai dengan anggaran APBN melalui Kementan	- Menyusun <i>masterplan</i> pengembangan sapi sragen - Menyusun DED dan RAB	Kerjasama dengan kelompok peternak yang akan mengembangkan sapi sragen	2022-2023	APBN
7	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah	Koordinasi dengan Kemen PUPERA	Pendataan RTLH di Kab. Sragen	-	2019-2024	APBN
8	Pengembangan amenitas pariwisata berbasis homestay/desa wisata	Koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	-	-	2023	APBN & APBD Prov. Jateng
9	Pengembangan SDM bidang IPTEK di Jawa Tengah	Koordinasi dengan Kemenristek DIKTI untuk pengembangan inkubasi bisnis di Teknopark Sragen	-		2023	APBN

4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sragen

1. Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - a. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang: PAUD, TK, SD dan SMP. Sarana dan prasarana tersebut meliputi: gedung, ruang kelas, meubel, ruang serbaguna, keputakaan serta utilitas dan keamanan sekolah baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu perlu dukungan yang lebih baik bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sragen.
 - b. Derajat kesehatan masyarakat harus ditingkatkan melalui:
 - 1) Peningkatan fasilitas kesehatan serta kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sragen tanpa membedakan pasien terutama pasien BPJS.
 - 2) Upaya kesehatan masyarakat dan lingkungan perlu didukung dan ditingkatkan antara lain melalui jambanisasi untuk desa-desa yang belum tercukupi sarprasnya sehingga mengurangi sebaran penyakit baik menular maupun tidak menular melalui Pola Hidup Bersih Sehat.
 - c. Diperlukan terobosan baru dalam menangani dan mengurangi angka kemiskinan mengingat angka kemiskinan Sragen cukup tinggi. Data yang akurat menjadi dasar penanganan yang tepat. Di samping itu, bantuan sosial untuk masyarakat miskin masih perlu dilakukan, antara lain melalui bantuan pembangunan rumah layak huni serta bantuan sosial bagi keluarga rawan sosial ekonomi.
 - d. Dalam rangka mendukung peningkatan kegiatan keagamaan, perlu adanya alokasi bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.
 - e. Guna mengarahkan masyarakat khususnya pemuda pada kegiatan-kegiatan yang positif, perlu dukungan bantuan untuk pengadaan sarana dan prasarana olah raga masyarakat.
2. Bidang Perekonomian Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan
 - a. Perlunya pembinaan terhadap UMKM dalam rangka *recovery* serta memperkuat perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19 melalui pelatihan dan bantuan peralatan produksi.
 - b. Peningkatan program *life skill* berupa kursus baik jenis maupun frekuensinya sampai ke pelosok pedesaan.
 - c. Perlunya dukungan terhadap kegiatan kepariwisataan oleh masyarakat dan desa melalui pembinaan destinasi wisata dan budaya.
 - d. Penyediaan infrastruktur jalan yang berkualitas pada semua ruas baik jalan negara, provinsi, kabupaten maupun desa.
 - e. Penyediaan air bersih dari berbagai sumber dana dalam rangka peningkatan ketersediaan air bersih terutama.
 - f. Perlunya penyediaan penerangan jalan umum guna keamanan dan kenyamanan pemakai jalan.
 - g. Perlunya dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan masyarakat dan perekonomian secara umum antara lain melalui bantuan ternak untuk kelompok tani/ternak.

- h. Pembangunan fisik yang berlangsung cepat tetap harus menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perlu dukungan terhadap pelestarian lingkungan hidup antara lain pengadaan bibit pohon, pembangunan sumur resapan serta pemanfaatan limbah ternak sebagai biogas.
3. Bidang Pemerintahan dan Keuangan
- a. Pendapatan Asli daerah (PAD) dirasa masih bisa didorong lagi peningkatannya. Untuk itu diperlukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah oleh semua Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
 - b. Dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang mantab dan menjaga potensi semakin menurunnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Sragen menuju peningkatan wawasan kebangsaan dan peningkatan peran seluruh komponen masyarakat.

4.6 Inovasi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi, sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik- praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di kabupaten Sragen sendiri telah terbit Peraturan Bupati Sragen Nomor 89 tahun 2021 tentang Inovasi daerah. Serangkaian peraturan tersebut sebagai pedoman implementasi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi: inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi lainnya yang menjadi kewenangan daerah.

Inovasi daerah dapat memperkuat kemandirian daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, daerah harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang mandiri pasti akan lebih survive. Tanpa adanya inovasi, daerah akan tertinggal. Melalui inovasi daerah dapat membangun citra positif pemerintah daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat. Melalui inovasi dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Sragen melakukan sebuah inovasi berupa TUMIS (Desa Tuntas Kemiskinan). Latar belakang TUMIS ini adalah masih tingginya penduduk miskin di Kabupaten dimana Penduduk Miskin di Kabupaten Sragen menduduki peringkat terbawah se Solo Raya, sesuai dengan

data Kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen Penduduk Miskin Kabupaten Sragen sebesar 13,83 %. Sedangkan data Penduduk Miskin sesuai dengan DTKS per Maret 2022 sejumlah 390.841 Jiwa atau 144.777 Rumah Tangga/KK. Hasil Pemetaan Desa/Kelurahan berdasarkan Tingkat Kesejahteraan (DTKS - Kepmensos 146/HUK/2020) di Kabupaten Sragen terdapat 51 Desa/Kelurahan Zona Merah Kemiskinan. Dan berdasarkan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (PKE) Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sragen terdapat 25 desa PKE.

Desa Tuntas Kemiskinan (TUMIS) adalah upaya pengentasan kemiskinan terintegrasi di tingkat desa, dengan cara asesmen kebutuhan pengentasan kemiskinan tingkat desa maupun kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) supaya dapat diberikan terapi yang tepat dari OPD terkait, termasuk kebutuhan infrastruktur desa

Tahapan Desa Tuntas Kemiskinan :

1. Pemilihan Desa

- Desa PKE, Zona Merah Kemiskinan.
- Komitmen Kepala Desa dan seluruh perangkat pendukung termasuk RT
- Jumlah Rumah Tangga Miskin Versi DTKS Bulan Maret 2022.

2. Pra Asesmen

- Penentuan form assessment (dari kriteria dalam UU No 13 tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin, Form verifikasi Rumah Tangga Miskin di UPTPK (Perbup No 59 tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sragen), Form sensus BPS.
- Penentuan Assesor: TKSK, Pendamping PKH, IT Desa, Pendamping Desa
- Pelatihan assessor untuk persamaan persepsi.

3. Asesmen

- Screening Data
- Proses Asesmen : Door to door
- Entry Data di aplikasi
- Analisa Data untuk menghasilkan Informasi

4. Identifikasi Kebutuhan Desa

- 7 kriteria (RTLH, Jambanisasi, Bantuan Pendidikan, Sambungan Listrik, UEP, Jaminan Hidup (Jadup), PBI JKN APBD)
- Penentuan OPD pelaksana.

Tahun 2022 melalui Anggaran Penetapan akan melakukan upaya pengentasan kemiskinan di Desa Jabung Kecamatan Plupuh, dengan Istimasi Anggaran Tuntas Kemiskinan (TUMIS) sebagai berikut :

Tabel 4.15
Tabel Anggaran Tuntas Kemiskinan

Uraian	Jumlah	Anggaran (Rupiah)
DTKS (Maret 2022)	637 KK	
Diasessment	521 KK	
RTLH (@ Rp. 17.500.000,-)	57 rumah	997.500.000,-
Jambanisasi (@ 1.500.000,-)	48 jamban	72.000.000,-
Bantuan Pendidikan SD Rp. 225.000,-/Bl SMP Rp. 375.000,-/Bl SMA Rp. 500.000,-/Bl	6 siswa	19.500.000,-
Sambungan Listrik (900 VA @Rp. 843.000,0)	12 sambungan	10.116.000,-
UEP (minimal @Rp. 2.000.000 sesuai jenis usaha)	155 orang	310.000.000,-
Jadup (@Rp. 200.000,-/Bl selama 1 tahun)	38 keluarga	91.200.000,-
PBI JKN APBD (@Rp. 42.000,- /bl/orang selama 1 tahun)	332 orang	167.328.000,-

Sedangkan melalui anggaran Perubahan Tahun 2022 akan melakukan penganganan Tuntas kemiskinan di Desa Cemeng Kecamatan Sambungmacan dan Desa Kadipiro Kecamatan Sambirejo. Sedangkan target tahun 2022 sebanyak 17 desa akan ditangani tahun 2023. Dampak yang diharapkan dari Desa Tuntas Kemiskinan adalah :

1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat / rata-rata lama sekolah.
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

-oOo-

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2023 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2023, disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan tahun kedua RPJMD 2021-2026 dan arah kebijakan dan prioritas Provinsi Jawa tengah dan pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Kabupaten Sragen 2023 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan *good governance* dalam meningkatkan pelayanan publik yang prima”**.

Kebijakan pendanaan Kabupaten Sragen tahun 2023 diprioritaskan pada pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat, namun tidak terlepas dari upaya pemulihan untuk memperkuat perekonomian, sosial dalam program/kegiatan strategis untuk penyelesaian permasalahan pembangunan. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan, CSR, Pinjaman Daerah, serta sumber pendanaan lainnya.

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah sebagaimana uraian pada Bab III, proyeksi kerangka pendanaan daerah tahun 2023 mendatang untuk membiayai belanja daerah berasal dari pendapatan dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 367.235.308.226,00 atau 16,82% dan Dana Transfer sebesar Rp 1.816.066.823.490,00 atau 83,18%. Sedangkan dari sisi Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Sragen masih tetap mengandalkan SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) yang akan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran belanja.

Secara rinci kerangka pendanaan dan belanja daerah berdasarkan struktur APBD sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Proyeksi Kerangka Pendanaan dan Belanja Kabupaten Sragen Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD TAHUN 2022 (Rp)	RKPD TAHUN 2023 (Rp)
1	PENDAPATAN	2.169.769.096.035	2.183.302.131.716
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	352.767.656.665	367.235.308.226
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	91.000.000.000	105.000.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.634.102.060	20.746.342.060
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.500.000.000	25.270.331.999
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	228.633.554.605	216.218.634.167
1.2	DANA TRANSFER	1.812.001.439.370	1.816.066.823.490
1.2.1	DANA TRANSFER PUSAT (Dana Perimbangan)	1.645.950.439.370	1.664.988.823.490
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.325.759.000	30.325.759.000

NO	URAIAN	APBD TAHUN 2022 (Rp)	RKPD TAHUN 2023 (Rp)
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	984.484.500.000	984.484.500.000
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	434.040.812.470	453.079.196.590
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	14.427.722.900	14.427.722.900
1.2.1.5	Dana Desa	182.671.645.000	182.671.645.000
1.2.2	DANA TRANSFER ANTAR DAERAH	166.051.000.000	151.078.000.000
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	150.000.000.000	150.000.000.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.051.000.000	1.078.000.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.000.000.000	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.000.000.000	0
2	BELANJA	2.399.604.632.516	2.513.351.948.819
2.1	BELANJA OPERASI	1.738.290.201.238	1.702.228.327.397
2.1.1	Belanja Pegawai	1.137.549.785.550	1.091.865.023.777
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	527.512.442.868	529.705.012.520
2.1.3	Belanja Bunga	2.328.750.000	5.000.000.000
2.1.4	Belanja Subsidi	0	2.500.000.000
2.1.5	Belanja Hibah	60.990.422.600	56.243.291.100
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.908.800.220	16.915.000.000
2.2	BELANJA MODAL	316.136.068.278	441.002.420.558
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.497.618.000	10.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	339.680.745.000	360.121.200.864
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.890.000.000	4.890.000.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	334.790.745.000	355.231.200.864
	DEFISIT BELANJA	-229.835.536.481	-330.049.817.103
3	PEMBIAYAAN	229.860.411.681	330.049.817.103
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	279.860.411.681	405.049.817.103
3.1.1	Penggunaan SiLPA	233.610.411.681	291.299.817.103
3.1.2	Pinjaman kepada Pihak ketiga	46.250.000.000	113.750.000.000
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	75.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	25.000.000.000	0
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	25.000.000.000	75.000.000.000

Sumber Data: BPKPD dan Bappeda Litbang, diolah

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk memanfaatkan anggarannya secara efisien dan efektif dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan daerah serta dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Rencana kerja daerah Kabupaten Sragen tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 4 (empat) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawas, 1 (satu) Unsur Kewilayahan dan 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum. Beberapa program dan kegiatan yang langsung memberikan kontribusi terhadap penyelesaian 5 (lima) prioritas daerah dan

mendapatkan perhatian khusus terhadap pendanaannya karena sesuai prioritas pembangunan daerah.

5.2 Rencana Program Strategis Daerah tahun 2023

Program strategis Kabupaten Sragen tahun 2023 merupakan bagian program unggulan Bupati Sragen dalam periode lima tahun ke depan yakni tahun 2021-2026, di antaranya membangun SDN Unggul di setiap kecamatan, meningkatkan sarana prasarana pendidikan, Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dan Pembangunan Pemda Terpadu, membangun fasilitas olahraga masyarakat, pengembangan UMKM dengan anggaran mencapai 10 milyar per tahun, dan meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan industri kreatif. Dimana sesuai tema dan prioritas pembangunan tahun 2023 program strategis Kabupaten Sragen tahun 2023 difokuskan pada:

1. Pembangunan Pemda Terpadu

Keberadaan Dinas/Badan dan Kantor Pemkab Sragen saat ini lokasi masih tersebar atau belum dalam satu kawasan dengan Kantor Bupati serta sempitnya area sekarang sehingga berdampak pada kurang efektifnya sistem/mekanisme serta kinerja antar instansi pemerintahan sehingga pelayanan menjadi kurang optimal.

Dengan demikian, kebutuhan Kantor Pemerintahan terpadu untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja antar instansi, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk disediakan, untuk itulah dibangun Kantor Pemda Terpadu Pemkab Sragen.

Tahun 2023 merupakan tahap kedua pembangunan Kantor Pemda Terpadu. Tahap ini merupakan lanjutan dari tahun 2022, dimana persiapan tahun 2022 diantaranya pembebasan lahan, penyusunan dokumen Lingkungan & AMDAL Lalin, *Ground breaking* dan Pembangunan Fisik tahun 2022 dan 2023.

Kantor Pemda Terpadu berdiri di atas tanah seluas 3,7 Ha. Konsep bangunan direncanakan bangunan vertikal terdiri dari; gedung Bupati, Wakil Bupati, Setda, Bappeda Litbang, BPKPD, Kominfo, BKSDM, Inspektorat, SatpolPP, Kesbangpol, Disperkimtaru dan DPMD

2. Membangun SDN Unggul di setiap kecamatan

Sekolah Unggul pada dasarnya seperti sekolah reguler namun terdapat Pengembangan keunggulan berdasar kekhasan potensi ekonomi, sosial dan budaya daerah setempat yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang besar dalam perspektif pembangunan nasional.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga pengajar; penyusunan software kurikulum; peningkatan sarana dan prasarana; dan penyiapan dukungan anggaran. Kegiatan SD Unggul merupakan kolaborasi antara Sekolah Penggerak, Sekolah Berkarakter, Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Inklusi yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing kegiatan secara intensif

Kurikulum pembelajaran mata pelajaran sudah mengintegrasikan muatan materi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam PHBS, cinta lingkungan, pendidikan antikorupsi, olahraga, tertib berlalu-lintas, pendidikan bela negara yang mengutamakan nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas dalam pembelajaran

Rencananya sekolah unggul dipilih dari sekolah yang sudah ada yaitu 20 sekolah dasar di dua puluh kecamatan. Nantinya penetapan lokasi sekolah unggul ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen. Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, baik secara kegiatan, pendampingan maupun pendanaannya. Bahkan diharapkan SD Unggul ini dapat direplikasi di tiap kecamatan serta dapat berkelanjutan sampai Tingkat sekolah Menengah Pertama

Rencana program sekolah dasar unggul yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkannya diantaranya:

a. Program pengelolaan pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, termasuk pembangunan sekolah dasar unggul yang dikembangkan berdasarkan kekhasan potensi ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Pembangunan sekolah dasar unggul ini meliputi peningkatan kualitas tenaga pengajar; penyusunan software kurikulum; peningkatan sarana dan prasarana; dan penyiapan dukungan anggaran. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Angka Kelulusan Kesetaraan/Paket A/B/C; Angka Partisipasi Kasar SD/MI; Angka Partisipasi Murni SD/MI; Angka Putus Sekolah SD/MI; Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A; Angka Kelulusan SD/MI; Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS.

Rencananya tahun 2023 Peningkatan sarana dan prasarana diwujudkan seperti penambahan ruang kelas baru, pembangunan utilitas sekolah (pembangunan lap komputer), pengadaan mebel, pengadaan perlengkapan sekolah komputer, jasa konsultan perencanaan dan pengawas SD unggul. Sedangkan lokasi sekolah uggulnya direncanakan diantaranya SDN Jatiskarangpung1, SDN Plupuh 1, SDN Blimbing 1, SDN Karanganyar 2 dan SDN Gabus 1;

b. Program pengembangan kurikulum

Program ini diarahkan pada Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SD pada SD Unggul; Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, serta Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar.

c. Program pendidik dan tenaga kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Rasio siswa per guru jenjang SD/MI;

d. Program pengendalian perizinan pendidikan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pendidikan Dasar, yang diselenggarakan oleh Masyarakat. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Cakupan pemrosesan izin pendirian pendidikan dasar.

e. Program pengembangan bahasa dan sastra

Program ini diarahkan pada Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase sekolah SD yang menerapkan mulok bahasa Jawa.

3. Pengembangan UMKM dengan anggaran mencapai 10 Milyar per tahun

Dampak pandemi Covid-19 memukul semua sektor dan UMKM merupakan salah satu sektor yang terkena dampak yang paling besar dengan adanya kebijakan PPKM. Strategi yang diambil dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian daerah melalui penyediaan infrastuktur dasar secara merata untuk mendorong peningkatan sektor Pariwisata, UKM serta kemudahan dalam perijinan. Salah satunya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan sasaran pelaku UKM melalui antara lain fasilitasi akses modal melalui koperasi dan fasilitasi bantuan pemasaran produk UKM, serta pendampingan dan pelatihan usaha/manajemen UKM.

Rencana program pengembangan UMKM yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkannya diantaranya melalui:

a. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase usaha mikro yang ditingkatkan aset usahanya.

b. Program pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase usaha mikro yang ditingkatkan omset usahanya.

c. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peserta pelatihan yang terserap di DUDI.

d. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase laporan pelayanan perijinan dan nonperijinan yang tersusun dengan baik.

e. **Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif**

Program ini diarahkan pada Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pelaku wisata yang bersertifikat.

f. **Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan**

Program ini diarahkan pada Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil serta Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan.

Bantuan peralatan yang diutamakan kepada kelompok usaha produktif seperti pertukangan, pedagang, industri kecil dan sebagainya dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM, perdagangan dan perindustrian. Sedangkan pelatihan seperti menjahit, membatik, mengolah makanan, budidaya tanaman, budidaya perikanan dan lain sebagainya dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, pemberian sertifikat ijin usaha yang dipermudah oleh DPMPSTP, fasilitasi pengolahan dan pemasarannya hasil budidaya perikanan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, Fasilitasi bagi penjual sekitar obyek destinasi tempat wisata oleh Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata.

Pemasaran secara digital dan melalui media sosial menjadi alternatif dalam memasarkan semua produk UMKM. Tersedianya media sosial menjadi salah satu alternatif pemasaran yang handal dan diyakini lebih cepat diakses oleh konsumen. Oleh karena itu perlu adanya kemampuan setiap UMKM dalam memasarkan produknya secara digital. Pelatihan-pelatihan *marketplace* perlu dilakukan dengan difasilitasi pemerintah agar pemasaran produk UMKM lebih efektif dan efisien.

4. **Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan industri kreatif**

Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen meliputi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata proporsi sebesar 9,01 persen. Rata-rata proporsi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 77,03 persen. Lalu untuk rata-rata proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 yakni 4,42 persen. Artinya Pemerintah Kabupaten Sragen masih ketergantungan dengan dana transfer pusat.

Dengan intensifikasi pendapatan maka akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah diantaranya sektor pajak dan retribusi. Seiring dengan pemulihan dampak Covid-19 dan adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam pembangunan obyek wisata di Kabupaten Sragen seperti:

- a. Museum Sangiran
- b. Perbaikan sarana dan prasarana Gunung kemukus,
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pemandian air hangat bayanan
- d. Perbaikan fasilitas kolam renang kartika

Rencana program peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan industri kreatif yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkannya di antaranya:

a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Program ini diarahkan pada Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta optimalisasi pengelolaan destinasi wisata. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah kunjungan wisatawan.

b. Program pemasaran pariwisata

Program ini diarahkan pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Pelaksanaan Promosi Pariwisata.

c. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Program ini diarahkan pada Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pelaku wisata yang bersertifikat.

5. Membangun fasilitas olahraga masyarakat

Olahraga merupakan salah satu sarana untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, dengan kondisi fisik dan mental yang sehat, kinerja seseorang akan lebih cenderung mengalami peningkatan (lebih produktif). Kesegaran jasmani dengan berolahraga secara fisik diakui merupakan cara bergerak badan yang paling sempurna, paling mudah dan yang paling menarik dilakukan oleh semua orang.

Jika dilihat dari data statistik mengenai perkembangan jumlah atlet yang berprestasi tahun 2019 dengan perolehan medali sekitar 108 medali belum sebanding dengan jumlah pemuda usia 16-30 tahun sekitar 214 ribu jiwa sedangkan GOR untuk olahraga di Kabupaten Sragen jumlah 1 unit dan masih perlu dilakukan revitalisasi dan penambahan kelengkapan fasilitas.

Rencana program pengembangan fasilitas olahraga masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2023 dalam upaya mewujudkannya yaitu Program pengembangan daya saing keolahragaan. Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga prestasi, Olahraga rekreasi, dan organisasi olahraga, serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah Prestasi olahraga Kabupaten Sragen di tingkat provinsi dan nasional.

Selain itu Pemerintah kabupaten Sragen akan menambah fasilitas olahraga masyarakat dan olahraga prestasi dengan perbaikan GOR Diponegoro dan Stadion Taruna, serta perbaikan sarana olahraga masyarakat seperti lapangan badminton, voli, futsal, tennis meja dan lain-lain.

Berbagai kegiatan olahraga seperti turnamen/kejuaraan tingkat kecamatan, Kabupaten, Provinsi, nasional dan Internasional kita siapkan untuk menciptakan bibit unggul serta dapat menciptakan atlit yang berprestasi sampai level Nasional dan Internasional.

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 4 (empat) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawas, 1 (satu) Unsur Kewilayahan dan 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum.

Tabel 5.2
Prioritas Program RKPD Kabupaten Sragen 2023

No	Prioritas 2023	Program	OPD	Anggaran
1	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Bappeda Litbang	824.179.000
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		1.591.470.000
		Program penelitian dan pengembangan daerah		965.000.000
		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	22.783.756.000
		Program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat	1.429.938.000
		Program perumusan kebijakan pedampingan dan asistensi		1.088.267.000
		Program kepegawaian daerah	BKPSDM	3.267.417.924
		Program pengembangan sumber daya manusia		991.092.950
		Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi PP	719.286.200
		Program penguatan idelogi pancasila dan karakter kebangsaan	Bakesbangpol	538.827.500
		Program peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		2.199.991.600
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		296.999.550

No	Prioritas 2023	Program	OPD	Anggaran
		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		102.545.250
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial		1.928.519.500
		Program penanggulangan bencana		1.817.759.450
		Program penataan desa	Dinas PMD	47.250.000
		Program peningkatan kerjasama desa		1.504.721.250
		Program administrasi pemerintah desa		1.036.494.500
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat		344.718.250
		Program pengelolaan pendapatan daerah	BPKPD	5.202.544.850
		Program pengelolaan keuangan daerah		357.452.057.720
		Program pengelolaan barang milik daerah		1.736.542.000
		Program pendaftaran penduduk	Disdukcapil	1.625.332.000
		Program pencatatan sipil		343.120.000
		Program pengolahan informasi administrasi kependudukan		126.150.000
		Program pengolahan profil kependudukan		157.430.000
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah	17.111.099.110
		Program perekonomian dan pembangunan		1.261.271.550
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten		1.360.020.244.255
		Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Kecamatan	4.059.545.600
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		16.651.303.859
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		481.305.400
		Program penyelenggaraan urusan pemerintah umum		787.327.850
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		214.403.850
		Program aplikasi informatika	Dinas Kominfo	2.624.694.500
		Program informasi dan komunikasi publik		1.234.544.000

No	Prioritas 2023	Program	OPD	Anggaran
		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		460.732.000
		Program penyelenggaraan statistik sektoral		253.740.000
		Program pengelolaan arsip	Dinas Arsipus	267.000.000
		Program perlindungan dan penyelematan arsip		150.000.000
		Program perizinan dan penggunaan arsip		27.000.000
2	Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	185.784.062.540
		Program pengembangan kurikulum		14.999.800
		Program pendidik dan tenaga kependidikan		70.000.000
		Program pengendalian perizinan pendidikan		21.596.000
		Program pengembangan bahasa dan sastra		49.994.900
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Arsipus	1.937.994.000
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Dispora	454.997.500
		Program pengembangan kapasitas kepramukaan		425.000.000
		Program pengembangan daya saing keolahragaan		4.444.993.200
		Program pengembangan kebudayaan	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	751.000.000
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional		125.000.000
		Program pembinaan sejarah		95.000.000
		Program pelestariaan dan pengelolaan cagar budaya		154.999.800
		Program pengelolaan permuseuman		200.000.000
		Program pemenuhan upaya kesehatan dan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas kesehatan	132.668.765.274
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		377.103.000
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		2.921.064.500
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		49.896.750
		Program pengendalian penduduk	DPPKBP3A	150.000.000

No	Prioritas 2023	Program	OPD	Anggaran
		Program pembinaan keluarga berencana		5.779.602.000
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera		5.113.115.000
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan		190.296.000
		Program perlindungan perempuan		226.542.750
		Program pemenuhan hak anak (PHA)		100.378.000
		Program pengelolaan sumber daya air	DPU	13.171.236.000
		Program penyelenggaraan jalan		145.297.848.000
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		11.695.000.000
		Sistem pengelolaan dan pengembangan air limbah		6.360.246.000
		Program penataan bangunan gedung		119.549.638.200
		Program pengembangan permukiman	Disperkim Taru	9.579.039.662
		Program penyelenggaraan penataan ruang		1.590.000.000
		Program kawasan permukiman		3.289.122.933
		Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman		30.000.000
		Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum		412.000.000
		Program pengembangan perumahan		450.000.000
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh		2.612.000.000
		Program penyeleenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Dinas Perhubungan	1.392.398.080
		Program pengelolaan pelayaran		6.576.250
		Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Disperkim Taru	50.000.000
		Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		50.000.000
		Program penatagunaan tanah		70.000.000
		Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente		50.000.000

No	Prioritas 2023	Program	OPD	Anggaran
3	Percapatan Pertumbuhan Ekonomi	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan	1.132.895.000
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		2.036.974.000
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		470.000.000
		Program penyuluhan pertanian		509.180.000
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Peternakan dan Perikanan	249.999.800
		Program perikanan tangkap		125.000.000
		Program pengelolaan perikanan budidaya		1.848.318.000
		Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan		460.000.000
		Program perencanaan dan pembangunan industri	Diskumindag	1.064.334.250
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional		42.400.000
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi		31.000.000
		Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi		104.000.000
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian		96.000.000
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi		110.000.000
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)		269.800.000
		Program pengembangan UMKM		2.000.000.000
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan		4.041.264.000
		Program perizinan dan pendaftaran perusahaan		15.000.000
		Program standarisasi dan perlindungan konsumen		248.491.500
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		94.000.000
		Program pengembangan ekspor		32.000.000
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		346.000.000
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dispora	9.200.853.716
		Program pemasaran pariwisata		

No	Prioritas 2023	Program	OPD	Anggaran
				2.009.999.000
		Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		480.000.000
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif		566.078.550
		Program pengembangan iklim penanaman modal	DPMPTSP	225.000.000
		Program Promosi penanaman modal		252.000.000
		Program pelayanan penanaman modal		610.125.000
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal		402.873.000
		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		110.000.000
		Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.900.000.000
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		747.000.000
		Program penanganan kerawanan pangan		63.000.000
		Program pengawasan keamanan pangan		205.000.000
4	Percepatan Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran	Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial	625.000.000
		Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		250.000.000
		Program rehabilitasi sosial		2.243.500.000
		Program perlindungan dan jaminan sosial		5.705.000.000
		Program penanganan bencana		145.000.000
		Program pengelolaan taman makam pahlawan		45.000.000
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperkim Taru	2.612.000.000
		Program perencanaan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	70.000.000
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja		1.639.999.900
		Program penempatan tenaga kerja		1.474.999.804
		Program hubungan industrial		215.000.000
5	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan	Program perencanaan lingkungan hidup	DLH	579.999.700

No	Prioritas 2023	Program	OPD	Anggaran
	lingkungan hidup			
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		2.555.514.872
		Program pengelolaan keanekaagaman hayati		833.904.900
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya beracun (Limbah B3)		126.057.000
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		139.068.000
		Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat		34.968.400
		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat		99.935.000
		Program penanganan pengaduan lingkungan hidup		17.000.000
		Program pengelolaan persampahan		3.674.109.595
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		3.392.345.130

Sumber : RPJMD Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 5.2 di atas prioritas pembangunan tahun 2023 dijabarkan dalam indikator program sesuai Urusan Pemerintahan sebagaimana uraian dibawah ini.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengelolaan pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, termasuk pembangunan sekolah dasar unggul yang dikembangkan berdasarkan kekhasan potensi ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Pembangunan sekolah dasar unggul ini meliputi peningkatan kualitas tenaga pengajar; penyusunan software kurikulum; peningkatan sarana dan prasarana; dan penyiapan dukungan anggaran. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Kasar PAUD umur 4-6 tahun; Angka Kelulusan PAUD umur 4-6 tahun; Angka Kelulusan Kesetaraan/Paket A/B/C; Angka Partisipasi Kasar SD/MI; Angka Partispasi Murni SD/MI; Angka Putus Sekolah SD/MI; Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A; Angka

RKPD Kab.Sragen Tahun 2023

Kelulusan SD/MI; Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS; Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS; Angka Partisipasi Murni SMP/MTS; Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS; Angka Putus Sekolah SMP/MTS; serta Angka Kelulusan SMP/MTS. Program Pengelolaan Pendidikan ini dilaksanakan dalam upaya mengatasi permasalahan dalam kualitas pelayanan dasar yang terkait penurunan Angka Putus Sekolah, peningkatan partisipasi peserta didik jenjang usia dini, peningkatan APK SD/MI, APK SMP /MTS dan peningkatan terhadap capaian APM SMP/MTS. Program tersebut juga berkontribusi dalam penurunan stunting melalui kelas Orangtua pada satuan PAUD yang melibatkan orangtua peserta didik dalam upaya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini dan memastikan bahwa terjadi kesinambungan pembiasaan PHBS di satuan PAUD dan di rumah peserta didik.

b. Program pengembangan kurikulum

Program ini diarahkan pada Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Nonformal. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SD pada SD Unggul; Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SMP; serta Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal PAUD Negeri.

c. Program pendidik dan tenaga kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Rasio siswa per guru jenjang PAUD (TK/RA); Rasio siswa per guru jenjang SD/MI; serta Rasio siswa per guru jenjang SMP/MTS.

d. Program pengendalian perizinan pendidikan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Cakupan pemrosesan izin pendirian pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal.

e. Program pengembangan bahasa dan sastra

Program ini diarahkan pada Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase sekolah SD/SMP yang menerapkan mulok bahasa jawa Persentase sekolah SD/SMP yang menerapkan mulok bahasa jawa.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pemenuhan upaya kesehatan dan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyediaan fasilitas kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta jaminan

kesehatan masyarakat. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu capaian standar pelayanan minimal seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, anak pendidikan dasar, usia produktif, lanjut usia, penderita hipertensi, penderita DM, ODGJ, TB dan HIV. Dengan program ini diharapkan optimalisasi penanganan kesehatan lansia bisa meningkat menjadi 100% pada tahun 2023. Selain itu diharapkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin cakupannya semakin luas dan tercapai target pada tahun 2023. Sebagai sektor utama dalam intervensi spesifik, Dinas Kesehatan melalui program ini diharapkan dapat menekan prevalensi V dengan sasaran remaja, PUS, ibu hamil dan menyusui, bayi serta balita.

b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Program ini diarahkan pada Pemberiaan izin praktik tenaga kesehatan, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, serta Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peningkatan kompetensi SDM kesehatan.

c. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Program ini diarahkan pada Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat, dan pelaksanaan sehat dalam rangka promosi preventif, serta Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Program ini terutama diarahkan untuk mengoptimalkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sehingga cakupan desa kelurahan/siaga aktif bisa meningkat serta terbentuk pola hidup sehat yang pada muaranya akan berkontribusi pada menurunnya keluarga beresiko stunting.

d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman

Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pemberiaan sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1, Pemberiaan sertifikat produksi pangan untuk industri rumah tangga, Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, serta Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Cakupan pemberian jawaban terhadap permohonan sertifikat standar.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengelolaan sumber daya air

Program ini diarahkan pada Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai, serta Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Saluran irigasi dalam kondisi baik.

b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Program ini diarahkan pada pembangunan drainase dan trotoar meliputi jalan kabupaten maupun jalan lingkungan. Indikator yang digunakan adalah persentase drainase dalam kondisi baik.

c. Program penyelenggaraan jalan

Program ini diarahkan pada Peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas jalan di daerah Kabupaten/Kota. Bentuk kegiatan diantaranya rekonstruksi jalan, survey kondisi jalan/ jembatan, pemeliharaan jembatan berkala, pemeliharaan rutin jalan diharapkan mampu meningkatkan capaian Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Jalan dalam kondisi mantap.

d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Program diarahkan pada capaian pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase capaian pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

e. Sistem pengelolaan dan pengembangan air limbah

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah rumah tangga komunal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase capaian pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

f. Program pengembangan jasa konstruksi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyedia jasa konstruksi dengan indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyedia jasa konstruksi yang dibina.

g. Program penataan bangunan gedung

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase layanan perijinan PBG dan SLF, Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik.

h. Program penataan bangunan dan lingkungannya

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Kondisi Lingkungan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik.

i. Program pengembangan permukiman

Program ini diarahkan pada peningkatan infrastruktur di kawasan strategis perkotaan dengan indikator yang akan dicapai yaitu persentase infrastruktur strategis perkotaan kondisi baik.

j. Program penyelenggaraan penataan ruang

Program ini diarahkan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Indeks Perencanaan Tata Ruang; Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang didalamnya salah satunya mengatur alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan fisik perkotaan.

k. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

Program ini diarahkan pada pengelolaan persampahan baik pemerintah, swasta dan masyarakat dengan indikator yang akan dicapai adalah persentase pengelolaan persampahan yang tersedia di Kabupaten Sragen.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program kawasan permukiman

Program ini diarahkan pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Tertangani. Didalam program ini terdapat kegiatan pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh serta pembangunan rumah baru layak huni.

b. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pengembang perumahan yang tersertifikasi dan teregistrasi.

c. Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum

Program ini diarahkan pada Peningkatan perumahan yang terlayani psu. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase perumahan yang terlayani PSU.

d. Program pengembangan perumahan

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Rehabilitasi serta Pendistribusian dan sertah terima Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani.

e. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh

Program ini diarahkan pada penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh . Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) di Kawasan Pencegahan Kumuh yang Tertangani atau Terfasilitasi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai penunjang juga sudah tersedia database RTLH khususnya kawasan kumuh perkotaan yang akan mendapatkan penanganan meliputi kec Sragen dan Ngrampal. Dengan program ini pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin, pekerja/buruh dan masyarakat dengan keterbatasan akses pembiayaan dapat optimal.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelsasain gangguan keteriban umum serta penrbitan perda dan perkada. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan, Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.

b. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Program ini diarahkan pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase evakuasi terhadap bencana.

c. Program penanggulangan bencana

Program ini diarahkan pada Pelayanan Informasi, dan pencegahan daerah rawan Bencana Kabupaten/Kota, serta Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase penanggulangan bencana. Mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana dioptimalkan melalui program ini.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pemberdayaan sosial

Program ini diarahkan pada upaya penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan peningkatan potensi kesejahteraan sosial bagi kelompok-kelompok rentan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase PSKS yang aktif secara individu, keluarga dan lembaga.

b. Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan

Program ini diarahkan pada Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah

Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan.

c. Program rehabilitasi sosial

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, serta Penerima Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti panti.

d. Program perlindungan dan jaminan sosial

Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar serta Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini juga berkontribusi dalam upaya penurunan prevalensi stunting, karena apabila masyarakat miskin mendapat jaminan sosial maka kebutuhan dasar mereka yang meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi akan terpenuhi sehingga berpengaruh pada meningkatnya derajat kesehatan keluarganya.

e. Program penanganan bencana

Program ini diarahkan pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota serta Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan penanganan.

f. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase TMP yang dikelola (Dirawat).

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program perencanaan tenaga kerja

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun.

b. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peserta pelatihan yang terserap di DUDI. Program ini merupakan salah satu upaya dalam menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Sragen dan meningkatkan kepesertaan pelatihan yang terserap DUDI.

c. Program penempatan tenaga kerja

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota serta peningkatan informasi penempatan kerja. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase penempatan tenaga kerja.

d. Program hubungan industrial

Program ini diarahkan pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota serta Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi cakupan perusahaan yang membuat PP (peraturan perusahaan), cakupan perusahaan yang telah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Program ini diarahkan pada Pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan, serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase ARG pada belanja langsung APBD, Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan (angka). Salah satu yang diharapkan dari pelaksanaan program ini dapat meningkatkan partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah/eksekutif.

b. Program perlindungan perempuan

Program ini diarahkan pada Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Rasio KDRT Perempuan, Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka). Rasio KDRT Perempuan yang masih memerlukan perhatian diupayakan melalui program ini. Kegiatan yang dilakukan berupa Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan korban kekerasan dalam kewenangan kabupaten/kota, serta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten Kota.

c. Program pemenuhan hak anak (PHA)

Program ini diarahkan pada Pelembagaan program pemenuhan hak anak, serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak. Indikator kinerja yang akan

dicapai pada program ini meliputi Peningkatan kapasitas lembaga dalam partisipasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, Persentase cakupan pendampingan forum anak.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan

Program ini diarahkan pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase tingkat pemenuhan infrastruktur kemandirian pangan.

b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Penguatan Cadangan pangan masyarakat. Termasuk didalamnya Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan sebagai informasi akses pasar komoditas pertanian bagi petani dan kelompok tani.

c. Program penanganan kerawanan pangan

Program ini diarahkan pada Peningkatan penangaan kawasan rawan pangan dan pembuatan peta keretakan serta ketahanan pangan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase penurunan desa/kelurahan rawan pangan. Termasuk didalamnya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.

d. Program pengawasan keamanan pangan

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan.

4. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program penyelesaian sengketa tanah garapan

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Sengketa dan Konflik Pertanian yang Tertangani.

b. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

Program ini diarahkan pada Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.

c. Program penatagunaan tanah

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Jumlah Titik Aset Tanah yang Terdata.

d. Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente

Program ini diarahkan pada Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program perencanaan lingkungan hidup

Program ini diarahkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten serta penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase kesediaan dokumen LH.

b. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Program ini diarahkan pada Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH.

c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap kerusakan lahan kritis. Indikator kinerja yang akan dicapai Persentase kegiatan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan LH yang ditangani

d. Program pengelolaan keanekaagaman hayati

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase luasan RTH publik yang terpelihara.

e. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan.

f. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Indikator kinerja

yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan.

g. Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Desa dan kelurahan yang menyusun Peraturan Desa dan Kelurahan terkait Lingkungan Hidup.

h. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup

Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan.

i. Program pengelolaan persampahan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Swasta dan pemberdayaan masyarakat serta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Program ini diharapkan akan mengoptimalkan penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pendaftaran penduduk

Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pendaftaran penduduk. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik, Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak).

b. Program pencatatan sipil

Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan catatan sipil. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun; Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk.

c. Program pengolahan informasi administrasi kependudukan

Program ini diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Pemanfaatan data kependudukan.

d. Program pengolahan profil kependudukan

Program ini diarahkan pada Penyusunan dan peningkatan publikasi Profil Kependudukan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program penataan desa

Program ini diarahkan pada Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu tingkat fasilitasi penataan desa.

b. Program peningkatan kerjasama desa

Program ini diarahkan pada Peningkatan Fasilitasi Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu jumlah kerjasama yang disepakati.

c. Program administrasi pemerintah desa

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi salah satunya kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

d. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar termasuk diantaranya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna).

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengendalian penduduk

Program ini diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk serta Pemetaan

Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR).

b. Program pembinaan keluarga berencana

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi, serta Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Angka kesertaan KB MKJP. Program ini juga berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting. Dengan adanya pemakaian kontrasepsi, maka kehamilan akan lebih terencana dan pada akhirnya akan mengurangi resiko bayi lahir dengan kecacatan.

c. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, serta PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase UPPKS yang mendapatkan pembinaan; Penguatan Peran PIK-Remaja Proyek Nasional dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program penyeleenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Program ini diarahkan pada Penetapan rencana induk jaringan LLAJ, Penyediaan perlengkapan serta sarana dan prasarana jalan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase sarpras LLAJ dalam kondisi baik.

b. Program pengelolaan pelayaran

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana angkutan perairan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Keselamatan Kapal.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Prosentase informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat. Termasuk didalamnya Pengelolaan

Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

b. Program aplikasi informatika

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten serta pengelolaam e-government. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi.

c. Program informasi dan komunikasi publik

Program ini diarahkan pada Peningkatan publikasi Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah konten informasi yang dipublikasikan ke masyarakat.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi

Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Peningkatan Kategori Tingkat Kesehatan Koperasi yang diawasi.

b. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

Program ini diarahkan pada Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota.

c. Program pendidikan dan latihan perkoperasian

Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase SDM Koperasi Aktif yang memiliki Kompetensi. Adapun salah tujuan program ini meningkatkan jumlah koperasi sehat dan aktif di Kabupaten Sragen.

d. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina.

e. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku

Kepentingan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase usaha mikro yang ditingkatkan aset usahanya. Termasuk didalamnya Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (sudah ditahun 2022), Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro, Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan lain-lain

f. Program pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase usaha mikro yang ditingkatkan omset usahanya.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengembangan iklim penanaman modal

Program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota serta pembuatan peta potensi investasi. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun.

b. Program promosi penanaman modal

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar. Dengan promosi yang gencar diharapkan akan meningkatkan nilai investasi PMDN/PMA.

c. Program pelayanan penanaman modal

Program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM. Salah satu tujuan program ini mengoptimalkan jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM.

e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase laporan pelayanan perijinan dan nonperijinan yang tersusun dengan baik.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda, Kepemudaan, serta Organisasi Pemuda terhadap Pemuda Pelopor di tingkat Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader di Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase capaian kapasitas kepemudaan. Dengan program ini diharapkan prosentase capaian kepemudaan yang masih rendah dapat meningkat.

b. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase capaian kapasitas kepramukaan.

c. Program pengembangan daya saing keolahragaan

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga prestasi, Olahraga rekreasi, dan organisasi olahraga, serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah Prestasi olahraga Kabupaten Sragen di tingkat provinsi dan nasional tahun (n). Program ini merupakan upaya dalam mengoptimalkan pembinaan cabang olahraga.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program penyelenggaraan statistik sektoral

Program ini diarahkan pada Peningkatan ketersediaan data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu mealui penyelenggaraan statistic sectoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Cakupan data sektoral yang tersedia, terintegrasi dan terbarukan.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaran persadian dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peningkatan pemahaman PD terhadap keamanan informasi.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengembangan kebudayaan

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Kebudayaan dan pelestarian kesenian yang pelakunya adalah masyarakat daerah, serta pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah. Indikator kinerja yang

akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan/OPK yang dilindungi. Termasuk didalamnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pengenalan kesenian daerah. Indikator yang dicapai pada program ini adalah Persentase obyek kesenian yang dikembangkan. Dengan kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota mampu meningkatkan perlindungan Obyek Pemajuan Kebudayaan/OPK.

c. Program pembinaan sejarah

Program ini diarahkan pada Pembinaan, pengkajian, dan pendokumentasian sejarah lokal. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Sejarah yang diinventarisasi.

d. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Program ini diarahkan pada Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten, penerbitan izin membawah cagar budaya ke luar daerah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini Persentase obyek yang diduga cagar budaya (ODCB) yang dilindungi.

e. Program pengelolaan permuseuman

Program ini diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan koleksi, serta sarana dan prasarana permuseuman. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini Persentase masyarakat yang mengapresiasi museum.

17. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengelolaan arsip

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis daerah serta Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase terkelola arsip dinamis dan statis. Termasuk diantaranya pemeliharaan, pengawasan arsip dinamis daerah.

b. Program perlindungan dan penyelamatan arsip

Program ini diarahkan pada Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Pemerintah Daerah, serta Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase arsip yang terselamatkan.

c. Program perizinan dan penggunaan arsip

Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pengguna arsip yang terfasilitasi.

18. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai Jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah koleksi bahan pustaka dan perpustakaan yang terakreditasi.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program perikanan tangkap

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan nelayan kecil, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap.

b. Program pengolahan perikanan budidaya

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan peningkatan penggunaan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya.

c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Program ini diarahkan pada Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil serta Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Program ini diarahkan pada Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta optimalisasi pengelolaan destinasi wisata. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah kunjungan wisatawan.

b. Program pemasaran pariwisata

Program ini diarahkan pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Pelaksanaan Promosi Pariwisata.

c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

Program ini diarahkan pada Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini

yaitu Persentase Produk Ekraf yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Program ini diarahkan pada Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pelaku wisata yang bersertifikat.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Produksi Padi; Jagung; Kedelai; Bawang Merah; Cabai Besar; Tebu; Persentase peningkatan populasi sapi; Persentase peningkatan daging sapi; Persentase peningkatan populasi kambing/domba; Persentase peningkatan daging kambing/domba; Persentase peningkatan populasi unggas; Persentase peningkatan daging unggas. Kegiatan dalam program ini meliputi pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan program ini diharapkan produksi tanaman pangan utama dan hortikultura serta produksi daging kambing/domba, sapi dan unggas dapat meningkat.

b. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Program ini diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan prasarana pertanian. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi Baik (Meter), Persentase prasarana peternakan yang dalam kondisi baik. Masih rendahnya prasarana peternakan dalam kondisi baik diharapkan akan mampu diatasi dengan kegiatan pengembangan prasarana pertanian dan pembangunan prasarana pertanian.

c. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Luasan lahan pengendalian OPT. Dengan program ini diharapkan mampu meningkatkan persentase luasan lahan pengendalian OPT.

d. Program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan pada Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase Peningkatan kelas kelompok tani tahun berkenaan, Persentase kelompok ternak yang memperoleh pembinaan.

e. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Program ini diarahkan pada Penjaminan dan pengawasan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

Program ini diarahkan pada Pembangunan, Pengelolaan, serta Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase jumlah pasar dalam kondisi baik.

b. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan

Program ini diarahkan pada Peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peningkatan jumlah toko modern (pusat perbelanjaan dan *minimarket*) yang memenuhi ketentuan per tahun.

c. Program standarisasi dan perlindungan konsumen

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang.

d. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Penjaminan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

e. Program pengembangan ekspor

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah IKM/UMKM pelaku ekspor.

f. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase produk unggulan yang diterima pasar internasional.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program perencanaan dan pembangunan industri

Program ini diarahkan pada Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pertumbuhan sentra industri sesuai RPIK. Termasuk didalamnya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

b. Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase *success rate* industri yang mendapat izin setelah difasilitasi.

c. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

Program ini diarahkan pada Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase data industri yang telah terintegrasi dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pembangunan kawasan transmigrasi

Program ini diarahkan pada koordinasi penempatan transmigran ke Kawasan Transmigrasi. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase transmigran yang ditempatkan.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Program ini diarahkan pada Peningkatan Fasilitasi kerjasama hukum dan koordinasi daerah, serta Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi EKPPD; Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi; Persentase *Policy Brief* Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan keagamaan yang Dimanfaatkan.

b. Program perekonomian dan pembangunan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase *Policy Brief* Bidang Perekonomian Yang Dimanfaatkan; Indeks Tata Kelola Pengadaan; Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Belanja Daerah.

c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan menjadi bagian reformasi birokrasi dengan indikator yang akan dicapai yaitu capaian bobot komponen pengungkit dalam Reformasi Birokrasi.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada Pembuatan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, peningkatan kapasitas DPRD, serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Tingkat fasilitasi pelayanan kepada DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

Program ini diarahkan pada Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase ketercapaian mekanisme perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), serta Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase keselarasan Program Renja PD dan dengan RKPD.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengelolaan pendapatan daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase peningkatan realisasi Pajak Daerah dan Persentase peningkatan realisasi Retribusi daerah.

b. Program pengelolaan keuangan daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi pengelolaan keuangan daerah serta Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase OPD yang telah menyusun laporan Keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP).

c. Program pengelolaan barang milik daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah dengan baik.

3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program kepegawaian daerah

Program ini diarahkan pada Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN serta peningkatan kompetensi ASN. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase Jabatan Yang Terisi Sesuai Dengan Standar Kompetensi Jabatan; Persentase Kasus Indisipliner Pegawai Yang terselesaikan.

b. Program pengembangan sumber daya manusia

Program ini diarahkan pada Pengembangan Kompetensi Teknis, serta Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi.

4. Penelitian dan pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program penelitian dan pengembangan daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase riset dan pengembangan yang ditindaklanjuti; Persentase inovasi daerah yang ditindaklanjuti.

F. Unsur Pengawas Urusan Pemerintah

1. Inspektorat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program penyelenggaraan pengawasan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal.

b. Program perumusan kebijakan pedampingan dan asistensi

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta pedampingan dan asistensi. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan dan koordinasi pelayanan urusan publik. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan.

b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan kegiatan pemberdayaan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase sarpras kelurahan kondisi baik dan persentase lembaga desa yang aktif.

c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan pencegahan tindak kriminalitas. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu persentase penanganan laporan kejadian.

d. Program penyelenggaraan urusan pemerintah umum

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik.

e. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

Program ini diarahkan peningkatan pada pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu.

H. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Kesatuan bangsa dan politik

a. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang. Diharapkan persentase

masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat lebih optimal dengan adanya program ini.

b. Program peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik.

c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase ormas yang paham terhadap UU Ormas dan diharapkan akan meningkat capaiannya dari tahun sebelumnya.

d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan penghayat kepercayaan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Bangsa.

e. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah laporan konflik sosial yang terjadi. Potensi konflik sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban diatasi dengan program ini.

Rencana alokasi anggaran 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran daerah diuraikan pada **Lampiran II**.

-oOo-

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tujuan memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja diartikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan maupun program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja tersebut menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pemangku kepentingan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi, serta untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja juga menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi melalui indikator kerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023

Menurut Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sragen periode 2021-2026. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sragen. IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 6.1
Indikasi Kinerja Utama Kabupaten Sragen tahun 2023

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan/Sasaran Daerah)	Satuan	Target 2023
1	Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan keluarga	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,72
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,15
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan keluarga	Angka Harapan Hidup	Tahun	76,02
	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,92
		Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	KLA Predikat Madya
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/	B
			Indeks	(60,79)
	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP)	Predikat/nilai	BB (70,30)
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Indeks	83
		Tingkat kemandirian keuangan daerah	%	16,67
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi	Indeks SPBE	Indeks	3,45
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3
	Meningkatnya Pendapatan Per kapita	Pendapatan perkapita	Rp.juta/tahun	30,07
	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	Trilyun Rp	1,55
	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,4
4	Menurunkan angka kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja	Angka kemiskinan	%	11,73
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,07
	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	%	0,55
	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,24
5	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Indeks	74,29

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan/Sasaran Daerah)	Satuan	Target 2023
	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah	Indeks Infrastruktur	Indeks	76,81
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,4

Sumber : RPJMD Kab. Sragen Tahun 2021-2026

6.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023

No	OPD Pengampu	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,15
		Capaian SPM Bidang Pendidikan :		
		Capaian SPM Bidang Pendidikan PAUD	Persen	66
		Capaian SPM Bidang Pendidikan SD	Persen	84
		Capaian SPM Bidang Pendidikan SMP	Persen	76
		Capaian SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Non Formal	Persen	21
		Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang PAUD	Persen	9,16
		Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang SD	Persen	35
		Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang SMP	Persen	70
		Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang Pendidikan Non Formal	Persen	9,52
		Cakupan pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan, Sejarah dan Cagar Budaya	Persen	78,26
		Persentase obyek yang diduga cagar budaya yang dilestarikan	Persen	99,24
		Persentase kebudayaan yang dilestarikan	Persen	53,49

No	OPD Pengampu	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	Satuan	Target 2023
		Persentase sejarah yang dilestarikan	Persen	68,75
2	Dinas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,02
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	80
3	Dinas Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persen	78,2
		Indeks Infrastruktur Bina Marga dan SDA	Persen	80,3
		Indeks Keciptakarya	Indeks	74
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	58,82
		Persentase rumah layak huni	Persen	87,64
		Persentase luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani	Persen	30
		Indeks Kepatuhan Terhadap RTRW	Indeks	87
		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	0,96
		Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks	23
		Persentase Capaian Pelayanan Bidang Pertanahan Kewenangan Kabupaten	Persen	100
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Persen	5
		Tingkat Pelayanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persen	65
		Persentase penurunan pelanggaran Perda/ Perkada	Persen	5
		Tingkat Layanan Penanganan Kebakaran	Persen	100
		Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit penanggulangan kebakaran	Persen	45
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,5
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi, edukasi, pencegahan dan penanganan bencana	Persen	66
7	Dinas Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) miskin yang ditangani	Persen	90
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Persen	76
8	Dinas Tenaga Kerja	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	Persen	70,24
		Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Rp/Perkapita)	Milyar	8,251

No	OPD Pengampu	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	Satuan	Target 2023
9	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	91,92
		Angka Harapan Hidup Perempuan	Tahun	78,14
		Rata-rata lama sekolah perempuan	Tahun	7,53
		Pengeluaran perkapita perempuan	Rupiah/tahun	11.807.801
		Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	KLA Predikat Madya
		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,11
		Total Fertility Rate	Anak	2,1
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian	Persen	0,96
		Rata rata peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	0,51
		Rata rata peningkatan produksi tanaman hortikultura	Persen	1,35
		Rata rata peningkatan produksi tanaman perkebunan	Persen	1
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,4
		Angka Kecukupan Protein (AKP)	Angka	57,3
		Angka Kecukupan Energi (AKE)	Angka	2.090,50
11	Dinas Lingkungan Hidup	IKLH	Indeks	68,4
		Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	55
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	98,25
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	indeks	56
		Pengelolaan Sampah	Nilai	70,5
12	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Persen	83,75
		Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	74,45
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	8
		Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Jumlah	8
		Hasil Penilaian penyelenggaraan pemerintahan desa tahun (n)	Nilai	15
14	Dinas Perhubungan	Indeks Pelayanan Trasportasi	Satuan	0,468
		Persentase sarpras perhubungan dalam kondisi baik	Persen	61,33
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Indeks	3,4
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	65

No	OPD Pengampu	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	Satuan	Target 2023
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	3
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Indeks	3,4
		Persentase Jumlah Badan Publik yang informatif	Persen	45
		Persentase penyediaan data pada aplikasi sragen satu data (Urusan Statistik)	Persen	100
		Indeks Keamanan Informasi (Urusan Persandian)	Indeks	II+
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase koperasi sehat	Persen	26,8
		Persentase peningkatan aset dan omset usaha mikro	Persen	1,2
		Persentase Koperasi Aktif	Persen	18,4
		Persentase Usaha Mikro yang meningkat aset dan omsetnya	Persen	1,2
		Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	Persen	0,66
		Persentase Sarpras perdagangan dalam kondisi baik	Persen	45,51
		Tingkat Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Angka	77,77
		Persentase IKM/UKM Pelaku Ekspor	Persen	1,33
		Persentase pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	Persen	0,37
		Persentase pertumbuhan industri	Persen	0,36
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai realisasi penanaman modal	Rp trilyun	1,55
		Jumlah PMA PMDN	investor	1.313
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	Persen	0,56
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	100
		Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persen	5
		Peningkatan prestasi olahraga	Medali	105
		Persentase capaian kapasitas kepemudaan	Persen	25
		% atlet berprestasi	Persen	55
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Persen	32,82
		persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	7,14
		Jumlah koleksi pustaka	buku	68.033
		Indeks Kearsipan	Indeks	70
		% perangkat daerah yang telah menerapkan arsip baku	Persen	50

No	OPD Pengampu	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	Satuan	Target 2023
20	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase peningkatan nilai sektor perikanan dan peternakan	Persen	1,49
		Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	1,18
		Persentase peningkatan produksi daging	Persen	1,8
21	Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	80
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dievaluasi	Persen	80
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi	Persen	80
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang dievaluasi	Persen	90
22	Sekretariat DPRD	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Persen	90
		Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Nilai	75
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Nilai perencanaan kinerja daerah	Nilai	22,51
		% kualitas perencanaan strategis	%	100
		% kualitas perencanaan kinerja tahunan	%	100
		Indeks inovasi daerah	indeks	62
		Persentase riset dan inovasi yang diimplementasikan	Persen	62,5
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	16,67
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	2,69
		Tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yg baik	Persen	100
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Indeks	265
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71,5
26	Inspektorat	Maturitas SPIP	Angka	2,5
		Kapabilitas APIP	Angka	3,1
		Manajemen Resiko (MRI)	Angka	2,5
		Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Angka	2,5
27	Kecamatan	IKM Kecamatan	Angka	83,4

No	OPD Pengampu	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	Satuan	Target 2023
		Nilai LKJiP Kecamatan	Angka	62
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase penurunan konflik Ipoleksosbud	Persen	24,1
		Persentase konflik Ipoleksosbud yang tertangani	Persen	100

Sumber : RPJMD Kab. Sragen Tahun 2021-2026

6.3 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021-2026, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta IKU OPD. Indikator kinerja daerah Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2023
1	2	3	4
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3
2	Pendapatan perkapita	Rp.juta/tahun	30,07
3	Nilai realisasi penanaman modal	Trilyun Rp	1,55
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,4
5	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,724
6	Angka kemiskinan	%	11,73
7	Persentase penurunan angka kemiskinan	%	0,55
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,07
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,24
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,72
11	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,02
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89
13	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,15
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,92
15	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	KLA Predikat Madya
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83
B	Aspek Pelayanan Umum		
	Pendidikan		
1	Capaian SPM Bidang Pendidikan PAUD	Persen	66
2	Capaian SPM Bidang Pendidikan SD	Persen	84
3	Capaian SPM Bidang Pendidikan SMP	Persen	76
4	Capaian SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Non Formal	Persen	21
5	Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang PAUD	Persen	9,16

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2023
6	Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang SD	Persen	35
7	Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang SMP	Persen	70
8	Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang Pendidikan Non Formal	Persen	9,52
	Kesehatan		
9	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	80
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
10	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persen	78,2
11	Indeks Infrastruktur Bina Marga dan SDA	Persen	80,3
12	Indeks Kepatuhan Terhadap RTRW	Indeks	87
13	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	0,96
14	Indeks Keciptakarya	Indeks	74
	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
15	Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	58,82
16	Persentase rumah layak huni	Persen	87,64
17	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan sesuai kewenangan kabupaten yang ditangani	Persen	30
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
18	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum (Satpol PP)	Persen	5
19	Tingkat Layanan Penanganan Kebakaran (Satpol PP)	Persen	100
20	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (BPBD)	Satuan	0,5
21	Tingkat Pelayanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persen	65
22	Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perkada	Persen	5
23	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit penanggulangan kebakaran	Persen	45
24	Tingkat layanan relawan kebakaran dalam penanggulangan kebakaran	Persen	10
25	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi , edukasi, pencegahan dan penanganan bencana	Persen	66
	Sosial		
26	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) miskin yang ditangani	Persen	90
27	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Persen	76
	Tenaga Kerja		
28	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Rp/Perkapita)	Persen	8,251
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
29	Angka Harapan Hidup Perempuan	Tahun	78,14
30	Rata-rata lama sekolah perempuan	Tahun	7,53
31	Pengeluaran perkapita perempuan	Rupiah/tahun	11.807.801
32	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	KLA Predikat Madya

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2023
	Pangan		
33	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Angka	57,3
34	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Angka	2.090,50
	Pertanahan		
35	Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks	23
36	Persentaase Capaian Pelayanan Bidang Pertanahan Kewenangan Kabupaten	Persen	100
	Lingkungan Hidup		
37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,4
38	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	55
39	Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	98,25
40	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	indeks	56
41	Pengelolaan Sampah	indeks	70,5
	Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil		
42	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Persen	83,75
43	Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	74,45
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
44	Indeks Desa Membangun	Indeks	8
45	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Jumlah	8
46	Hasil Penilaian penyelenggaraan pemerintahan desa tahun (n)	Nilai	15
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
47	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,11
48	Total Fertility Rate	Anak	2,1
	Perhubungan		
49	Indeks Pelayanan Transportasi	Satuan	0,468
50	Persentase sarpras perhubungan dalam kondisi baik	Persen	61,33
	Komunikasi dan Informatika		
51	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	65
52	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	3
53	Indeks Domain Manajemen SPBE	Indeks	3,4
54	Persentase Jumlah Badan Publik yang informatif	Persen	45
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
55	Persentase koperasi sehat	Persen	26,8
56	Persentase peningkatan aset dan omset usaha mikro	Persen	1,2
57	Persentase Koperasi Aktif	Persen	18,4
58	Persentase Usaha Mikro yang meningkat aset dan omsetnya	Persen	1,2
	Penanaman Modal		
59	Jumlah PMA PMDN (investor)	Jumlah	1.313
60	Nilai realisasi penanaman modal (Rp trilyun)	Nilai	1,55
	Kepemudaan dan Olahraga		
61	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah	105
62	persentase capaian kapasitas kepemudaan	Persen	25

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2023
63	Persentase atlet berprestasi	Jumlah	55
	Statistik		
64	Persentase penyediaan data pada aplikasi sragen satu data	Persen	100
	Persandian		
65	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	II+
	Kebudayaan		
66	Cakupan pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan, Sejarah dan Cagar Budaya	Persen	78,26
67	Persentase obyek yang diduga cagar budaya yang dilestarikan	Persen	99,24
68	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	Persen	53,49
69	Persentase sejarah yang dilestarikan	Persen	68,75
	Perpustakaan		
70	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Persen	32,82
71	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	7,14
72	Jumlah koleksi pustaka	Jumlah	68.033
	Kearsipan		
73	Indeks Kearsipan	Indeks	70
74	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan arsip baku	Persen	50
	Kelautan dan Perikanan		
75	Persentase peningkatan nilai sektor perikanan dan peternakan	Persen	1,49
76	Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	1,18
	Pariwisata		
77	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	Persen	0,56
78	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	100
79	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persen	5
	Pertanian		
80	Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian	Persen	0,96
81	Rata rata peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	0,51
82	Rata rata peningkatan produksi tanaman hortikultura	Persen	1,35
83	Rata rata peningkatan produksi tanaman perkebunan	Persen	1
84	Persentase peningkatan produksi daging	Persen	1,8
	Perdagangan		
85	Persentase Sarpras perdagangan dalam kondisi baik	Persen	45,51%
86	Tingkat Stabiliitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Angka	77,77
87	Persentase IKM Pelaku Ekspor	Persen	1,33
	Perindustrian		
88	Persentase pertumbuhan industri	Persen	0,36
	Sekretariat Daerah		
89	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	80

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2023
90	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dievaluasi	Persen	80
100	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi	Persen	80
101	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang dievaluasi	Persen	90
	Sekretariat DPRD		
102	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Persen	90
103	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Nilai	75
	Perencanaan		
104	Nilai perencanaan kinerja daerah	Nilai	22,51
105	% kualitas perencanaan strategis	%	100
106	% kualitas perencanaan kinerja tahunan	%	100
	Keuangan		
107	Tingkat kemandirian keuangan daerah	%	16,67
108	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
109	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	2,69
110	Tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yg baik	Persen	100
	Kepegawaian		
111	Indeks Sistem Merit	Indeks	265
112	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	72
	Pengawasan		
113	Maturitas SPIP	Angka	2,5
114	Kapabilitas APIP	Angka	3,1
115	Manajemen Resiko (MRI)	Angka	2,5
116	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Angka	2,5
	Penelitian dan Pengembangan		
117	Persentase riset dan inovasi yang diimplementasikan	Persen	71,5
	Keuangan		
118	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	2,69
119	Tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yg baik	Persen	100
	Kecamatan		
120	IKM Kecamatan	Angka	83,4
121	Nilai LKJiP Kecamatan	Angka	62
	Kesatuan Bangsa dan Politik		
122	Persentase penurunan konflik Ipoleksosbud	Persen	24,1
123	Persentase konflik Ipoleksosbud yang tertangani	Persen	100
C	Aspek Daya Saing		
1	Indeks Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Indeks	74,29
2	Indeks Infrastruktur	Indeks	66,36

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2023
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/	B
		Indeks	(60,79)
4	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP)	Predikat/Nilai	BB (70,30)
5	Indeks SPBE	Indeks	3
6	Indeks inovasi daerah	indeks	62

Sumber : RPJMD Kab. Sragen Tahun 2021-2026

6.4 Indikator Kinerja Program Daerah

Indikator Kinerja Program merupakan indikator yang ditetapkan Kepala Daerah yang menjadi penentu keberhasilan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sekaligus keberhasilan Indikator Kinerja Utama Daerah tahun 2023. Indikator kinerja program daerah Kabupaten Sragen tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.4
Penetapan Indikator Program Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan (AL) PAUD 4-6 Tahun	87 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	99,8 %	
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,7 %	
				Angka Kelulusan Kesetaraan/Paket A/B/C	99 %	
				Angka Melanjutkan (AM) SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	99,8 %	
				Angka Partisipasi Kasar PAUD umur 4 - 6 Tahun	60 %	
				Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	100 %	
				Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	100 %	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99,83 %	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	87,41 %	
				Angka Partispasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	84 %	
				Angka Partispasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	76 %	
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0,25 %	
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,09 %	
				Persentase SMP/MTs yang memiliki Ruang UKS sesuai Standar	93,8 %	
				Persentase Guru PAUD yang bersertifikasi Pendidik	65 %	
				Persentase Guru Yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Pendidikan PAUD Formal	65 %	
				Persentase Kepala Sekolah PAUD yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan	97 %	

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				pelatihan calon kepala sekolah		
				Persentase Pengawas PAUD yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100 %	
				Persentase Ruang Kelas PAUD kondisi baik	36 %	
				Persentase PKBM sesuai standar	84 %	
				Persentase Ruang Kelas PAUD kondisi baik	36 36	
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal PAUD Negeri	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SD pada SD Unggul	100 %	
				Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SMP	53 %	
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio siswa per guru jenjang PAUD (TK/RA)	15 siswa/guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rasio siswa per guru jenjang SD/MI	15 siswa/guru	
				Rasio siswa per guru jenjang SMP/MTs	13 siswa/guru	
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan pemrosesan izin pendirian pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	bahasa dan sastra lokal yang terlindungi	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	% OPK yang dilindungi	46.59 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	% obyek kesenian yang dikembangkan	23.01 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	% Sejarah yang diinventarisasi	68.75 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	% obyek yang diduga cagar budaya (ODCB) yang dilestarikan	99.23 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	% Masyarakat yang mengapresiasi Museum	40 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	Dinas Kesehatan
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase saran kefarmasian yang memenuhi standart	75%	Dinas Kesehatan

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	Dinas Kesehatan
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran irigasi dalam kondisi baik	79,71 %	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan an Sistem Penyediaan Air Minum	72,61	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan an Sistem Air Limbah	84,77	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase layanan perijinan PBG dan SLF	100	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Penyelenggaraan Jalan	80,89 %	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Strategis Perkotaan Kondisi Baik	71,44%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Index Perencanaan Tata Ruang	85,71	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Tertangani	30%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) di Kawasan Pencegahan Kumuh yang Tertangani atau Terasilitasi	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase perumahan yang terlayani PSU	78%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan yang tersertifikasi dan teregistrasi	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa dan Konflik Pertanahan yang Tertangani	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
2	10	6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penyelenggara-raan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Jumlah Titik Aset Tanah yang Terdata	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan keyertiban umum di wilayah Kabupaten Sragen	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terselenggaranya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	SEMUA OPD
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase (%) PSKS yang Aktif secara Individu, Keluarga dan Lembaga	100 %	Dinas Sosial

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase (%) KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan	100 %	Dinas Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase (%) PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100 %	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase (%) PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	Dinas Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase (%) Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan	100 %	Dinas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentasi (%) TMP yang dikelola (Dirawat)	100 %	Dinas Sosial
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	100 %	Dinas Tenaga Kerja
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Peserta Pelatihan yang terserap di DUDI	50 %	Dinas Tenaga Kerja
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Penempatan Tenaga Kerja	64,81 %	Dinas Tenaga Kerja
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase perusahaan yang membuat PP (peraturan perusahaan)	75 %	Dinas Tenaga Kerja
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang ditempatkan	100 %	Dinas Tenaga Kerja
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang tersedia di Kabupaten Sragen	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen LH	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	95 %	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan kelurahan yang menyusun Peraturan Desa dan Kelurahan terkait Lingkungan Hidup	20 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi)	68 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan	90 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (aset pemerintah)	48,5 %	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (pemberdayaan masyarakat)	22 %	
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	70%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik	98,95 %	
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun	95 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk	54,55 %	
				Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 %	
				Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100 %	
				Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 %	
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan data kependudukan	61,22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	96 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat Fasilitasi Penataan Desa	5 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama yang disepakati	4 Kerjasama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	20 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% ARG pada belanja langsung APBD	29 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	70 %	
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	70 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Rasio KDRT Perempuan	0,30 %	
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan kapasitas lembaga dalam partisipasi pemenuhan hak dan perlindungan anak	60 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase cakupan pendampingan forum anak	40 %	
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio KDRT Anak	0,009 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	65,17 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kesertaan KB MKJP	26,80 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Anak
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Penguatan Peran PIKRemaja Proyek Nasional dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase UPPKS yang mendapatkan pembinaan	100 %	
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarpras LLAJ dalam kondisi baik	71,55 %	Dinas Perhubungan
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase kapal yang memenuhi standar keselamatan	25 %	Dinas Perhubungan
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data sektoral yang tersedia, terintegrasi dan terbaru	65 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase peningkatan pemahaman PD terhadap keamanan informasi	30 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kategori Tingkat Kesehatan Koperasi yang diawasi	2,3%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	27%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi Aktif yang memiliki Kompetensi	39%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina	1,5%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan asset usahanya	1,2%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Perdagangan
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan omset usahanya	20,43%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase peningkatan jumlah toko modern (pusat perbelanjaan dan minimarket) yang memenuhi ketentuan per tahun	44,09%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar dalam kondisi baik	54,35%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	87,93	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase IKM/UMKM pelaku ekspor	1,33%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	80,86%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase produk unggulan yang diterima pasar internasional	60%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase pertumbuhan sentra industri sesuai RPIK	3,23%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase success rate industri yang mendapat izin setelah difasilitasi	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri yang telah terintegrasi dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	37,23%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	40 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pintu
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	20 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	83 poin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	10 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	30 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase capaian kapasitas kepemudaan	25%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang olah raga	40%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase capaian kapasitas kepramukaan	25%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	200.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pelaksanaan Promosi Pariwisata	45%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekraf yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	9%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku wisata yang bersertifikat	15%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	60.000 Orang	Dinas Arsip dan Perpustakaan
				Penambahan Koleksi Bahan Pustaka	3000 eksemplar	
				Penambahan perpustakaan yang terakreditasi	3 unit	

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase terkelola arsip dinamis dan statis	9 persen	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terselamatkan	50 %	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pengguna arsip yang terfasilitasi	100 %	Dinas Arsip dan Perpustakaan
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,25%	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	0,75%	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan populasi sapi	1,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Persentase peningkatan daging sapi	0,43%	
				Persentase peningkatan populasi kambing/domba	1,2%	
				Persentase peningkatan daging kambing/domba	1,13%	
				Persentase peningkatan populasi unggas	3,2%	
				Persentase peningkatan daging unggas	3,83%	
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi Baik (Meter)	53,3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	5%	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan kelas kelompok tani tahun berkenaan	20%	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase tingkat pemenuhan infrastruktur kemandirian pangan	7 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penguatan Cadangan pangan masyarakat	6.8 Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Persentase Kenaikan Angka Kecukupan Protein	0.53 %	
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan desa/kel rawan pangan	1.44 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan	13.30 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi	659.865 Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Produksi Jagung	132.000 Ton	
				Produksi Kedelai	705 Ton	
				Produksi Bawang merah	1681 Ton	
				Produksi Cabe Besar	3034 Ton	
				Produksi Tebu	31882 Ton	
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi Baik	53.3 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Luasan lahan pengendalian OPT	13 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas kelompok tani tahun berkenaan	20 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	EKPPD	33.367	Sekretariat Daerah
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Policy Brief Bidang Perekonomian Yang Dimanfaatkan	100%	Sekretariat Daerah
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat fasilitasi pelayanan kepada DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	90%	Sekretariat DPRD
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketercapaian mekanisme perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dan APBD	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Persentase keselarasan program RKPD dan RPJMD	100 %	
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang ditindaklanjuti	62 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Persentase riset dan pengembangan yang ditindaklanjuti	82 %	
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase OPD yang telah menyusun laporan Keuangan sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)	85 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah yang dengan baik	85 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	3,29 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				Persentase Kenaikan Pendapatan Retribusi Daerah	9,69 %	
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Jabatan Yang Terisi Sesuai Dengan Standar Kompetensi Jabatan	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase Kasus Indisipliner Pegawai Yang terselesaikan	100 %	
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi	58 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	82	Inspektorat Daerah
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	100	Inspektorat Daerah
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100	Kecamatan
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif	100 %	Kecamatan
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	100 %	Kecamatan
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasikan Dengan Baik	100 %	Kecamatan
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa Tepat Waktu	100 %	Kecamatan
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	65 %	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Pendidikan Politik	75 %	Badan Kesatuan Bangsa Politik

Kode			Program	Indikator Program	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Paham Terhadap UU Ormas	17.6 %	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Bangsa	73 %	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah laporan konflik sosial yang terjadi	7 Kejadian	Badan Kesatuan Bangsa Politik

-oOo-

BAB VII

PENUTUP

Lampiran I Peraturan Bupati Sragen tentang RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023 ini mengikat secara normatif dan operasional bagi semua Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Untuk selanjutnya, dokumen RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023 ini merupakan dokumen tolok ukur bagi semua Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dalam penilaian kinerja masing-masing pada tahun 2023.

RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023 juga merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sragen Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sragen Tahun 2023. Dalam mekanisme penganggaran selanjutnya, KUA dan PPAS Kabupaten Sragen Tahun 2023 merupakan dasar bagi penyusunan RAPBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023.

Demikian, Lampiran I Peraturan Bupati Sragen tentang RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023 ini disusun dan ditetapkan, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya bagi semua Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen.

Sragen, 14 Juni 2022


BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sragen
Tahun 2023

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								757,306,744,763					0	
1	01	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	567,757,875,690						100 %	0	
1	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	%		100 %	260,514,050						100 %	0	
1	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	36,036,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	11,883,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	21,329,350	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	15,941,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah	1 dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Dokumen	111,654,200	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah	6 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	48,670,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	%	%	100 %	560,875,750,194						100 %	0	
1	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4582 Orang/bulan	560,844,750,194		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	4582 Orang/bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		300 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	300 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	12 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		5 Dokumen	3,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling		Administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	5 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		19 Laporan	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	19 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		12 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	12 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	%	100 %	110,000,000						100 %	0	
1	01	001	2.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	110,000,000					Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sesuai aturan	12 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sesuai aturan	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
1	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	%		100 %	150,000,000						100 %	0		
1	01	001	2.05	002	Pengadaan Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	150,000,000					Administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai aturan	1 Paket		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			120 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai aturan	120 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai aturan	100 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			200 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai aturan	200 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	%		100 %	2,122,224,000						100 %	0		
1	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	50,000,000					Administrasi umum pada perangkat daerah	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	1,050,297,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi umum pada perangkat daerah	2 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	25,181,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi umum pada perangkat daerah	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	199,993,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi umum pada perangkat daerah	2 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi umum pada perangkat daerah	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			25 Dokumen	5,000,000				Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi umum pada perangkat daerah	25 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			66 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi umum pada perangkat daerah	66 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			5 Dokumen	501,753,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Administrasi umum pada perangkat daerah	5 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100 %	609,420,446						100 %	0		
1	01	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	310,732,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	298,688,446		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	%		100 %	2,115,757,000						100 %	0		
1	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			23 Laporan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	23 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			72 Laporan	1,200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Laporan	89,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	0 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	810,758,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100 %	1,514,210,000						100 %	0		
1	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7 Unit	234,210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	7 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			130 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	130 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	1,250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan (AL) PAUD 4-6 Tahun	%		%	87 %	189,392,278,373						87 %	0	
					Angka Kelulusan (AL) SD/Mi/Paket A	%		%	99.8 %							99.8 %		
					Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%		%	99.7 %							99.7 %		
					Angka Kelulusan Kesetaraan/Paket A/B/C	%		%	99 %							99 %		
					Angka Melanjutkan (AM) SD/Mi/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	%		%	99.8 %							99.8 %		
					Angka Partisipasi Kasar PAUD umur 4 - 6 Tahun	%		%	60 %							60 %		
					Angka Partisipasi Kasar SD/Mi/Paket A	%		%	100 %							100 %		
					Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%		%	100 %							100 %		
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/Mi/Paket A	%		%	99,83 %							99,83 %		
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%		%	87,41 %							87,41 %		
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi/Paket A	%		%	84 %							84 %		
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%		%	76 %							76 %		
					Angka Putus Sekolah (APS) SD/Mi/Paket A	%		%	0,25 %							0,25 %		
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%		%	0,09 %							0,09 %		
1	01	002	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD/Mi yang memiliki Ruang UKS sesuai Standar	%		%	72 %	107,905,108,943					72 %	0		
1	01	002	2.01	002	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			5 Ruang	1,035,824,350	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	5 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			6 Ruang	1,174,943,190	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	6 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			10 Unit	1,853,049,273	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	10 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat			20 Ruang	4,870,895,140		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	20 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			5 Ruang	424,148,400	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	5 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			6 Ruang	509,147,780	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	6 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi			10 Unit	239,873,760	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	10 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			5 Paket	306,199,900	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	5 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			5 Paket	1,199,729,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	5 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	002	2.01	017	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				300 Unit	59,999,950	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	300 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				15500 Peserta Didik	19,999,950	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	15500 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				519 Satuan Pendidikan	24,999,900	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	519 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	024	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				50 Satuan Pendidikan	155,796,950	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	50 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				240 Peserta Didik	350,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	240 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1410 Orang	17,469,708,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	1410 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3862 Orang	1,571,724,750	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	3862 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				50 Satuan Pendidikan	89,853,200	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	50 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				580 Satuan Pendidikan	76,309,215,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	580 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.01	030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				25 Orang	239,999,950	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar (SD)	25 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP/MTs yang memiliki Ruang UKS sesuai Standar	%		%	82 %	56,464,435,740							82 %	0	
					Persentase SMP/MTs yang memiliki Ruang UKS sesuai Standar	%		%	93.8 %							93.8 %			
1	01	002	2.02	003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	199,996,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				4 Ruang	199,996,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	4 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
1	01	002	2.02	012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	109,977,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	2 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				92 Ruang	5,212,432,652		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	92 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	015	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	119,976,948		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	6 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	684,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	0 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	768,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	0 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	2,125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	028	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				10 Paket	1,400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	10 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				11000 Peserta Didik	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	11000 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				11000 Peserta Didik	308,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	11000 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	037	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				11112 Satuan Pendidikan	166,437,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	11112 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2436 Peserta Didik	438,635,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	2436 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				392 Orang	3,826,934,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	392 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1916 Orang	1,369,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	1916 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				20 Satuan Pendidikan	604,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	20 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				92 Satuan Pendidikan	38,708,368,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	92 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.02	043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				50 Orang	191,802,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	50 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Guru PAUD yang bersertifikasi Pendidik	%		%	36 %	22,336,020,440							36 %	0	
					Persentase Guru PAUD yang bersertifikasi Pendidik	%		%	65 %										
					Persentase Guru Yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Pendidikan PAUD Formal	%		%	65 %										
					Persentase Kepala Sekolah PAUD yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	%		%	97 %										
					Persentase Pengawas PAUD yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	%		%	100 %										
					Persentase Ruang Kelas PAUD kondisi baik	%		%	36 %										
1	01	002	2.03	001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				5 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	5 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.03	002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	124,597,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.03	003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 unit	509,841,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	3 unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.03	004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	3 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.03	007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				11 Paket	352,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	11 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.03	008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				7 Paket	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	7 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.03	009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				6 Paket	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	6 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.03	010	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				23 Paket	1,180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	23 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
1	01	002	2.03	015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			10 Orang	98,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	10 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.03	016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			722 Orang	215,230,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	722 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.03	017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			915 Satuan Pendidikan	134,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	915 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.03	018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			865 Satuan Pendidikan	19,390,670,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	865 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C	%		%	13 %	2,686,713,250						13 %	0	
					Persentase PKBM sesuai standar	%		%	84 %						84 %			
					Persentase Ruang Kelas PAUD kondisi baik	36		36	36 36						36 36			
1	01	002	2.04	001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun			2 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal (PNF) / kesetaraan	2 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.04	009	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia			2 Paket	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal (PNF) / kesetaraan	2 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.04	010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			900 Peserta Didik	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal (PNF) / kesetaraan	900 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.04	011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia			2 Paket	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal (PNF) / kesetaraan	2 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.04	012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			650 Peserta Didik	20,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal (PNF) / kesetaraan	650 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.04	015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			250 Orang	24,983,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal (PNF) / kesetaraan	250 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.04	016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			21 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal (PNF) / kesetaraan	21 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	2.04	017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			21 Satuan Pendidikan	2,441,500,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal (PNF) / kesetaraan	21 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
1	01	002	2.04	018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sarana prasarana kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal (PNF) / kesetaraan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	003		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal PAUD Negeri	%		%	100 %	14,999,800						100 %	0	
					Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SD pada SD Unggul	%		%	100 %					100 %				
					Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SMP	%		%	53 %					53 %				
1	01	003	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan SD, SMP dan PAUD Negeri yang tersedia	dokumen		dokumen	98 dokumen	0					98 dokumen	0	
1	01	003	2.01	001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	003	2.01	002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	003	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal PAUD Negeri	dokumen		dokumen	8 dokumen	14,999,800					8 dokumen	0	
1	01	003	2.02	001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	14,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	003	2.02	002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	004		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio siswa per guru jenjang PAUD (TK/RA)	siswa/guru		siswa/guru	15 siswa/guru	70,000,000					15 siswa/guru	0		
					Rasio siswa per guru jenjang SD/MI	siswa/guru		siswa/guru	15 siswa/guru					15 siswa/guru				
					Rasio siswa per guru jenjang SMP/MTs	siswa/guru		siswa/guru	13 siswa/guru					13 siswa/guru				
1	01	004	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	% tercukupinya kebutuhan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	%		%	100 %	70,000,000					100 %	0	
1	01	004	2.01	001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	005			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan pemrosesan izin pendirian pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat	%		%	100 %	21,596,000					100 %	0	
1	01	005	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Cakupan pemrosesan izin pendirian SD dan SMP yang diselenggarakan masyarakat	%		%	100 %	16,601,000					100 %	0	
1	01	005	2.01	001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				4 Dokumen	6,606,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	005	2.01	002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10 Dokumen	9,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	005	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Cakupan pemrosesan izin pendirian SD dan SMP yang diselenggarakan masyarakat	%		%	100 %	4,995,000					100 %	0	
1	01	005	2.02	001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				3 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	005	2.02	002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				3 Dokumen	4,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
1	01	005	2.02	003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				3 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1	01	006			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	bahasa dan sastra lokal yang terlindungi	%		%	100 %	49,994,900							100 %	0				
1	01	006	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra lokal kabupaten	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	49,994,900							3 kegiatan	0				
1	01	006	2.01	005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terdistribusi				200 Buku	19,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200 Buku	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1	01	006	2.01	006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota				100 Peserta Didik	29,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	0	
2	22	002			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	% OPK yang dilindungi	%		%	46.59 %	2,471,000,000							46.59 %	0				
2	22	002	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPK yang dilestarikan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan)	buah		buah	12 buah	305,000,000							12 buah	0				
2	22	002	2.01	001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				10 Objek	130,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Masyarakat pelaku kebudayaan dalam daerah kabupaten	10 Objek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2	22	002	2.01	002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				80 Orang	175,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Masyarakat pelaku kebudayaan dalam daerah kabupaten	80 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2	22	002	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian yang dilestarikan	buah		buah	8 buah	2,166,000,000							8 buah	0				
2	22	002	2.02	001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				8 Objek	1,736,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Masyarakat pelaku kesenian tradisional dalam daerah kabupaten	8 Objek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2	22	002	2.02	002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	430,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Masyarakat pelaku kesenian tradisional dalam daerah kabupaten	2 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2	22	003			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	% obyek kesenian yang dikembangkan	%		%	23.01 %	125,000,000							23.01 %	0				
2	22	003	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku kesenian dan kelompok seni yang dibina	orang/kelompok		orang/kelompok	55 orang/kelompok	125,000,000							55 orang/kelompok	0				
2	22	003	2.01	001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				40 Orang	50,000,000					Masyarakat pelaku kesenian dalam daerah kabupaten	40 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2	22	003	2.01	002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				300 Sertifikat	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Masyarakat pelaku kesenian dalam daerah kabupaten	300 Sertifikat	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2	22	003	2.01	003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Lembaga	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Masyarakat pelaku kesenian dalam daerah kabupaten	15 Lembaga	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2	22	004			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	% Sejarah yang diinventarisasi	%		%	68.75 %	95,000,000							68.75 %	0				
2	22	004	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah yang dilestarikan	buah		buah	2 buah	95,000,000							2 buah	0				
2	22	004	2.01	001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				20 Orang	55,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten sragen	20 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2	22	004	2.01	002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten sragen	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2	22	004	2.01	003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten sragen	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2	22	005			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	% obyek yang diduga cagar budaya (ODCB) yang dilestarikan	%		%	99.23 %	154,999,800							99.23 %	0				
2	22	005	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang terdaftar dan Registrasi tingkat kabupaten	buah		buah	41 buah	80,000,000							41 buah	0				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	005	2.01	001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				20 Obyek	45,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Benda cagar budaya	20 Obyek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	005	2.01	002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Pengkajian dan Penetapan Obyek Cagar Budaya yang disusun				1 dokumen	35,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Benda cagar budaya	1 dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	005	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	benda		benda	4 benda	74,999,800						4 benda	0	
2	22	005	2.02	001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				2 Objek	15,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Benda Cagar Budaya	2 Objek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	005	2.02	003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				2 Objek	59,999,800	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Benda Cagar Budaya	2 Objek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	006			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	% Masyarakat yang mengapresiasi Museum	%		%	40 %	200,000,000						40 %	0	
2	22	006	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mengapresiasi museum	orang		orang	50 orang	200,000,000						50 orang	0	
2	22	006	2.01	003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				2 Unit	180,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Museum Kabupaten	2 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	006	2.01	004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	20,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Museum Kabupaten	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													310,256,324,704	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						185,946,784,587							206,616,324,704	
1	02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						110,000,000							120,000,000	
1	02	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Laporan	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						182,981,516,991							191,650,925,275	
1	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1405 Orang/ Bulan	182,981,516,991		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1405 Orang/ Bulan	191,650,925,275	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						845,498,696							7,133,756,182	
1	02	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36,694,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Paket	37,694,240	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	376,624,456		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Paket	4,734,061,942	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	71,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Paket	1,980,807,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	105,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Paket	117,193,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	251,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Laporan	260,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						310,732,000							1,200,000,000	
1	02	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	310,732,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Unit	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Paket	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						954,076,000							5,617,167,481	
1	02	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	381,436,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Laporan	1,573,559,481	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	146,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	426,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Laporan	3,893,608,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						744,960,900							894,475,766	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	409,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Unit	250,021,966	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	82,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Unit	83,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	103,311,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		5 Unit	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	149,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Unit	440,953,800	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						96,146,110,172							100,675,000,000	
1	02	002	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						60,570,249,750							59,400,000,000	
1	02	002	2.01	001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	6,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Unit	15,700,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.01	002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	25,999,938,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Unit	27,000,000,000	Dinas Kesehatan
												DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar							
1	02	002	2.01	013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	14,427,595,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Unit	7,500,000,000	Dinas Kesehatan
													Dana Insentif Daerah						
1	02	002	2.01	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 unit	2,800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 unit	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.01	016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	10,592,716,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Paket	6,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.01	020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Unit	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						35,520,860,422							41,215,000,000	
1	02	002	2.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13382 Orang	223,340,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		13382 Orang	1,100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12300 Orang	30,659,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12300 Orang	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12302 Orang	41,263,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12302 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50699 Orang	31,775,672		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		50699 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				118251 Orang	89,051,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		118251 Orang	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				551285 Orang	245,736,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		551285 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				129008 Orang	64,383,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		129008 Orang	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250035 Orang	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		250035 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21921 Orang	1,149,531,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		21921 Orang	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2232 Orang	22,589,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		2232 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				9537 Orang	68,014,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		9537 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				16175 Orang	22,247,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		16175 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	16,946,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	1,550,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	2,770,443,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	2,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	47,251,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	259,240,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	205,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	19,999,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	158,314,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	87,857,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Orang	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	775,057,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	230,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	26,204,489,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	30,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				0 Orang	9,289,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	90,493,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	105,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	161,444,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				25 Unit	1,424,261,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		25 Unit	1,150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedian, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1,267,179,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Unit	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						55,000,000							60,000,000	
1	02	002	2.03	001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						377,103,000							380,000,000	
1	02	003	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						377,103,000							380,000,000	
1	02	003	2.03	001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				0 Orang	377,103,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Orang	380,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	004			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						49,896,750							60,000,000	
1	02	004	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						24,949,500							30,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	02	004	2.01	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	24,949,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	004	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						24,947,250							30,000,000		
1	02	004	2.03	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	24,947,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	005			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2,921,064,500							2,525,000,000		
1	02	005	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						76,943,650							25,000,000		
1	02	005	2.01	001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	76,943,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	005	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,844,120,850							2,500,000,000		
1	02	005	2.02	001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	2,844,120,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	2,500,000,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														201,000,000,000	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						129,000,000,000							201,000,000,000		
1	02	001	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						129,000,000,000							201,000,000,000		
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						129,000,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			201,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														32,500,000,000	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						29,937,000,000							32,500,000,000		
1	02	001	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						29,937,000,000							32,500,000,000		
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	29,937,000,000	Kab. Sragen, Gemolong, Gemolong	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Unit Kerja	32,500,000,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														4,804,400,000	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,700,000,000							3,704,400,000		
1	02	001	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						2,700,000,000							3,704,400,000		
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2,700,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			3,704,400,000	Dinas Kesehatan	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,036,450,850							1,100,000,000		
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,036,450,850							1,100,000,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	1,036,450,850		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															3,041,606,250	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,400,000,000							2,141,606,250	
1	02	001	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					1,400,000,000							2,141,606,250	
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1,400,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			2,141,606,250	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					872,901,200							900,000,000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					872,901,200							900,000,000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	872,901,200		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	900,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															1,852,200,000	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,200,000,000							1,852,200,000	
1	02	001	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					1,200,000,000							1,852,200,000	
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1,200,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			1,852,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					872,314,900							0	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					872,314,900							0	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	872,314,900		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															4,109,825,000	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,200,000,000							3,009,825,000	
1	02	001	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					2,200,000,000							3,009,825,000	
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2,200,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			3,009,825,000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,025,296,600							1,100,000,000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,025,296,600							1,100,000,000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	1,025,296,600		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															2,520,675,000	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,500,000,000							1,620,675,000	
1	02	001	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					1,500,000,000							1,620,675,000	
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1,500,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			1,620,675,000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					857,520,620							900,000,000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					857,520,620							900,000,000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	857,520,620		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	900,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															2,462,793,750	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,600,000,000						1,562,793,750			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1,600,000,000						1,562,793,750			
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,600,000,000		Pendapatan dari BLUD	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			1,562,793,750	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					892,337,620						900,000,000			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					892,337,620						900,000,000			
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	892,337,620		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	900,000,000	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3,318,682,990					3,994,062,500		
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,300,000,000						2,894,062,500			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2,300,000,000						2,894,062,500			
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,300,000,000		Pendapatan dari BLUD	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			2,894,062,500	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,018,682,990						1,100,000,000			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,018,682,990						1,100,000,000			
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	1,018,682,990		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3,209,242,800					3,895,664,375		
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,200,000,000						2,795,664,375			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2,200,000,000						2,795,664,375			
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,200,000,000		Pendapatan dari BLUD	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			2,795,664,375	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,009,242,800						1,100,000,000			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,009,242,800						1,100,000,000			
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	1,009,242,800		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3,100,026,000					3,415,250,000		
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,100,000,000						2,315,250,000			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2,100,000,000						2,315,250,000			
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,100,000,000		Pendapatan dari BLUD	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			2,315,250,000	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,000,026,000						1,100,000,000			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,000,026,000						1,100,000,000			
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	1,000,026,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,520,051,050					2,736,437,500		
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,600,000,000						1,736,437,500			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1,600,000,000						1,736,437,500			
1	02	001	2.10	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1,600,000,000		Pendapatan dari BLUD	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			1,736,437,500	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					920,051,050						1,000,000,000			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					920,051,050						1,000,000,000			
1	02	002	2.02	033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	920,051,050		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	12 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Kesehatan		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													2,225,837,300	
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,200,000,000						1,389,150,000			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1,200,000,000						1,389,150,000			
1	02	001	2.10	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1,200,000,000		Pendapatan dari BLUD	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			1,389,150,000	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					835,687,300						836,687,300			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					835,687,300						836,687,300			
1	02	002	2.02	033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	835,687,300		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	12 Dokumen	836,687,300	Dinas Kesehatan		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													3,117,915,600	
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,800,000,000						2,102,247,000			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1,800,000,000						2,102,247,000			
1	02	001	2.10	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1,800,000,000		Pendapatan dari BLUD	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			2,102,247,000	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,012,668,600						1,015,668,600			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,012,668,600						1,015,668,600			
1	02	002	2.02	033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1,012,668,600		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	12 Dokumen	1,015,668,600	Dinas Kesehatan		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													4,023,291,605	
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,250,000,000						2,998,248,750			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2,250,000,000						2,998,248,750			
1	02	001	2.10	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2,250,000,000		Pendapatan dari BLUD	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			2,998,248,750	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,024,042,855						1,025,042,855			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,024,042,855						1,025,042,855			
1	02	002	2.02	033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1,024,042,855		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	12 Dokumen	1,025,042,855	Dinas Kesehatan		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													3,015,962,500	
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,550,000,000						1,967,962,500			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1,550,000,000							1,967,962,500			
1	02	001	2.10	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1,550,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			1,967,962,500	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,038,000,000							1,048,000,000			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,038,000,000							1,048,000,000			
1	02	002	2.02	033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1,038,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	1,048,000,000	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														3,403,668,275	
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,750,000,000							2,360,397,375			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1,750,000,000							2,360,397,375			
1	02	001	2.10	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1,750,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			2,360,397,375	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,041,270,900							1,043,270,900			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,041,270,900							1,043,270,900			
1	02	002	2.02	033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1,041,270,900		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	1,043,270,900	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														2,711,227,520	
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,500,000,000							1,852,200,000			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1,500,000,000							1,852,200,000			
1	02	001	2.10	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1,500,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			1,852,200,000	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					858,027,520							859,027,520			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					858,027,520							859,027,520			
1	02	002	2.02	033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	858,027,520		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	859,027,520	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														2,692,537,332	
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,575,000,000							1,805,895,000			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1,575,000,000							1,805,895,000			
1	02	001	2.10	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1,575,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Unit Kerja	1,805,895,000	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					885,642,332							886,642,332			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					885,642,332							886,642,332			
1	02	002	2.02	033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	885,642,332		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	886,642,332	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														3,547,781,035	
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,200,000,000							2,546,775,000			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2,200,000,000							2,546,775,000			
1	02	001	2.10	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2,200,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			2,546,775,000	Dinas Kesehatan		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,000,006,035						1,001,006,035				
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,000,006,035							1,001,006,035			
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	1,000,006,035		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	1,001,006,035	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														3,225,242,600	
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,800,000,000							2,199,487,500			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1,800,000,000							2,199,487,500			
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0 Unit Kerja	1,800,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Unit Kerja	2,199,487,500	Dinas Kesehatan	
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,024,755,100							1,025,755,100			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,024,755,100							1,025,755,100			
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	1,024,755,100		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	1,025,755,100	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														4,280,558,200	
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,900,000,000							3,241,350,000			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2,900,000,000							3,241,350,000			
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0 Unit Kerja	2,900,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Unit Kerja	3,241,350,000	Dinas Kesehatan	
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,029,208,200							1,039,208,200			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,029,208,200							1,039,208,200			
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	1,029,208,200		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	1,039,208,200	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														2,712,088,100	
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,700,000,000							1,852,200,000			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1,700,000,000							1,852,200,000			
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,700,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			1,852,200,000	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					849,888,100							859,888,100			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					849,888,100							859,888,100			
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	849,888,100		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	859,888,100	Dinas Kesehatan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														3,042,833,530	
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,857,000,000							2,087,197,875			
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1,857,000,000							2,087,197,875			
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,857,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			2,087,197,875	Dinas Kesehatan		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					954,635,655							955,635,655			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
														Nasional	Daerah			
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					954,635,655						955,635,655			
1	02	002	2.02	033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	954,635,655		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	955,635,655	Dinas Kesehatan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,335,856,675						2,440,869,175		
1	02	001		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,400,000,000						1,504,912,500		
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1,400,000,000						1,504,912,500		
1	02	001	2.10	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1,400,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1,504,912,500	Dinas Kesehatan	
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						935,856,675						935,956,675		
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						935,856,675						935,956,675		
1	02	002	2.02	033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	935,856,675		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	935,956,675	Dinas Kesehatan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,616,311,600						3,603,001,600		
1	02	001		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,700,000,000						2,685,690,000		
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1,700,000,000						2,685,690,000		
1	02	001	2.10	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1,700,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		2,685,690,000	Dinas Kesehatan	
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						916,311,600						917,311,600		
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						916,311,600						917,311,600		
1	02	002	2.02	033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	916,311,600		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	917,311,600	Dinas Kesehatan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,596,310,200						3,163,226,575		
1	02	001		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,600,000,000						2,165,916,375		
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1,600,000,000						2,165,916,375		
1	02	001	2.10	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1,600,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		2,165,916,375	Dinas Kesehatan	
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						996,310,200						997,310,200		
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						996,310,200						997,310,200		
1	02	002	2.02	033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	996,310,200		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen	997,310,200	Dinas Kesehatan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						368,472,748						504,118,775		
1	02	001		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						350,000,000						484,118,775		
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						350,000,000						484,118,775		
1	02	001	2.10	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						350,000,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		484,118,775	Dinas Kesehatan	
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						18,472,748						20,000,000		
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						18,472,748						20,000,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
1	02	002	2.02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	18,472,748		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																3,500,000,000	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,300,000,000							3,500,000,000		
1	02	001	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					3,300,000,000							3,500,000,000		
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	3,300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Unit Kerja	3,500,000,000	Dinas Kesehatan		
					Jumlah bulan tersedianya pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	12 Bulan			12 Bulan										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																42,000,000	
1	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	22,322,252,118					100 %	42,000,000		
1	03	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.	Dok		Dok	4 Dok	101,328,000					4 Dok	42,000,000		
1	03	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dok	101,328,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	4 Dok	42,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan	laporan		laporan	12 laporan	18,535,629,518					12 laporan	0		
1	03	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 Orang/bulan	18,535,629,518		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	0 Orang/bulan		0	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	597,098,600					100 %	0		
1	03	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	358,298,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 paket	52,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 paket	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	63,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				250 Dokumen	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	250 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	15 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	unit		unit	48 unit	1,577,940,000					48 unit	0		
1	03	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	2 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	960,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	3 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.07	003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				2 Unit	550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	2 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	49,676,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	4 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	18,264,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	3 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	435,964,000					12 Laporan	0		
1	03	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 bulan	185,964,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	1,074,292,000					12 Laporan	0		
1	03	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	151,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	18 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
1	03	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			14 Unit	522,972,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	14 Unit		0 Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.09	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara			5 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	5 Unit		0 Dinas Pekerjaan Umum
1	03	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	3 Unit		0 Dinas Pekerjaan Umum
1	03	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran irigasi dalam kondisi baik	%	%	79.71 %	3,551,410,000						79.71 %		0
1	03	002	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	1,010,410,000						5 Dokumen	0	
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	Unit	1 Unit						1 Unit			
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	120 Orang						120 Orang			
						Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen			
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM	KM	0.1 KM						0.1 KM			
						Persentase embung yang direhabilitasi	%	%	2.04 %						2.04 %			
1	03	002	2.01	021	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi			1 Unit	200,000,000	Kab. Sragen, Karangmalang, Guworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Unit		0 Dinas Pekerjaan Umum
1	03	002	2.01	049	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara			1 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Unit		0 Dinas Pekerjaan Umum
1	03	002	2.01	053	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara			0.325 KM	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	0.325 KM		0 Dinas Pekerjaan Umum
1	03	002	2.01	061	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			120 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	120 Orang		0 Dinas Pekerjaan Umum
1	03	002	2.01	062	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun			5 Dokumen	210,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	5 Dokumen		0 Dinas Pekerjaan Umum
1	03	002	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	Bendung	2 Bendung	2,541,000,000						2 Bendung	0	
						Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	Titik	Titik	1 Titik						1 Titik			
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	KM	0.6 KM						0.6 KM			
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	KM	1.5 KM						1.5 KM			
						Persentase Saluran Irigasi yang direhabilitasi	%	%	0.58 %						0.58 %			
1	03	002	2.02	006	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun			1 Titik	206,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Titik		0 Dinas Pekerjaan Umum
1	03	002	2.02		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kegiatan Penunjang			0 KM	830,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 KM	0 Dinas Pekerjaan Umum	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			0.6 KM		Kab. Sragen, Masaran, Jirapan	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pemugaan			0.6 KM			
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kedung Gatot (Bangunan 3 Buah dan Saluran)			400 m		Kab. Sragen, Kedawung, Celep			400 m				
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Nusupan (Saluran)			200 m					200 m				
1	03	002	2.02	021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			0.6 KM	1,405,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0.6 KM		0 Dinas Pekerjaan Umum
1	03	002	2.02	022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara			3 Bendung	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	3 Bendung		0 Dinas Pekerjaan Umum
1	03	003			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					10,695,000,000							0	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	03	003	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					10,695,000,000							0		
1	03	003	2.01	004	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat			750 SR	6,670,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		750 SR	0	Dinas Pekerjaan Umum
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat				
1	03	003	2.01	006	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			0	3,625,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0	0	Dinas Pekerjaan Umum
					Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan			1715 SR								1715 SR		
1	03	003	2.01	012	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama			5 unit	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		5 unit	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	005			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					6,360,246,000							0	
1	03	005	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					6,360,246,000							0	
1	03	005	2.01	012	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			500 Rumah Tangga	6,360,246,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		500 Rumah Tangga	0	Dinas Pekerjaan Umum
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	03	006			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	65,20 %	50,55 %	57,50 %	1,200,000,000						57,50 %	0	
1	03	006	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					1,200,000,000							0	
1	03	006	2.01	014	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi			659 M	1,200,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Infrastruktur	659 M	0	Dinas Pekerjaan Umum
											Kab. Sragen, Sragen, Karang Tengah							
1	03	008			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					118,295,956,800							0	
1	03	008	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					118,295,956,800							0	
1	03	008	2.01	001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			2 Dokumen	420,492,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	008	2.01	002	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			3 Dokumen	117,875,464,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		3 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	010			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Penyelenggaraan Jalan	%	%	80.89 %	132,402,245,365						80.89 %	0	
1	03	010	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	%	80.89 %	132,402,245,365						80.89 %	0	
1	03	010	2.01	001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advdis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			5 Dokumen	631,148,000	Kab. Sragen, Plupuh, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Infrastruktur	5 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum
											Kab. Sragen, Masaran, Pilang							
											Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon							
											Kab. Sragen, Miri, Gilirejo							
											Kab. Sragen, Miri, Gilirejo Baru							
1	03	010	2.01	002	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan			5277 MÂ²	4,092,245,000	Kab. Sragen, Plupuh, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Infrastruktur	5277 MÂ²	0	Dinas Pekerjaan Umum
											Kab. Sragen, Masaran, Pilang							
											Kab. Sragen, Miri, Gilirejo							
											Kab. Sragen, Miri, Gilirejo Baru							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
												Nasional	Daerah							
1	03	010	2.01	003	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				1 Dokumen	105,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Infrastruktur	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	010	2.01	004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	510,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Infrastruktur	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum	
1					Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				39.62 KM	108,736,289,000	Kab. Sragen, Kalijambe, Trobayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Infrastruktur	39.62 KM		0	Dinas Pekerjaan Umum
										Kab. Sragen, Kalijambe, Krikilan		DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan								
										Kab. Sragen, Kalijambe, Bukuran										
										Kab. Sragen, Kalijambe, Ngebung										
										Kab. Sragen, Kalijambe, Saren										
										Kab. Sragen, Plupuh, Karangwaru										
										Kab. Sragen, Plupuh, Manyarejo										
										Kab. Sragen, Plupuh, Gedongan										
										Kab. Sragen, Plupuh, Dari										
										Kab. Sragen, Masaran, Karangmalang										
										Kab. Sragen, Kedawung, Bendungan										
										Kab. Sragen, Sambirejo, Jambeyan										
										Kab. Sragen, Sambirejo, Sambi										
										Kab. Sragen, Sambungmacan, Sambungmacan										
										Kab. Sragen, Karangmalang, Puro										
										Kab. Sragen, Sragen, Sine										
										Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon										
										Kab. Sragen, Sidoharjo, Tenggak										
										Kab. Sragen, Sidoharjo, Sribit										
										Kab. Sragen, Tanon, Gabugan										
										Kab. Sragen, Tanon, Gading										
										Kab. Sragen, Gemolong, Gemolong										
										Kab. Sragen, Miri, Girmargo										
										Kab. Sragen, Miri, Brojol										
										Kab. Sragen, Miri, Bagor										
										Kab. Sragen, Miri, Gilirejo										
										Kab. Sragen, Sumberlawang, Kacangan										
										Kab. Sragen, Sumberlawang, Tilogotirto										
										Kab. Sragen, Sumberlawang, Ngargotirto										
										Kab. Sragen, Sukodono, Jatitengah										
										Kab. Sragen, Gesi, Tanggan										
										Kab. Sragen, Gesi, Gesi										
										Kab. Sragen, Tangen, Katelan										
										Kab. Sragen, Jenar, Jenar										
1	03	010	2.01	009	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0.55 KM	200,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Nglorog	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Infrastruktur	0.55 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	010	2.01	010	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				28.34 km	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Infrastruktur	28.34 km	0	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	010	2.01	011	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				4.59 KM	6,968,863,365	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Infrastruktur	4.59 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	010	2.01	012	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				48 M	10,163,860,000	Kab. Sragen, Kalijambe, Trobayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Infrastruktur	48 M		0	Dinas Pekerjaan Umum
										Kab. Sragen, Kedawung, Pengkok										
										Kab. Sragen, Karangmalang, Kedungwaduk										
1	03	010	2.01	018	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				19.5 M	754,840,000	Kab. Sragen, Plupuh, Karangwaru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Infrastruktur	19.5 M		0	Dinas Pekerjaan Umum
										Kab. Sragen, Plupuh, Dari										
										Kab. Sragen, Kedawung, Wonorejo										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
										Kab. Sragen, Gemolong, Gemolong			Dan Pelayanan Dasar							
1	03	010	2.01	023	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				3 Dokumen		Kab. Sragen, Kalijambe, Bukuran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Infrastruktur	3 Dokumen	0 Dinas Pekerjaan Umum		
									240,000,000	Kab. Sragen, Kedawung, Pengkok										
										Kab. Sragen, Karangmalang, Kedungwaduk										
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						6,299,041,765						0			
1	03	007			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					4,979,041,765							0			
1	03	007	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					4,979,041,765							0			
1	03	007	2.01	001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				8.6 sistem jaringan	4,979,041,765	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		8.6 sistem jaringan	0 Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang				
						Luasan ruang terbuka hijau (taman dan makam) yang dipelihara			0.1 ha			0.1 ha								
1	03	012			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1,320,000,000							0			
1	03	012	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					415,000,000							0			
1	03	012	2.01	002	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR Kab/Kota Kabupaten/Kota				2 Dokumen	215,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		2 Dokumen		0 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang			
1	03	012	2.01	004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang				450 dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		450 dokumen		0 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang			
1	03	012	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						350,000,000						0			
1	03	012	2.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 dokumen	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 dokumen		0 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang			
1	03	012	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						315,000,000						0			
1	03	012	2.03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	315,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen		0 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang			
1	03	012	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						240,000,000						0			
1	03	012	2.04	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	240,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen		0 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang			
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						16,013,309,826					1,780,000,000				
1	04	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9,888,738,092						0			
1	04	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,025,620,092						0			
1	04	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	7,025,620,092	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		12 Bulan		0 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang			
1	04	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						477,049,000						0			
1	04	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor				12 Bulan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		12 Bulan		0 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang			
1	04	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	206,658,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		0 Paket	0 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang				
						Jumlah penyediaan peralatan / perlengkapan kantor		22 unit	22 unit											
1	04	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan yang tersedia				10 unit	1,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		10 unit		0 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
1	04	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor			12 Bulan	89,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		12 Bulan		0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	04	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 Bulan	34,971,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		12 Bulan		0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	04	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah			12 Bulan	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		12 Bulan		0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	04	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					990,718,000								0	
1	04	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					204,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran				0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	04	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor			12 Bulan	54,752,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		12 Bulan		0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	04	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan	731,966,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		12 bulan		0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	04	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,395,351,000								0	
1	04	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			45 Unit	748,934,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		45 Unit		0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	04	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					646,417,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran				0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					450,448,773								400,000,000	
1	04	002	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					46,750,000								50,000,000	
1	04	002	2.01	005	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			1 Dokumen	46,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		1 Dokumen	50,000,000	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	04	002	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					403,698,773								350,000,000	
1	04	002	2.03	001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			22 Unit Rumah	403,698,773		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		22 Unit Rumah	350,000,000	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	04	003			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					3,089,122,961								0	
1	04	003	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					3,089,122,961								0	
1	04	003	2.03	002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Backlog Perumahan / RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani			0 Unit	0		DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		0 Unit		0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			0 Unit Rumah			0 Unit Rumah								
1	04	003	2.03	006	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar			0.8 Ha	199,999,961	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan			Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		0.8 Ha		0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	04	003	2.03	008	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun			79 Unit	2,889,123,000		DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		79 Unit		0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1	04	004			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					2,415,000,000								1,000,000,000	
1	04	004	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					2,415,000,000								1,000,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	04	004	2.01	001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			150 Unit Rumah	2,415,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	150 Unit Rumah	1,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang	
1	04	005			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					140,000,000						350,000,000		
1	04	005	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					140,000,000						350,000,000		
1	04	005	2.01	001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			20 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Dokumen	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang	
1	04	005	2.01	002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			3 Lokasi	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Lokasi	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang	
1	04	005	2.01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			1 Laporan	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang	
1	04	006			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					30,000,000						30,000,000		
1	04	006	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil					30,000,000						30,000,000		
1	04	006	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			1 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	30,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
2	10	004			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					50,000,000						0		
2	10	004			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					50,000,000						0		
2	10	004	2.01		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			10 Berita Acara	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	10 Berita Acara		Dinas Perumahan Rakyat, 0 Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang	
2	10	005			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					50,000,000						0		
2	10	005	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					50,000,000						0		
2	10	005	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	1 dokumen		Dinas Perumahan Rakyat, 0 Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang	
2	10	006			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					50,000,000						0		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
2	10	006	2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					50,000,000						0			
2	10	006	2.01	003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah			1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
2	10	010			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					70,000,000						0		
2	10	010	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					70,000,000						0		
2	10	010	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 Laporan	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Laporan	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						9,125,717,634								
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	predikat		predikat	BB (70,30) predikat	7,485,694,084					BB (70,30) predikat	8,244,000,000	
1	05	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun	dokumen		dokumen	4 dokumen	11,600,000					4 dokumen	17,000,000	
1	05	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	5,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	2 Dokumen	8,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 dokumen	5,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	2 dokumen	8,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	6,560,728,787					12 Laporan	7,000,000,000	
1	05	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			61 Orang/bulan	6,560,728,787		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	61 Orang/bulan	7,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	84,810,000					12 Laporan	215,000,000	
1	05	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			110 Paket	84,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	110 Paket	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	248,486,297					12 Laporan	331,500,000	
1	05	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4,908,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Paket	7,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	28,732,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	2 Paket	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	0 Paket	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			65 Paket	162,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	65 Paket	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	6,593,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Paket	8,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60 Laporan	46,163,297		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	60 Laporan	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		6,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	05	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	28,589,000					1 dokumen	47,000,000		
1	05	001	2.07	005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	24,349,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 paket	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	001	2.07	011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	4 Unit	12,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan		laporan	12 laporan	177,111,000					12 laporan	203,500,000		
1	05	001	2.08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	96,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	001	2.08	003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan	8,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	001	2.08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	75,711,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan		laporan	12 laporan	374,369,000					12 laporan	430,000,000		
1	05	001	2.09	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	352,744,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	26 Unit	400,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	001	2.09	009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya				1 Unit	21,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Unit	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	002		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketenteraman dan keyertiban umum di wilayah Kabupaten Sragen	%		%	100 %	626,845,600					100 %	1,050,185,850		
1	05	002	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pelanggaran dan pengaduan tramtibus dalam Kabupaten yang ditangani dan diselesaikan	Kasus		Kasus	3519 Kasus	405,832,600					3519 Kasus	731,000,000		
1	05	002	2.01	001 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				535 kali	146,748,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	535 kali	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	002	2.01	002 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				23 Kasus	153,233,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	23 Kasus	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	002	2.01	004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	43,484,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Dokumen	6,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	002	2.01	005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Orang	56,419,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	50 Orang	110,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	002	2.01	008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	2,947,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Dokumen	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	002	2.01	009 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				5 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	5 Laporan	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	002	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran atas pelaksanaan perda/perkada yang ditegakkan	Kasus		Kasus	1772 Kasus	221,013,000					1772 Kasus	319,185,850		
1	05	002	2.02	001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				2 Laporan	9,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	2 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	002	2.02	002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	002	2.02	003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			72 laporan	211,283,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	72 laporan	249,185,850	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	004			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terselenggaranya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	%		%	100 %	1,013,177,950					100 %	1,245,000,000		
1	05	004	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	Jenis		Jenis	5 Jenis	977,697,950					5 Jenis	1,180,000,000		
1	05	004	2.01	001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	0 Dokumen	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	004	2.01	002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				90 Laporan	935,322,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	90 Laporan	1,100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	004	2.01	003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				92 Dokumen	27,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	92 Dokumen	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	004	2.01	006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				18 Unit	14,775,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	18 Unit	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	004	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah kantor/ perusahaan yang diinspeksi	Kantor		Kantor	4 Kantor	5,168,000					4 Kantor	20,000,000		
1	05	004	2.02	001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	5,168,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Dokumen	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	004	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Satpol PP				0	30,312,000					0	45,000,000		
1	05	004	2.04	001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				168 Orang	30,312,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	168 Orang	45,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,089,528,693						3,552,057,435		
1	05	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,480,000						2,625,000		
1	05	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 dokumen	2,480,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		5 dokumen	2,625,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,175,784,727						1,099,811,435		
1	05	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1,175,784,727		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		10 Orang/bulan	1,099,811,435	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20,000,000						6,000,000		
1	05	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						20,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			6,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						289,316,950						263,340,000		
1	05	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	4,890,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 paket	5,382,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	05	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	62,542,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Paket	43,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
														Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi				
1	05	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10,133,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi				
1	05	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	132,962,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Paket	135,624,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	8,030,950	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Paket	8,834,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50 Laporan	70,759,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	50 Laporan	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					290,557,440						27,000,000		
1	05	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			4 Unit	135,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	4 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	7,084,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	148,213,440	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Unit	27,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74,727,976						67,085,000		
1	05	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1,571,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1,728,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	41,255,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	12 Laporan	43,317,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	9,319,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Laporan	10,251,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	22,582,976	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Laporan	11,789,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					236,661,600						47,000,000		
1	05	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			5 Unit	32,460,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	5 Unit	38,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					8,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		8,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	195,951,600	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	003			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1,326,769,500						2,039,196,000		
1	05	003	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					112,898,000						100,110,000		
1	05	003	2.01	001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi			1 Dokumen	87,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Dokumen	45,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	003	2.01	002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			300 Orang	25,028,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	300 Orang	55,110,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah			
1	05	003	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					284,061,000						818,799,000		
1	05	003	2.02	002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			60 Orang	19,082,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	60 Orang	49,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.02	003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			1 Dokumen	111,734,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Dokumen	552,711,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.02	004	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			1 Unit	45,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Unit	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.02	005	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana			1 Dokumen	17,967,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Dokumen	79,288,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.02	006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			4 Kawasan	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	4 Kawasan	22,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.02	007	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah ASN, SATGAS, Relawan yang mendapatkan pelatihan pasca bencana Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Material mitigasi Monitoring dan verifikasi kerusakan akibat bencana			100 orang 1 dokumen 1 paket 10 kali	52,012,000				Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	100 orang 1 dokumen 1 paket 10 kali	52,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.02	008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			40 Orang	28,266,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	40 Orang	32,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.02	010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			250 Orang	10,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	250 Orang	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					820,519,500						926,975,000	
1	05	003	2.03	002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	dropping air bersih Jumlah bulan jasa Respon cepat kejadian bencana di wilayah Kab. Sragen Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah kejadian bencana yang tertangani			500 tangki 12 bulan 2 Dokumen 90 kejadian	758,367,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	500 tangki 12 bulan 2 Dokumen 90 kejadian	845,897,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.03	003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dapur umum Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			30 kali 30 Orang	43,922,000					30 kali 30 Orang	33,400,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.03	004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100 Orang	18,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	100 Orang	47,678,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					109,291,000						193,312,000	
1	05	003	2.04	002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang terbentuk Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah			10 desa 1 Dokumen	38,796,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	10 desa 1 Dokumen	116,900,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.04	003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					25,932,000				Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		22,602,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.04	004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia			1 Dokumen	36,038,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Dokumen	27,950,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.04	005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Monitoring kegiatan rehabilitasi pasca bencana Monitoring penyelenggaraan penanggulangan bencana			1 Laporan 20 kali 20 kali	8,525,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	1 Laporan 20 kali 20 kali	25,860,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
									11,932,508,593							11,724,922,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah			
1	06	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	5,065,238,593					100 %	5,955,840,000	
1	06	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	15,000,000					2 Dokumen	70,000,000	
1	06	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	10,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	12 Laporan	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	5,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	4 Laporan	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	4,258,508,593					12 Laporan	5,151,768,000	
1	06	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			34 Orang/Bulan	4,258,508,593	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	34 Orang/Bulan	5,151,768,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikerjakan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0					1 Dokumen	10,000,000	
1	06	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	96,000,000					12 Laporan	145,000,000	
1	06	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	3,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	12 Paket	5,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	15,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	12 Paket	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	13,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	12 Paket	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	15,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	12 Paket	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	50,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	12 Laporan	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	2 Dokumen	0	Dinas Sosial
1	06	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Unit		Unit	8 Unit	95,000,000					8 Unit	34,072,000	
1	06	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			44 Paket	30,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	44 Paket	0	Dinas Sosial
1	06	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			8 Unit	65,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	8 Unit	34,072,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	285,730,000					12 Laporan	270,000,000	
1	06	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	75,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	12 Laporan	75,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	15,730,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	12 Laporan	15,000,000	Dinas Sosial

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
1	06	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	195,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	12 Laporan	180,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Laporan	Laporan	12 Laporan	315,000,000						12 Laporan	275,000,000	
1	06	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			21 Unit	265,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	21 Unit	265,000,000	Dinas Sosial
1	06	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	50,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	2 Unit	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	002			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase (%) PSKS yang Aktif secara Individu, Keluarga dan Lembaga	%	%	100 %	432,000,000						100 %	425,000,000	
1	06	002	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	Orang	Orang	60 Orang	10,000,000						60 Orang	10,000,000	
1	06	002	2.02	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	PSKS	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	002	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS (TKSK, Karang Taruna, PSM, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tagana, dll) yang mengikuti Diklat	Orang	Orang	134 Orang	422,000,000						134 Orang	415,000,000	
1	06	002	2.03	001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan			50 Orang	20,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	PSKS	50 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	002	2.03	002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Orang	250,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	PSKS	20 Orang	250,000,000	Dinas Sosial
1	06	002	2.03	003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Orang	12,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	PSKS	30 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	002	2.03	004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			7 Lembaga	115,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	PSKS	7 Lembaga	155,000,000	Dinas Sosial
1	06	002	2.03	005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Sertifikat	25,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	PSKS	20 Sertifikat	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	003			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase (%) KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan	%	%	100 %	150,000,000						100 %	250,000,000	
1	06	003	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Korban Tindak Kekerasan(KTK) dan Pekerja Migran (PM) bermasalah yang di tangani	Orang	Orang	50 Orang	150,000,000						50 Orang	250,000,000	
1	06	003	2.01	001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan			50 Orang	150,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50 Orang	250,000,000	Dinas Sosial
1	06	004			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase (%) PPKS terlanter yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	%	100 %	1,831,500,000						100 %	1,382,082,000	
1	06	004	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Lansia terlanter,anak terlanter, bermasalah dengan hukum,berkebutuhan khusus), Penyandang Disabilitas, tuna sosial, PGOT) yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	Orang	1845 Orang	1,501,090,000						1845 Orang	1,050,164,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	004	2.01	001	Penyediaan Permakaman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakaman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	90,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100 Orang	90,000,000	Dinas Sosial
1	06	004	2.01	002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	25,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100 Orang	20,000,000	Dinas Sosial
1	06	004	2.01	003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	100,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	004	2.01	004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	85,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	60 Orang	70,000,000	Dinas Sosial
1	06	004	2.01	005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	200 Orang	30,000,000	Dinas Sosial
1	06	004	2.01	006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	140,090,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100 Orang	150,000,000	Dinas Sosial
1	06	004	2.01	008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				185 Orang	181,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	185 Orang	70,082,000	Dinas Sosial
1	06	004	2.01	009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	500 Orang	20,082,000	Dinas Sosial
1	06	004	2.01	010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				225 Orang	565,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	225 Orang	465,000,000	Dinas Sosial
1	06	004	2.01	011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	70 Orang	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	004	2.01	012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				115 Orang	115,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	115 Orang	120,000,000	Dinas Sosial
1	06	004	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti	Orang		Orang	417 Orang	330,410,000						417 Orang	331,918,000	
1	06	004	2.02	005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	10,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	0 Orang	40,493,000	Dinas Sosial
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang				25 Orang						
1	06	004	2.02	007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				395 Orang	320,410,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	395 Orang	276,425,000	Dinas Sosial
1	06	004	2.02	009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	004	2.02	010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	004	2.02	014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3 Dokumen	5,000,000	Dinas Sosial
1	06	005			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase (%) PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%		%	100 %	4,328,770,000						100 %	3,292,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
													Nasional	Daerah						
1		06	005	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Bantuan sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Fakir Miskin, yang masuk DTKS dan jumlah Operator desa/keluaraan yang mengikuti Verifikasi dan validasi data Fakir Miskin, Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai bagi Fakir Miskin, Jumlah SDM Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Jumlah Survei Saraswati, jampersal, beasiswa bagi Masyarakat Miskin (UPT-PK), Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu	Orang	Orang	5801 Orang	4,328,770,000					5801 Orang	3,292,000,000				
1		06	005	2.02	001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			300000 Orang	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	300000 Orang	20,000,000	Dinas Sosial	
1		06	005	2.02	002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			3746 Keluarga	1,088,770,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3746 Keluarga	520,000,000	Dinas Sosial	
1		06	005	2.02	003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima BLT bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok, Jumlah orang penerima manfaat bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, dan jumlah orang penerima manfaat bantuan jaminan hidup kemiskinan absolut desa tuntas kemiskinan			1945 Orang	2,360,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1945 Orang	2,360,000,000	Dinas Sosial	
1		06	005	2.02	004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			500 Orang	880,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	500 Orang	392,000,000	Dinas Sosial	
1	06	006			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase (%) Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan	%		%	100 %	80,000,000						100 %	370,000,000		
1	06	006	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase (%) Korban bencana Alam dan Bencana Sosial yang ditangani	%		%	100 %	60,000,000						100 %	300,000,000		
1	06	006	2.01	001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	40 Orang	85,000,000	Dinas Sosial	
1	06	006	2.01	004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	60,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	40 Orang	200,000,000	Dinas Sosial	
1	06	006	2.01	005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	150 Orang	15,000,000	Dinas Sosial	
1	06	006	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tagana yang mengikuti kegiatan Evakuasi Bencana Alam dan Sosial dan Koordinasi bencana alam dan sosial	Orang		Orang	30 Orang	20,000,000						30 Orang	70,000,000		
1	06	006	2.02	001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1 Kampung	35,000,000	Dinas Sosial	
1	06	006	2.02	002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	20,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	30 Orang	35,000,000	Dinas Sosial	
1	06	007			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentasi (%) TMP yang dikelola (Dirawat)	%		%	100 %	45,000,000						100 %	50,000,000		
1	06	007	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam terpenuhinya pemeliharaan TMP yang terawat	Makam		Makam	1 Makam	45,000,000						1 Makam	50,000,000		
1	06	007	2.01	001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Sosial	
1	06	007	2.01	002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	45,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1 Makam	25,000,000	Dinas Sosial	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														14,034,076,000	
2	07	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	9,963,610,260						100 %	10,077,076,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
2	07	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%		%	100 %	10,000,000						100 %	10,000,000	
2	07	001	2.01		001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	5 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	7,815,536,302						100 %	8,000,000,000	
2	07	001	2.02		001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			68 Orang/bulan	7,815,536,302		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	68 Orang/bulan	8,000,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	285,070,900						100 %	302,076,000	
2	07	001	2.06		001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Paket	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	145,074,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Paket	192,076,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Paket	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Paket	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Laporan	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	9,996,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1,219,900,000						100 %	1,275,000,000	
2	07	001	2.08		002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	470,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Laporan	470,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	14,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Laporan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	735,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Laporan	790,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	633,103,058						100 %	490,000,000	
2	07	001	2.09		002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			45 Unit	190,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	45 Unit	190,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	442,883,058		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Unit	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	002		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	%		%	100 %	50,000,000						100 %	80,000,000	
2	07	002	2.01		001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Prosentase lembaga/ perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	%		%	60 %	50,000,000					60 %	80,000,000
2	07	002	2.01	001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			1 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Paket	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	002	2.01	002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro			10 Perusahaan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	10 Perusahaan	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	003		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Peserta Pelatihan yang terserap di DUDI	%		%	50 %	2,409,999,684						50 %	1,340,000,000	
2	07	003	2.01		001	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase Peserta Lulus Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	%		%	90 %	2,069,999,784					90 %	750,000,000
2	07	003	2.01	001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			298 Orang	2,049,999,784		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	298 Orang	650,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
															DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			
2	07	003	2.01	002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			1 Lembaga	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Lembaga	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah				
2	07	003	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	%		50 %	49,999,900					50 %	50,000,000		
2	07	003	2.02	001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga LPK yang dibina			30 Lembaga	49,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	30 Lembaga	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	003	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.	%		41 %	10,000,000					41 %	10,000,000		
2	07	003	2.03	001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi			5 Perizinan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	5 Perizinan	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	003	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	%		100 %	250,000,000					100 %	450,000,000		
2	07	003	2.04	001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas.			50 Perusahaan	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	50 Perusahaan	450,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	003	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	%		10 %	30,000,000					10 %	80,000,000		
2	07	003	2.05	001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saling Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	004			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Penempatan Tenaga Kerja	%		64.81 %	1,049,998,786					64.81 %	2,317,000,000		
2	07	004	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pencaker yang terfasilitasi Pelayanan Antarkerja	%		100 %	294,999,336					100 %	880,000,000		
2	07	004	2.01	002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD,AKAN dan AKL			310 Orang	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	310 Orang	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	004	2.01	003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			2030 Orang	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	2030 Orang	125,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	004	2.01	004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD			200 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	200 Orang	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	004	2.01	005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			60 Orang	159,999,336		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	60 Orang	670,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	004	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		100 %	85,000,000					100 %	85,000,000		
2	07	004	2.02	001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi			72 Lembaga	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	72 Lembaga	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	004	2.02	002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan aturan yang Berlaku			72 Lembaga	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	72 Lembaga	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	004	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	%		100 %	249,999,800					100 %	215,000,000		
2	07	004	2.03	001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			12 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	12 Dokumen	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	004	2.03	002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub).			5000 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	5000 Orang	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	004	2.03	003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja			500 Orang	159,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	500 Orang	120,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	004	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pencaker yang terfasilitasi Pelayanan Antarkerja	%		100 %	419,999,650					100 %	1,137,000,000		
2	07	004	2.04	001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya.			60 Orang	299,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	60 Orang	740,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	004	2.04	002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani.			1000 Orang	19,999,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1000 Orang	22,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	004	2.04	003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan			30 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	30 Orang	375,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
													Nasional	Daerah							
2	07	005		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase perusahaan yang membuat PP (peraturan perusahaan)	%		%	75 %	215,000,000						75 %	220,000,000				
2	07	005	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP)	%		%	40 %	50,000,000						40 %	50,000,000				
2	07	005	2.01	001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online.			5 Perusahaan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	5 Perusahaan	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja			
2	07	005	2.01	002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama			2 Perusahaan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	2 Perusahaan	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja			
2	07	005	2.01	003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			70 Laporan	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	70 Laporan	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja			
2	07	005	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial	%		%	100 %	165,000,000						100 %	170,000,000				
2	07	005	2.02	001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			25 Perkara	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	25 Perkara	35,000,000	Dinas Tenaga Kerja			
2	07	005	2.02	002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan.			25 Perkara	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	25 Perkara	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja			
2	07	005	2.02	003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi			74 Asosiasi dan SP	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	74 Asosiasi dan SP	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja			
2	07	005	2.02	004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			30 Lembaga	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	30 Lembaga	85,000,000	Dinas Tenaga Kerja			
2	07	005	2.02	005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			100 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	100 Orang	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja			
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																65,000,000	
3	32	003		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang ditempatkan	%		%	100 %	65,000,000						100 %	65,000,000				
3	32	003	2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyediaan Lokasi Permukiman transmigrasi	%		%	100 %	65,000,000						100 %	65,000,000				
3	32	003	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2 Laporan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	2 Laporan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja			
3	32	003	2.01	004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan			2 Kepala Keluarga	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	2 Kepala Keluarga	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja			
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																50,000,000	
2	07	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	50,000,000						100 %	50,000,000				
2	07	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	50,000,000						1 Unit Kerja	50,000,000				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
2	07	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 			1 Unit Kerja	50,000,000		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Unit Kerja	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	03	004			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang tersedia di Kabupaten Sragen	%		%	100 %	802,444,600						100 %	3,168,321,000	
1	03	004	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Sarpras Pengelolaan Persampahan yang terbangun di Kabupaten Sragen	Unit		Unit	13 Unit	802,444,600						13 Unit	3,168,321,000	
1	03	004	2.01	001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				6 Dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	6 Dokumen	105,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
1	03	004	2.01	002	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	3 Dokumen	65,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
1	03	004	2.01	003	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				500 Rumah Tangga	600,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	500 Rumah Tangga	628,321,000	Dinas Lingkungan Hidup	
1	03	004	2.01	004	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi				2 Unit	202,444,600	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Unit	325,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
1	03	004	2.01	005	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				4000 Rumah Tangga	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	4000 Rumah Tangga	1,743,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
1	03	004	2.01	006	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Unit	275,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
1	03	004	2.01	007	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan				150 Orang	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	150 Orang	17,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
1	03	004	2.01	008	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				2 Kelompok	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Kelompok	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
2	11	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,376,131,717						100 %	13,559,797,000	
2	11	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	10,427,664,878						14 Bulan	10,581,397,000	
2	11	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/bulan	10,427,664,878	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	120 Orang/bulan	10,581,397,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	001	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	46,933,500						12 Bulan	25,000,000	
2	11	001	2.04	003	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	23,727,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Laporan	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	001	2.04	004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,715,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	001	2.04	006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	001	2.04	007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	10,491,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	217,611,000						12 Bulan	170,400,000	
2	11	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,250,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Paket	7,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	45,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Paket	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
2	11	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	48,381,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Paket	48,400,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	16,100,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Paket	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	99,880,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Laporan	65,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	56,513,000						12 Bulan	115,000,000	
2	11	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				60 Unit	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	60 Unit	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	56,513,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Unit	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	388,782,000						12 Bulan	353,000,000	
2	11	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Laporan	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	65,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Laporan	65,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	14,170,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Laporan	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	306,612,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Laporan	260,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,238,627,339						12 Bulan	2,315,000,000	
2	11	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	143,200,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	30 Unit	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				59 Unit	1,985,873,407	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	59 Unit	2,210,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	109,553,932	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	002			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen LH	%		%	100 %	779,999,700						100 %	100,000,000	
2	11	002	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	269,999,700						4 Dokumen	100,000,000	
2	11	002	2.01	001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				3 Dokumen	186,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	002	2.01	002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	83,999,700	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	002	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2 Buah KLHS RDTR (5 Lokasi)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	510,000,000						2 Dokumen	0	
2	11	002	2.02	001	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	105,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	002	2.02	002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	405,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	%		%	100 %	2,229,172,140						100 %	877,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
2	11	003	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sumur resapan, IPA/H, lubang biopori dan embung yang terbangun dan Pengelolaan Laboratorium	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	1,785,009,490						5 Dokumen	255,000,000	
2	11	003	2.01	001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			2 Dokumen	1,490,209,540	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2.01	002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			3 Dokumen	294,799,950	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	3 Dokumen	205,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2.01	003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan			0 Dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	0 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencemaran yang tertangani	%		%	72 %	81,178,700						72 %	200,000,000	
2	11	003	2.02	001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			1 Laporan	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2.02	002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi			1 Lokasi	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Lokasi	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2.02	003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan			1 Titik	81,178,700	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Titik	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan LH yang ditangani	%		%	88 %	362,983,950						88 %	422,000,000	
2	11	003	2.03	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar			2 Dokumen	212,983,950	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Dokumen	310,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2.03	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			1 Dokumen	150,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Dokumen	112,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	004		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	%		%	100 %	453,534,600						100 %	865,000,000	
2	11	004	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	%		%	100 %	453,534,600						100 %	865,000,000	
2	11	004	2.01	001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun			2 Dokumen	47,684,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Dokumen	205,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	004	2.01	002	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			2.48 Ha	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2.48 Ha	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	004	2.01	004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			25.27 Ha	246,810,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	25.27 Ha	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	004	2.01	006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			175 Orang	89,167,600	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	175 Orang	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	004	2.01	007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			1 Unit	69,872,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Unit	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	005		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan	%		%	100 %	126,057,000						100 %	32,500,000	
2	11	005	2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Permohonan rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan fasilitasi	%		%	100 %	28,380,000						100 %	22,500,000	
2	11	005	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			23 Dokumen	14,280,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	23 Dokumen	7,500,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
2	11	005	2.01	002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			15 Laporan	14,100,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	15 Laporan	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	005	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permohonan rekomendasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan fasilitasi	%	%	100 %	97,677,000						100 %	10,000,000	
2	11	005	2.02	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			1 Dokumen	63,532,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	005	2.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			1 Dokumen	34,145,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	%	%	95 %	138,138,350						95 %	196,000,000	
2	11	006	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum dan yang memiliki persetujuan lingkungan	%	%	95 %	138,138,350						95 %	196,000,000	
2	11	006	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			25 Dokumen	14,168,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	25 Dokumen	26,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	006	2.01	002	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			2 Orang	40,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Orang	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	006	2.01	003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan	59,905,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Laporan	90,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	006	2.01	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD			1 Dokumen	24,065,350	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	008			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan kelurahan yang menyusun Peraturan Desa dan Kelurahan terkait Lingkungan Hidup	%	%	20 %	34,968,400						20 %	37,500,000	
2	11	008	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa dan kelurahan yang mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan Lingkungan Hidup	%	%	20 %	34,968,400						20 %	37,500,000	
2	11	008	2.01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			30 Lembaga	34,968,400	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	30 Lembaga	37,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	009			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi)	%	%	68 %	99,935,000						68 %	125,000,000	
2	11	009	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten)	%	%	77.33 %	99,935,000						77.33 %	125,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	009	2.01	001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				14 Entitas	99,935,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	14 Entitas	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	010			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan	%		%	90 %	17,000,000						90 %	18,000,000	
2	11	010	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Aduan Sengketa Lingkungan yang ditindaklanjuti	%		%	90 %	17,000,000						90 %	18,000,000	
2	11	010	2.01	001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				10 Dokumen	17,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	10 Dokumen	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	011			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (aset pemerintah)	%		%	48.5 %	3,204,526,400						48.5 %	4,178,620,000	
						Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (pemberdayaan masyarakat)	%		%	22 %							22 %		
2	11	011	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Ton/Th		Ton/Th	120000 Ton/Th	3,193,279,400						120000 Ton/Th	3,873,000,000	
						Jumlah Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Ton/Th		Ton/Th	74000 Ton/Th							74000 Ton/Th		
2	11	011	2.01	001	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				3 Dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	3 Dokumen	26,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	011	2.01	002	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				2 Laporan	175,194,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Laporan	225,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	011	2.01	003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				120000 Ton	1,980,422,650	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	120000 Ton	1,475,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	011	2.01	004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				42 Kelompok	38,438,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	42 Kelompok	72,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	011	2.01	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				4 Dokumen	279,224,250	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	4 Dokumen	875,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	011	2.01	006	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				3 Dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	3 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	011	2.01	007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	720,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Unit	1,150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	011	2.02		Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi		Rekomendasi	2 Rekomendasi	0						2 Rekomendasi	30,000,000	
2	11	011	2.02	001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi				2 Rekomendasi	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Rekomendasi	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
2	11	011	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan		Laporan	2 Laporan	11,247,000					2 Laporan	275,620,000			
2	11	011	2.03	001	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah			2 Laporan	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Laporan	26,620,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	011	2.03	002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja			8 Unit	11,247,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	8 Unit	225,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	011	2.03	003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota			2 Laporan	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	2 Laporan	24,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								7,238,253,732								8,286,767,592	
2	12	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	5,155,871,732						100 Persen	5,504,637,592		
2	12	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	13,500,000						5 Dokumen	14,000,000		
2	12	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	4,659,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	2 Dokumen	5,159,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Laporan	8,841,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	3 Laporan	8,841,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	3,934,489,732						12 Laporan	4,251,335,592		
2	12	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			29 Orang/bulan	3,934,489,732	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	29 Orang/bulan	4,251,335,592	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	417,133,000						12 Laporan	432,960,000		
2	12	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	11,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	1 Paket	11,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	180,177,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	2 Paket	166,560,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	40,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	4 Paket	45,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	30,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	2 Paket	35,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			36 Dokumen	5,400,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	36 Dokumen	5,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	100,556,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	12 Laporan	120,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			30000 Dokumen	50,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	30000 Dokumen	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	53,867,000						12 Laporan	65,860,000		
2	12	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0 Unit	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	0 Unit	35,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			15 Unit	53,867,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	15 Unit	30,860,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	486,357,000						12 Laporan	486,357,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
2	12	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	270,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	12 Laporan	270,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	76,356,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	12 Laporan	76,357,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	140,001,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	12 Laporan	140,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	250,525,000						12 Laporan	254,125,000	
2	12	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	205,900,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	22 Unit	209,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	5,825,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	12 Unit	5,825,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	38,800,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen	6 Unit	38,800,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	002			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	Persen		Persen	70 Persen	1,420,882,000						70 Persen	2,108,750,000	
					Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik	Persen		Persen	98.95 Persen						98.95 Persen				
2	12	002	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan Dokumen Kependudukan	Dokumen		Dokumen	233134 Dokumen	1,420,882,000						233134 Dokumen	2,108,750,000	
2	12	002	2.01	001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				305 Dokumen	18,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Penduduk Kabupaten Sragen	305 Dokumen	40,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	002	2.01	004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	312,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Penduduk Kabupaten Sragen	12 Laporan	400,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	002	2.01	005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				232829 Dokumen	1,090,882,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Penduduk Kabupaten Sragen	232829 Dokumen	1,668,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	003			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun	Persen	Persen	95 Persen	377,920,000							95 Persen	380,000,000	
						Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk	Persen	Persen	54.55 Persen								54.55 Persen		
						Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	Persen	100 Persen								100 Persen		
						Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Persen	Persen	100 Persen								100 Persen		
						Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	Persen	100 Persen								100 Persen		
2	12	003	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Dokumen		Dokumen	28860 Dokumen	377,920,000						28860 Dokumen	380,000,000	
2	12	003	2.01	001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				28860 Dokumen	283,120,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Penduduk Kabupaten Sragen	28860 Dokumen	279,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	003	2.01	002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				15 Layanan	94,800,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Penduduk Kabupaten Sragen	15 Layanan	101,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	004			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan data kependudukan	Persen		Persen	61.22 Persen	126,150,000						61.22 Persen	128,950,000	
2	12	004	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	126,150,000							2 Dokumen	128,950,000	
						Jumlah dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Dokumen	42 Dokumen							42 Dokumen			
2	12	004	2.01	001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				3 Dokumen	116,516,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Perangkat Daerah Kabupaten Sragen	3 Dokumen	118,016,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	004	2.01	002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				42 Dokumen	9,634,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Perangkat Daerah Kabupaten Sragen	42 Dokumen	10,934,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	005			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	Persen		Persen	96 Persen	157,430,000						96 Persen	164,430,000	
2	12	005	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah laporan dan penyajian data yang disusun tepat waktu	Laporan		Laporan	24 Laporan	157,430,000						24 Laporan	164,430,000	
2	12	005	2.01	001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	139,438,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Penduduk Kabupaten Sragen	12 Dokumen	144,438,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	12	005	2.01	002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				3 Dokumen	17,992,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Penduduk Kabupaten Sragen	3 Dokumen	19,992,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											8,975,928,534								7,463,430,265	
2	13	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	4,888,279,034						100 %	5,819,755,380		
2	13	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	%		%	100 %	7,500,000						100 %	8,423,415		
2	13	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7,500,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	ASN	7 Dokumen	8,423,415	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	4,165,211,784						100 %	5,006,151,435		
2	13	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	4,165,211,784	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	ASN	36 Orang/bulan	5,006,151,435	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan				
2	13	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	348,586,250						100 %	248,179,470		
2	13	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,100,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	ASN	1 Paket	5,619,075	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	174,605,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	ASN	1 Paket	79,585,275	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	31,510,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	ASN	1 Paket	21,309,750	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,390,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	ASN	1 Paket	11,432,190	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	113,681,250	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	ASN	1 Laporan	115,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	13,300,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	ASN	1 Dokumen	14,733,180	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Kendaraan Roda 2 Bermotor	Unit		Unit	196 Unit	0						196 Unit	0		
2	13	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				196 unit	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Kepala Desa	196 unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	180,370,000						100 %	281,788,815		
2	13	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	99,660,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Laporan	207,900,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	17,010,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Laporan	14,772,450	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	63,700,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Laporan	59,116,365	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	186,611,000						100 %	275,212,245		
2	13	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 unit	166,529,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	ASN	14 unit	228,736,200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	20,082,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	ASN	1 unit	46,476,045	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	002			PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat Fasilitas Penataan Desa	%		%	5 %	47,250,000						5 %	51,975,000		
2	13	002	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas Tata Wilayah Desa	Desa		Desa	10 Desa	47,250,000						10 Desa	51,975,000		
2	13	002	2.01	002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				10 Desa	47,250,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Desa	10 Desa	51,975,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	003			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama yang disepakati	Kerjasama		Kerjasama	4 Kerjasama	1,504,721,250						4 Kerjasama	462,683,183		
2	13	003	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama yang disepakati	Kerjasama		Kerjasama	4 Kerjasama	1,504,721,250						4 Kerjasama	462,683,183		
2	13	003	2.01	001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	52,867,250	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Dokumen	57,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	003	2.01	002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1,426,500,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	4 Dokumen	381,150,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	003	2.01	003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	25,354,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Dokumen	23,783,183	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif
2	13	004			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	%	%	100 %	2,190,960,000					100 %	749,743,824		
2	13	004	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	%	%	100 %	2,190,960,000					100 %	749,743,824		
2	13	004	2.01	001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Dokumen	17,325,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa			5 Dokumen	39,382,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	5 Dokumen	45,802,680	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			0 Dokumen	60,077,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	0 Dokumen	112,497,578	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			196 Dokumen	196 Dokumen									
2	13	004	2.01	004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa			3 Dokumen	68,229,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	3 Dokumen	43,836,870	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			384 Orang	29,500,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	384 Orang	36,505,508	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa			3 Laporan	20,668,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	3 Laporan	22,934,662	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Dokumen	22,214,115	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			2 Dokumen	32,300,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	2 Dokumen	35,227,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			2 Laporan	160,727,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	2 Laporan	24,924,900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			1 Laporan	34,430,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Laporan	24,622,290	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa			6 Dokumen	55,682,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	6 Dokumen	98,168,070	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			1 Dokumen	1,056,278,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Dokumen	62,911,118	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa			1 Dokumen	58,709,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Dokumen	34,727,960	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			196 Desa	21,873,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	196 Desa	41,211,555	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa			196 Laporan	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	196 Laporan	34,434,015	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			608 Dokumen	112,220,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	608 Dokumen	57,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2.01	018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			1 Dokumen	405,883,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Dokumen	34,650,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	005			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Lembaga	Lembaga	20 Lembaga	344,718,250						20 Lembaga	379,272,878	
2	13	005	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	Lembaga	20 Lembaga	344,718,250						20 Lembaga	379,272,878	
2	13	005	2.01	002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			1 Dokumen	21,161,250	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Desa	1 Dokumen	23,100,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	13	005	2.01	003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	64,515,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Desa	2 Lembaga	99,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	005	2.01	005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				2 Dokumen	41,700,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Desa	2 Dokumen	45,622,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	005	2.01	006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				5 Laporan	51,176,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Desa	5 Laporan	30,215,378	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	005	2.01	007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	53,175,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Desa	1 Laporan	57,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	005	2.01	009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				4 Dokumen	112,990,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Desa	4 Dokumen	123,585,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													804,800,000		
2	08	002			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% ARG pada belanja langsung APBD	%		%	29 %	190,296,000							29 %	215,000,000	
						Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	%		%	70 %								70 %		
2	08	002	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang Melaksanakan PPRG	%		%	80 %	75,080,000							80 %	85,000,000	
2	08	002	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0		1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
															Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran					
2	08	002	2.01	004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Perangkat Daerah	60,080,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0		25 Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	002	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	Rasio Perempuan di Eksekutif	%		%	75 %	20,000,000							75 %	24,000,000	
						Rasio Perempuan di Legislatif	%		%	30 %								30 %		
2	08	002	2.02	001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0		1 Dokumen	12,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	002	2.02	002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Organisasi	10,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0		27 Organisasi	12,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	002	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	%		%	3.7 %	95,216,000							3.7 %	106,000,000	
2	08	002	2.03	001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				10 Lembaga	43,216,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0		10 Lembaga	46,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	002	2.03	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	7,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0		30 Orang	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	002	2.03	003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				40 Dokumen	45,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0		40 Dokumen	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
													Nasional	Daerah				
2	08	003		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	%		%	70 %	226,542,750					70 %	196,489,000		
			Rasio KDRT Perempuan		%		%	0,30 %	0,30 %									
2	08	003	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	%		%	0.035 %	75,053,750					0.035 %	35,000,000		
2	08	003	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	65,053,750	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	3 Dokumen	19,999,750	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	003	2.01	002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Perangkat Daerah	10,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	20 Perangkat Daerah	15,000,250	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	003	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Korban Perempuan yang dirujuk	%	%	10 %	105,000,000					10 %	110,000,000		
2	08	003	2.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Layanan	105,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Layanan	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	003	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Petugas yang telah dilatih Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan	%	%	15 %	46,489,000					15 %	51,489,000		
2	08	003	2.03	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			20 Orang	46,489,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	20 Orang	51,489,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	006			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan kapasitas lembaga dalam partisipasi pemenuhan hak dan perlindungan anak	%	%	60 %	100,378,000					60 %	105,000,000		
				Persentase cakupan pendampingan forum anak	%	%	40 %	40 %										
2	08	006	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas DEKELA dalam Pemenuhan Hak Anak	%	%	41.35 %	12,054,000					41.35 %	13,000,000		
2	08	006	2.01	001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			1 Organisasi	4,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Organisasi	4,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	006	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	8,054,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Dokumen	9,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	006	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak	%	%	75 %	88,324,000					75 %	92,000,000		
2	08	006	2.02	001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			25 Orang	3,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	25 Orang	4,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	006	2.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	50,162,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	3 Dokumen	51,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
2	08	006	2.02	003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	15,054,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	3 Dokumen	16,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	006	2.02	004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	20,108,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	3 Dokumen	21,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	007			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio KDRT Anak	%		0,009 %	273,311,000						0,009 %	288,311,000		
2	08	007	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	%		0.035 %	66,000,000						0.035 %	71,000,000		
2	08	007	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	66,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Dokumen	71,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	007	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan korban anak yang terdampingi	%		10 %	167,311,000						10 %	172,311,000		
2	08	007	2.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			5 Layanan	167,311,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	5 Layanan	172,311,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	007	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Petugas yang telah dilatih Penanganan Kasus Kekerasan Anak	%		15 %	40,000,000						15 %	45,000,000		
2	08	007	2.03	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	40,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Dokumen	45,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						16,433,324,242							14,790,536,000	
2	14	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%		100 %	5,392,607,242						100 %	5,289,411,000		
2	14	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	14 bulan	4,695,000,192					14 bulan	4,642,910,000		
2	14	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			35 Orang	4,695,000,192	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	35 Orang	4,642,910,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	172,015,450					12 bulan	128,733,500		
2	14	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	15,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Paket	11,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	51,889,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Paket	23,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	14,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Paket	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,126,450	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Paket	11,733,500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	76,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	38 Laporan	73,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	290,572,900						12 bulan	294,459,000	
2	14	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	66,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	48 Laporan	62,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	18,470,900	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	4 Laporan	15,459,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	206,102,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	12 Laporan	217,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	235,018,700						12 bulan	223,308,500	
2	14	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				125 Unit	225,360,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	125 Unit	209,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya				3 Unit	9,658,700	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	3 Unit	14,308,500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	002			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	%		%	65,17 %	150,000,000						65,17 %	205,000,000	
2	14	002	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	%		%	75 %	50,000,000						75 %	100,000,000	
2	14	002	2.01	002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	4 Dokumen	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	002	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemetaan Pengendalian Penduduk	%		%	42.8 %	100,000,000						42.8 %	105,000,000	
2	14	002	2.02	011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				5 Dokumen	85,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	5 Dokumen	90,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	002	2.02	013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	15,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	12 Dokumen	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kesertaan KB MKJP	%		%	26,80 %	5,777,602,000						26,80 %	4,132,000,000	
2	14	003	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Kecamatan yang Mendapatkan media KIE	%		%	100 %	1,983,100,000						100 %	1,620,000,000	
					Terlaksananya Kegiatan Penyuluh KKBPK di Balai Penyuluh	%		%	100 %								100 %		
					Terlaksananya Rapat Koordinasi BOKB	%		%	100 %								100 %		
						%		%	100 %								100 %		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
2	14	003	2.01	001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			6 Organisasi	5,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	6 Organisasi	8,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.01	002	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			13 Dokumen	25,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	13 Dokumen	28,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.01	003	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			20 Unit	70,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	20 Unit	73,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.01	004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			32 Dokumen	77,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	32 Dokumen	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.01	005	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Cetak Leaflet Media KIE			10 rim	6,100,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	10 rim	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.01	006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			20 Laporan	315,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	20 Laporan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.01	007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			12 Laporan	1,445,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	12 Laporan	1,448,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.01	008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			4 Laporan	40,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	4 Laporan	43,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pelaksanaan Pembinaan KADER KB ke Masyarakat	Kegiatan	Kegiatan	4992 Kegiatan	1,313,000,000						4992 Kegiatan	1,323,000,000	
2	14	003	2.02	001	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			1 Organisasi	135,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Organisasi	138,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.02	002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia			1875 unit	15,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1875 unit	19,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.02	004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			19968 Orang	1,163,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	19968 Orang	1,166,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Visitasi dan Registrasi Klinik KB	%	%	86 %	1,466,502,000						86 %	164,000,000	
2	14	003	2.03	001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			70 Laporan	45,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	70 Laporan	48,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	003	2.03	003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				3500 orang	1,323,100,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	3500 orang	13,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.03	008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				10 Laporan	65,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	10 Laporan	68,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.03	009	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				1950 orang	17,260,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1950 orang	18,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.03	010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				87 orang	16,142,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	87 orang	17,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan POKJA Kampung KB, Unil Lapangan dan Tribina di Kampung KB	Kegiatan		Kegiatan	240 Kegiatan	1,015,000,000						240 Kegiatan	1,025,000,000	
2	14	003	2.04	001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				2 Organisasi	25,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	2 Organisasi	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.04	003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				46 Kampung	990,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	46 Kampung	995,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	004			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Penguatan Peran PIKRemaja Proyek Nasional dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	%		%	100 %	5,113,115,000						100 %	5,164,125,000	
					Persentase UPPKS yang mendapatkan pembinaan	%		%	100 %							100 %			
2	14	004	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB	Kegiatan		Kegiatan	22 Kegiatan	5,106,075,000						22 Kegiatan	5,149,125,000	
2	14	004	2.01	001	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk				1 Kelompok	10,080,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Kelompok	18,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	004	2.01	002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				15 Unit	509,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	15 Unit	521,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	004	2.01	005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				208 Orang	4,286,995,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	208 Orang	4,300,125,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	004	2.01	006	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				500 Kelompok	300,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	500 Kelompok	310,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif
2	14	004	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembinaan POKTAN BKB/BKR/BKL	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	7,040,000				1 Kegiatan	15,000,000			
2	14	004	2.02	003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPPKS)			12 Organisasi	7,040,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	12 Organisasi	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							10,303,577,418						11,333,780,000	
2	15	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	%		%	100 %	8,590,488,588					100 %	9,444,288,000		
2	15	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	2,994,000					2 dokumen	3,500,000		
2	15	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	1,497,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	3 Dokumen	1,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1,497,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	1 Laporan	2,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	laporan		laporan	1 laporan	6,821,363,838					1 laporan	7,142,952,000		
2	15	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			67 Orang/bulan	6,821,363,838		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Administrasi keuangan	67 Orang/bulan	7,141,452,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Administrasi keuangan	2 Dokumen	1,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	laporan		laporan	1 laporan	3,998,000					1 laporan	4,000,000		
2	15	001	2.03	004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	3,998,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Administrasi barang milik daerah	1 Laporan	4,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	0					2 kegiatan	101,500,000		
2	15	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			100 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	100 Paket	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			134 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	134 Dokumen	1,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	laporan		laporan	1 laporan	290,566,000					1 laporan	217,500,000		
2	15	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	2,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Administrasi umum	1 Paket	2,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	97,648,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Administrasi umum	4 Paket	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Administrasi umum	1 Paket	5,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
2	15	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	105,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Administrasi umum	6 Paket	105,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	79,428,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Administrasi umum	15 Laporan	45,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	laporan		laporan	1 laporan	14,716,000						1 laporan	150,000,000	
2	15	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	4,512,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pengadaan barang milik daerah	2 Unit	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	10,204,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pengadaan barang milik daerah	5 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan		laporan	1 laporan	728,595,750						1 laporan	540,328,000	
2	15	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	212,496,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Penyediaan jasa penunjang	36 Laporan	230,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	516,099,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Penyediaan jasa penunjang	12 Laporan	310,328,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan		laporan	1 laporan	728,255,000						1 laporan	1,284,508,000	
2	15	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemeliharaan barang milik daerah	0 Unit	464,508,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	512,111,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pemeliharaan barang milik daerah	34 Unit	600,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	196,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemeliharaan barang milik daerah	1 Unit	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	19,914,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemeliharaan barang milik daerah	10 Unit	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarpras LLAJ dalam kondisi baik	%		%	71,55 %	1,706,512,580						71,55 %	1,881,992,000	
2	15	002	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan	dokumen		dokumen	1 dokumen	100,000,000						1 dokumen	0	
2	15	002	2.01	001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%		%	78 %	423,531,000						78 %	665,082,000	
2	15	002	2.02	001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Penyediaan perlengkapan jalan	1 Unit	80,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	002	2.02	002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Unit	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Penyediaan perlengkapan jalan	10 Unit	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.02	003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Penyediaan perlengkapan jalan	2 Unit	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.02	004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				190 Unit	93,531,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Penyediaan perlengkapan jalan	190 Unit	370,082,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal penumpang tipe C dalam kondisi baik	%		%	50 %	104,529,080						50 %	259,508,000	
2	15	002	2.03	003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pengelolaan terminal penumpang tipe C	1 Unit	180,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.03	004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	104,529,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pengelolaan terminal penumpang tipe C	2 Unit	79,508,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen izin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan	dokumen		dokumen	1 dokumen	45,194,500						1 dokumen	7,500,000	
2	15	002	2.04	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	45,194,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Penerbitan izin penyelenggaraan fasilitas parkir	1 Laporan	7,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang diuji	%		%	273 %	348,945,000						273 %	352,000,000	
2	15	002	2.05	001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Unit	25,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.05	003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				11642 Unit	80,328,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	11642 Unit	80,328,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.05	004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				6019 Dokumen	162,513,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6019 Dokumen	162,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.05	007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	106,104,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9 Unit	84,672,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	rasio		rasio	0.5 rasio	574,297,000						0.5 rasio	470,902,000	
2	15	002	2.06	001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	18,461,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.06	002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				57 Unit	368,455,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	57 Unit	260,246,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.06	004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	187,381,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	1 Laporan	190,656,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan yng dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	70,996,000						3 kegiatan	67,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	002	2.08	001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Orang	14,128,500	Kab. Sragen, Karangmalang, Kroyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	1 Orang	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.08	002	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	31,487,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	1 Laporan	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.08	003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	15,210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	1 Laporan	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.08	004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				0 Laporan	0	Kab. Sragen, Karangmalang, Kroyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	0 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.08	005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	10,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	1 Laporan	12,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang antar kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/kotayang terlaksana	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	39,020,000						2 kegiatan	60,000,000	
2	15	002	2.09	001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Unit	29,106,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Penyediaan angkutan umum	2 Unit	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.09	002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	9,914,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Penyediaan angkutan umum	1 Laporan	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	003			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase kapal yang memenuhi standar keselamatan	%		%	25 %	6,576,250						25 %	7,500,000	
2	15	003	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan data dan informasi jaringan lintas penyeberangan serta persetujuan pengoperasian kapal yang terlaksana	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	6,576,250						1 kegiatan	7,500,000	
2	15	003	2.07	001	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6,576,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal	1 Dokumen	7,500,000	Dinas Perhubungan
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													8,099,758,000	
2	16	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	5,594,406,235						100 %	5,144,758,000	
2	16	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen		dokumen	5 dokumen	1,205,500						5 dokumen	7,500,000	
2	16	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	2 dokumen	3,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 dokumen	1,205,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	3 dokumen	4,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	laporan		laporan	12 laporan	4,446,324,735						12 laporan	4,471,000,000	
2	16	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 orang/bulan	4,446,324,735	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kegiatan operasional kantor	40 orang/bulan	4,471,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	16	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	laporan		laporan	8 laporan	250,000,000						8 laporan	200,000,000	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		orang	500 orang							500 orang		
2	16	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500 Orang	250,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	masyarakat	500 Orang	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
2	16	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	laporan		laporan	12 laporan	312,630,000					12 laporan	138,500,000		
2	16	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	3,995,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	1 paket	4,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 paket	186,301,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	5 paket	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 paket	35,080,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	4 paket	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	7,254,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	2 paket	8,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			5 dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	5 dokumen	1,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			35 laporan	80,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	35 laporan	80,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan		laporan	2 laporan	237,328,000						2 laporan	0	
2	16	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			8 unit	151,065,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	8 unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 unit	49,455,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	3 unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4 unit	36,808,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	4 unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan		laporan	12 laporan	140,378,000						12 laporan	122,758,000	
2	16	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 laporan	4,034,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	12 laporan	5,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	10,224,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	12 laporan	8,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 laporan	39,334,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	12 laporan	34,258,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	86,786,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	12 laporan	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan		laporan	12 laporan	206,540,000						12 laporan	205,000,000	
2	16	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			16 unit	156,540,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	16 unit	155,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 unit	50,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	kegiatan operasional kantor	1 unit	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat	%		%	100 %	1,351,524,000						100 %	1,400,000,000	
2	16	002	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media dan Kemitraan Penyampaian Informasi	media		media	8 media	1,351,524,000						8 media	1,400,000,000	
2	16	002	2.01	001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			1 dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat	1 dokumen	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			1 dokumen	25,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat	1 dokumen	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			1 dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat	1 dokumen	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			1 dokumen	25,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat	1 dokumen	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	002	2.01	005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				3 dokumen	844,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat	3 dokumen	800,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 dokumen	22,980,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat	1 dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				3 layanan	150,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat	3 layanan	175,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 dokumen	25,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat	1 dokumen	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				1 dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat	1 dokumen	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 orang	44,544,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat	20 orang	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	215,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat	1 Dokumen	65,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 unit	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat	2 unit	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%		%	100 %	2,207,244,500						100 %	1,555,000,000	
2	16	003	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan domain resmi Pemkab Sragen	%		%	100 %	320,000,000						100 %	355,000,000	
2	16	003	2.01	002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan Online Pemkab Sragen	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.01	003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				264 Unit kerja	320,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan Online Pemkab Sragen	264 Unit kerja	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan Pusat Data Kabupaten Sragen	%		%	100 %	1,887,244,500						100 %	1,200,000,000	
2	16	003	2.02	001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan Online Pemkab Sragen	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02	002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				2 Dokumen	200,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan Online Pemkab Sragen	2 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02	003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan Online Pemkab Sragen	1 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02	007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				4 unit	100,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan Online Pemkab Sragen	4 unit	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02	008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				264 layanan	1,135,820,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan Online Pemkab Sragen	264 layanan	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02	009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 dokumen	74,699,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan Online Pemkab Sragen	1 dokumen	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
2	16	003	2.02	010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				4 dokumen	118,475,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan Online Pemkab Sragen	4 dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02	011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				2 dokumen	100,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan Online Pemkab Sragen	2 dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02	012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				3 dokumen	58,250,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan Online Pemkab Sragen	3 dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						199,822,000						255,000,000		
2	20	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data sektoral yang tersedia, terintegrasi dan terbaru	%		%	65 %	199,822,000						65 %	255,000,000	
2	20	002	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral PD yang akurat	%		%	75 %	199,822,000						75 %	255,000,000	
2	20	002	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 dokumen	94,822,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	masyarakat dan stake holder	2 dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	002	2.01	002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				75 orang	50,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	masyarakat dan stake holder	75 orang	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	002	2.01	003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				75 dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	masyarakat dan stake holder	75 dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	002	2.01	004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				48 orang	30,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	masyarakat dan stake holder	48 orang	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	002	2.01	005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik				1 unit	25,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	masyarakat dan stake holder	1 unit	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						460,732,000						260,000,000		
2	21	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase peningkatan pemahaman PD terhadap keamanan informasi	%		%	30 %	460,732,000						30 %	260,000,000	
2	21	002	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keamanan data milik Pemkab Sragen	%		%	30 %	460,732,000						30 %	260,000,000	
2	21	002	2.01	001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				2 dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan online Pemkab Sragen	2 dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	002	2.01	002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 laporan	39,992,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan online Pemkab Sragen	2 laporan	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	002	2.01	003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 laporan	300,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan online Pemkab Sragen	1 laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	002	2.01	004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				264 Perangkat Daerah	120,740,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Jaringan online Pemkab Sragen	264 Perangkat Daerah	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						21,657,014,474						25,852,104,880		
2	17	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	18,480,867,474						100 %	20,139,354,880	
2	17	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen		dokumen	8 dokumen	15,000,000						8 dokumen	70,000,000	
2	17	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		2 Dokumen	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 dokumen	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	6 dokumen	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan ASN	bulan		bulan	14 bulan	16,327,425,960						14 bulan	16,840,803,472	
2	17	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				171 Orang/bulan	16,327,425,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	171 Orang/bulan	16,840,803,472	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	291,510,000						12 bulan	411,752,890	
2	17	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 paket	12,352,890	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Paket	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	61,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Paket	57,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Paket	57,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Dokumen	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit sarpras pengadaan barang /penunjang urusan pemerintahan daerah	unit		unit	115 unit	315,394,000						115 unit	1,144,849,000	
2	17	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	260,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	4 Unit	856,624,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	0				Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	30 Unit	27,725,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	35,394,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	6 Unit	210,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	2 Unit	50,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang/pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	bulan		bulan	12 bulan	471,684,514						12 bulan	598,216,000	
2	17	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	344,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	12 Laporan	380,400,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	14,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	12 Laporan	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	112,394,514		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	12 Laporan	157,816,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	bulan		bulan	12 bulan	1,059,853,000						12 bulan	1,073,733,518	
2	17	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	728,984,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	26 Unit	775,440,926	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	320,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	2 Unit	278,292,592	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	9,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	15 Unit	20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	003			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kategori Tingkat Kesehatan Koperasi yang diawasi	4,1 %		18 %	2,3 %	54,000,000						2,3 %	81,000,000	
2	17	003	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		%	7.9 %	54,000,000						7.9 %	81,000,000	
2	17	003	2.01	001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				396 Unit Usaha	43,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	396 Unit Usaha	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	003	2.01	002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				30 Unit Usaha	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	30 Unit Usaha	21,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				0 Unit Usaha			0 Unit Usaha							
2	17	004			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	30,1 %		24,5 %	27 %	104,000,000						27 %	120,000,000	
2	17	004	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi sehat	Koperasi		Koperasi	130 Koperasi	104,000,000						130 Koperasi	120,000,000	
2	17	004	2.01	001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				160 Unit Usaha	72,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	160 Unit Usaha	85,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	004	2.01	002	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				48 Unit Usaha	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	48 Unit Usaha	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	005			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi Aktif yang memiliki Kompetensi	100 %		17,9 %	39 %	304,220,000						39 %	156,500,000	
2	17	005	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		%	31 %	304,220,000						31 %	156,500,000	
2	17	005	2.01	001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				35 Orang	304,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	35 Orang	156,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	006			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina	10,5 %		N/A %	1,5 %	13,500,000						1,5 %	155,000,000	
2	17	006	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan penataan manajemen	%		%	33 %	13,500,000						33 %	155,000,000	
2	17	006	2.01	001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				40 Orang	13,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	40 Orang	155,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Unit Usaha			0 Unit Usaha							
2	17	007			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan asset usahanya	1,5 %		1,3 %	1,2 %	304,440,000						1,2 %	1,200,250,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
2	17	007	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang dilakukan pemberdayaan	%		%	5.3 %	304,440,000					5.3 %	1,200,250,000		
2	17	007	2.01	001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	0 Dokumen	85,733,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota			550 unit usaha			550 unit usaha									
2	17	007	2.01	002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			350 Unit Usaha	39,015,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	350 Unit Usaha	600,125,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	17	007	2.01	003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			100 Unit Usaha	52,793,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	100 Unit Usaha	85,732,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	17	007	2.01	004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			75 Unit Usaha	183,632,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	75 Unit Usaha	342,928,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
									DAK Non Fisik-PKZUKM									
2	17	007	2.01	005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			100 Orang	29,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	100 Orang	85,732,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	17	008			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan omset usahanya	100 %	0,80 %	20,43 %	2,395,987,000					20,43 %	4,000,000,000		
2	17	008	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang dilakukan pengembangan	%	%	20.4 %	2,395,987,000					20.4 %	4,000,000,000		
2	17	008	2.01	001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			555 Unit Usaha	2,395,987,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	555 Unit Usaha	4,000,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
										4,498,224,000						8,022,691,280		
3	30	002			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase peningkatan jumlah toko modern (pusat perbelanjaan dan minimarket) yang memenuhi ketentuan per tahun	50,35 %	39,24 %	44,10 %	10,000,000					44,10 %	15,000,000		
3	30	002	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah movev toko modern (pusat perbelanjaan dan minimarket) yang dilaksanakan	kali	kali	5 kali	10,000,000					5 kali	15,000,000		
3	30	002	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			12 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Dokumen	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	003			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar dalam kondisi baik	60,87 %	47,83 %	54,35 %	3,963,772,500					54,35 %	7,342,691,280		
3	30	003	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar dalam kondisi baik	pasar	pasar	25 pasar	2,843,759,500					25 pasar	6,082,626,780		
3	30	003	2.01	001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			1 Unit	811,828,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Unit	4,000,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	003	2.01	002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			5 Unit	2,031,931,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	5 Unit	2,082,626,780	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	003	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pasar yang dibina sarana distribusi perdagangannya	pasar	pasar	46 pasar	1,120,013,000					46 pasar	1,260,064,500		
3	30	003	2.02	001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			6 Dokumen	1,027,514,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	6 Dokumen	1,027,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	3	30	003	2.02	002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			5 Dokumen	92,498,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	5 Dokumen	232,564,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	3	30	004			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	94,83 %	39 %	87,93 %	60,000,000							87,93 %	75,000,000	
3	3	30	004	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemantauan SPBU pertashop dan agen LPG	%	%	100 %	20,000,000							100 %	25,000,000	
3	3	30	004	2.01	003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			27 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	27 Laporan	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	3	30	004	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					20,000,000							25,000,000		
3	3	30	004	2.02	002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			82 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	82 Laporan	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	3	30	004	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan agen/distributor pupuk bersubsidi	%	%	100 %	20,000,000							100 %	25,000,000	
3	3	30	004	2.03	003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			50 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	50 Laporan	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	3	30	005			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase IKM/UMKM pelaku ekspor	2,67 %	N/A %	1,33 %	20,000,000							1,33 %	55,000,000	
	3	30	005	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan bagi IKM/UMKM potensi ekspor	kali	kali	1 kali	20,000,000							1 kali	55,000,000	
3	3	30	005	2.01	001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina			60 Pelaku Usaha	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	60 Pelaku Usaha	55,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	3	30	006			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	81,81 %	100 %	80,87 %	244,451,500							80,87 %	185,000,000	
3	3	30	006	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah lokasi yang akan ditera/tera ulang	kecamatan	kecamatan	20 kecamatan	244,451,500							20 kecamatan	185,000,000	
3	3	30	006	2.01	001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			6018 Unit	236,951,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	6018 Unit	173,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	3	30	006	2.01	002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			0 Orang	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	0 Orang	11,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			350 Orang				350 Orang							
3	3	30	007			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase produk unggulan yang diterima pasar internasional	60 %	60 %	60 %	200,000,000						60 %	350,000,000		
3	3	30	007	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pameran produk unggulan yang dilaksanakan	kali	kali	1 kali	200,000,000						1 kali	350,000,000		
3	3	30	007	2.01	001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			20 UMKM	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	20 UMKM	350,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					15,982,413,236						1,730,000,000			
3	31	002				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase pertumbuhan sentra industri sesuai RPIK	2,94 %	N/A %	3,23 %	15,940,013,236						3,23 %	1,595,000,000		
3	31	002	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah sentra industri sesuai RPIK	unit	unit	64 unit	15,940,013,236						64 unit	1,595,000,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	002	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			1 Dokumen	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	002	2.01	004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			1 Dokumen	745,013,236		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Dokumen	1,300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	002	2.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1 Dokumen	15,065,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Dokumen	45,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	003			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase success rate industri yang mendapat izin setelah difasilitasi	100 %		N/A %	100 %	0						100 %	55,000,000	
3	31	003	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan rekomendasi pemenuhan ijin usaha industri	dokumen		dokumen	12 dokumen	0						12 dokumen	55,000,000	
3	31	003	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS			12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	12 Dokumen	55,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	004			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri yang telah terintegrasi dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	53,19 %		21,28 %	37,23 %	42,400,000						37,23 %	80,000,000	
3	31	004	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah industri yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIinas)	unit		unit	35 unit	42,400,000						35 unit	80,000,000	
3	31	004	2.01	002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			1 Dokumen	42,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						7,381,960,345							8,379,500,000	
2	18	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	5,849,972,845						100 %	6,707,500,000	
2	18	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen		dokumen	4 dokumen	9,783,000						4 dokumen	20,000,000	
2	18	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	6,000,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	3 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	3,783,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Laporan	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasikeuangan perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	3,380,906,790						12 bulan	3,800,000,000	
2	18	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			28 Orang/bulan	3,380,906,790						0	28 Orang/bulan	3,800,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	laporan		laporan	1 laporan	100,978,409						1 laporan	122,000,000	
2	18	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			42 Paket	37,680,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	42 Paket	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			6 Orang	15,310,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	6 Orang	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
2	18	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	0		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	70 Orang	23,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	47,988,409		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	40 Orang	49,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	774,213,000						12 bulan	852,000,000	
2	18	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	48,707,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	2 Paket	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	300,619,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	8 Paket	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	103,026,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	4 Paket	130,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	150,000,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	3 Paket	162,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7,992,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	110,000,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	20 Laporan	130,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	38,844,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	3 Dokumen	160,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	15,025,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan		laporan	2 laporan	286,569,000						2 laporan	160,000,000	
2	18	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	33,815,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Unit	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 paket	136,579,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	4 paket	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				36 Unit	116,175,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	36 Unit	65,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	988,248,245						12 bulan	1,286,000,000	
2	18	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5,500,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	4 Laporan	6,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
2	18	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	472,508,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	4 Laporan	780,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Laporan	135,940,245		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	4 Laporan	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	374,300,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	4 Laporan	380,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	laporan	laporan	2 laporan	309,274,401						2 laporan	467,500,000	
2	18	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			3 Unit	54,150,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	3 Unit	53,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Unit	114,217,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	12 Unit	114,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			96 Unit	23,121,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	96 Unit	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	0		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	20 Unit	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.09	007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	20,850,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	4 Unit	36,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	50,485,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Unit	64,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			47 Unit	46,451,401		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	47 Unit	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	002			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	%	%	40 %	225,000,000						40 %	430,000,000	
2	18	002	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	dokumen	dokumen	2 dokumen	0						2 dokumen	190,000,000	
2	18	002	2.01	001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			1 Dokumen	0		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	002	2.01	002	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah			8 Kegiatan Usaha	0		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	8 Kegiatan Usaha	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	002	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	dokumen	dokumen	2 dokumen	225,000,000						2 dokumen	240,000,000	
2	18	002	2.02	001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pembuatan Peta Potensi Investasi	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	002	2.02	002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	125,000,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pembuatan Peta Potensi Investasi	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	003			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	%		%	20 %	150,000,000						20 %	430,000,000	
2	18	003	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi	kali		kali	2 kali	150,000,000						2 kali	430,000,000	
2	18	003	2.01	001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Dokumen	180,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	003	2.01	002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	2 Dokumen	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	004			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	poin		poin	83 poin	644,114,500						83 poin	570,000,000	
2	18	004	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	%		%	100 %	644,114,500						100 %	570,000,000	
2	18	004	2.01	001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1200 Pelaku Usaha	143,778,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1200 Pelaku Usaha	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	004	2.01	002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				500 Kegiatan Usaha	230,211,500		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	500 Kegiatan Usaha	220,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	004	2.01	003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				93 Orang	70,125,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	93 Orang	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	004	2.01	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				150 Kegiatan Usaha	200,000,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	150 Kegiatan Usaha	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	005			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	%		%	10 %	402,873,000						10 %	122,000,000	
2	18	005	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%		%	100 %	402,873,000						100 %	122,000,000	
2	18	005	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				60 Kegiatan Usaha.	54,000,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	60 Kegiatan Usaha.	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	005	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				150 Pelaku Usaha	254,873,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	150 Pelaku Usaha	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	005	2.01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				100 Kegiatan Usaha	94,000,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	100 Kegiatan Usaha	42,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	006			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	%		%	30 %	110,000,000						30 %	120,000,000	
2	18	006	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan	%		%	30 %	110,000,000						30 %	120,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
2	18	006	2.01	001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			1 Dokumen	110,000,000		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
2	19	002			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase capaian kapasitas kemudaan	30 %	5 %	25 %	409,999,000						25 %	0	
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yg mengikuti pelatihan wirausaha	%		40 %	309,999,000					40 %	0		
2	19	002	2.01															
2	19	002	2.01	001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			50 Orang	29,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	50 Orang	0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	002	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			50 Orang	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	50 Orang	0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	002	2.01	009	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan			74 Orang	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	74 Orang	0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	002	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yg aktif	%	%	86.67 %	100,000,000						86.67 %	0	
2	19	002	2.02	002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	003			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang olah raga	50 %	37,50 %	40 %	4,980,591,000						40 %	0	
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cabor yg tersedia sarana prasarananya	%	%	15 %	736,000,000						15 %	0	
2	19	003	2.01															
2	19	003	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			782 Unit	736,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	782 Unit	0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	003	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cabor mengikuti kejuaraan olahraga	%	%	31 %	500,000,000						31 %	0	
2	19	003	2.02	003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			200 Orang	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	200 Orang	0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	003	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan database olahraga	%	%	70 %	19,998,500						70 %	0	
2	19	003	2.03	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan			1 Dokumen	19,998,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	003	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase cabor yang aktif	%	%	87.5 %	3,025,000,000						87.5 %	0	
2	19	003	2.04	002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			4 Organisasi	3,025,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	4 Organisasi	0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	003	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase capaian pembinaan olahraga rekreasi	%	%	20 %	699,592,500						20 %	0	
2	19	003	2.05	001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			1 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah					
2	19	003	2.05	003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				2 Unit	599,592,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	2 Unit		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
2	19	004			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase capaian kapasitas kepramukaan	30 %		0 %	25 %	400,000,000						25 %	0		
2	19	004	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase anggota kwarcab pramuka yg aktif	%		%	70 %	400,000,000						70 %	0		
2	19	004	2.01	002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran	0	1 Organisasi		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														0	
3	26	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	7,476,928,935						100 %	0		
3	26	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen		dokumen	5 dokumen	15,000,000						5 dokumen	0		
3	26	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	3 Dokumen		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,391,662,580							0		
3	26	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	5,391,662,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		47 Orang/bulan		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	laporan		laporan	1 laporan	0						1 laporan	0		
3	26	001	2.05	002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Paket		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	laporan		laporan	7 laporan	244,998,000						7 laporan	0		
3	26	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Paket		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Paket		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Paket		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Paket		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	4 Dokumen		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	14,998,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	3 Dokumen		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	laporan		laporan	2 laporan	93,453,000						2 laporan	0		
3	26	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	4 Unit		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	36,029,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	25 Unit		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	57,424,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	6 Unit		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan		laporan	4 laporan	1,461,376,240						4 laporan	0		
3	26	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,994,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19,994,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,186,388,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	laporan		laporan	2 laporan	270,439,115						2 laporan	0		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	26	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	170,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	30 Unit		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	99,999,115		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	4 Unit		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	002			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	350.000 Orang		73.011 Orang	200.000 Orang	7,361,830,228						200.000 Orang		0	
3	26	002	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang terpelihara	buah		buah	5 buah	2,975,000,728						5 buah		0	
3	26	002	2.01	002	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Dokumen		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	002	2.01	003	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	2,900,000,728		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	5 Lokasi		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	002	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase capaian pembangunan sarana prasarana obyek wisata	%		%	62.5 %	4,140,610,300						62.5 %		0	
3	26	002	2.03	003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	0		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	5 Lokasi		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	002	2.03	004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	3,900,000,000		DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Unit		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	002	2.03	005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Dokumen	19,999,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	5 Dokumen		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	002	2.03	006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	220,610,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	2 Laporan		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	002	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha wisata yg dibina	%		%	60 %	246,219,200						60 %		0	
3	26	002	2.04	004	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				4 Laporan	246,219,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	4 Laporan		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	003			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pelaksanaan Promosi Pariwisata	60 %		N/A %	45 %	475,000,000						45 %		0	
3	26	003	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan promosi pariwisata	%		%	45 %	475,000,000						45 %		0	
3	26	003	2.01	001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	325,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	3 Dokumen		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	003	2.01	002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	2 Laporan		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	003	2.01	003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	3 Dokumen		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	003	2.01	004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Dokumen		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	004			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekraf yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	20 %		N/A %	9 %	645,000,000						9 %		0	
3	26	004	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase capaian pengembangan ekraf	%		%	50 %	645,000,000						50 %		0	
3	26	004	2.02	005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				5 Dokumen	645,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	5 Dokumen		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	004	2.02	007	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				4 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	4 Dokumen		0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
													Nasional	Daerah							
3	26	005		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku wisata yang bersertifikat	25 %		5 %	15 %	341,078,550					15 %	0					
3	26	005	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan pelaku wisata yang dilatih	%		%	50 %	341,078,550					50 %	0					
3	26	005	2.01	001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya			92 Orang	241,078,550		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	92 Orang	0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				
3	26	005	2.01	002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			25 Orang	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	25 Orang	0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				
3	26	005	2.01	006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			60 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	60 Orang	0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				
3	26	005	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase capaian kapasitas pelaku ekraf	%		50 %	0					50 %	0					
3	26	005	2.02	001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			200 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	200 Orang	0	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															6,217,252,152			0	
2	23	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawajian, dan keuangan Perangkat Daerah"	persen		persen	100 persen	4,858,004,152					100 persen	0					
2	23	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% pelayanan adminsitras keuangan	persen		persen	100 persen	3,486,005,202					100 persen	0					
2	23	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			30 orang/bulan	3,486,005,202	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	30 orang/bulan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan			
2	23	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pelayanan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	313,842,150					100 persen	0					
2	23	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 paket	14,614,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 paket	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan			
2	23	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			1 paket	84,120,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 paket	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan			
2	23	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			1 paket	30,975,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 paket	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan			
2	23	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			1 paket	15,085,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 paket	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan			
2	23	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			7 dokumen	24,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	7 dokumen	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan			
2	23	001	2.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paketbahan/material yang disediakan			1 paket	2,661,250	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 paket	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan			
2	23	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			60 Laporan	131,681,900	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	60 Laporan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan			
2	23	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD			2 dokumen	10,705,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2 dokumen	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan			
2	23	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pengadaan barang Milik daerah	persen	persen	100 persen	265,209,000					100 persen	0					
2	23	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			6 unit	127,179,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	6 unit	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan			
2	23	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			3 unit	138,030,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3 unit	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
					Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit				Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Teknologi	Perpustakaan	0 Unit		Perpustakaan
2	23	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% penyediaan jasa Penunjang perkantoran	persen	persen	100 persen	317,586,800						100 persen	0	
2	23	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			270 Laporan	2,970,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	270 Laporan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			3 Laporan	157,722,800	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3 Laporan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			20 Laporan	15,134,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	20 Laporan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			1 Laporan	141,760,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Laporan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	persen	100 persen	475,361,000						100 persen	0	
2	23	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			30 unit	300,268,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	30 unit	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara			5 unit	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	5 unit	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			20 unit	25,310,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	20 unit	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 unit	149,783,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 unit	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	002			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	orang	orang	60000 orang	1,359,248,000						60000 orang	0	
					Penambahan Koleksi Bahan Pustaka	eksemplar	eksemplar	3000 eksemplar								3000 eksemplar		
					Penambahan perpustakaan yang terakreditasi	unit	unit	3 unit								3 unit		
2	23	002	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang di kelola	unit	unit	4 unit	1,184,994,000						4 unit	0	
2	23	002	2.01	001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			1 layanan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 layanan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	002	2.01	002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			3 Perpustakaan	21,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	3 Perpustakaan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	002	2.01	006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1 Orang	63,231,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Orang	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	002	2.01	007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi			1 Layanan	793,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Layanan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	002	2.01	008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan			3000 Eksemplar	190,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	3000 Eksemplar	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	002	2.01	009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			8000 Eksemplar	106,893,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	8000 Eksemplar	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	002	2.01	010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			300 Dokumen	10,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	300 Dokumen	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
2	23	002	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pemberdayaan gemar membaca	orang		orang	260 orang	174,254,000					260 orang	0		
2	23	002	2.02	001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				2 Lokus	76,254,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	pengunjung perpustakaan perpustakaan umum , kelling, dan sekolah	2 Lokus	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	002	2.02	003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				18 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	pengunjung perpustakaan perpustakaan umum , kelling, dan sekolah	18 Orang	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	002	2.02	004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	98,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	pengunjung perpustakaan perpustakaan umum , kelling, dan sekolah	1 Perpustakaan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	002	2.02	005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				6 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	pengunjung perpustakaan perpustakaan umum , kelling, dan sekolah	6 Orang	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						394,000,000							0	
2	24	002			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	prosentase terkelola arsip dinamis dan statis	persen		persen	9 persen	244,000,000						9 persen	0	
2	24	002	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daftar Arsip Dinamis	dokumen		dokumen	4 dokumen	99,000,000						4 dokumen	0	
2	24	002	2.01	001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas Yang Diciptakan dan Digunakan				500 Berkas	17,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD	500 Berkas	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	002	2.01	002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Tata Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				10000 Berkas	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	SKPD	10000 Berkas	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	002	2.01	003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	46,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	SKPD	1 Laporan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	002	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis	dokumen		dokumen	4 dokumen	33,000,000						4 dokumen	0	
2	24	002	2.02	001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI				5 Arsip	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	SKPD	5 Arsip	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	002	2.02	002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5 Arsip	33,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	SKPD	5 Arsip	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	002	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis	dokumen		dokumen	4 dokumen	112,000,000						4 dokumen	0	
2	24	002	2.03	001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				20 Pengguna	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD	20 Pengguna	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	002	2.03	002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				48 Laporan	82,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	SKPD	48 Laporan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	003			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	prosentase arsip yang terselamatkan	persen		persen	50 persen	135,000,000						50 persen	0	
2	24	003	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan	SKPD		SKPD	1 SKPD	25,000,000						1 SKPD	0	
2	24	003	2.01	001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				500 Arsip	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	SKPD	500 Arsip	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	003	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip terselamatkan akibat bencana	dokumen		dokumen	20 dokumen	20,000,000						20 dokumen	0	
2	24	003	2.02	001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				50 Arsip	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	SKPD	50 Arsip	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	24	003	2.02	002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				50 Arsip	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	SKPD		50 Arsip	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	003	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung,dibubarkan	dokumen		dokumen	4 dokumen	90,000,000							4 dokumen	0	
2	24	003	2.03	001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				5 Daftar	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	SKPD		5 Daftar	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	003	2.03	002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				500 Arsip	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	SKPD		500 Arsip	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	004			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	% pengguna arsip yang terfasilitasi	persen		persen	100 persen	15,000,000							100 persen	0	
2	24	004	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan peminjaman arsip	dokumen		dokumen	6 dokumen	15,000,000							6 dokumen	0	
2	24	004	2.01	001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0		1 SOP	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	004	2.01	002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				50 Arsip	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0		50 Arsip	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
											11,075,983,471								11,164,740,000	
3	25	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,265,165,521								8,537,640,000	
3	25	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,078,904,976								7,083,860,000	
3	25	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	7,078,904,976		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			64 Orang/bulan	7,083,860,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						291,997,545								327,000,000	
3	25	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,998,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			1 Paket	15,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			1 Paket	50,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			1 Paket	20,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			1 Paket	45,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			20 Dokumen	3,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	158,999,545		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			1 Laporan	194,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						156,548,000								160,000,000	
3	25	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	4,499,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			1 Unit	5,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	152,049,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			15 Unit	155,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						500,195,000								400,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah				
3	25	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	124,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Laporan	125,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	39,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Laporan	40,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	335,245,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Laporan	235,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					237,520,000							566,780,000	
3	25	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			35 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		35 Unit	300,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			36 Unit	231,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		36 Unit	210,780,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			26 Unit	5,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		26 Unit	6,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Unit	50,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	003			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					125,000,000							293,000,000	
3	25	003	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					125,000,000							193,000,000	
3	25	003	2.01	001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia			16 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		16 Dokumen	25,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	003	2.01	002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia			30 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		30 Unit	25,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	003	2.01	003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			45 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		45 Unit	143,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	003	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					0							100,000,000	
3	25	003	2.02	001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			30 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		30 Orang	25,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	003	2.02	002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			2 Kelompok	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		2 Kelompok	75,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	004			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2,225,817,950							1,874,100,000	
3	25	004	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					1,537,499,950							1,160,000,000	
3	25	004	2.02	001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			11 Kelompok	950,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		11 Kelompok	950,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	004	2.02	002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan			5 Kelompok	587,499,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		5 Kelompok	185,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	004	2.02	004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			8 Kelompok	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		8 Kelompok	25,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	004	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					688,318,000							714,100,000	
3	25	004	2.04	002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Unit	512,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		1 Unit	514,100,000	Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	004	2.04	003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	60,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		1 Unit	60,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	004	2.04	004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	116,218,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		1 Dokumen	140,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	006			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						460,000,000							460,000,000	
3	25	006	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						25,000,000							25,000,000	
3	25	006	2.02	001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				4 Unit Usaha	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		4 Unit Usaha	25,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	006	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						435,000,000							435,000,000	
3	25	006	2.03	002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				6 Pelaku Usaha	435,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		6 Pelaku Usaha	435,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							14,566,058,045						2,195,000,000	
3	27	002			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						6,819,022,500							1,455,000,000	
3	27	002	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						6,480,000,000							1,110,000,000	
3	27	002	2.02	002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	1,680,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		3 Dokumen	150,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	002	2.02	003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	4,800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		4 Dokumen	960,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	002	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						72,840,000							75,000,000	
3	27	002	2.03	001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	72,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		12 Laporan	75,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	002	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						266,182,500							270,000,000	
3	27	002	2.05	005	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				96 Ton	266,182,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		96 Ton	270,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	003			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						7,479,999,895							450,000,000	
3	27	003	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian						180,000,000							200,000,000	
3	27	003	2.01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		1 Laporan	200,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	003	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian						7,299,999,895							250,000,000	
3	27	003	2.02	009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	7,299,999,895		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		1 Unit	250,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
													Nasional	Daerah						
3	27	004		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						224,999,800						250,000,000				
3	27	004	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						104,999,800						105,000,000				
3	27	004	2.01	001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			20 Laporan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		20 Laporan	75,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3	27	004	2.01	002	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			10 Laporan	29,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		10 Laporan	30,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3	27	004	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota					40,000,000						40,000,000				
3	27	004	2.02	001	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan			12 Laporan	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		12 Laporan	40,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3	27	004	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					35,000,000						60,000,000				
3	27	004	2.03	001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium			5 Laporan	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		5 Laporan	60,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3	27	004	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					45,000,000						45,000,000				
3	27	004	2.04	002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			5 Laporan	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		5 Laporan	45,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3	27	007			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					42,035,850						40,000,000				
3	27	007	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					42,035,850						40,000,000				
3	27	007	2.01	002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			1 Unit	42,035,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penanganan kemiskinan dan pengangguran		1 Unit	40,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan		
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												25,179,357,000			
2	09	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	23,156,129,908						100 %	22,159,357,000		
2	09	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	21,228,585,908						1 Laporan	20,220,247,000		
2	09	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	21,228,585,908	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14 Bulan	20,220,247,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	438,494,000						1 Laporan	449,060,000		
2	09	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	11,200,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Bulan	11,700,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	183,454,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Bulan	190,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor				12 Bulan	60,480,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Bulan	62,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 Bulan	33,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Bulan	35,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD				12 Bulan	360,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Bulan	360,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				12 Bulan	150,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Bulan	150,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	698,968,000						1 Laporan	710,050,000	
2	09	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	130,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Bulan	135,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja				12 Bulan	21,200,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Bulan	22,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	547,768,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Bulan	552,850,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	790,082,000						1 Laporan	780,000,000	
2	09	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional				12 Bulan	415,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Bulan	425,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Lainnya				3 Unit	375,082,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3 Unit	355,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase tingkat pemenuhan infrastruktur kemandirian pangan	%		%	7 %	1,900,000,000						7 %	2,000,000,000	
2	09	002	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa kelurahan yang telah dibangun infrastruktur kemandirian pangan	Desa		Desa	14 Desa	1,900,000,000						14 Desa	2,000,000,000	
2	09	002	2.01	001	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				2 Unit	1,900,000,000	Kab. Sragen, Masaran, Krikilan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Gapoktan	2 Unit	2,000,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	003			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penguatan Cadangan pangan masyarakat	Ton		Ton	6.8 Ton	742,000,000						6.8 Ton	740,000,000	
2	09	003	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah ketersediaan pangan utama	Ton		Ton	523276 Ton	392,000,000						523276 Ton	450,000,000	
2	09	003	2.01	001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				5 Laporan	22,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Gapoktan	5 Laporan	25,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	003	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				9 Laporan	60,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Gapoktan	9 Laporan	60,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	003	2.01	004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				8 Dokumen	60,000,000	Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Gapoktan	8 Dokumen	65,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
												Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan							
												Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan							
												Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan							
												Kab. Sragen, Gondang, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sragen, Karangmalang, Semua Kelurahan							
												Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan							
2	09	003	2.01	006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				4 Unit	250,000,000	Kab. Sragen, Kalijambe, Trobayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Gapoktan	4 Unit	300,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
										Kab. Sragen, Kedawung, Bendungan									
										Kab. Sragen, Sambirejo, Blimbing									
										Kab. Sragen, Karangmalang, Kedungwaduk									
2	09	003	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengisian stok pangan yang ada dilumbung	Ton		Ton	13 Ton	25,000,000					13 Ton	25,000,000		
2	09	003	2.02	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	15,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan	1 Laporan	15,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	003	2.02	002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	003	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai	Jumlah ketersediaan pangan utama	Ton		Ton	523276 Ton	325,000,000					523276 Ton	265,000,000		
					Persentase Kenaikan Angka Kecukupan Protein	%	%	0.53 %	0.53 %	0.53 %					0.53 %				
2	09	003	2.04	001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	003	2.04	002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				8 Laporan	310,000,000	Kab. Sragen, Kalijambe, Tegalombo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan	8 Laporan	250,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
												Kab. Sragen, Masaran, Gebang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
												Kab. Sragen, Kedawung, Pengkok							
												Kab. Sragen, Kedawung, Jengrik							
												Kab. Sragen, Karangmalang, Plosokerep							
												Kab. Sragen, Jenar, Kandangapi							
2	09	004			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan desa/kel rawan pangan	%		%	1.44 %	63,000,000					1.44 %	70,000,000		
2	09	004	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah desa yang akan dianalisis kerentanan dan ketahanan pangannya	Desa		Desa	208 Desa	23,000,000					208 Desa	25,000,000		
2	09	004	2.01	001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				5 Dokumen	23,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Desa	5 Dokumen	25,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	004	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	Desa		Desa	3 Desa	40,000,000					3 Desa	45,000,000		
2	09	004	2.02	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	40,000,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Jetis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Desa, Gapoktan	2 Laporan	45,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
												Kab. Sragen, Sambirejo, Dawung							
2	09	005			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan	%		%	13.30 %	205,000,000					13.30 %	210,000,000		
2	09	005	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Presentase produsen yang bersertifikat PSAT dan sertifikat prima 3	%		%	4.6 %	205,000,000					4.6 %	210,000,000		
2	09	005	2.01	001	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				2 Dokumen	20,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani, Gapoktan, Pelaku Usaha, Siswa sekolah dasar	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	005	2.01	002	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				3 Sertifikat	90,000,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Sukorojo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani, Gapoktan, Pelaku Usaha, Siswa sekolah dasar	3 Sertifikat	90,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
												Kab. Sragen, Sambirejo, Jambeyan							
												Kab. Sragen, Sambirejo, Jetis							
2	09	005	2.01	003	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	45,000,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Jetis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani, Gapoktan, Pelaku Usaha, Siswa sekolah dasar	2 Dokumen	45,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	005	2.01	005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			4 Dokumen	50,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani, Gapoktan, Pelaku Usaha, Siswa sekolah dasar	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											4,139,049,000		4,038,000,000	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Bawang merah	Ton		Ton	1681 Ton						1681 Ton			
						Produksi Cabe Besar	Ton		Ton	3034 Ton						3034 Ton			
						Produksi Jagung	Ton		Ton	132000 Ton						132000 Ton			
						Produksi Kedelai	Ton		Ton	705 Ton						705 Ton			
						Produksi Padi	Ton		Ton	659865 Ton						659865 Ton			
						Produksi Tebu	Ton		Ton	31882 Ton						31882 Ton			
3	27	002	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah alat dan mesin pertanian dalam kondisi baik	Unit		Unit	84759 Unit						84759 Unit	294,000,000		
3	27	002	2.01	001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			1 Laporan	131,566,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Tani, Gapoktan	1 Laporan	132,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	002	2.01	002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			2 Laporan	161,274,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani, Gapoktan	2 Laporan	162,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	002	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Hektar		Hektar	5 Hektar						5 Hektar	864,000,000		
3	27	002	2.02	001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian			1 VUB	150,000,000	Kab. Sragen, Kedawung, Karangpelem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani, Gapoktan	1 VUB	150,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	002	2.02	003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			3 Dokumen	680,055,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani, Gapoktan	3 Dokumen	714,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	003			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi Baik	%		%	53.3 %						53.3 %	1,980,000,000		
3	27	003	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah penambahan panjang irigasi tersier per tahun	Meter		Meter	636806 Meter						636806 Meter	580,000,000		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			6 Laporan	577,160,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani, Gapoktan	6 Laporan	580,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
3	27	003	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah panjang irigasi tersier dalam kondisi baik	M2		M2	339616 M2						339616 M2	1,400,000,000		
3	27	003	2.02	001	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					0				Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani		0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			3 Unit	300,000,000	Kab. Sragen, Kedawung, Wonokerso	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani	3 Unit	200,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
												Kab. Sragen, Gondang, Tunggul							
												Kab. Sragen, Karangmalang, Kroyo							
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			2 Unit	1,159,814,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani	2 Unit	1,200,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
												Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan							
3	27	005			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Luasan lahan pengendalian OPT	%		%	13 %						13 %	470,000,000		
3	27	005	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan lahan yang sudah terkendali OPT	Hektar		Hektar	491 Hektar						491 Hektar	470,000,000		
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			491 Ha	350,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani, Gapoktan	491 Ha	350,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			20 Laporan	120,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani, Gapoktan	20 Laporan	120,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	007			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas kelompok tani tahun berkenaan	%		%	20 %						20 %	430,000,000		
3	27	007	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Prosentase Kelembagan pertanian yang dilakukan pendampingan	%		%	20.49 %						20.49 %	430,000,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
3	27	007	2.01	001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			20 Unit	189,180,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kelompok Tani, Gapoktan, KTNA, PPL	20 Unit	60,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
3	27	007	2.01	002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			208 Unit	300,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	Kelompok Tani, Gapoktan, KTNA, PPL	208 Unit	350,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	007	2.01	003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			1 Unit	20,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kelompok Tani, Gapoktan, KTNA, PPL	1 Unit	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
4	01				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					54,381,030,483							60,587,949,099		
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34,491,499,633							39,752,909,785		
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20,166,702,900							24,261,974,119		
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 Orang/bulan	20,166,702,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Orang/bulan	24,261,974,119	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					140,000,000							425,900,000		
4	01	001	2.05	002	Pengadaan Pakaihan Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0 Paket	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Paket	350,900,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			100 Orang	50,000,000		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		100 Orang	75,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					4,168,639,000							4,514,642,238		
4	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket	29,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Paket	33,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket	366,046,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Paket	337,916,156	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0 Paket	75,947,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Paket	83,726,082	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0 Paket	2,600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Paket	2,860,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0 Paket	296,651,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Paket	330,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0 Dokumen	99,996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	770,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					192,306,000							211,750,000		
4	01	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Unit	0	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Unit	0	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	192,306,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Unit	211,750,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4,542,084,000							4,963,453,880		
4	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					58,674,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			64,541,400	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1,508,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			1,659,273,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					300,652,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			330,871,415	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0 Laporan	2,674,328,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	2,908,768,065	Sekretariat Daerah	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,257,354,000					1,928,934,700			
4	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0 Unit	1,447,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0 Unit	1,631,934,700	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0 Unit	66,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0 Unit	88,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	129,894,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0 Unit	143,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2,100,069,506						2,242,153,477		
4	01	001	2.11	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					780,069,506		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		790,153,477	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.11	004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			0 Orang/Bulan	1,320,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0 Orang/Bulan	1,452,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					110,432,000						121,692,120		
4	01	001	2.12	003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			0 Paket	110,432,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0 Paket	121,692,120	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.13		Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Nilai		Nilai	80 Nilai	764,999,650				80 Nilai	1,028,499,395		
					Persentase PD dengan nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja nilai "10"	persen		persen	35 persen	35 persen								
					Persentase UPP dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "B"	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen								
4	01	001	2.13	001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					380,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Perangkat Daerah	459,800,000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.13	002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			2 Dokumen	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Perangkat Daerah	2 Dokumen	163,349,395	Sekretariat Daerah
4	01	001	2.13	003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			5 Dokumen	99,999,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Perangkat Daerah	5 Dokumen	113,850,000	Sekretariat Daerah
4	01	001	2.13	004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			2 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Perangkat Daerah	2 Dokumen	110,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	001	2.13	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			5 Dokumen	99,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Perangkat Daerah	5 Dokumen	181,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	001	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					48,912,577						53,909,856		
4	01	001	2.14	001	Fasilitasi Keprotokolan					48,912,577		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		53,909,856	Sekretariat Daerah	
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	EKPPD	Nilai	Nilai	33.367 Nilai	16,103,259,100					33.367 Nilai	19,817,234,509		
4	01	002	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	dokumen	dokumen	1 dokumen	752,908,500					1 dokumen	677,600,193		
4	01	002	2.01	001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			1 Dokumen	116,799,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD	1 Dokumen	175,450,193	Sekretariat Daerah
4	01	002	2.01	002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			2 Dokumen	109,608,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	002	2.01	003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			3 Dokumen	526,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD	3 Dokumen	502,150,000	Sekretariat Daerah
4	01	002	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					15,030,173,550						18,837,134,316		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	01	002	2.02	001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	5,993,999,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Dokumen	7,720,259,316	Sekretariat Daerah
4	01	002	2.02	002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	4,814,831,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Dokumen	6,235,735,000	Sekretariat Daerah
4	01	002	2.02	003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	4,221,342,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Dokumen	4,881,140,000	Sekretariat Daerah
4	01	002	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						190,000,000								181,500,000	
4	01	002	2.03	001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				0 Dokumen	70,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	66,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	002	2.03	002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				0 Kasus	33,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Kasus	33,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	002	2.03	003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				0 Dokumen	86,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	82,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	002	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Peresentase kerjasama yang terealisasi	Persen		Persen	100 Persen	130,177,050							100 Persen	121,000,000	
4	01	002	2.04	001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	130,177,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Sragen	10 Dokumen	121,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						3,786,271,750								1,017,804,805	
4	01	003	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						2,665,000,000								181,500,000	
4	01	003	2.01	001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				0 Dokumen	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	77,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	003	2.01	002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				0 Laporan	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	38,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	003	2.01	003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				0 Dokumen	2,560,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	66,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	003	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						152,382,200								170,125,475	
4	01	003	2.02	001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				0 Dokumen	52,382,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	57,625,475	Sekretariat Daerah
4	01	003	2.02	002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				0 Laporan	74,999,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	82,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	003	2.02	003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				0 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	003	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						568,889,550								665,779,330	
4	01	003	2.03	001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				0 Dokumen	372,961,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	410,257,485	Sekretariat Daerah
4	01	003	2.03	002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						99,999,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	003	2.03	003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0 Orang	95,928,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Orang	105,521,845	Sekretariat Daerah
4	01	003	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						400,000,000								400,000	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup		1 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah					
4	01	003	2.04	001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						400,000,000		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		400,000	Sekretariat Daerah		
															Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup					
															Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	02				SEKRETARIAT DPRD														0	
4	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						37,303,464,891							0		
4	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						32,930,961,891							0		
4	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						32,930,961,891	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			0	Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						200,000,000							0		
4	02	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Orang		0 Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,046,848,000							0		
4	02	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	35,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket		0 Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	316,290,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Paket		0 Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	460,428,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Paket		0 Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	124,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Paket		0 Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						35,400,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			0	Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			0	Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						57,722,000							0		
4	02	001	2.07	005	Pengadaan Mebel						57,722,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			0	Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						718,872,000							0		
4	02	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			0	Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						353,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			0	Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						359,712,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			0	Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,253,844,000							0		
4	02	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						555,218,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			0	Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						698,626,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			0	Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						530,225,000							0		
4	02	001	2.15	002	Penyediaan Pakaiain Dinas dan Atribut DPRD						480,225,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			0	Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.15	003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				0 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Orang		0 Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.16		Layanan Administrasi DPRD						564,992,000							0		
4	02	001	2.16	003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				0 Laporan	305,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Laporan		0 Sekretariat DPRD	
4	02	001	2.16	004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						259,992,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat				0 Sekretariat DPRD	
4	02	002			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						20,421,506,000							0		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
4	02	002	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						770,000,000						0		
4	02	002	2.01	001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			0 Dokumen	420,000,000					0 Dokumen		0	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.01	003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan					170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.01	004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik					180,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup				0	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						2,685,964,000							0	
4	02	002	2.04	002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			0 Dokumen	1,600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Dokumen		0	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.04	003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan					425,964,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.04	004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli					480,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat				0	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.04	005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat				0	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						2,965,542,000							0	
4	02	002	2.05	003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			0 Dokumen	2,965,542,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen		0	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						14,000,000,000							0	
4	02	002	2.08	001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					14,000,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Sekretariat DPRD
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01			PERENCANAAN														
5	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	6,204,411,531					100 %	8,743,991,812		
5	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	Laporan	Laporan	9 Laporan	4,953,869,919					9 Laporan	6,870,007,388		
5	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			41 Orang/bulan	4,953,869,919	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang	41 Orang/bulan	6,870,007,388	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	Laporan	Laporan	1 Laporan	552,469,512					1 Laporan	1,149,680,062		
5	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	11,550,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang	1 Paket	11,550,220	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	186,554,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang	1 Paket	818,442,812	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	88,135,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang	1 Paket	80,187,480	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	31,729,450	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang	1 Paket	31,729,550	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			3 Dokumen	7,770,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang	3 Dokumen	7,770,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	226,731,062	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang	1 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan BMD penunjang urusan Pemda	Laporan	Laporan	Laporan	1 Laporan	67,632,000					1 Laporan	161,878,762		
5	01	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			2 Unit	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang	2 Unit	131,025,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang Disediakan			11 Unit	49,940,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang	11 Unit	13,550,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
5	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	17,692,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang	2 Unit	17,303,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemda	Laporan	Laporan	1 Laporan	294,943,600						1 Laporan	270,520,700	
5	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat perangkat daerah			1 Laporan	625,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang (kelancaran pelaksanaan tugas administrasi)	1 Laporan	907,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			1 Laporan	23,750,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang (kelancaran pelaksanaan tugas administrasi)	1 Laporan	24,025,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	69,078,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang (kelancaran pelaksanaan tugas administrasi)	1 Laporan	69,097,600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	201,490,600	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Bappeda Litbang (kelancaran pelaksanaan tugas administrasi)	1 Laporan	176,490,600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda	Laporan	Laporan	1 Laporan	335,496,500						1 Laporan	291,904,900	
5	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			24 Unit	225,402,500	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aset Bappeda Litbang (kendaraan dinas, mebel, gedung kantor)	24 Unit	181,802,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			24 Unit	10,100,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aset Bappeda Litbang (kendaraan dinas, mebel, gedung kantor)	24 Unit	10,102,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	99,994,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aset Bappeda Litbang (kendaraan dinas, mebel, gedung kantor)	1 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	002			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketercapaian mekanisme perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	%	%	100 %	824,179,000						100 %	750,000,000	
5	01	002	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keselarasan dokumen rencana perangkat daerah terhadap dokumen rencana pembangunan daerah	%	%	90 %	480,000,000						90 %	480,000,000	
5	01	002	2.01	001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Rancangan Teknokratik RPJPD)			1 Dokumen	130,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD se Kabupaten Sragen	1 Dokumen	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	002	2.01	005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1 Berita Acara	110,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD se Kabupaten Sragen	1 Berita Acara	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	002	2.01	006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan			648 Usulan	15,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD se Kabupaten Sragen	648 Usulan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	002	2.01	007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)			2 Dokumen	225,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD se Kabupaten Sragen	2 Dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)			0 Dokumen				0 Dokumen						
5	01	002	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan	%	%	100 %	239,994,000						100 %	165,000,000	
5	01	002	2.02	001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			2 Masukan	184,994,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD dan stake holder terkait	2 Masukan	135,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	002	2.02	003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			1 Buku	55,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD dan stake holder terkait	1 Buku	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	002	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah dengan capaian sangat tinggi (di atas 90 %)	%	%	80 %	104,185,000						80 %	105,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	002	2.03	003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	104,185,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD se Kabupaten Sragen	6 Laporan	105,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dan APBD	%		%	100 %	1,641,470,000							100 %	965,000,000	
					Persentase keselarasan program RKPD dan RPJMD	%		%	100 %					100 %					
5	01	003	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen rencana perangkat daerah terhadap dokumen rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	%	100 %	596,470,000							100 %	420,000,000	
5	01	003	2.01	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	126,470,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	2 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.01	002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pemerintahani				12 Perangkat Daerah	15,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	12 Perangkat Daerah	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.01	003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan				12 Perangkat Daerah	65,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	12 Perangkat Daerah	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.01	004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	80,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	1 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.01	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	180,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	2 Dokumen	180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.01	006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				6 Perangkat Daerah	60,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	6 Perangkat Daerah	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.01	007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				6 Perangkat Daerah	20,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	6 Perangkat Daerah	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.01	008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	50,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	1 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen rencana perangkat daerah terhadap dokumen rencana pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	%	90 %	405,000,000							90 %	205,000,000	
5	01	003	2.02	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	1 Dokumen	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.02	002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0 Laporan	3,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	0 Laporan	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
						Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				3 Perangkat Daerah			3 Perangkat Daerah						
5	01	003	2.02	003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0 Laporan	7,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	0 Laporan	7,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
						Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				3 Perangkat Daerah			3 Perangkat Daerah						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
5	01	003	2.02	004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			1 Laporan	200,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	1 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.02	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	1 Dokumen	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.02	006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA Bidang SDA			3 Perangkat Daerah	3,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	3 Perangkat Daerah	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.02	007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA			3 Perangkat Daerah	7,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	3 Perangkat Daerah	7,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.02	008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			1 Laporan	155,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	1 Laporan	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen rencana perangkat daerah terhadap dokumen rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	%	95 %	640,000,000						95 %	340,000,000	
5	01	003	2.03	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	80,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	1 Dokumen	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.03	002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur			3 Perangkat Daerah	3,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	3 Perangkat Daerah	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.03	003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur			3 Perangkat Daerah	7,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	3 Perangkat Daerah	7,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.03	004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			1 Laporan	350,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	1 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.03	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	120,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	1 Dokumen	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.03	006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang kewilayahan			20 Perangkat Daerah	60,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	20 Perangkat Daerah	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	003	2.03	007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang kewilayahan			20 Perangkat Daerah	20,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	SKPD downline	20 Perangkat Daerah	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						965,000,000						965,000,000	
5	05	002			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang ditindaklanjuti	%	%	62 %	965,000,000						62 %	965,000,000	
						Persentase riset dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	%	82 %							82 %		
5	05	002	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase riset dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang direkomendasikan	%	%	100 %	245,000,000						100 %	245,000,000	
5	05	002	2.01	002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			1 Laporan	155,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat dan stake holder terkait	1 Laporan	155,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah						
5	05	002	2.01	005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			1 Laporan	90,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat dan stake holder terkait	1 Laporan	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	05	002	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase riset dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang direkomendasikan	%	%	100 %	90,000,000						100 %	90,000,000			
5	05	002	2.02	009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja			1 Dokumen	90,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat Kabupaten Sragen	1 Dokumen	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	05	002	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase riset dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang direkomendasikan	%	%	100 %	180,000,000						100 %	180,000,000			
5	05	002	2.03	002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			1 Dokumen	90,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat Kabupaten Sragen	1 Dokumen	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	05	002	2.03	009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			1 Dokumen	90,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat Kabupaten Sragen	1 Dokumen	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	05	002	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang direkomendasikan	%	%	60 %	450,000,000						60 %	450,000,000			
5	05	002	2.04	001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			1 Dokumen	170,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat Kabupaten Sragen	1 Dokumen	170,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	05	002	2.04	003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			2 Laporan	180,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat Kabupaten Sragen	2 Laporan	180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	05	002	2.04	004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			2 Laporan	80,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat Kabupaten Sragen	2 Laporan	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	05	002	2.04	005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			1 Laporan	20,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat Kabupaten Sragen	1 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	02									428,883,789,666				433,032,306,430						
5	02	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat daerah dalam satu Tahun	%	%	100 %	38,885,618,802					100 %	39,287,693,000			
5	02	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	Dokumen	22 Dokumen	47,574,000				22 Dokumen	88,232,000			
5	02	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	9,699,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Dokumen	8,728,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	5,579,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Dokumen	8,978,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	5,705,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	5,984,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Dokumen	10,526,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	7,250,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	12 Laporan	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	7,357,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	4 Laporan	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
5	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	12 Laporan	15,512,834,156						12 Laporan	15,293,619,164	
5	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			85 Orang/Bulan	15,473,635,156	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADJ) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	85 Orang/Bulan	15,217,851,164	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			5 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	5 Dokumen	17,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5 Dokumen	19,447,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	5 Dokumen	22,325,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5 Laporan	7,582,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	5 Laporan	15,443,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2 Dokumen	12,170,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Dokumen	7,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			3 Laporan	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	3 Laporan	7,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Dokumen	7,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang dikerjakan	%	%	100 %	4,473,000						100 %	41,000,000	
5	02	001	2.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Dokumen	7,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Dokumen	8,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			1 Laporan	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Laporan	7,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	4,473,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Laporan	7,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Laporan	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Dokumen	7,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	%	%	100 %	20,000,000						100 %	195,600,000	
5	02	001	2.05	002	Pengadaan Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan			110 Paket	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja Terkait	110 Paket	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja Terkait	1 Dokumen	7,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			10 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja Terkait	10 Dokumen	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja Terkait	1 Dokumen	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			3 Orang	20,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja Terkait	3 Orang	11,600,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
5	02	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			89 Orang	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja Terkait	89 Orang	12,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	506,585,450					12 Bulan	478,238,700	
5	02	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	10,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Paket	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	180,221,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Paket	183,663,950	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Paket	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	76,350,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Paket	75,360,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	24,499,450	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Paket	24,499,750	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	2,160,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Dokumen	2,160,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 Paket	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Paket	2,475,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	68,275,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	12 Laporan	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8 Laporan	131,080,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	8 Laporan	131,080,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			800 Dokumen	14,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	800 Dokumen	14,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			7 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	7 Dokumen	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang dikerjakan sesuai ketentuan	%	%	100 %	456,786,000						100 %	690,000,000	
5	02	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	444,809,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Unit	600,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			20 Unit	11,977,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	20 Unit	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Unit	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	3 Unit	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Unit	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan/Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	21,804,537,106						12 Bulan	21,837,848,546	
5	02	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3400 Laporan	3,465,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	3400 Laporan	3,465,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	21,649,178,106	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	36 Laporan	21,649,178,106	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Laporan	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Laporan	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	151,894,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	12 Laporan	135,205,440	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang disusun sesuai ketentuan	%	%	100 %	532,829,090						100 %	663,154,590	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	02	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya				150 Unit	264,900,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	150 Unit	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	156,946,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	11 Unit	372,345,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit		0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	5 Unit	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit		0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	4 Unit	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	110,983,090	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	1 Unit	150,809,590	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi				5 Unit		0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	5 Unit	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit		0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	5 Unit	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase OPD yang telah menyusun laporan Keuangan sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)	%		%	85 %	382,809,084,264							85 %	386,370,162,000	
5	02	002	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun sesuai aturan	%		%	100 %	1,661,687,450							100 %	1,708,000,000	
5	02	002	2.01	001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokuman KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	96,801,400	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Dokumen	108,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	002	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokuman Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	64,084,400	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Dokumen	80,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	002	2.01	003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	65,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Dokumen	66,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	002	2.01	004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	46,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Dokumen	46,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	002	2.01	005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				47 Dokumen	7,500,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	47 Dokumen	7,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	002	2.01	006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				47 Dokumen	7,499,850	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	47 Dokumen	7,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	002	2.01	007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				3 Dokumen	819,966,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	3 Dokumen	840,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	002	2.01	008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				3 Dokumen	370,835,800	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	3 Dokumen	375,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	002	2.01	009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	55,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	2 Dokumen	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	002	2.01	010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				12 Dokumen	27,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	12 Dokumen	29,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	002	2.01	011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				47 Dokumen	27,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	47 Dokumen	29,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
5	02	002	2.01	013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			47 Orang	75,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	47 Orang	65,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang dikerjakan	%	%	100 %	977,686,500					100 %	1,226,750,000		
5	02	002	2.02	001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			40 Dokumen	82,500,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	40 Dokumen	90,750,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatn Daerah
5	02	002	2.02	002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			1 Laporan	5,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	1 Laporan	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.02	003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			10000 Dokumen	79,458,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	10000 Dokumen	114,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.02	004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah			2 Dokumen	10,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	2 Dokumen	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.02	005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			80 Dokumen	110,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	80 Dokumen	121,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.02	006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama, dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			10 Dokumen	15,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	10 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga			3000 Laporan	235,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	3000 Laporan	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.02	008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	12 Dokumen	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.02	009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			4 Dokumen	69,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	4 Dokumen	73,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.02	010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			47 Dokumen	103,292,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	47 Dokumen	278,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.02	011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			147 Orang	248,436,500	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	147 Orang	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatn Daerah
5	02	002	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	%	%	100 %	1,179,340,150					100 %	1,287,751,498		
5	02	002	2.03	001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			67 Laporan	79,046,150	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Dinas Terkait	67 Laporan	26,620,121	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.03	002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			50 Laporan	62,060,500	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Dinas Terkait	50 Laporan	68,275,460	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah				
5	02	002	2.03	003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran			64 Laporan	27,509,600	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Dinas Terkait	64 Laporan	30,260,890	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.03	004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			7 Laporan	88,669,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Dinas Terkait	7 Laporan	97,543,545	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			150 Dokumen	254,369,750	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Dinas Terkait	150 Dokumen	318,052,372	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.03	006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen hasil Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Dokumen	25,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Dinas Terkait	1 Dokumen	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.03	007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			2 Dokumen	25,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Dinas Terkait	2 Dokumen	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.03	008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Dokumen	75,072,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Dinas Terkait	1 Dokumen	82,582,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.03	009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			2 Dokumen	124,452,700	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Dinas Terkait	2 Dokumen	136,900,610	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.03	010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			1 Dokumen	102,024,950	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Dinas Terkait	1 Dokumen	112,227,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.03	011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota			130 Orang	227,532,500	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Dinas Terkait	130 Orang	250,288,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.03	012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang Dibina Kabupaten/Kota			30 Lembaga	60,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Dinas Terkait	30 Lembaga	65,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.03	013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota			1 Laporan	28,603,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Dinas Terkait	1 Laporan	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	%	%	100 %	378,891,200,864						100 %	381,822,660,502	
5	02	002	2.04	003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah			1 Laporan	8,600,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja Terkait	1 Laporan	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.04	008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			1 Laporan	360,291,200,864	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja Terkait	1 Laporan	334,797,660,502	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.04	009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1 Laporan	10,000,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja Terkait	1 Laporan	10,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.04	010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota			1 Laporan	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja Terkait	1 Laporan	37,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	%	100 %	99,169,300						100 %	325,000,000	
5	02	002	2.05	001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah			142 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	142 Dokumen	225,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	2.05	002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			12 Dokumen	49,169,500	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	12 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5	02	002	2.05	003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				70 Orang	49,999,800	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD	70 Orang	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	003			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah yang dengan baik	%		%	85 %	1,736,542,000							85 %	1,314,542,000	
5	02	003	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	%		%	100 %	1,736,542,000							100 %	1,314,542,000	
5	02	003	2.01	001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	194,093,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	1 Dokumen	199,093,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	003	2.01	003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	59,774,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	2 Dokumen	64,774,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	003	2.01	005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				4 Laporan	127,675,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	4 Laporan	102,675,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	003	2.01	006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				47 Laporan	165,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	47 Laporan	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	003	2.01	007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	536,788,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	2 Laporan	425,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	003	2.01	010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	116,212,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	2 Dokumen	173,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	003	2.01	011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				53 Laporan	130,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	53 Laporan	120,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	003	2.01	012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	57,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	2 Laporan	65,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	003	2.01	013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota				200 Orang	350,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD dan Unit Kerja OPD	200 Orang	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	004			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	%		%	3,29 %	5,452,544,600							3,29 %	6,059,909,430	
					Persentase Kenaikan Pendapatan Retribusi Daerah	%		%	9,69 %									9,69 %		
5	02	004	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dicapai	%		%	100 %	5,452,544,600							100 %	6,059,909,430	
5	02	004	2.01	001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	246,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	1 Dokumen	248,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	004	2.01	002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.				10 Dokumen	80,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	10 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	004	2.01	003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	59,999,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	1 Laporan	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	004	2.01	004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	668,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	1 Unit	670,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	004	2.01	005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	212,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	1 Laporan	214,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	004	2.01	006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	88,939,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	1 Laporan	91,450,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	004	2.01	007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang Disesuaikan NJOP nya				125 Obyek Pajak	39,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	125 Obyek Pajak	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	004	2.01	008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1,244,999,850	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	1 Dokumen	1,248,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
5	02	004	2.01	009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20 Layanan	269,934,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	20 Layanan	279,209,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
5	02	004	2.01	010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1,460,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	1 Dokumen	1,465,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
5	02	004	2.01	011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				20 Dokumen	399,245,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	20 Dokumen	409,249,930	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
5	02	004	2.01	012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				50 Dokumen	9,810,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	50 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
5	02	004	2.01	013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	624,617,750	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	4 Dokumen	1,270,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
5	02	004	2.01	014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				14 Laporan	50,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Sragen Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	OPD, Unit kerja terkait, Kelompok Usaha Masyarakat	14 Laporan	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	03				KEPEGAWAIAN																	14,261,717,644	
5	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	8,347,748,201						100 %	9,789,557,694					
5	03	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	9,999,750						3 Dokumen	10,000,000					
5	03	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4,999,750	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	5,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	5,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan	%		%	100 %	6,910,392,470						100 %	7,171,415,064					
5	03	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang	6,910,392,470	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	55 Orang	7,171,415,064	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	50,000,000						100 %	50,000,000					
5	03	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1300 Paket	50,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1300 Paket	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	328,080,181						100 %	641,649,620					
5	03	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				213 Paket	29,995,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	213 Paket	79,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	166,783,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	15 Paket	344,649,620	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1572 Paket	32,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1572 Paket	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17389 Paket	38,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	17389 Paket	43,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	61,302,181	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	140,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	0						100 %	924,000,000					
5	03	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 unit	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	3 unit	924,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	543,839,000						100 %	434,612,010					
5	03	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	990,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	2,994,750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	222,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	193,600,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	60,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	68,807,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	260,849,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	169,210,260	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
5	03	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	505,436,800						100 %	557,881,000	
5	03	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			28 Unit	220,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	28 Unit	296,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	285,436,800	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	4 Unit	261,881,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Jabatan Yang Terisi Sesuai Dengan Standar Kompetensi Jabatan	%	%	100 %	2,317,626,974						100 %	4,472,159,950	
					Persentase Kasus Indisipliner Pegawai Yang Terselesaikan	%	%	100 %								100 %		
5	03	002	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengelolaan data adminitrasi kepegawaian	%	%	100 %	744,088,474						100 %	1,647,928,000	
5	03	002	2.01	002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.01	003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			2 Dokumen	50,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.01	004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			2 Laporan	518,192,474	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	1,300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.01	006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN			12 Laporan	71,968,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.01	008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			2 Lembaga	32,928,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	2 Lembaga	32,928,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.01	010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian"			12 Laporan	16,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.01	011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			32 Dokumen	15,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	32 Dokumen	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.01	012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			72 Laporan	20,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	72 Laporan	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	%	%	100 %	985,575,500						100 %	968,691,000	
5	03	002	2.02	001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			12 Dokumen	99,335,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen	71,595,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.02	002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			4 Pengelolaan	106,874,500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	4 Pengelolaan	137,390,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.02	003	Pengelolaan Promosi ASN	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN"			12 Dokumen	779,366,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen	759,706,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase jabatan Fungsional dibanding keseluruhan pegawai	%	%	53 %	372,963,000						53 %	1,640,540,950	
5	03	002	2.03	001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya			414 Orang	82,213,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	414 Orang	400,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.03	002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	189,118,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.03	003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	123,349,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.03	004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	"Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan"			220 Orang	12,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	220 Orang	12,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
														Nasional	Daerah										
5	03	002	2.03	005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat"				3 Dokumen	160,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	686,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	03	002	2.03	006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				14 Orang	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	14 Orang	42,857,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	03	002	2.03	007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				4 Laporan	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	4 Laporan	10,216,950	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	03	002	2.03	008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	"Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional"				109 Orang	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	109 Orang	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	03	002	2.03	009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	03	002	2.03	012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	22,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	03	002	2.03	013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				20 Orang	42,750,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	20 Orang	42,750,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	03	002	2.03	014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				622 Orang	76,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	622 Orang	76,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	03	002	2.03	015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional"				1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	10,750,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	03	002	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	%			%	100 %	215,000,000						100 %	215,000,000							
					Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin	%			%	1.5 %						1.5 %									
5	03	002	2.04	003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	80,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	80,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	03	002	2.04	004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				50 Orang	13,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	50 Orang	13,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	03	002	2.04	008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				12 Laporan	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	03	002	2.04	009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				20 Dokumen	60,000,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	20 Dokumen	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	03	002	2.04	010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	17,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	17,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													991,092,950							
5	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi	%		%	58 %	700,166,000						58 %	991,092,950							
5	04	002	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase jumlah pejabat struktural yang bersertifikat kompetensi	%		%	33 %	700,166,000						33 %	991,092,950							
5	04	002	2.02	007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi,jabatan fungsional kepemimpinan dan prajabatan				1 Laporan	133,374,650	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	424,301,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5	04	002	2.02	008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan,fasilitasi,pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi,pengelolaan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerja sama				2 Dokumen	566,791,350	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	566,791,350	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																				
6	01				INSPEKTORAT DAERAH																10,136,129,646			9,683,801,000	
6	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7,909,336,146							7,223,801,000							
6	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0							70,000,000							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
6	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	10,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	10,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	10,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	10,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	10,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	10,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	10,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,051,906,146							6,278,701,000	
6	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	7,051,906,146		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		47 Orang/bulan	6,258,701,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Dokumen	10,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	10,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0							10,000,000	
6	01	001	2.03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Dokumen	10,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						91,500,000							130,000,000	
6	01	001	2.05	002	Pengadaan Pakailan Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Paket	0	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	91,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Orang	120,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Orang	10,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						139,930,000							187,800,000	
6	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Paket	1,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Paket	10,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	6,530,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Paket	20,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	13,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Paket	20,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Paket	15,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	2,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	2,800,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	6,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	10,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	90,000,000	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
6	01	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	17,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	19,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						82,269,000							65,000,000	
6	01	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Unit	0	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	18,153,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Unit	15,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	64,116,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Unit	50,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						228,623,000							187,300,000	
6	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	2,300,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	84,832,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	85,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	75,156,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	45,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	66,655,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	55,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						315,108,000							295,000,000	
6	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	274,944,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Unit	235,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	40,164,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Unit	60,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						1,389,876,500							1,700,000,000	
6	01	002	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1,194,569,500							1,465,000,000	
6	01	002	2.01	001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				63 Laporan	317,388,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		63 Laporan	400,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	002	2.01	002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				0 Laporan	69,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	230,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	002	2.01	003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				0 Laporan	107,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	180,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	002	2.01	004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				0 Laporan	343,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	180,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	002	2.01	005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				0 Laporan	101,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	200,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	002	2.01	007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				0 Dokumen	255,981,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Dokumen	275,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	002	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						195,307,000							235,000,000	
6	01	002	2.02	001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				0 Laporan	30,307,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	35,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	002	2.02	002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				0 Laporan	165,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	200,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	003			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						836,917,000							760,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
6	01	003	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan						179,050,000						90,000,000		
6	01	003	2.01	001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				0 Rekomendasi	179,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Rekomendasi	90,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	003	2.02	Pendampingan dan Asistensi						657,867,000						670,000,000		
6	01	003	2.02	001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				0 perangkat daerah	170,033,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 perangkat daerah	235,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	003	2.02	002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				0 perangkat daerah	180,214,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 perangkat daerah	100,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	003	2.02	003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				0 Kegiatan	302,813,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Kegiatan	290,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	003	2.02	004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1 perangkat daerah	4,807,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 perangkat daerah	45,000,000	Inspektorat Daerah
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01			KECAMATAN						2,874,310,593							2,693,083,675	
7	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,705,597,493							2,655,494,175	
7	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,418,412,293							2,468,174,215	
7	01	001	2.02	001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2,418,412,293		Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		23 Orang/bulan	2,468,174,215	Kecamatan Kalijambe
7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						83,793,200							54,473,960	
7	01	001	2.06	001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4,356,000		Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		3,352,000	Kecamatan Kalijambe	
7	01	001	2.06	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						51,752,000		Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		23,166,960	Kecamatan Kalijambe	
7	01	001	2.06	004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13,470,000		Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		17,820,000	Kecamatan Kalijambe	
7	01	001	2.06	005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	4,200,000		Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		2 paket	4,096,000	Kecamatan Kalijambe
7	01	001	2.06	006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1,800,000	Kecamatan Kalijambe	
7	01	001	2.06	009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	5,000,000		Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan	0	Kecamatan Kalijambe
7	01	001	2.06	010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				24 dokumen	3,215,200		Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		24 dokumen	4,239,000	Kecamatan Kalijambe
7	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47,086,000							7,865,000	
7	01	001	2.07	005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				63 unit	38,240,000		Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		63 unit	0	Kecamatan Kalijambe
7	01	001	2.07	006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0		Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		6 Unit	0	Kecamatan Kalijambe
7	01	001	2.07	010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	8,846,000		Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		7 Unit	7,865,000	Kecamatan Kalijambe
7	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						84,716,000							81,861,000	
7	01	001	2.08	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	1,479,000		Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 laporan	1,474,000	Kecamatan Kalijambe
7	01	001	2.08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 laporan	21,960,000		Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		4 laporan	21,960,000	Kecamatan Kalijambe
7	01	001	2.08	003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 laporan	9,286,000		Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		4 laporan	11,430,000	Kecamatan Kalijambe

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	51,991,000	Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 laporan	46,997,000	Kecamatan Kalijambe
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						71,590,000							43,120,000	
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						45,640,000	Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			43,120,000	Kecamatan Kalijambe
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	25,950,000	Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Unit		Kecamatan Kalijambe
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						5,023,000							0	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						5,023,000							0	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 laporan	5,023,000	Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 laporan		Kecamatan Kalijambe
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						5,342,500							0	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						5,342,500							0	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 bulan	5,342,500	Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan		Kecamatan Kalijambe
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						21,427,000							22,000,000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						21,427,000							22,000,000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 bulan	21,427,000	Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan	22,000,000	Kecamatan Kalijambe
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			0	Kecamatan Kalijambe
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						124,080,250							0	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						124,080,250							0	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				200 orang	99,999,750	Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		200 orang		Kecamatan Kalijambe
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						15,093,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi				Kecamatan Kalijambe
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 orang	8,987,500	Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		80 orang		Kecamatan Kalijambe
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						12,840,350							15,589,500	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12,840,350							15,589,500	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			14 dokumen	6,882,350	Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		14 dokumen	9,922,000	Kecamatan Kalijambe
7	01	006	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			14 laporan	5,958,000	Kab. Sragen, Kalijambe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		14 laporan	5,667,500	Kecamatan Kalijambe
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN													
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,910,381,611							355,000,000	
7	01	001			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,476,783,611							5,000,000	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,195,381,232							0	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2,195,381,232		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			0	Kecamatan Plupuh
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					74,804,000							5,000,000	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Bulan	4,494,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Bulan	0	Kecamatan Plupuh
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Bulan	32,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Bulan	0	Kecamatan Plupuh
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Bulan	20,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Bulan	0	Kecamatan Plupuh
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Bulan	9,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Bulan	0	Kecamatan Plupuh
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			0	Kecamatan Plupuh
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	5,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Plupuh
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					45,792,000							0	
7	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	45,792,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Unit	0	Kecamatan Plupuh
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					92,577,750							0	
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4,382,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			0	Kecamatan Plupuh
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					25,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			0	Kecamatan Plupuh
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15,996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			0	Kecamatan Plupuh
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					46,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			0	Kecamatan Plupuh
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					68,228,629							0	
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8 Unit	54,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		8 Unit	0	Kecamatan Plupuh
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	13,698,629		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Unit	0	Kecamatan Plupuh
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					19,969,900							0	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					19,969,900							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						7,329,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi			0 Kecamatan Plupuh	
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Bulan	12,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Bulan	0 Kecamatan Plupuh	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						25,659,950							0	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						25,659,950							0	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 kali	25,659,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 kali	0 Kecamatan Plupuh	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						378,663,150							350,000,000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						378,663,150							350,000,000	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				325 Orang	349,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		325 Orang	350,000,000 Kecamatan Plupuh	
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						18,932,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0 Kecamatan Plupuh	
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	9,731,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Orang	0 Kecamatan Plupuh	
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						9,305,000							0	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						9,305,000							0	
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 desa	9,305,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		3 desa	0 Kecamatan Plupuh	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						3,243,875,555							23,500,000	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercukupi	%		%	100 %	2,564,173,605						100 %	23,500,000	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi Administrasi keuangan yang tercukupi	%		%	100 %	2,267,082,880						100 %	0	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang	2,267,082,880	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		21 Orang	0 Kecamatan Masaran	
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasi Administrasi umum yang tercukupi	%		%	100 %	119,985,850						100 %	23,500,000	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,735,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Paket	0 Kecamatan Masaran	
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	71,354,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Paket	0 Kecamatan Masaran	
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	22,300,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Paket	23,500,000 Kecamatan Masaran	
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	14,396,850	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Paket	0 Kecamatan Masaran	
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Paket	4,200,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Paket	0 Kecamatan Masaran	
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	5,000,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		6 Laporan	0 Kecamatan Masaran	
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
7	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	28,620,000					100 %	0		
7	01	001	2.07	010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	28,620,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	1 Unit	0	Kecamatan Masaran	
7	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	76,859,000					12 Bulan	0		
7	01	001	2.08	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,600,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	12 Laporan	0	Kecamatan Masaran	
7	01	001	2.08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30,000,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	12 Laporan	0	Kecamatan Masaran	
7	01	001	2.08	003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4,623,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	12 Laporan	0	Kecamatan Masaran	
7	01	001	2.08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	39,636,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	12 Laporan	0	Kecamatan Masaran	
7	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	71,625,875					100 %	0		
7	01	001	2.09	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	41,104,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	18 Unit	0 Kecamatan Masaran	
7	01	001	2.09	005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	2,638,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	6 Unit	0 Kecamatan Masaran	
7	01	001	2.09	009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	27,883,875	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	2 Unit	0 Kecamatan Masaran	
7	01	002		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan	%		%	100 %	122,265,000					100 %	0		
7	01	002	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan Kecamatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	6,461,000					1 Dokumen	0		
7	01	002	2.01	001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	6,461,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan	0 Kecamatan Masaran	
7	01	002	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase pemeliharaan jalan raya sukowati wilayah Masaran	%		%	100 %	115,804,000					100 %	0		
7	01	002	2.04	003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	115,804,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Laporan	0 Kecamatan Masaran	
7	01	003		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif	%		%	100 %	12,290,000					100 %	0		
7	01	003	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif	%		%	100 %	12,290,000					100 %	0		
7	01	003	2.01	003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas				12 Laporan	12,290,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Laporan	0 Kecamatan Masaran	
7	01	004		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	%		%	100 %	25,617,000					100 %	0		
7	01	004	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	%		%	100 %	25,617,000					100 %	0		
7	01	004	2.01	001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,617,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan	0 Kecamatan Masaran	
7	01	005		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasikan Dengan Baik	%		%	100 %	517,960,000					100 %	0		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
													Nasional	Daerah							
7	01	005	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	517,960,000						100 %	0				
7	01	005	2.01		002	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				280 Orang	500,000,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		280 Orang		0 Kecamatan Masaran		
7	01	005	2.01		003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			375 Orang	17,960,000	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		375 Orang		0 Kecamatan Masaran		
7	01	006		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa Tepat Waktu	%		%	100 %	1,569,950						100 %	0				
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa Tepat Waktu	%		%	100 %	1,569,950						100 %	0			
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 Dokumen	1,569,950	Kab. Sragen, Masaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen		0 Kecamatan Masaran			
7				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01			KECAMATAN																	
7	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Urusan Pemerintahan Daerah yang tercukupi	%		%	100 %	2,571,840,723							100 %	0			
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan yang tercukupi	%		%	100 %	2,298,897,873							100 %	0		
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			22 Orang/bulan	2,298,897,873	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		22 Orang/bulan		0 Kecamatan Kedawung		
7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang tercukupi	%		%	100 %	94,771,600							100 %	0			
7	01	001	2.06		001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	4,610,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		12 Paket		0 Kecamatan Kedawung	
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			29 Paket	50,080,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		29 Paket		0 Kecamatan Kedawung		
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			540 Paket	22,950,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		540 Paket		0 Kecamatan Kedawung		
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	10,031,600	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		12 Paket		0 Kecamatan Kedawung		
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			240 Dokumen	2,100,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		240 Dokumen		0 Kecamatan Kedawung		
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	5,000,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Laporan		0 Kecamatan Kedawung			
7	01	001	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%											%	100 %	27,000,000
7	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	27,000,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		1 Unit		0 Kecamatan Kedawung		
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	%		%	100 %	88,377,000						100 %	0			
7	01	001	2.08			001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	5,213,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		12 Laporan		0 Kecamatan Kedawung
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	19,850,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		12 Laporan		0 Kecamatan Kedawung		
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	8,600,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		12 Laporan		0 Kecamatan Kedawung		
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	54,714,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		12 Laporan		0 Kecamatan Kedawung		
7	01	001	2.09	001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	62,794,250						100 %	0			
7	01	001	2.09			002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			13 Unit	39,800,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		13 Unit		0 Kecamatan Kedawung
7	01	001	2.09			005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			73 Unit	7,995,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0		73 Unit		0 Kecamatan Kedawung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	5,000,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	6 Unit	0	Kecamatan Kedawung
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9,999,250	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Unit	0	Kecamatan Kedawung
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan yang sesuai standart pelayanan	%		%	100 %	12,140,000						100 %	0	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi	%		%	100 %	12,140,000						100 %	0	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	12,140,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Laporan	0	Kecamatan Kedawung
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Lembaga desa yang aktif	%		%	100 %	13,775,000						100 %	0	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Lembaga desa yang aktif	%		%	100 %	13,775,000						100 %	0	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	13,775,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan	0	Kecamatan Kedawung
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penanganan laporan kejadian	%		%	100 %	26,738,000						100 %	0	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	prosentase cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	26,738,000						100 %	0	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	26,738,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	12 Laporan	0	Kecamatan Kedawung
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						274,817,000							0	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						274,817,000							0	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				320 Orang	250,000,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		320 Orang	0	Kecamatan Kedawung
													Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat						
														Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat					
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				572 Orang	24,817,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		572 Orang	0	Kecamatan Kedawung
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB Desa tepat waktu	%		%	100 %	19,987,000						100 %	0	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	prosentase desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	%		%	100 %	19,987,000						100 %	0	
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 Dokumen	5,880,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	10 Dokumen	0	Kecamatan Kedawung
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				10 Dokumen	10,987,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	10 Dokumen	0	Kecamatan Kedawung
7	01	006	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10 Laporan	3,120,000	Kab. Sragen, Kedawung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	10 Laporan	0	Kecamatan Kedawung
7	01																		
7	01				KECAMATAN						2,865,118,783							53,045,000	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,728,318,783							0	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,437,727,783							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan				12 bulan	2,437,727,783	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan	0	Kecamatan Sambirejo	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan					23 Orang/bulan						
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						63,925,000							0		
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor				12 bulan	9,995,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan		0	Kecamatan Sambirejo
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis dan peralatan kantor				12 bulan	15,000,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan		0	Kecamatan Sambirejo
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan				12 bulan	21,930,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan		0	Kecamatan Sambirejo
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	14,000,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan		0	Kecamatan Sambirejo
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD				12 bulan	3,000,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan		0	Kecamatan Sambirejo
7	01	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 bulan	0	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan		0	Kecamatan Sambirejo
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						62,801,000							0		
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah penyediaan mebel yang mendukung operasional kerja				4 Unit	17,331,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		4 Unit		0	Kecamatan Sambirejo
7	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lain yang diadakan				5 unit	45,470,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		5 unit	0	Kecamatan Sambirejo	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit				0 Unit							
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						94,383,000							0		
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik				12 bulan	24,000,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan		0	Kecamatan Sambirejo
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa perbaikan peralatankerja				12 bulan	10,386,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan		0	Kecamatan Sambirejo
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor				12 bulan	59,997,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan		0	Kecamatan Sambirejo
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69,482,000							0		
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 bulan	45,520,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan		0	Kecamatan Sambirejo
7	01	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel						4,963,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi				0	Kecamatan Sambirejo
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara				1 Gedung	18,999,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Gedung		0	Kecamatan Sambirejo
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						10,999,000							19,307,000		
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10,999,000							19,307,000		
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang Kecamatan				1 Kegiatan	10,999,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Kegiatan	11,500,000		Kecamatan Sambirejo
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		4 Dokumen	7,807,000		Kecamatan Sambirejo
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						6,000,000							7,000,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
7	01	003	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						6,000,000						7,000,000		
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	6,000,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Laporan	7,000,000	Kecamatan Sambirejo
7	01	004		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%		%	100 %	25,130,000						100 %	26,738,000	
					Prosentase penanganan laporan kejadian	%		%	100 %							100 %		
7	01	004	7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penanganan laporan kejadian	%		%	100 %	25,130,000						100 %	26,738,000	
7	01	004	7.03	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	25,130,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Laporan	26,738,000	Kecamatan Sambirejo
7	01	005		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						82,860,000							0	
7	01	005	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						82,860,000							0	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi , Kordinasi dan Pembinaan Warbang dan Hannas			1 Kegiatan	50,000,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Kegiatan	0	Kecamatan Sambirejo
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			1 Kegiatan 0 Orang	32,860,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Kegiatan 0 Orang	0	Kecamatan Sambirejo
7	01	006		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB-Desa tepat waktu	%		%	100 %	11,811,000						100 %	0	
7	01	006	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB-Desa tepat waktu	%		%	100 %	11,811,000						100 %	0	
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			1 Dokumen	6,695,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Sambirejo
7	01	006	2.01	008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			3 Dokumen	5,116,000	Kab. Sragen, Sambirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	3 Dokumen	0	Kecamatan Sambirejo
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN					2,220,320,397							2,547,434,910	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,005,893,397							2,437,913,910	
7	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,733,796,697							2,178,137,210	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 Orang/bulan	1,733,796,697		Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Orang/bulan	2,178,137,210	Kecamatan Gondang
7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						75,654,700							75,734,700	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket	1,499,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Paket	1,500,000	Kecamatan Gondang
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					40,740,000		Pajak Daerah		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			40,765,000	Kecamatan Gondang
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0 Paket	22,416,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Paket	22,470,000	Kecamatan Gondang
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0 Paket	5,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Paket	5,999,700	Kecamatan Gondang
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Laporan	5,000,000	Kecamatan Gondang
														Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat				
														Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat				
														Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
7	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15,000,000						15,000,000		
7	01	001	2.07	005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Unit	15,000,000	Kecamatan Gondang
7	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70,590,000						65,760,000		
7	01	001	2.08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Laporan	21,000,000	Kecamatan Gondang
7	01	001	2.08	003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	2,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Laporan	2,800,000	Kecamatan Gondang
7	01	001	2.08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	46,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Laporan	41,960,000	Kecamatan Gondang
7	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						110,852,000						103,282,000		
7	01	001	2.09	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	44,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Unit	36,900,000	Kecamatan Gondang
7	01	001	2.09	009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66382000				100 %	66,382,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		100 %	66,382,000	Kecamatan Gondang
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit					0 Unit					
7	01	002		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						15,965,000						16,000,000		
7	01	002	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						3,965,000						4,000,000		
7	01	002	2.01	001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	3,965,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Laporan	4,000,000	Kecamatan Gondang
7	01	002	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						12,000,000						12,000,000		
7	01	002	2.02	003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Laporan	12,000,000	Kecamatan Gondang
7	01	004		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						21,132,000						21,132,000		
7	01	004	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						21,132,000						21,132,000		
7	01	004	2.01	001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	21,132,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Laporan	21,132,000	Kecamatan Gondang
7	01	005		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						171,987,000						66,989,000		
7	01	005	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						171,987,000						66,989,000		
7	01	005	2.01	002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang	45,000,000	Kecamatan Gondang
7	01	005	2.01	003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0 Orang	21,987,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Orang	21,989,000	Kecamatan Gondang
7	01	006		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						5,343,000						5,400,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
													Nasional	Daerah					
7	01	006	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5,343,000						5,400,000			
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			0 Dokumen	5,343,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Dokumen	5,400,000	Kecamatan Gondang	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01									3,001,854,946								2,604,922,000	
7	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase urusan Pemerintahan Daerah yang Tercukupi	17 orang		17 orang	100 % 17 orang	2,253,195,946						100 % 17 orang	2,217,680,000		
7	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	17 orang	2,019,968,946						17 orang	1,911,880,000		
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			17 Orang/bulan	2,019,968,946	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	17 Orang/bulan	1,911,880,000	Kecamatan Sumbingmacan	
7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum yang tercukupi	bulan		bulan	12 bulan	48,740,000						12 bulan	66,350,000		
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	2,825,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	4 Paket	2,825,000	Kecamatan Sumbingmacan	
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"			4 paket	18,954,000	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	4 paket	24,914,000	Kecamatan Sumbingmacan	
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"			4 paket	12,342,000	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	4 paket	12,342,000	Kecamatan Sumbingmacan	
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"			4 paket	3,999,000	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	4 paket	3,999,000	Kecamatan Sumbingmacan	
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4 dokumen	1,620,000	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	4 dokumen	1,620,000	Kecamatan Sumbingmacan	
													Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi						
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"			1 laporan	6,470,000	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	1 laporan	5,650,000	Kecamatan Sumbingmacan	
7	01	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD"			20 Dokumen	2,530,000	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	20 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Sumbingmacan	
7	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit tersedianya peralatan dan mesin	unit		unit	4 unit	72,899,000						4 unit	121,000,000		
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	57,499,000	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	4 Unit	90,000,000	Kecamatan Sumbingmacan	
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"			2 Unit	15,400,000	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	2 Unit	31,000,000	Kecamatan Sumbingmacan	
7	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terbayarnya administrasi kantor	bulan		bulan	12 bulan	38,055,000						12 bulan	46,250,000		
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 laporan	26,402,000	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	4 laporan	26,402,000	Kecamatan Sumbingmacan	
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"			4 laporan	7,428,000	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	4 laporan	7,418,000	Kecamatan Sumbingmacan	
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"			4 laporan	4,225,000	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	4 laporan	12,430,000	Kecamatan Sumbingmacan	
7	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	bulan		bulan	12 bulan	73,533,000						12 bulan	72,200,000		
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan"			10 Unit	44,113,000	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	10 Unit	37,100,000	Kecamatan Sumbingmacan	
7	01	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			10 Unit	2,965,000	Kab. Sragen, Sumbingmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sumbingmacan	10 Unit	2,965,000	Kecamatan Sumbingmacan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"				1 Unit	26,455,000	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sambungmacan	1 Unit	32,135,000	Kecamatan Sambungmacan
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan	1 dokumen		1 dokumen	100 % 1 dokumen	161,999,000						100 % 1 dokumen	262,200,000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang di koordinasikan	dokumen		dokumen	1 dokumen	6,000,000						1 dokumen	28,000,000	
7	01			001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait				1 laporan	6,000,000	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sambungmacan	1 laporan	28,000,000	Kecamatan Sambungmacan
										Kab. Sragen, Sambungmacan, Bedoro		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup						
													Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi						
													Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup						
													Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup						
													Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup						
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						12,505,000						14,120,000		
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan"				1 laporan	12,505,000	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 laporan	14,120,000	Kecamatan Sambungmacan
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat	laporan		laporan	12 laporan	143,494,000						12 laporan	220,080,000	
7	01			003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 laporan	143,494,000	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sambungmacan	1 laporan	220,080,000	Kecamatan Sambungmacan
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi						
													Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat						
													Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat						
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penanganan laporan kejadian	12 laporan		12 laporan	100 % 12 laporan	26,738,000						100 % 12 laporan	26,738,000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penanganan laporan kegiatan perbulan	laporan		laporan	12 laporan	26,738,000						12 laporan	26,738,000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan"				1 laporan	26,738,000	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sambungmacan	1 laporan	26,738,000	Kecamatan Sambungmacan
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	kegiatan		kegiatan	100 % kegiatan	544,387,000						100 % kegiatan	78,317,000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bulan kegiatan pelaksanaan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	544,387,000						3 kegiatan	78,317,000	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	"Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional"				60 orang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sambungmacan	60 orang	20,000,000	Kecamatan Sambungmacan
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	"Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa"				50 orang	29,711,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sambungmacan	50 orang	38,317,000	Kecamatan Sambungmacan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	"Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional"			60 orang	14,676,000	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sambungmacan	60 orang	20,000,000	Kecamatan Sambungmacan	
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB-Desa tepat waktu	9 Desa	9 Desa	100 % 9 Desa	15,535,000						100 % 9 Desa	19,987,000		
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terisi Perangkat Desa dan Kepala Desa	Desa	Desa	9 Desa	15,535,000						9 Desa	19,987,000		
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 Dokumen	8,652,000	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sambungmacan	1 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Sambungmacan	
7	01	006	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	"Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya"			1 laporan	6,883,000	Kab. Sragen, Sambungmacan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Sambungmacan	1 laporan	10,987,000	Kecamatan Sambungmacan	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN													2,976,788,000	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%	%	100 %	2,158,677,506						100 %	2,563,757,000		
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang tercukupi	%	%	100 %	1,903,310,906						100 %	2,338,175,000		
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			22 Orang	1,903,310,906		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan Ngrampal	22 Orang	2,338,175,000	Kecamatan Ngrampal	
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasi Administrasi umum yang tercukupi	%	%	100 %	65,803,000						100 %	91,600,000		
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebutuhan Kantor Kecamatan Ngrampal	12 Paket	7,500,000	Kecamatan Ngrampal	
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	20,488,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebutuhan Kantor Kecamatan Ngrampal	12 Paket	40,000,000	Kecamatan Ngrampal	
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	22,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebutuhan Kantor Kecamatan Ngrampal	12 Paket	25,000,000	Kecamatan Ngrampal	
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	8,265,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebutuhan Kantor Kecamatan Ngrampal	12 Paket	9,000,000	Kecamatan Ngrampal	
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	2,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebutuhan Kantor Kecamatan Ngrampal	12 Dokumen	2,100,000	Kecamatan Ngrampal	
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	5,000,000	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebutuhan Kantor Kecamatan Ngrampal	12 Laporan	4,000,000	Kecamatan Ngrampal	
7	01	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			12 Dokumen	0	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebutuhan Kantor Kecamatan Ngrampal	12 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Ngrampal	
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	49,946,600						100 %	0		
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	0	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebutuhan Barang Kantor Kec. Ngrampal	3 Unit	0	Kecamatan Ngrampal	
													Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi						
7	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5 Unit	49,946,600	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebutuhan Barang Kantor Kec. Ngrampal	5 Unit	0	Kecamatan Ngrampal	
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	%	%	100 %	87,507,000						100 %	89,982,000		
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	2,090,000	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebutuhan Jasa Penunjang Kantor Kecamatan Ngrampal	12 Laporan	2,100,000	Kecamatan Ngrampal	
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	19,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebutuhan Jasa Penunjang Kantor Kecamatan Ngrampal	12 Laporan	19,800,000	Kecamatan Ngrampal	
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	8,000,000	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebutuhan Jasa Penunjang Kantor Kecamatan Ngrampal	12 Laporan	8,000,000	Kecamatan Ngrampal	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	57,617,000	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebutuhan Jasa Penunjang Kantor Kecamatan Ngrampal	12 Laporan	60,082,000	Kecamatan Ngrampal
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	52,110,000						100 %	44,000,000	
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	45,640,000	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Perawatan Sarana Prasarana Kantor Kecamatan Ngrampal	10 Unit	34,000,000	Kecamatan Ngrampal
7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	6,470,000	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Perawatan Sarana Prasarana Kantor Kecamatan Ngrampal	12 Unit	10,000,000	Kecamatan Ngrampal
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya			1 Unit	0	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Perawatan Sarana Prasarana Kantor Kecamatan Ngrampal	1 Unit	0	Kecamatan Ngrampal
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	%	%	100 %	137,999,000						100 %	259,334,000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Koordinasi	dokumen	dokumen	1 dokumen	9,000,000						1 dokumen	9,000,000	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 Laporan	9,000,000	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Koordinasi Kegiatan Kantor Kecamatan Ngrampal	1 Laporan	9,000,000	Kecamatan Ngrampal
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah bulan pelaksanaan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	bulan	bulan	12 bulan	128,999,000						12 bulan	250,334,000	
7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	128,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kebersihan Jalan Raya	12 Laporan	250,334,000	Kecamatan Ngrampal
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif	%	%	100 %	16,755,000						100 %	17,380,000	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah PKK Desa	Desa	Desa	8 Desa	16,755,000						8 Desa	17,380,000	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	16,755,000	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	8 Desa	12 Laporan	17,380,000	Kecamatan Ngrampal
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	%	%	100 %	23,636,500						100 %	0	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	%	%	100 %	23,636,500						100 %	0	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	23,636,500	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Wilayah Kec. Ngrampal 8 Desa	12 Laporan	0	Kecamatan Ngrampal
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			4 Laporan	0	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Wilayah Kec. Ngrampal 8 Desa	4 Laporan	0	Kecamatan Ngrampal
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	%	%	100 %	90,364,000						100 %	128,317,000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase cakupan pembinaan pemerintahan umum	%	%	100 %	90,364,000						100 %	128,317,000	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			180 Orang	50,000,000	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Urusan Pemerintahan Wil. Kecamatan Ngrampal	180 Orang	50,000,000	Kecamatan Ngrampal
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			100 Orang	40,364,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Urusan Pemerintahan Wil. Kecamatan Ngrampal	100 Orang	78,317,000	Kecamatan Ngrampal

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
7	01	006							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB Desa tepat waktu	%			%	100 %		10,239,000					100 %	8,000,000
7	01	006	2.01						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan	%		%	100 %	10,239,000						100 %	8,000,000	
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			8 Dokumen	4,401,000	Kab. Sragen, Ngrampal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	8 Desa Wil Kec. Ngrampal	8 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Ngrampal						
7	01	006	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			8 Laporan	5,838,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	8 Desa Wil Kec. Ngrampal	8 Laporan	0	Kecamatan Ngrampal						
7	UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	01									5,207,499,396								5,074,783,000					
7	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,280,297,496						4,112,011,000							
7	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0						0							
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	0			Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		3 Dokumen	0	Kecamatan Karangmalang						
7	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,496,573,673						3,520,011,000							
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	3,496,573,673		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan	3,520,011,000	Kecamatan Karangmalang						
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			31 Orang/bulan				31 Orang/bulan											
7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						209,355,000						222,000,000							
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 bulan	8,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan	8,500,000	Kecamatan Karangmalang						
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket				0 Paket											
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			12 bulan	117,138,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan	129,770,000	Kecamatan Karangmalang						
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket				1 Paket											
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	55,063,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Paket	55,068,000	Kecamatan Karangmalang						
					Jumlah Rapat-rapat			74 Rapat				74 Rapat											
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			15 Unit	11,662,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		15 Unit	11,662,000	Kecamatan Karangmalang						
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket				1 Paket											
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	16,992,000		PENDAPATAN TRANSFER	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		0 Laporan	17,000,000	Kecamatan Karangmalang						
														Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi									
7	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						349,977,000						300,000,000							
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 bulan	3,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan	3,350,000	Kecamatan Karangmalang						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan				1 Laporan											
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Bulan	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Bulan	85,000,000	Kecamatan Karangmalang						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan				1 Laporan											
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Bulan	80,972,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Bulan	30,994,000	Kecamatan Karangmalang						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan				1 Laporan											
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Bulan	180,655,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 Bulan	180,656,000	Kecamatan Karangmalang						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan				1 Laporan											
7	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						224,391,823						70,000,000							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		13 Unit	0	Kecamatan Karangmalang
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	67,396,000		PENDAPATAN TRANSFER		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		13 Unit	63,000,000	Kecamatan Karangmalang
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	156,995,823		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		3 Unit	7,000,000	Kecamatan Karangmalang
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						761,906,550							796,000,000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						127,706,550							116,000,000	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	8,054,000		PENDAPATAN TRANSFER		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Laporan	8,054,300	Kecamatan Karangmalang
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	119,652,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Dokumen	107,945,700	Kecamatan Karangmalang
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						634,200,000							630,000,000	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	634,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Laporan	630,000,000	Kecamatan Karangmalang
7	01	002	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						0							50,000,000	
7	01	002	2.03	002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Unit	50,000,000	Kecamatan Karangmalang
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						23,395,950							23,396,000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						23,395,950							23,396,000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan pelaksanaan patroli keamanan lingkungan				12 bulan	23,395,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 bulan	23,396,000	Kecamatan Karangmalang
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan			1 Laporan						
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						119,412,500							120,889,000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						119,412,500							120,889,000	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sragen, Karangmalang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Karangmalang
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				300 Orang			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300 Orang			
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				338 Orang	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		338 Orang	65,089,000	Kecamatan Karangmalang
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				45 Orang	9,412,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		45 Orang	5,800,000	Kecamatan Karangmalang

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
7	01	006		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						22,486,900						22,487,000		
7	01	006	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						22,486,900						22,487,000		
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 Dokumen	19,986,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Dokumen	19,987,000	Kecamatan Karangmalang
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			1 Dokumen	2,500,000		PENDAPATAN TRANSFER		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Karangmalang
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01			KECAMATAN						1,740,710,250							1,315,710,400	
7	01	003		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1,740,710,250							1,315,710,400	
7	01	003	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1,740,710,250							1,315,710,400	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	1,640,710,400	Kab. Sragen, Karangmalang, Plumbungan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Unit	1,215,710,400	Kecamatan Karangmalang
					Jumlah sarana dan prasarana fisik yang dibangun			20 lokasi								20 lokasi		
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat			5 kegiatan	99,999,850	Kab. Sragen, Karangmalang, Plumbungan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		5 kegiatan	100,000,000	Kecamatan Karangmalang
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas								1 Pokmas / Ormas		
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01			KECAMATAN						1,923,422,000							1,189,469,600	
7	01	003		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1,923,422,000							1,189,469,600	
7	01	003	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1,923,422,000							1,189,469,600	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana fisik yang dibangun			20 lokasi	1,746,152,400	Kab. Sragen, Karangmalang, Kroyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		20 lokasi	1,164,469,600	Kecamatan Karangmalang
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit								1 Unit		
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat			5 kegiatan	177,269,600	Kab. Sragen, Karangmalang, Kroyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		5 kegiatan	25,000,000	Kecamatan Karangmalang
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas								1 Pokmas / Ormas		
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01			KECAMATAN						21,736,141,232							22,067,498,999	
7	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	9,002,004,773						100 %	8,639,797,999	
7	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Yang Tercukupi	%		%	100 %	6,834,189,764						100 %	7,210,962,716	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			65 Orang	6,834,189,764	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Kecamatan dan 6 Kelurahan		65 Orang	7,210,962,716	Kecamatan Sragen
7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Tercukupi	%		%	100 %	722,282,792						100 %	402,943,301	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan			7 Paket	26,667,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan dan Desa/Kelurahan		7 Paket	39,908,302	Kecamatan Sragen
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan			7 Paket	455,583,900	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan dan Desa/Kelurahan		7 Paket	197,323,865	Kecamatan Sragen
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan			7 Paket	209,100,000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan dan Desa/Kelurahan		7 Paket	77,141,435	Kecamatan Sragen
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0 Paket								0 Paket		
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan			4 Paket	19,912,250				Kecamatan dan Desa/Kelurahan		4 Paket	73,895,528	Kecamatan Sragen
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	11,019,642	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan dan Desa/Kelurahan		2 Laporan	14,674,171	Kecamatan Sragen
7	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	96,619,000						100 %	135,288,000	
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan			7 Paket	96,619,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Barang Milik Daerah		7 Paket	135,288,000	Kecamatan Sragen
7	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%		%	100 %	662,244,757						100 %	615,460,000	
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan			12 Laporan	209,728,757		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Kantor		12 Laporan	209,535,281	Kecamatan Sragen

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			4 Laporan	50,970,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Operasional Kantor	4 Laporan	37,978,270	Kecamatan Sragen
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan			12 Laporan	401,546,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Operasional Kantor	12 Laporan	367,946,449	Kecamatan Sragen
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100 %	686,668,460						100 %	275,143,982	
						Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %									
																100 %		
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			27 Unit	198,760,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	27 Unit	174,372,896	Kecamatan Sragen
7	01	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara			26 Unit	5,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	26 Unit	5,977,983	Kecamatan Sragen
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang di pelihara / Di rehabilitasi			7 Unit	481,928,460	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	7 Unit	94,793,103	Kecamatan Sragen
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standart Pelayanan	%	%	100 %	2,233,003,950						100 %	3,563,426,000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	244,311,050						100 %	652,823,550	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			7 Laporan	32,526,050	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan, UPTD Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan	7 Laporan	30,468,995	Kecamatan Sragen
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2 Laporan	211,785,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan, UPTD Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan	2 Laporan	622,354,555	Kecamatan Sragen
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan	%	%	100 %	1,629,600,000						100 %	2,095,200,000	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	1,629,600,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Ketua RT/RW se Kecamatan Sragen	12 Laporan	2,095,200,000	Kecamatan Sragen
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	%	%	100 %	359,092,900						100 %	815,402,450	
7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang di Limpahkan			4 Laporan	359,092,900	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PKK, THL Persampahan, Peserta Lelang Tanah Bondo Desa	4 Laporan	815,402,450	Kecamatan Sragen
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa/Kelurahan Yang Aktif	%		100 %	9,865,496,009						100 %	9,727,717,000	
						Persentase Sarana Prasarana Kelurahan Kondisi Baik	%	100 %	100 %									
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa/Kelurahan Yang Aktif	%		100 %	9,865,496,009						100 %	9,727,717,000	
						Persentase Sarana Prasarana Kelurahan Kondisi Baik	%	100 %	100 %									
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun			122 Paket	8,835,647,894	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana Prasarana Kelurahan dan Kelompok Masyarakat	122 Paket	9,177,717,000	Kecamatan Sragen
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			29 Pokmas	1,029,848,115	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana Prasarana Kelurahan dan Kelompok Masyarakat	29 Pokmas	550,000,000	Kecamatan Sragen
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	%	100 %	21,240,000						100 %	27,801,000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	%	100 %	21,240,000						100 %	27,801,000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	21,240,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Muspika Kecamatan Sragen	12 Laporan	27,801,000	Kecamatan Sragen

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
7	01	005		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasikan Dengan Baik	%		%	100 %	598,959,000						100 %	82,645,000	
7	01	005	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	598,959,000						100 %	82,645,000	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan			1 tahun	575,000,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Dan Desa/Kelurahan	1 tahun	70,584,890	Kecamatan Sragen	
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			50 orang	23,959,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Dan Desa/Kelurahan	50 orang	12,060,110	Kecamatan Sragen	
7	01	006		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	%		%	100 %	15,437,500						100 %	26,112,000	
7	01	006	2.01	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memperoleh Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan	%		%	100 %	15,437,500						100 %	26,112,000	
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			2 Dokumen	8,762,500	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Desa/Kelurahan se Kecamatan Sragen	2 Dokumen	19,112,000	Kecamatan Sragen	
7	01	006	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			3 Laporan	6,675,000	Kab. Sragen, Sragen, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Desa/Kelurahan se Kecamatan Sragen	3 Laporan	7,000,000	Kecamatan Sragen	
7	01			UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01			KECAMATAN														
7	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian pelayanan umum kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	2,860,477,038						100 %	0	
7	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang tercukupi	%		%	100 %	2,603,502,538						100 %	0	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Orang/bulan	2,603,502,538	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	25 Orang/bulan	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi umum yang tercukupi	%		%	100 %	91,708,000						100 %	0	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	5,000,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Paket	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	49,263,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Paket	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			15 Paket	0	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	15 Paket	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	19,050,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Paket	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	6,310,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Paket	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	1,980,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Dokumen	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5 Laporan	5,000,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	5 Laporan	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	5,105,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	20,389,500						100 %	0	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 unit	10,995,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	5 unit	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3,244,500	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	2 Unit	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6,150,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Unit	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	%		%	100 %	70,961,000						100 %	0	
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,532,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Laporan	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26,000,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Laporan	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8,312,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Laporan	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	34,117,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Laporan	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%		%	100 %	73,916,000						100 %	0	
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	51,020,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	11 Unit	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22,896,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Unit	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan	%		%	100 %	139,948,000						100 %	0	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	4,000,000						1 Dokumen	0	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 laporan	4,000,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 laporan	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Urusan		Urusan	1 Urusan	135,948,000						1 Urusan	0	
7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	135,948,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Laporan	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif	%		%	100 %	7,076,000						100 %	0	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase desa yang dibina	%		%	100 %	7,076,000						100 %	0	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	7,076,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Laporan	0	Kecamatan Sidoharjo
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penanganan laporan kejadian	%		%	100 %	21,173,000						100 %	0	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan prosentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	21,173,000						100 %	0	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 laporan	21,173,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 laporan	0 Kecamatan Sidoharjo	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	%	%	100 %	319,479,000					100 %	0		
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan prosentase pembinaan pemerintahan umum	%	%	100 %	319,479,000					100 %	0		
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhimeka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			100 Orang	12,500,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	100 Orang	0 Kecamatan Sidoharjo	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			50 Orang	275,000,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	50 Orang	0 Kecamatan Sidoharjo	
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			100 Orang	25,995,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	100 Orang	0 Kecamatan Sidoharjo	
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			60 Orang	5,984,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	60 Orang	0 Kecamatan Sidoharjo	
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKP Desa APB Desa tepat waktu	%	%	100 %	15,335,000					100 %	0		
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang memperoleh fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan	%	%	100 %	15,335,000					100 %	0		
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			12 Dokumen	3,580,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Dokumen	0 Kecamatan Sidoharjo	
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			1 Dokumen	7,700,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Dokumen	0 Kecamatan Sidoharjo	
7	01	006	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			12 laporan	4,055,000	Kab. Sragen, Sidoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 laporan	0 Kecamatan Sidoharjo	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN												0	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												0	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												0	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			20 Orang/bulan	2,155,557,687	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	20 Orang/bulan	0 Kecamatan Tanon		
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	3,096,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	12 Paket	0 Kecamatan Tanon		
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	45,503,000	Kab. Sragen, Tanon, Semus Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	12 Paket	0 Kecamatan Tanon		
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	5,145,000	Kab. Sragen, Tanon, Semus Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	1 Paket	0 Kecamatan Tanon		
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	13,600,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	12 Paket	0 Kecamatan Tanon		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8,998,500	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Paket		0	Kecamatan Tanon
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,680,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Dokumen		0	Kecamatan Tanon
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5,000,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Laporan		0	Kecamatan Tanon
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50,581,000								0	
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				37 unit	30,122,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		37 unit		0	Kecamatan Tanon
7	01	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	20,459,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		3 Unit		0	Kecamatan Tanon
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						71,385,000								0	
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21,000,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Laporan		0	Kecamatan Tanon
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	6,940,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Laporan		0	Kecamatan Tanon
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	43,445,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Laporan		0	Kecamatan Tanon
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70,877,455								0	
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	43,880,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		8 Unit		0	Kecamatan Tanon
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	26,997,455	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Unit		0	Kecamatan Tanon
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						5,311,000								0	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						5,311,000								0	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	5,311,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Laporan		0	Kecamatan Tanon
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						5,308,000								0	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						5,308,000								0	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	5,308,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Laporan		0	Kecamatan Tanon
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						22,566,000								0	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						22,566,000								0	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	22,566,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 Laporan		0	Kecamatan Tanon
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						237,202,150								0	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah			
7	01	005	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						237,202,150						0	
7	01	005	2.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				500 Orang	200,000,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	500 Orang	0 Kecamatan Tanon	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat			
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			240 Orang	30,463,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	240 Orang	0 Kecamatan Tanon	
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			60 Orang	6,739,150	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	60 Orang	0 Kecamatan Tanon	
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					7,434,850						0	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					7,434,850						0	
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			16 Dokumen	2,435,000	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	16 Dokumen	0 Kecamatan Tanon	
7	01	006	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			16 Laporan	4,999,850	Kab. Sragen, Tanon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	16 Laporan	0 Kecamatan Tanon	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN					14,321,471,040						11,870,939,813	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	%	%	100 %	5,595,592,240					100 %	5,256,862,963	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	%	%	100 %	4,351,329,278					100 %	4,610,852,000	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			39 Orang/bulan	4,351,329,278		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	39 Orang/bulan	4,610,852,000 Kecamatan Gemolong
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang tercukupi	%	%	100 %	536,265,200					100 %	336,485,000	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	20,767,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Paket	7,252,000 Kecamatan Gemolong
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	292,304,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Paket	151,446,000 Kecamatan Gemolong
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	151,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Paket	71,250,000 Kecamatan Gemolong
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	61,544,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Paket	99,367,000 Kecamatan Gemolong
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Dokumen	1,620,000 Kecamatan Gemolong
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	8,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Laporan	5,550,000 Kecamatan Gemolong
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	80,529,800					100 %	34,425,000	
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			34 Unit	80,529,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	34 Unit	34,425,000 Kecamatan Gemolong
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	%	%	100 %	293,007,503					100 %	205,396,000	
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Laporan	6,600,000 Kecamatan Gemolong
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	57,184,503		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Laporan	41,968,000 Kecamatan Gemolong
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	24,069,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Laporan	12,651,000 Kecamatan Gemolong
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	204,554,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	0	1 Laporan	144,177,000 Kecamatan Gemolong

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
7	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	334,460,459					100 %	69,704,963		
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			18 Unit	53,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	18 Unit	39,381,500	Kecamatan Gemolong
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	280,840,459		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	4 Unit	30,323,463	Kecamatan Gemolong
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	545,564,800					100 %	326,548,050	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Jumlah kegiatan koordinasi	%		%	100 %	475,047,000					100 %	275,543,050	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 Laporan	4,869,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Laporan	4,869,050	Kecamatan Gemolong
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	470,177,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Dokumen	270,674,000	Kecamatan Gemolong
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%		%	100 %	70,517,800					100 %	51,005,000	
7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1 Laporan	70,517,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Laporan	51,005,000	Kecamatan Gemolong
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif	%		%	100 %	8,004,312,000					100 %	6,132,916,000	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa	%		%	100 %	575,400,000					100 %	575,400,000	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	575,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Laporan	575,400,000	Kecamatan Gemolong
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	7,428,912,000					100 %	5,557,516,000	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			180 Unit	7,283,655,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	180 Unit	5,357,516,000	Kecamatan Gemolong
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4 Pokmas / Ormas	145,257,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Pokmas / Ormas	200,000,000	Kecamatan Gemolong
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	%		%	100 %	27,698,000					100 %	27,801,000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	27,698,000					100 %	27,801,000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	27,698,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Laporan	27,801,000	Kecamatan Gemolong
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	%		%	100 %	128,317,000					100 %	106,824,800	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penugasan kepala daerah	%		%	100 %	128,317,000					100 %	106,824,800	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			50 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	50 Orang	55,000,000	Kecamatan Gemolong
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			70 Orang	68,317,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	70 Orang	50,000,000	Kecamatan Gemolong

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			60 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	60 Orang	1,824,800	Kecamatan Gemolong	
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB- Desa tepat waktu	%	%	100 %	19,987,000						100 %	19,987,000		
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang dibina	%	%	100 %	19,987,000						100 %	19,987,000		
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 Dokumen	12,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Gemolong	
7	01	006	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			1 Laporan	7,862,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1 Laporan	9,987,000	Kecamatan Gemolong	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN													2,134,221,898	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian administrasi keuangan	%	%	100 %	2,054,865,428						100 %	2,018,991,000		
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi administrasi keuangan tercukupi	%	%	100 %	1,813,559,128						100 %	1,712,074,000		
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"			15 Orang/bulan	1,813,559,128	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	15 Orang/bulan	1,712,074,000	Kecamatan Miri	
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasi administrasi umum tercukupi	%	%	100 %	49,959,800						100 %	50,000,000		
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"			10 Paket	5,000,000	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	10 Paket	5,000,000	Kecamatan Miri	
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"			10 Paket	18,820,000	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	10 Paket	18,820,000	Kecamatan Miri	
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"			10 Paket	14,960,000	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	10 Paket	15,000,000	Kecamatan Miri	
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"			100 Paket	4,499,800	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	100 Paket	4,500,000	Kecamatan Miri	
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			300 Dokumen	1,680,000	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	300 Dokumen	1,680,000	Kecamatan Miri	
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	10 Laporan	5,000,000	Kecamatan Miri	
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tersedianya barang penunjang urusan pemerintah	%	%	100 %	76,537,000						100 %	115,000,000		
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10 Unit	29,951,000	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	10 Unit	30,000,000	Kecamatan Miri	
7	01	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"			5 Unit	46,586,000	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	5 Unit	85,000,000	Kecamatan Miri	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5 Unit						5 Unit					
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	%	%	100 %	64,956,500						100 %	65,000,000		
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	7,980,000	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Laporan	7,980,000	Kecamatan Miri	
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"			5 Laporan	2,960,000	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	5 Laporan	3,000,000	Kecamatan Miri	
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"			12 Laporan	54,016,500	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 Laporan	54,020,000	Kecamatan Miri	
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentasi barang milik daerah terpelihara	%	%	100 %	49,853,000						100 %	76,917,000		
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	44,880,000	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	10 Unit	56,917,000	Kecamatan Miri	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	4,973,000	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	10 Unit	5,000,000	Kecamatan Miri
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"				1 Unit	0	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Miri
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Prosentase dokumen hasil musrenbang	%		%	100 %	8,199,550						100 %	8,199,898	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	presentase rapat koordinasi	%		%	100 %	8,199,550						100 %	8,199,898	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	8,199,550	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Laporan	8,199,898	Kecamatan Miri
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	prosentase lembaga desa yang aktif	%		%	100 %	5,310,750						100 %	5,311,000	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	prosentase desa yang aktif	%		%	100 %	5,310,750						100 %	5,311,000	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan"				1 Laporan	5,310,750	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	-	1 Laporan	5,311,000	Kecamatan Miri
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	prosentase penanganan laporan kejadian	%		%	100 %	23,396,000						100 %	23,396,000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	prosentase penanganan kejadian	%		%	100 %	23,396,000						100 %	23,396,000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan"				1 Laporan	23,396,000	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	-	1 Laporan	23,396,000	Kecamatan Miri
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%		%	100 %	120,888,600						100 %	70,889,000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	penyelenggaraan umum terkoordinasi dengan baik	%		%	100 %	120,888,600						100 %	70,889,000	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	"Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional"				100 Orang	60,888,850	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	100 Orang	10,889,000	Kecamatan Miri
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	"Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa"				100 Orang	35,000,000	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	100 Orang	35,000,000	Kecamatan Miri
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	"Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional"				100 Orang	24,999,750	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	100 Orang	25,000,000	Kecamatan Miri
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	%		%	100 %	14,934,600						100 %	7,435,000	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang dibina	%		%	100 %	14,934,600						100 %	7,435,000	
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 Dokumen	10,934,700	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	10 Dokumen	3,435,000	Kecamatan Miri
7	01	006	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	"Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya"				10 Laporan	3,999,900	Kab. Sragen, Miri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	10 Laporan	4,000,000	Kecamatan Miri
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN														
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,369,878,638							2,417,049,000	
7	01	001									2,078,576,438							2,276,430,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
7	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,810,716,188							1,911,880,000		
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			16 orang/bulan	1,810,716,188	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		16 orang/bulan	1,911,880,000	Kecamatan Sumberlawang
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan					0 Orang/bulan						
7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					46,683,000							71,350,000		
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	3,999,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		4 Paket	4,000,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"			4 paket	15,784,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		4 paket	39,450,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 paket	16,300,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		4 paket	17,300,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			4 paket	3,500,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		4 paket	3,500,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4 Dokumen	2,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		4 Dokumen	2,100,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	5,000,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					26,745,000							96,000,000		
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			2 paket	16,745,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		2 paket	46,000,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 unit	10,000,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		2 unit	50,000,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107,168,500							100,000,000		
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			1 laporan	1,100,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 laporan	1,100,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 laporan	25,000,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		12 laporan	25,000,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			4 laporan	4,857,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		4 laporan	8,900,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			4 laporan	76,211,500	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		4 laporan	65,000,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					87,263,750							97,200,000		
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			13 unit	42,020,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		13 unit	36,500,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 unit	45,243,750	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 unit	60,700,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	002		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4,640,000							9,837,000		
7	01	002	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4,640,000							9,837,000		
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait			1 laporan	4,640,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 laporan	9,837,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	003		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5,740,000							5,740,000		
7	01	003	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					5,740,000							5,740,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan"			1 laporan	5,740,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 laporan	5,740,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					25,701,000							26,738,000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					25,701,000							26,738,000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			4 Laporan	25,701,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		4 Laporan	26,738,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					244,077,200							78,317,000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					244,077,200							78,317,000	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			600 Orang	199,999,700	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		600 Orang	0	Kecamatan Sumberlawang
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			100 Orang	44,077,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		100 Orang	78,317,000	Kecamatan Sumberlawang
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					11,144,000							19,987,000	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					11,144,000							19,987,000	
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 Dokumen	0	Kab. Sragen, Sumberlawang, Ngandul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Kecamatan Sumberlawang
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			1 Dokumen	2,500,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Ngandul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		1 Dokumen	0	Kecamatan Sumberlawang
7	01	006	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	"Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya" Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			2 laporan 0 Laporan	8,644,000	Kab. Sragen, Sumberlawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		2 laporan 0 Laporan	19,987,000	Kecamatan Sumberlawang
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN					2,116,708,088							2,462,099,000	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,982,984,738							2,253,000,000	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,706,124,638							1,975,000,000	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	1,706,124,638	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 bulan	1,975,000,000	Kecamatan Mondokan
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					68,704,600							89,000,000	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tercukupinya komponen listrik/penerangan kantor			12 bulan	5,000,000	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 bulan	5,000,000	Kecamatan Mondokan
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tersedianya kebutuhan peralatan kantor			1 Paket 12 bulan	32,805,000	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Paket 12 bulan	45,000,000	Kecamatan Mondokan
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tersedianya bahan logistik kantor			0 Paket 12 bulan	18,900,000	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		0 Paket 12 bulan	25,000,000	Kecamatan Mondokan
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tercukupinya kebutuhan akan barang cetak dan penggandaan			12 bulan	6,999,600	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 bulan	8,000,000	Kecamatan Mondokan
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		2 Laporan	6,000,000	Kecamatan Mondokan
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50,047,000							20,000,000	
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	terpenuhinya kebutuhan mebel untuk pelayanan umum			1 paket	50,047,000	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 paket	20,000,000	Kecamatan Mondokan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101,106,000						104,000,000		
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tercukupinya kebutuhan akan listrik dan air			12 bulan	26,400,000	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 bulan	30,000,000	Kecamatan Mondokan
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor			12 bulan	5,400,000	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 bulan	9,000,000	Kecamatan Mondokan
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor (kebersihan dan keamanan)			12 bulan	69,306,000	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 bulan	65,000,000	Kecamatan Mondokan
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpelihara dan terbayar pajaknya	unit		9 unit	57,002,500						9 unit	65,000,000	
7	01	001	2.09	001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah unit kendaraan yang terbayar pajaknya			9 unit	44,380,000	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		9 unit	35,000,000	Kecamatan Mondokan
					Jumlah unit kendaraan yang terpelihara		9 unit	9 unit										
7	01	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara			1 unit	12,622,500	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 unit	30,000,000	Kecamatan Mondokan
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					9,985,500							11,000,000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					9,985,500							11,000,000	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 Laporan	9,985,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 Laporan	11,000,000	Kecamatan Mondokan
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					10,000,000							8,298,000	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					10,000,000							8,298,000	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 bulan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 bulan	8,298,000	Kecamatan Mondokan
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					21,991,000							27,801,000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					21,991,000							27,801,000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan tercapainya lingkungan yang aman			12 bulan	21,991,000	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		12 bulan	27,801,000	Kecamatan Mondokan
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					79,646,900							140,000,000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					79,646,900							140,000,000	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			200 Orang	49,999,900	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi		200 Orang	100,000,000	Kecamatan Mondokan
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi				
														Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat				
														Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat				
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI			1 kegiatan	29,647,000	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat		1 kegiatan	40,000,000	Kecamatan Mondokan
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					12,099,950							22,000,000	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					12,099,950							22,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu				12 bulan	6,149,950	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	12 bulan	12,000,000	Kecamatan Mondokan	
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Prosentase desa yang mengadakan pemilihan kepala desa				1 desa	5,950,000	Kab. Sragen, Mondokan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar masyarakat	1 desa	10,000,000	Kecamatan Mondokan	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN														
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%		%	100 %	1,851,177,026					100 %	2,021,315,000		
7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun	dokumen		dokumen	2 dokumen	4,985,000					2 dokumen	5,000,000		
7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan				1 laporan	4,985,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	1 laporan	5,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan tercukupi	%		%	100 %	1,577,892,753					100 %	1,796,944,000		
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				15 orang	1,577,892,753		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	15 orang	1,796,944,000	Kecamatan Sukodono
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum Perangkat Daerah tercukupi	%		%	100 %	113,537,000					100 %	79,871,000		
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				4 paket	2,836,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	4 paket	2,500,000	Kecamatan Sukodono
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan				12 paket	70,887,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	12 paket	36,571,000	Kecamatan Sukodono
					Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor				6 Unit					6 Unit					
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				12 paket	19,626,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	12 paket	13,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				12 paket	7,888,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	12 paket	11,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				12 dokumen	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	12 dokumen	1,800,000	Kecamatan Sukodono
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	12 Laporan	5,000,000	Kecamatan Sukodono
														Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi					
7	01	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD				12 dokumen	5,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	12 dokumen	10,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	%		%	100 %	85,499,773					100 %	82,000,000		
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				12 laporan	4,556,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	12 laporan	4,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 laporan	22,957,273		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	12 laporan	25,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				2 laporan	9,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	2 laporan	8,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 laporan	48,646,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	12 laporan	45,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	%		%	100 %	69,262,500					100 %	57,500,000		
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya				9 Unit	43,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	9 Unit	35,200,000	Kecamatan Sukodono
					Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara				9 Unit					9 Unit					
7	01	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit untuk pemeliharaan mebelair				10 Unit	2,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	10 Unit	2,300,000	Kecamatan Sukodono
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ang dipelihara/ direhabilitasi				1 Unit	23,082,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	ASN Kecamatan	1 Unit	20,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	%		%	100 %	12,026,000					100 %	13,833,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
7	01	002	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Musrenbang	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	6,720,000				1 kegiatan	8,833,000			
7	01	002	2.01	001Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	6,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Instansi tingkat Kecamatan dan Pemerintah Desa	1 laporan	8,833,000	Kecamatan Sukodono
7	01	002	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase permohonan pelayanan yang terlayani sesuai standar	%		%	100 %	5,306,000					100 %	5,000,000		
7	01	002	2.02	003Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 laporan	5,306,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	2 laporan	5,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	003		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Lembaga Desa yang aktif	%		%	100 %	5,734,000					100 %	2,501,000		
7	01	003	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah PKK Desa yang aktif	Desa		Desa	9 Desa	5,734,000					9 Desa	2,501,000		
7	01	003	2.01	003Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 laporan	5,734,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	PKK Desa	4 laporan	2,501,000	Kecamatan Sukodono
7	01	004		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penanganan laporan kejadian	%		%	100 %	25,739,000					100 %	27,801,000		
7	01	004	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	25,739,000					100 %	27,801,000		
7	01	004	2.01	001Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 laporan	21,521,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Tokoh Masyarakat Sukodono	4 laporan	22,801,000	Kecamatan Sukodono
7	01	004	2.01	002Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat				2 laporan	4,218,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Tokoh Masyarakat Sukodono	2 laporan	5,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	005		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	%		%	100 %	325,606,000					100 %	59,000,000		
7	01	005	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase cakupan pembinaan pemerintahan umum	%		%	100 %	325,606,000					100 %	59,000,000		
7	01	005	2.01	002Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				1000 Orang	275,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Generasi Muda dan Tokoh Masyarakat	1000 Orang	0 Kecamatan Sukodono	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi				
7	01	005	2.01	003Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 orang	38,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Generasi Muda dan Tokoh Masyarakat	100 orang	41,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	005	2.01	004Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikutl Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				15 orang	11,806,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Generasi Muda dan Tokoh Masyarakat	15 orang	18,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	006		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	%		%	100 %	17,146,000					100 %	12,112,000		
7	01	006	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan	%		%	100 %	17,146,000					100 %	12,112,000		
7	01	006	2.01	002Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 dokumen	8,357,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Pemerintah Desa	9 dokumen	6,000,000	Kecamatan Sukodono
7	01	006	2.01	017Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 laporan	8,789,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Pemerintah Desa	9 laporan	6,112,000	Kecamatan Sukodono
7				UNSUR KEWILAYAHAN														

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
7	01			KECAMATAN						2,470,432,502							2,199,093,000		
7	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah	%		%		100 %	2,162,929,002					100 %	2,014,120,000		
7	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi kantor tercukupi	%		%		100 %	1,901,350,378					100 %	1,715,000,000		
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 orang/bulan	1,901,350,378	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	17 orang/bulan	1,715,000,000	Kecamatan Gesi
7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor tercukupi	%		%		100 %	49,997,000						100 %	59,620,000	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	3,832,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	1 paket	4,500,000	Kecamatan Gesi
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	13,261,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	1 paket	15,620,000	Kecamatan Gesi
					Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor					1 unit							1 unit		
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	16,308,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	1 paket	20,000,000	Kecamatan Gesi
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	9,196,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	1 paket	11,000,000	Kecamatan Gesi
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	2,400,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	1 dokumen	2,500,000	Kecamatan Gesi
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Gesi
															Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi				
7	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%		100 %	49,883,000						100 %	52,000,000	
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan				25 unit	49,883,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	25 unit	52,000,000	Kecamatan Gesi
7	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%		100 %	105,799,000						100 %	126,500,000	
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	30,000,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	1 Laporan	30,500,000	Kecamatan Gesi
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,802,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	1 Laporan	11,000,000	Kecamatan Gesi
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	69,997,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	1 Laporan	85,000,000	Kecamatan Gesi
7	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%		100 %	55,899,624						100 %	61,000,000	
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 unit	44,880,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	9 unit	42,000,000	Kecamatan Gesi
7	01	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				17 unit	1,360,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	17 unit	2,500,000	Kecamatan Gesi
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	9,659,624	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	1 unit	16,500,000	Kecamatan Gesi
7	01	002		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan	%		%		100 %	20,075,000						100 %	42,939,000	
7	01	002	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi	laporan		laporan		1 laporan	9,581,000						1 laporan	19,439,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	9,581,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Kecamatan Gesi	1 Laporan	19,439,000	Kecamatan Gesi			
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	laporan		laporan	1 laporan	10,494,000						1 laporan	23,500,000				
7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	10,494,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Gesi	1 Laporan	23,500,000	Kecamatan Gesi			
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif	%		%	100 %	9,000,000						100 %	12,422,000				
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah PKK Desa	Desa		Desa	7 Desa	9,000,000						7 Desa	12,422,000				
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 laporan	9,000,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Tim Penggerak PKK se Kecamatan Gesi	1 laporan	12,422,000	Kecamatan Gesi			
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	%		%	100 %	22,237,000						100 %	27,801,000				
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	22,237,000						100 %	27,801,000				
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 laporan	22,237,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Masyarakat Kecamatan Gesi	1 laporan	27,801,000	Kecamatan Gesi			
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	%		%	100 %	246,431,500						100 %	82,699,000				
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum	%		%	100 %	246,431,500						100 %	82,699,000				
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				740 orang	215,000,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Wilayah se Kecamatan Gesi	740 orang	41,000,000	Kecamatan Gesi			
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				70 orang	28,048,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Wilayah se Kecamatan Gesi	70 orang	34,699,000	Kecamatan Gesi			
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				16 orang	3,383,500	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	Wilayah se Kecamatan Gesi	16 orang	7,000,000	Kecamatan Gesi			
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	%		%	100 %	9,760,000						100 %	19,112,000				
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan	%		%	100 %	9,760,000						100 %	19,112,000				
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 dokumen	5,036,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	7 dokumen	10,000,000	Kecamatan Gesi			
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				7 dokumen	4,724,000	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	7 dokumen	9,112,000	Kecamatan Gesi			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN													2,191,420,488			2,391,911,746	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%		%	100 %	2,068,746,388						100 %	2,252,060,746				
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan tercukupi	%		%	100 %	1,759,620,274						100 %	1,894,634,850				
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,759,620,274	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	-	15 Orang/bulan	1,894,634,850	Kecamatan Tangen			
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Tercukupi	%		%	100 %	85,816,600						100 %	127,775,600				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	4,659,000	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 paket	4,667,000	Kecamatan Tangen
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	42,924,000	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 paket	85,000,000	Kecamatan Tangen
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	23,375,000	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 paket	23,430,000	Kecamatan Tangen
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan barang yang disediakan				1 paket	8,118,600	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 paket	8,118,600	Kecamatan Tangen
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 dokumen	1,560,000	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 dokumen	1,560,000	Kecamatan Tangen
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	5,180,000	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	14 Laporan	5,000,000	Kecamatan Tangen
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan administrasi perkantoran	%		%	100 %	96,828,000						100 %	92,346,296	
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	2,200,000	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	-	12 laporan	2,200,000	Kecamatan Tangen
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	31,000,000	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	-	12 laporan	31,000,000	Kecamatan Tangen
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 laporan	11,676,000	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	-	12 laporan	12,000,000	Kecamatan Tangen
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						51,952,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	-		47,146,296	Kecamatan Tangen
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Perkantoran	%		%	100 %	126,481,514						100 %	137,304,000	
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 unit	44,380,000	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	8 unit	38,236,000	Kecamatan Tangen
7	01	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 unit	7,040,000	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 unit	7,068,000	Kecamatan Tangen
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	75,061,514	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 unit	92,000,000	Kecamatan Tangen
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	pelayanan yang sesuai standard	%		%	100 %	7,514,350						100 %	16,500,000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi	%		%	100 %	7,514,350						100 %	16,500,000	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						5,436,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0		6,500,000	Kecamatan Tangen
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 laporan	2,077,850	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 laporan	10,000,000	Kecamatan Tangen
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	presentase lembaga desa yang aktif	%		%	100 %	2,004,750						100 %	7,000,000	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase desa yang aktif	%		%	100 %	2,004,750						100 %	7,000,000	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				1 laporan	2,004,750	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 laporan	7,000,000	Kecamatan Tangen

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
				Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas			Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Berbasis Teknologi		0 Pokmas / Ormas		Kecamatan Tangen	
7	01	004		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	presentase laporan kejadiann	%		%	100 %	21,204,000					100 %	21,204,000		
7	01	004	7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	prosentase penanganan kejadian	%		%	100 %	21,204,000					100 %	21,204,000		
7	01	004	7.03	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 laporan	21,204,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	-	12 laporan	21,204,000	Kecamatan Tangen
7	01	005		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%		%	100 %	91,951,000					100 %	95,147,000		
7	01	005	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	penyelenggaraan umum terkoordinasi dengan baik	%		%	100 %	91,951,000					100 %	95,147,000		
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			100 Orang	70,000,000	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	100 Orang	70,000,000	Kecamatan Tangen
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			100 orang	21,951,000	Kab. Sragen, Tangen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	100 orang	25,147,000	Kecamatan Tangen
7	01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN														
7	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	1,793,693,657					100 %	2,061,917,000		
7	01	001		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	14 bulan	1,537,767,407					14 bulan	1,804,804,150		
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	1,537,767,407	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 bulan	1,804,804,150	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	47,053,250					1 Paket	47,054,850		
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			12 bulan	2,499,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 bulan	2,499,000	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor			12 bulan	12,159,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 bulan	12,159,000	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makan minum rapat/pertemuan			12 bulan	18,396,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 bulan	18,397,500	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 bulan	7,379,250	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 bulan	7,379,350	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan			12 bulan	1,620,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 bulan	1,620,000	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Paket	5,000,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Paket	5,000,000	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket	49,469,000					1 Paket	50,000,000		
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel			1 paket	30,000,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 paket	30,000,000	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya			1 unit	8,996,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 unit	9,000,000	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya			2 unit	10,473,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	2 unit	11,000,000	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	82,061,000					1 Laporan	82,714,000		
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat			12 bulan	3,300,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 bulan	3,300,000	Kecamatan Jenar	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			12 bulan	28,800,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 bulan	28,800,000	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			12 bulan	6,306,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 bulan	6,959,000	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa umum pelayanan kantor			12 bulan	43,655,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	12 bulan	43,655,000	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Barang milik Daerah yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket		Paket	1 Paket	77,343,000					1 Paket	77,344,000		
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya			11 unit	57,844,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	11 unit	57,844,000	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket pemeliharaan mebel			1 paket	4,500,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 paket	4,500,000	Kecamatan Jenar	
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya			2 unit	14,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	2 unit	15,000,000	Kecamatan Jenar	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan	%		%	100 %	19,119,900						100 %	19,120,000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		Laporan	1 Laporan	5,499,900						1 Laporan	5,500,000	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 laporan	5,499,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 laporan	5,500,000	Kecamatan Jenar	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Lembaga PUG (PKK) Kecamatan dan Desa Aktif	Laporan		Laporan	1 Laporan	13,620,000					1 Laporan	13,620,000		
					Jumlah Lembaga PUG (PKK) Kecamatan dan Desa Aktif	desa		desa	7 desa						7 desa				
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						13,620,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0		13,620,000	Kecamatan Jenar
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif	%		%	100 %	7,000,000						100 %	7,000,000	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	7,000,000						1 Laporan	7,000,000	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 laporan	7,000,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 laporan	7,000,000	Kecamatan Jenar	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	%		%	100 %	23,396,000						100 %	23,396,000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	laporan		laporan	1 laporan	23,396,000						1 laporan	23,396,000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 laporan	23,396,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 laporan	23,396,000	Kecamatan Jenar	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	%		%	100 %	114,075,700						100 %	70,889,000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang		Orang	70 Orang	114,075,700						70 Orang	70,889,000	
					Jumlah Paket orang yang Mengikuti Kegiatan	Paket		Paket	1 Paket						1 Paket				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			50 orang	70,000,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	50 orang	20,000,000	Kecamatan Jenar	
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			100 orang	30,889,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	100 orang	30,889,000	Kecamatan Jenar	
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			50 orang	13,186,700	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	50 orang	20,000,000	Kecamatan Jenar	
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	%	%	100 %	9,935,000						100 %	7,435,000		
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	dokumen	7 dokumen	9,935,000						7 dokumen	7,435,000		
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 dokumen	9,935,000	Kab. Sragen, Jenar, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 dokumen	7,435,000	Kecamatan Jenar	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
8	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	%	100 %	4,761,463,855							100 %	4,784,600,000	
8	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	Bulan	12 Bulan	3,622,601,230							12 Bulan	4,064,532,000	
8	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			28 Orang	3,622,601,230		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	28 Orang	4,064,532,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik	
8	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Bulan	Bulan	12 Bulan	620,124,625							12 Bulan	268,594,000	
8	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	7,175,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Paket	7,894,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik	
8	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	46,725,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Paket	66,545,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik	
8	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	3,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Paket	4,015,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik	
8	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	39,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Paket	62,030,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik	
8	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	16,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Paket	37,360,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik	
8	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25 Laporan	506,534,625		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	25 Laporan	72,600,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik	
8	01	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			111 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	111 Dokumen	18,150,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik	
8	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	8 Unit	79,092,000							8 Unit	0	
8	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			33 Unit	79,092,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	33 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa Politik	
8	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	Dokumen	21 Dokumen	172,073,000							21 Dokumen	268,445,000	
8	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	60,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	36 Laporan	66,066,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik	
8	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6 Laporan	112,013,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	6 Laporan	202,379,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik	
8	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	Dokumen	40 Dokumen	267,573,000							40 Dokumen	183,029,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
8	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	164,102,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	21 Unit	183,029,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	18,196,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	23 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	85,275,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	0 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	01	002			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%		%	65 %	788,127,825						65 %	550,000,000	
	8	01	002	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Kesadaran Bela Negara dan Pembauran Bangsa	%		%	1.5 %	788,127,825						1.5 %	550,000,000	
8	01	002	2.01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200 Orang	183,358,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	200 Orang	220,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	01	002	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				22 Kali	604,769,825		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	22 Kali	330,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	01	003			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Pendidikan Politik	%		%	75 %	1,949,311,600						75 %	284,800,000	
8	01	003	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Pendidikan Politik	%		%	22 %	1,949,311,600						22 %	284,800,000	
8	01	003	2.01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1000 Orang	248,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1000 Orang	265,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	01	003	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Hibah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilhan Bupati/Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 Kepada Bawaslu Kab. Sragen Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 Kepada KPU Kab. Sragen Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Lembaga 1 Lembaga 8 Orang	1,692,871,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	1 Lembaga 1 Lembaga 8 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	003	2.01	005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				8 Laporan	7,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	8 Laporan	19,800,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	01	004			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Paham Terhadap UU Ormas	%		%	17.6 %	545,999,550						17.6 %	1,051,700,000	
8	01	004	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Pemberdayaan Ormas	%		%	19.6 %	545,999,550						19.6 %	1,051,700,000	
8	01	004	2.01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	34,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	100 Orang	38,500,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	01	004	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah kepada ormas				3 Ormas	499,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	3 Ormas	1,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Ormas			0 Orang										
8	01	004	2.01	005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				20 Laporan	11,999,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	20 Laporan	13,200,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	01	005			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Bangsa	%		%	73 %	132,345,250						73 %	80,300,000	
8	01	005	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan	%		%	19.9 %	132,345,250						19.9 %	80,300,000	
8	01	005	2.01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				170 Orang	51,234,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	170 Orang	80,300,000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	01	005	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	81,111,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	100 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa Politik
8	01	006			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah laporan konflik sosial yang terjadi	Kejadian		Kejadian	7 Kejadian	1,751,019,500						7 Kejadian	0	
8	01	006	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Masyarakat yang paham Cegah Deteksi Dini Penanganan Konflik Sosial	%		%	18.8 %	1,751,019,500						18.8 %	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
															Nasional	Daerah					
8	01	006	2.01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				416 Orang	284,441,500		Danu Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	416 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa Politli		
8	01	006	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik daerah				314 Orang	1,391,575,000		Danu Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	314 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa Politli		
8	01	006	2.01	005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				15 Laporan	74,999,000		Danu Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi	0	15 Laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa Politli		
TOTAL											2,513,521,946,819								1,436,034,971,079		


 BUPATI SRAGEN,
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI